



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1945-2014



(Sumber: Back Tohir/Setneg)

Diterbitkan oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4-5, Senayan
Jakarta 10270

Dilarang mereproduksi seluruh maupun sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, elektronik maupun media cetak, termasuk dalam sistem penyimpanan dan kearsipan, tanpa izin tertulis dari penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Indonesia, 2014

ISBN 978-602-282-733-7

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada narasumber gambar/foto dan ilustrasi buku ini, di antaranya Arsip Nasional (ANRI), Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, KITLV Jakarta, Divisi Mandiri Foto Perum LKBN ANTARA, Reuters, AFP, Pusat Informasi Kompas, Tempo, Republika, Deppen, IPPHOS, Museum Satria Mandala, Arsip Foto BAB Publishing Indonesia, Dokumentasi Keluarga Presiden (Sukarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono), dan almarhum Armaya Tohir.

**Pelindung**

Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Dewan Pengarah

Dr. N. Hasan Wirajuda
Dewan Pertimbangan Presiden

Prof. Dr. Juwono Sudarsono
Menteri Pertahanan Republik Indonesia
(2003-2004)

Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Kebudayaan

Prof. Kacung Marijan, Ph.D.
Direktur Jenderal Kebudayaan

Drs. Nono Adya Supriyanto, M.M., M.T
Sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan

Narasumber

Taufik Abdullah
Saleh As'ad Djamhari
Andi Makmur Makka
Mohammad Sobary

Penulis

Julius Pour
Linda Sunarti
Tini Ismayani
Raden Muh. Mulyadi
Teuku Reza Fadel
Muhidin Dahlan
Zaenal A Budiyono
Akbar Linggaprana

Koordinator Penyuntingan

Drs. Endjat Djaenuderadjat
Direktur Sejarah dan Nilai Budaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Penyunting Umum

Restu Gunawan
Taufik Rahzen
Kasijanto

Pembaca Umum

Karsono H Saputra

Koordinator Produksi

Amurwani Dwi Lestariningsih

Penata Artistik

Rafli Lindaryadi Sato

Penyelia Gambar

Armaya Tohir
Maha Eka Swasta
Kuswara

Periset Gambar

Eddie Djunaedi
Mawanto
Melyadi Amir

Pengelola Tata Letak

Rully Jatmiko
Iregha Kadireja

Produksi dan Sekretariat

Agus Widiatmoko
Isak Purba
Siti Sari Hernawati
Hermasari Ayu Kusuma
Tirmizi

Periset Data

Haryanto
Dwi Artiningsih
Maemunah
Bariyo
Dian Andika Winda
Rika Irdyanti



DAFTAR ISI

KRONIK NEGARA DAN PRESIDEN 1901 - 2014

8

KATA PENGANTAR

22

SUKARNO

Penyambung Lidah Rakyat Yang Revolusioner

28

SOEHARTO

Bapak Pembangunan yang Ideologis

78

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Membuka Gerbang Demokrasi

122

ABDURRAHMAN WAHID

Bapak Pluralisme Yang Menjaga Keberagaman

160

MEGAWATI SUKARNOPUTRI

Meneguhkan Konstitusi

192

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Mengelola Perubahan dalam Era Globalisasi

228

APENDIKS

Panduan Kepustakaan

Indeks

272

KRONIK NEGARA DAN PRESIDEN 1901 - 2014

1901, 6 Juni: Sukarno lahir di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Sukarno menjadi Presiden RI ke-1.

1902, 12 Agustus: Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, dari pasangan Muhammad Djamil-Saleha. Ia menjadi Wakil Presiden RI ke-1 masa bakti 1945-1956. Hatta wafat pada 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Hatta dimakamkan sesuai permintaannya, "Di tengah rakyat yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya".

1912: Pergerakan nasionalisme semakin marak dengan lahirnya beberapa organisasi baru, seperti Indische Partij, Persjarian Moehammadijah, dan Sarekat Islam.

1912, 12 April: Sri Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) lahir di Yogyakarta. Dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta dengan nama Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati Ingalaga Ngabdurakhman Sayidin Panotogama Kalifatullah IX. Sultan HB IX diangkat sebagai Wakil Presiden RI ke-2 masa bakti 1973-1978.

1916, 16 Desember: Pemerintah Hindia Belanda memprakarsai berdirinya Volksraad (Dewan Rakyat) yang terdiri dari pejabat kolonial dan pribumi. Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, Tjiptomangoenkoesoemo, Dwijosewojo adalah nama-nama tokoh pribumi di Volksraad.

1917, 22 Juli: Adam Malik lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, dari pasangan Haji Abdoel Malik Batubara dan Salamah Malik. Adam Malik diangkat sebagai Wakil Presiden RI ke-3 masa bakti 1978-1983. Adam Malik wafat di Bandung pada 5 September 1984.

1921, 8 Juni: Soeharto lahir di desa Kemusuk, Godean, Yogyakarta. 1921. Soeharto menjadi Presiden RI ke-2.

1924, 10 Oktober: Umar Wirahadikusumah lahir di Sumedang, Jawa Barat. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga ningrat, Raden Rangga Wirahadikusumah dan Ratnaningrum. Umar diangkat sebagai Wakil Presiden RI ke-4 masa bakti 1983-1988.

1925: Sukarno menyelesaikan studi arsitekturnya di Technische Hogeschool/Sekolah Teknik Tinggi (THS) Bandung.

1927, 12 Maret: Sudharmono lahir di Desa Cerme, Gresik, Jawa Timur. Ia anak ketiga dari pasangan R. Wirodiredjo dan Soekarsi. Menjadi Wakil Presiden RI ke-5 masa bakti 1988-1993. Pada 25 Januari 2006 Sudharmono wafat di Jakarta.

1927, 4 Juli: Sukarno bersama Tjiptomangunkusumo, M Iskaq, Budiarto, Sunario, dan Sartono, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) di Bandung.

1927, 23 September: Ketua Perhimpunan Indonesia Mohammad Hatta ditangkap di Den Haag karena tulisan-tulisannya di jurnal *Indonesia Merdeka*. Yang turut ditangkap adalah Nazir Pamoentjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoaningrat.

1928, 9 Maret: Mohammad Hatta menyerahkan pembelaan tertulis yang berjudul *Indonesia Merdeka (Indonesie Vrij)*.

1928, 28 Oktober: Kongres Pemuda Indonesia II dilangsungkan di Gedung Oost Java Bioscoop, di Koningsplein Noord, Batavia. Organisasi yang hadir adalah: Jong Java, JIB, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Soematanen Bond (JSB), Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan PPPI. Kongres ini menghasilkan Poatoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia atau yang kemudian dikenal dengan "Sumpah Pemuda". Lagu "Indonesia Raya" diperkenalkan pertama kali oleh W.R. Soepratman dalam pertemuan pemuda-pemuda ini.

1930, September-Desember: Sukarno membacakan pleidoi *Indonesia Menggugat (Indonesië Klaagt Aan)* di Landraad Bandung setelah sebelumnya ditahan di penjara Banceuy selama satu tahun.

1935, 15 November: Try Sutrisno lahir di Surabaya, Jawa Timur. Ia Wakil Presiden Indonesia ke-6 masa bakti 1993-1998.

1936, 25 Juni: Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-pare, Sulawesi Selatan dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ia Wakil Presiden Indonesia ke-7 masa bakti Maret-Mei 1998. Dilantik sebagai Presiden RI ke-3 pada 21 Mei 1998.

1939, 21 Mei: Gabungan Politik Indonesia (GAPI) berdiri, terdiri partai dari golongan nasionalis moderat dan golongan nasionalis radikal. Asasnya persatuan nasional, demokrasi politik, ekonomi, sosial, dan persatuan aksi menuju "Indonesia Berparlemen".

1940, 15 Februari: Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat. Wakil Presiden RI ke-9 untuk masa bakti 2001-2004.

1940, 4 Agustus: Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur putera pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Solichah. Mereka keturunan dua keluarga karismatis dan sangat dihormati di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4 masa bakti 1999-2001.

1942, 15 Mei: Muhammad Jusuf Kalla (JK) lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan. JK menjadi Wakil Presiden RI ke-10 masa bakti 2004-2009.

1943, 25 Februari: Boediono lahir di Blitar, Jawa Timur, dan menjadi Wakil Presiden RI ke-11 masa bakti 2009-2014.

1943: Organisasi Pusat Tenaga Rakyat (Putera) didirikan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mansur diangkat sebagai pimpinannya, yang terkenal dengan sebutan Empat Serangkai.

1945, 1 Juni: Sukarno menyampaikan pikiran tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang diberi nama Pancasila, di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

1945, 17 Agustus: Sukarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan pada pukul 10.00 waktu Jawa di Jalan Pegangsaan Timur. Teks itu ditandatangani Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah upacara pembacaan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Fatmawati Sukarno.

1945, 18 Agustus: Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Negara, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Sukarno diangkat sebagai Presiden RI dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Membentuk Komite Nasional Indonesia.

1945, 17 September: Sukarno dan Hatta menghadiri rapat raksasa di Lapangan Ikada, Jakarta. Rapat itu sebagai dukungan Rakyat atas kemerdekaan.

1945, 3 November: Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 yang menjadi sandaran berdirinya parta-partai politik.

1946, 4 Januari: Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta pindah ke Yogyakarta.

1946, 21 Januari: Ukraina negara yang pertama di PBB mendukung kemerdekaan Indonesia.

1946, 15 November: Perjanjian antara Indonesia dan Belanda diparaf di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Isi persetujuan ini antara lain pihak Belanda mengakui kekuasaan defacto RI di Jawa, Madura, dan Sumatera.

1947, 23 Januari: Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta. Megawati adalah Wakil Presiden RI ke-8 (1999-2001) dan Presiden RI ke-5 masa bakti 2001-2004.

1947, 5 Mei: Tentara Republik Indonesia (TRI) dan Badan-Badan Perjuangan (Laskar) dilebur menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

1947, 4 Juli: Sutan Sjahrir berhenti sebagai Perdana Menteri dan digantikan Amir Sjarifuddin.

1947, 26 Desember: Soeharto menikah dengan Siti Hartinah yang merupakan kerabat dari keraton Mangkunegaran di Surakarta.

1948, 17 Januari: Penandatanganan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dilangsungkan di geladak kapal Renville. Persetujuan ini menyangkut masalah politik dan militer. Masalah politik antara lain kesepakatan untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat (NIS) yang didahului oleh pembentukan Pemerintah Federal Sementara. Di bidang militer berisi kesepakatan gencatan senjata, batas wilayah RI dan pendudukan Belanda. Kekuatan militer RI harus ditarik dari wilayah pendudukan Belanda. Karena persetujuan Renville terlalu besar memberikan konsesi kepada Belanda, akhirnya KNIP mengajukan mosi tidak percaya. Kabinet Amir Syarifudin bubar dan digantikan oleh Kabinet Hatta.

1948, 19 Desember: Presiden dan Wakil Presiden memberi mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap RI. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka dan selanjutnya ke Prapat.

1949, 1 Maret: Tentara Nasional Indonesia (TNI) Brigade 10 melakukan serangan umum ke pusat kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda. Serangan dikenal dengan "SO 1 Maret", dipimpin oleh Letkol. Soeharto, berhasil memaksa Belanda kembali ke meja perundingan.

1949, 9 September: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir di Desa Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur putera pasangan Soekotjo dan Siti Habibah. SBY terpilih sebagai Presiden RI masa bakti 2004-2014 dalam dua kali Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung.

1949, 29 Oktober: Mohammad Hatta menyampaikan pidato di Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk penyelesaian sengketa Indonesia dan Belanda. Kata Hatta, negara Indonesia bukan saja negara hukum, tapi sebuah negara kultural.

1949, 27 Desember: Di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. J. H. Van Maarseveen, dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama mengukuhkan tandatangannya pada Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat yang tidak bisa diubah lagi. Di Jakarta dilakukan upacara penyerahan kekuasaan dari Wakil Tinggi Mahkota A. H.J. Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

1950, 17 Agustus: Presiden Sukarno mendeklarasikan pembubaran negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan

kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai tujuan perjuangan bangsa Indonesia.

1950, 6 September: Mohammad Natsir dari Partai Masyumi ditunjuk sebagai Perdana Menteri.

1950, 27 September: Indonesia diterima sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan pendukung utama India dan Australia. Dua hari berikutnya sang saka merah putih untuk pertama kalinya berkibar di Gedung PBB.

1951, 26 April: Ketua Umum Partai Masyumi Sukiman ditunjuk sebagai Perdana Menteri menggantikan M. Natsir yang mengundurkan diri pada 21 Maret 1951.

1952, 2 April: Wilopo menggantikan Sukiman sebagai Perdana Menteri.

1952, 30 Agustus: Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan keluar dari Masyumi dan menjadi partai baru, Partai NU, dengan Wahid Hasjim sebagai ketuanya.

1952, 17 Oktober: Terjadi peristiwa demonstrasi menuntut Presiden Sukarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Peristiwa ini merupakan puncak konflik militer dan DPRS. Sejumlah pimpinan TNI AD yang terlibat, yakni Jenderal Mayor T. B. Simatupang, Kolonel A.H. Nasution, dan Kolonel Gatot Subroto, dinonaktifkan.

1953, 31 Juli: Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai Perdana Menteri menggantikan Wilopo yang kabinetnya bubar pada 2 Juni.

1955, 18-25 April 1955: Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan di Bandung. Pemrakarsa KAA ini adalah Indonesia, Burma, Ceylon, India, dan Pakistan. Konferensi yang dihadiri delegasi dari 29 negara di Asia dan Afrika ini menghasilkan Dasa Sila Bandung.

1955, 24 Juli: Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Burhanuddin Harahap ditunjuk sebagai perdana menteri.

1955, 29 September: Pemilihan Umum (Pemilu) pertama diselenggarakan setelah Indonesia merdeka. Pemilu yang diikuti oleh 100 peserta Pemilu yang terdiri dari partai politik, organisasi massa, dan perseorangan bertujuan memilih anggota DPR. Partai Nasional Indonesia (PNI) keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 22,3% (57 kursi) disusul tiga partai lainnya: Masyumi 20,9% (57 kursi), Nahdlatul Ulama 18,4% (45 kursi), dan Partai Komunis Indonesia 16,4% (39 kursi).

1955, 15 Desember: Pemilihan untuk anggota Konstituante (Badan Penyusun Undang-Undang Dasar baru).

1956, 26 Maret: Presiden Sukarno membuka sidang pertama Konstituante setelah sepekan sebelumnya Ali Sastroamidjojo ditunjuk kembali oleh Presiden Sukarno sebagai Perdana Menteri untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Burhanuddin Harahap pada 3 Maret. Sukarno berpesan, "*Buatlah Undang-Undang Dasar yang tjetjok dengan Djiwa proklamasi, buatlah Undang-Undang Dasar yang tjetjok dengan Djiwa Revolusi*".

1956, 3 Mei: Pemerintah RI membatalkan semua keputusan hasil Konferensi Meja Bundar 1949, yang meliputi hubungan Uni Indonesia-Belanda, hubungan ekonomi dan perdagangan karena Belanda menolak menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia.

1956, 1 Desember: Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI.

1957, 1 Januari: Untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Timur Tengah, setelah konflik Terusan Suez yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Mesir di bawah Gamal Abdul Naser.

1957, 21 Februari: Untuk mengatasi situasi pergolakan di dalam negeri, Presiden menyampaikan gagasan penyelesaian yang terkenal dengan Konsep Presiden. Sistem demokrasi barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

- Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
- Pembentukan Golongan Fungsional.

1957, 14 Maret: Kabinet Ali Sastroamidjojo bubar. Presiden Sukarno mengumumkan Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB). Institusi UUKB adalah Penguasa Perang Pusat (Peperpu) kemudian Penguasa Perang Tertinggi (Peperpti).

1957, 30 November: Tatkala Presiden Sukarno menghadiri Iustrum Perguruan Tjikini terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden. Sejumlah anak menjadi korban ledakan granat yang ditujukan kepada Presiden.

1957, 13 Desember: Perdana Menteri Djuanda mengumumkan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah perairan nasional atas dasar Archipelagic Principle atau Wawasan Nusantara. Penetapan ini dikenal sebagai "Deklarasi Djuanda".

1958, 20 Januari: Ditandatangani perjanjian perdamaian RI-Jepang untuk mengakhiri sengketa Perang Dunia II. RI menerima pampasan perang sejumlah US\$ 225.080 dalam bentuk barang dan jasa.

1958, 15 Februari: Achmad Husein di Padang memproklamasikan pemerintahan tandingan dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.

1959, 5 Juli: Presiden Sukarno mengeluarkan dekret yang menetapkan pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

1959, 17 Agustus: Dalam pidato kenegaraan, Presiden Sukarno yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" (*Rediscovery of Our Revolution*) berisi tentang garis-garis besar pelaksanaan "Demokrasi Terpimpin", yang kemudian menjadi GBHN, disebut sebagai Manifesto Politik (Manipol).

1959, 31 Desember: Presiden Sukarno membentuk Front Nasional untuk menghimpun seluruh kekuatan nasional yang bertujuan menyelesaikan revolusi Indonesia, melaksanakan pembangunan nasional, dan mengembalikan Irian Barat ke wilayah RI.

1960, 17 Agustus: Pada hari Ulang Tahun Proklamasi ke-15, Presiden Sukarno mengumumkan keputusan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Nederland sebagai protes pengiriman kapal induk Karel Doorman ke perairan Irian Barat.

1960, 1 September: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dag Hammarskjold meminta Indonesia mengirimkan pasukan dalam rangka meleraikan perang saudara di Congo (Zaire). Indonesia mengirimkan kontingen Garuda II yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Solichin Gautama yang tergabung dalam United Nations Operation for Congo.

1960, 30 September: Presiden Sukarno menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB berjudul *To Build the World Anew*. Sukarno membagi dunia dalam dua kubu: Nefo (*New Emerging Forces*) dan Oldefo (*Old Established Forces*). Presiden Sukarno menguraikan Pancasila dan *retooling* PBB.

1960, 10 November: Sidang Umum MPRS yang pertama diadakan di Bandung. Sidang menghasilkan dua Ketetapan MPRS (TAP MPRS):

- TAP No. I/MPRS/1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

- TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969.

Presiden Sukarno diangkat sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan predikat mandataris MPRS.

1961, 1 Januari: Presiden Sukarno mencanangkan dimulainya pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

1961, 3 Januari: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi-Hasil (UUPBH) diberlakukan untuk mengatasi krisis pangan dan pertanian dalam jangka panjang.

1961, 4 Maret: Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dilangsungkan penandatanganan perjanjian pembelian senjata atas kredit jangka panjang. Pihak Indonesia diwakili Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H. Nasution.

1961, 14 Agustus: Presiden Sukarno meresmikan pembentukan Praja Muda Karana (Pramuka), yang merupakan peleburan semua organisasi kepanduan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

1961, 17 Agustus: Peletakan batu pertama Monumen Nasional (Monas).

1961, 1 September: Presiden Sukarno menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang pertama Negara-Negara Non-blok di Beograd. Negara-negara Non-Blok adalah negara berkembang yang tidak melibatkan diri dalam perang dingin Amerika-Uni Soviet.

1962, 2 Januari: Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala untuk Pembebasan Irian Barat merangkap Deputi Wilayah Indonesia Bagian Timur.

1962, 15 Agustus: Persetujuan New York untuk mengakhiri sengketa wilayah Irian Barat antara Indonesia-Belanda ditandatangani. Isi pokok-pokonya antara lain: Masing-masing pihak sepakat selambat-lambatnya 1 Oktober 1962 Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA) akan menerima penyerahan pemerintahan dari pihak Belanda. Bendera Indonesia dikibarkan berdampingan dengan bendera PBB.

1962, 24 Agustus: Indonesia mendapat giliran menyelenggarakan Pesta Olahraga Asia IV (Asian Games) di Jakarta. Telah dibangun kompleks olahraga di atas tanah 270 hektar, dengan stadion utama yang mampu menampung 100.000 penonton dan stadion tertutup berkapasitas 15.000 penonton. Kompleks olahraga tersebut diberi nama Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno.

1962, 19 Desember: Trikora (Tiga Komando Rakyat), Komando Presiden yang diucapkan pada rapat umum di Yogyakarta dalam rangka perjuangan membebaskan wilayah Irian Barat. Trikora disambut oleh rakyat sebagai panggilan suci (*sacred calling*).

1963, 28 Maret: Deklarasi Ekonomi (Dekon) diumumkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Presiden Sukarno membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE).

1963, Mei: Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

1963, 18 September: Indonesia menentang pembentukan negara Federasi Malaysia, yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah, yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Di Jakarta terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang merusak Kedutaan Besar Inggris dan semua fasilitas milik Inggris.

1964, 3 Mei: Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Puncak penentangan Indonesia terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia. Presiden Sukarno mengeluarkan komando untuk menggagalkan pembentukan Malaysia yang terkenal dengan Dwikora.

1965, 1 Oktober: Tujuh jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh pasukan G30S/PKI yang dipimpin Letnan Kolonel Untung Samsuri. Peristiwa yang bermula dari konflik ideologi nasional dan politik berkembang menjadi tindak kekerasan dan tragedi bangsa.

1966, 11 Maret: Presiden Sukarno memberikan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu bagi terjaminnya keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden. Surat perintah itu dikenal sebagai Supersemar.

1966, 12 Maret: Letnan Jenderal Soeharto atas nama presiden membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang beserta organisasi yang bernaung, berlindung, dan berafiliasi dengannya.

1966, Juni: Presiden Sukarno menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada MPRS yang diberi judul "Nawaksara". MPRS menolak laporan Presiden Sukarno.

1967, 27 Maret: Jenderal Soeharto dilantik MPRS sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia ke-2.

1968, 10 Juni: Kabinet Pembangunan terbentuk. Kabinet pertama awal era Orde Baru, dengan program menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi, menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

1969, 1 April: Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dimulai.

1969, 19 November: Irian Barat resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Irian Barat menjadi provinsi ke-26 dengan nama Irian Jaya.

1970, 21 Juni: Mantan Presiden Sukarno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Disemayamkan di rumah duka Wisma Yaso (sekarang Museum TNI), Jakarta, dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.

1971, 3 Juli: Pemilihan Umum kedua (Pemilu) digelar dan diikuti sembilan partai politik dan Golkar. Pemilu dimenangkan Golkar dengan perolehan 227 kursi dari 360 kursi DPR.

1973, 5 Januari: Sembilan partai politik melakukan fusi ke dalam dua partai: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

1973, 27 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1973-1978.

1975, 20 April: Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diresmikan di Jakarta. TMII adalah taman rekreasi dan sekaligus budaya yang dibangun di atas tanah seluas 120 hektar.

1976, 17 Juli: Timor Timur menjadi bagian wilayah Republik Indonesia; dinyatakan sebagai provinsi ke-27 dengan ibukota Dili.

1976, Agustus: Sistem Satelit Domestik Palapa diresmikan Presiden Soeharto.

1978, 22 Februari: Masjid Istiqlal Jakarta diresmikan Presiden Soeharto. Masjid ini dibangun atas prakarsa Presiden Sukarno.

1978, 23 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Adam Malik sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1978-1983.

1980, 17 Agustus: Monumen Proklamasi Sukarno dan Hatta diresmikan. Monumen ini merupakan situs pembacaan Proklamasi bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945.

1982, 4 Mei: Pemilu digelar dengan diikuti dua partai politik dan Golkar. Golkar menang mutlak dengan meraih 246 kursi DPR.

1983, 23 Februari: Presiden Soeharto secara resmi membuka Candi Borobudur Abad ke-9 di Magelang, Jawa Tengah, sebagai situs sejarah dan wisata setelah sepuluh tahun direstorasi.

1983, 10 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Umar Wirahadikusumah sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1983-1988, sekaligus MPR memberi gelar Presiden Soeharto sebagai "Bapak Pembangunan".

1986, 21 Juli: Organisasi Pangan Dunia PBB (FAO) memberikan medali penghargaan kepada Presiden Soeharto atas keberhasilannya membawa Indonesia dalam swasembada pangan.

1986, 8 November: Sukarno dan Mohammad Hatta dianugerahi gelar pahlawan Proklamator.

1988, Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Sudharmono sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1988-1993.

1989, 8 Juni: PBB menganugerahi penghargaan kepada Presiden Soeharto atas prestasinya menahan laju pertumbuhan penduduk dengan Program Keluarga Berencana.

1992, 9 Juni: Pemilihan Umum digelar. Golkar memperoleh 282 kursi DPR disusul PPP 62 kursi dan PDI 56 kursi.

1992, 1 September: Presiden Soeharto membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok X di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC). KTT ini menjadi momentum perdamaian di Kamboja dan Palestina.

1993, 10 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1993-1997. Sepekan kemudian susunan kabinet diumumkan.

1993, 7 Juni: Presiden Soeharto lewat Keppres No 50 Tahun 1993 membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Ali Said ditunjuk sebagai ketua.

1994, 21 Oktober: Indonesia terpilih sebagai anggota sementara Dewan Keamanan PBB untuk tahun 1995-1996.

1994, 15 November: Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan APEC Summit. Pertemuan ini menghasilkan "Deklarasi Bogor". Sepekan kemudian Presiden Soeharto membuka Konferensi OPEC di Bali.

1995, 11 Agustus: Menristek BJ Habibie mendampingi Presiden Soeharto menyaksikan uji coba penerbangan pesawat buatan Indonesia, N-250 Gatotkaca, di Bandung.

1998, 29 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1998-2003.

1998, 12-14 Mei: Kerusuhan besar melanda Jakarta. Demonstrasi mahasiswa merebak di seluruh Indonesia menuntut perbaikan ekonomi dan perubahan sistem politik.

1998, 21 Mei: Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Posisinya digantikan Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

1999, 7 Juni: Pemilihan Umum digelar digelar dan diikuti 48 partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang dengan memperoleh 34 persen suara atau 153 kursi di DPR yang disusul Golkar (22% atau 120 kursi), PPP (10,7% atau 58 kursi), PKB (12,6% atau 51 kursi), PAN (7,1% atau 34 kursi), dan PBB (1,94% atau 13 kursi).

1999, 30 Agustus: Jajak pendapat masyarakat Timor Timur untuk memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan status "Otonomi Khusus" atau merdeka. Dalam referendum ini, warga Timtim memilih opsi kemerdekaan.

1999, 20 Oktober: Abdurrahman Wahid terpilih dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-3 setelah melewati pemungutan suara di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

1999, 31 Desember: Di hadapan pemimpin-pemimpin masyarakat, Presiden Wahid mengubah nama "Irian Jaya" menjadi "Papua".

2000, 14 Maret: Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan pencabutan TAP MPRS No XXV/1966 tentang pelarangan penyebaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.

2001, 1 Januari: Sistem ketatanegaraan baru, Otonomi Daerah, diberlakukan di seluruh Indonesia. Polisi Republik Indonesia (Polri) resmi dipisahkan dari Tentara Nasional.

2001, 9 Januari: Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani dokumen kesepakatan (*provision of understanding*) sebagai kerangka menyelesaikan konflik Aceh.

2001, 11 Januari: Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Komisi ini diketuai Jusuf Syakir.

2001, 30 Mei: Rapat Paripurna ke-62 DPR masa persidangan keempat digelar dengan agenda meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa (SI).

2001, 21 Juli: MPR menggelar Sidang Istimewa (SI) dengan agenda meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

2001, 23 Juli: Pada hari ketiga SI MPR, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit berisi pembubaran DPR dan pembekuan Partai Golkar. Dekrit tidak memperoleh tanggapan. MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai Presiden RI ke-4 dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.

2001, 9 Agustus: Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan susunan Kabinet Gotong Royong.

2001, 16 Agustus: Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato kenegaraan pertama di depan Sidang Paripurna DPR. Megawati menyatakan bahwa ia dan keluarganya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

2001, 21 Agustus: Presiden Megawati Soekarnoputri memulai lawatannya ke negara-negara anggota ASEAN.

2001, 20 Desember: Perundingan damai antarkelompok masyarakat yang bertikai di Kabupaten Poso dan Morowali mencapai 10 butir kesepakatan dan ditandatangani di Malino. Kesepakatan itu mengakhiri pertikaian horisontal yang sudah berlangsung tiga tahun.

2002, 1 Januari: Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) resmi memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam bentuk UU NAD (UU No 18/2001) dan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*.

2002, 17 Februari: Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional. Dalam peringatan nasional di Hall A Pekan Raya Jakarta itu hadir mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

2002, 25 Maret: DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Penyucian Uang (*Money Laundering*) menjadi UU.

2002, 5 Juni: Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri Komite Persiapan (PrepCom) IV KTT Pembangunan Berkelanjutan (WSSD) di Bali. Hadir 173 negara termasuk Uni Eropa dan 118 staf PBB.

2002, 8 Juni: Presiden Megawati Soekarnoputri memulai lawatannya ke empat negara Eropa: Italia, Inggris, Ceko, dan Slowakia. Sementara di Bali enam negara Pasifik Barat Daya sepakat membentuk forum Dialog Pasifik Barat Daya (Southwest Pacific Dialogue-SwPD) untuk menghadapi persaingan global. Keenam negara itu adalah Indonesia, Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Filipina, dan Timor-Leste.

2002, 26 September: Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono berdialog dengan 218 mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh Barat.

2002, 12 Oktober: Bom berdaya ledak tinggi menghantam Diskotik Sari Club dan Paddys Café di Kuta, Bali. Perang melawan teroris dimulai secara ekstensif.

2002, 9 Desember: Ditandatangani kesepakatan damai antara RI dan GAM di Jenewa Swiss. Kesepakatan itu diprakarsai Centre for Humanitarian Dialogue (Henry Dunant Centre).

2003, 9 Juni: Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional berbasis *e-government*, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik agar layanan publik efektif dan efisien.

2003, 13 Agustus: Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani UU Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi dan termuat di Lembaran Negara No 98 Tahun 2003. Tiga hari kemudian para hakim konstitusi mengucapkan sumpahnya.

2003, 29 Desember: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ketua Taufiequrachman Ruki dilantik oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta.

2004, 5 April: Pemilu untuk memilih partai politik dan anggota dewan legislatif (DPR, DPRD, DPD) digelar serentak yang diikuti 24 partai. Lima partai yang mendapatkan suara terbanyak adalah Partai Golongan Karya (21,58% atau 128 kursi DPR), PDI Perjuangan (18,53 % atau 109 kursi DPR), PKB (10,57% atau 62 kursi), PPP (8,15% atau 58 kursi), dan Partai Demokrat (7,45% atau 57 kursi).

2004, 5 Juli: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung digelar dengan diikuti lima pasangan calon, yakni (1) Wiranto-Salahuddin Wahid, (2) Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, (3) Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, (4) Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan (5) Hamzah Haz-Agum Gumelar. Karena tak satu pun pasangan yang mencapai 50% suara, maka Pilpres digelar dalam dua putaran. Yang berhak maju pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 4, masing-masing 33,58% dan 26,24%. Pilpres putaran kedua yang digelar pada 20 September, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 60,62%.

2004, 2 Oktober: Susilo Bambang Yudhoyono meraih gelar doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, dengan disertasi berjudul *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal*.

2004, 20 Oktober: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik dan mengambil sumpah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2004-2009. Keesokan harinya Presiden SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

2004, 26 Desember: Bencana besar tsunami melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang merenggut 200 ribu nyawa. Bencana dengan jumlah korban terbesar dalam sejarah Indonesia. Masa tanggap darurat ditetapkan selama tiga bulan hingga 26 Maret 2005.

2005, 9 Maret: Di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao yang didampingi Perdana Menteri Mari Alkatiri menandatangani deklarasi bersama pembentukan Commission Truth and Friendship (Komisi Kebenaran dan Persahabatan/KKP).

2005, 22 April: Konferensi Asia Afrika dibuka di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini sekaligus memperingati 50 tahun KAA di tempat yang sama. Pada 1955, peserta berjumlah 29 negara (3 dari Afrika dan 26 dari Asia dan Timur Tengah), sedangkan pada 2005 diikuti 106 negara merdeka.

2005, 15 Agustus: Delegasi Pemerintah Republik Indonesia bersama delegasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Perdamaian di Helsinki, Finlandia. Momentum yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono *via video conference* di Istana Merdeka, Jakarta, itu mengakhiri konflik berdarah antar anak bangsa yang berlangsung selama tiga dasawarsa.

2006, 14 Februari: Situs internet atau website untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diluncurkan. Situs resmi ini beralamat www.presidensby.info. Website ini berisikan informasi seputar Presiden Yudhoyono, Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, dan Istana Kepresidenan.

2006, 17 Oktober: Indonesia resmi terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2007-2008. Indonesia mendapat 158 suara dari 192 negara anggota Majelis Umum PBB.

2007, 3-14 Desember: Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim atau UNFCCC (United Nations Framework Convention of Climate Change) di Nusa Dua, Bali, dihadiri lebih dari 10 ribu perwakilan negara dan LSM dari 180 negara.

2008, 27 Januari: Presiden Republik Indonesia 1967-1998, H.M. Soeharto, wafat di Jakarta. Dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah.

2009, 9 Juli: Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD digelar di seluruh Indonesia dan diikuti 38 partai politik. Partai Demokrat keluar sebagai peraih suara terbanyak

(20,85% atau 150 kursi), disusul Partai Golkar (14,45% atau 107 kursi), dan PDI-P (14,03% atau 95 kursi).

2009, 8 Juli: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Pilpres) digelar satu putaran. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (Partai Demokrat) menjadi pemenang dengan perolehan suara 60,80%, mengalahkan Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto dari PDI-P (26,79%), dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto dari Partai Golkar (12,41%).

2009, 20 Oktober: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik dan mengambil sumpah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Boediono sebagai Wakil Presiden RI untuk masa bakti 2009-2014. Dua hari berikutnya Presiden SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II.

2009, 30 Desember: Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999-2001, wafat di Jakarta di usianya yang ke 69. Dikebumikan di Jombang.

2010, 25-30 April: Kongres Geothermal Dunia digelar di Nusa Dua, Bali, dengan tema "Geothermal: Energi Untuk Mengubah Dunia". Kongres ini diikuti 80 negara dan merupakan konferensi tenaga panas bumi terbesar di dunia. Sebelumnya konferensi ini diadakan di Firenze, Italia (1995), Beppu-Morioka, Jepang (2000), dan Antalya, Turki (2005).

2013, 3 Februari: Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk sebagai Ketua Panel Tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons) oleh Sekjen PBB ihwal Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/ MDGs). Bersama Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin 27 tokoh dari pelbagai latar profesi.

2013, 5-7 Oktober: Konferensi Tingkat Tinggi dari 21 pemimpin ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economy Cooperation/APEC) diselenggarakan di Nusa Dua, Bali dengan topik "Resilient Asia Pacific-Engine of Global Growth".

2013, 24-27 November: Forum Budaya Dunia (World Cultural Forum) diselenggarakan di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali. WCF adalah forum budaya dunia yang didukung UNESCO. Dihadiri sejumlah tokoh pembuat kebijakan, komunitas independen, pemikir, dan penggerak budaya dari 65 negara.

2013, 3-6 Desember: Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 digelar di Nusa Dua, Bali. Konferensi yang diikuti 2.800 delegasi dari 159 negara anggota WTO dan 25 negara peninjau menyepakati "Paket Bali" yang berisikan "Trade Facilitation, Agriculture and LDCs".

2014, 9 April: Pemilu anggota legislatif digelar serentak dan diikuti 12 partai politik dan tiga partai lokal Aceh.

2014, 12 Juni: Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia mengukuhkan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu ketahanan nasional.

2014, 9 Juli: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung digelar dengan diikuti dua pasangan calon, yakni (1) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, (2) Joko Widodo-Jusuf Kalla.

2014, 22 Juli: Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung, dan pasangan nomer urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 53,15 %, jumlah suara 70.997.883 (data KPU periode 22 Juni 2014).





Kadang-kadang terpaksa juga harus diakui bahwa waktu sebenarnya bersifat ganda. Ada waktu yang boleh dikatakan objektif, persis, dan terukur, satu hari sama dengan dua puluh empat jam, satu jam merupakan kata lain untuk enam puluh menit, dan begitulah seterusnya. Demikian juga halnya kalau kesatuan waktu yang lebih panjang yang sedang dihadapi, satu tahun berarti dua belas bulan, satu bulan kira-kira sama dengan tiga puluh hari, kecuali kalau keharusan kalender yang dipakai. Bukankah biasa juga, bahkan teramat sering dan sangat biasa pula, waktu mempunyai nilai yang subjektif? Ketika suasana kegembiraan sedang dinikmati, betapa cepat waktu berlalu. Tiba-tiba waktu lain telah datang begitu saja tanpa diundang. Namun bagaimana sebaliknya? Ketika kebosanan, apalagi di waktu rasa derita tengah melanda, betapa panjang perjalanan waktu. Dapat jugalah dipahami kalau bahasa sastra tidak jarang memakai konsep waktu sesuai dengan kisah yang disampaikan. Ada kalanya waktu terkena gaya eufemisme yang mengecil-ngecil "Apalah arti setahun, dua tahun, kalau akhirnya yang diinginkan tercapai juga". Atau terkena hiperbol, yang membesar-besar, "Puluhan tahun akan kunanti juga, demi masa depan yang membawa kebahagiaan".

Jika demikian halnya waktu dengan rasa subjektivitas pribadi, sebenarnya tidak pula berbeda keadaannya dengan kesadaran sosial. Perjalanan waktu dalam konteks peristiwa kesejarahan biasa juga, bahkan teramat biasa, terkena subjektivisme waktu. Hanya saja tiada kesatuan subjektivitas yang utuh bisa didapatkan. Andaikan tidak karena alasan lain, masyarakat bisa juga dibagi atas keterikatan anggotanya pada subjektivisme waktu yang tertentu. Semakin keras subjektivisme waktu, maka semakin mungkin konflik internal bisa terjadi. Ada yang menginginkan keberlanjutan situasi yang sedang dialami berjalan terus, maka dikatakanlah

mereka ini konservatif, sang pemelihara *status quo*. Sementara mereka yang ingin perubahan biasanya mendapat nama yang beragam-ragam sesuai dengan corak pemikiran dan perilaku sosial-politik yang diperlihatkan, mulai dari kaum reformis sampai golongan revolusioner, bahkan bisa juga pemberontak.

Ketika kedua dimensi waktu telah dibicarakan dalam konteks sejarah kontemporer tanah air yang tercinta ini, seakan-akan serentetan nama aktor sejarah terkemuka terpampang begitu saja. Biarlah ilmuwan berteori-teori tentang asal usul dari apa yang mereka namakan "*the force of history*", kekuatan sejarah. Hanya saja ketika sejarah kekinian disinggung, personifikasi waktu pun tidak terhindarkan. Maka kita pun berbicara atau bahkan berdebat tentang zaman ketika presiden "ini" atau "itu" negara mengalami "kemakmuran" atau "kemerosotan ekonomi". Sekian banyak peristiwa sosial atau ekonomi atau—tentu saja—politik terjadi dan dialami masyarakat bangsa. Maka begitulah seakan-akan dengan begitu saja nama pribadi telah dijadikan sebagai simbol dari dinamika zaman. Dapat jugalah dipahami kalau potret senyum sinis memakai teks, "*Piye kabare. Isih enak zaman ku to?*".

Ketika pendempetan waktu dan tokoh (sang aktor sejarah) telah terjadi bukan saja perjalanan sejarah terasa semakin jelas, bahkan berbagai perasaan subjektif pun bisa pula ikut bermain. Sejarah bukan lagi sekadar rekonstruksi dari rentetan peristiwa dalam perjalanan waktu, tetapi juga susunan potret aktor sejarah yang dianggap telah memainkan peranan yang dominan. Seketika hal-hal ini telah direnungkan maka tiba-tiba datang juga kesadaran betapa seakan-akan dengan begitu saja, meskipun telah sepuluh tahun berada di puncak kekuasaan, Presiden Republik Indonesia yang keenam sudah harus mengakhiri tugasnya. Kita pun sadar

juga, bahwa ia berada di tampuk kekuasaan selama sepuluh tahun (Oktober 2004–Oktober 2014), karena ia dua kali mendapat kepercayaan rakyat. Mestikah diherankan kalau seketika kata keenam telah diucapkan, bukan saja rangkaian sejarah kontemporer bangsa yang terbayangkan, serentetan nama pun muncul begitu saja, Sukarno (Agustus 1945–Maret 1967), Soeharto (Maret 1967–Mei, 1998), B.J. Habibie (Mei 1998–Oktober 1999), Abdurrahman Wahid (Oktober, 1999–Juli, 2001), Megawati Soekarnoputri (Juli 2001–Oktober 2004), dan Susilo Bambang Yudhoyono (Oktober 2004–Oktober 2014). Namun siapakah mereka yang sempat ditakdirkan untuk mendapat kedudukan terhormat itu? Siapakah mereka yang mendapat kepercayaan rakyat itu?

Meskipun sejak muda, bahkan teramat muda, ia telah melibatkan diri dalam pergerakan kebangsaan dan mempersembahkan bagi bangsa yang sedang berada di pintu gerbang kemerdekaan apa yang pernah disebut *philosophische grondslag* dari negara yang akan didirikan (sebuah dokumen yang sampai kini dijunjung tinggi bangsa) dan sempat pula mengalami situasi yang teramat kritis dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, tetapi ia bukanlah yang terlama menduduki kursi tertinggi di negara yang diproklamirkannya. Sukarno menduduki jabatan kepresidenan selama kira-kira 22 tahun. Sekali dipilih, kedudukannya pun tak tergoyahkan, bahkan juga tidak tergoyahkan ketika negara yang diproklamasikannya (bersama Bung Hatta) memasuki tahapan yang kritis. Di saat suatu kompromi demi kemenangan akhir sedang dibuat, ia, Sukarno, Presiden Republik Indonesia, dengan Ibukota Yogyakarta, “dipilih” untuk menjadi Presiden RIS (Republik Indonesia Serikat) (Desember 1949), sebuah negara kompromi yang berumur hanya sampai saat ia tampil memberikan pidato Hari Proklamasi, 17 Agustus 1950. Maka

dalam sejarah tanah air negara yang disebut RIS itu hanyalah tercatat sebagai sebuah kejadian, *event*, yang lewat begitu saja sebelum wilayah Republik Proklamasi kembali meliputi seluruh persada tanah air. Seketika kedaulatan negara telah diakui maka seakan-akan dengan begitu saja apa yang disebut “negara-negara federal”, negara yang didirikan atau disponsori Belanda, berjatuh satu-persatu, entah bergabung dengan RI (Republik Indonesia), entah jatuh begitu saja. Hanya Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur akhirnya bergabung dengan Republik Indonesia untuk bersama-sama membentuk kembali NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, adalah Presiden yang terlama menduduki jabatan yang dikatakan UUD 1945 (Undang–Undang Dasar 1945), adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Presiden adalah pula jabatan yang “boleh dipilih kembali” tanpa batas waktu. Dan ia pun dipilih dan dipilih lagi sampai enam kali. Ia naik ke atas tampuk kekuasaan ketika krisis dalam kehidupan kebangsaan sedang mendekati masa akhirnya dan ia harus melangkah ke luar demi krisis dalam kehidupan kenegaraan bisa terelakkan. Meskipun demikian ia sempat berada di puncak kekuasaan selama lebih kurang 32 tahun, jauh lebih lama dari masa yang dialami Bapak Bangsa Sukarno. Dalam periode ini kedudukannya sebagai “Bapak Pembangunan” pun tidak tergoyahkan. Ketika waktunya ditakdirkan harus berakhir maka “peta Indonesia” pun harus dibuat baru. Sedemikian banyak perubahan geografis yang telah terjadi, kota-kota baru bertumbuhan dan kota-kota lama bertambah besar, di masa ketika ia sibuk mengibarkan bendera “pembangunan nasional”. Lain kisah sejarah yang dialami Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berada di puncak kekuasaan negara (2004) setelah harus melalui proses yang

teramat berbeda. Telah ada tiga presiden yang merintis jalan lebih dulu. Bukan saja ia harus melalui pemilihan umum yang langsung, bukan lagi hanya oleh mereka yang mempunyai hak untuk memilih presiden, para anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dan UUD 1945 hasil amandemen telah pula menentukan seseorang hanya boleh dipilih dua kali saja sebagai presiden.

Jika saja hanya panjangnya masa tugas yang menjadi ukuran, maka B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri boleh dikatakan adalah Kepala Negara dalam masa peralihan (1998–2004). Namun, dalam masa tugas yang teramat singkat ini, mereka, dengan gaya masing-masing dan dalam konteks problem bangsa dan negara yang beragam-ragam pula, telah meninggalkan jejak yang tidak mungkin terlupakan. Ketika Habibie dengan berani membawa negara kembali seutuhnya mengikuti keharusan konstitusional, otonomi, kemerdekaan berpendapat, dan sebagainya, presiden sesudahnya mencoba mengikuti logika konstitusional yang telah kembali dibukanya. Jadi boleh dikatakan, bahwa kehadiran mereka di puncak kekuasaan memberi pertanda betapa peralihan dalam sistem demokrasi sedang mengalami perubahan, dari yang sekadar bersifat prosedural, sekedar basa-basi, menjadi substansial, sesuai keharusan konstitusi dan filsafat kenegaraan yang dianut, dan betapa masa baru dalam kehidupan kenegaraan masih berada dalam situasi yang agak mendebarkan.

Habibie adalah wakil presiden ketika Soeharto meletakkan jabatannya, tetapi ia, yang kini telah menjadi presiden, mengadakan Pemilihan Umum, sebelum masa jabatan kepresidenan Soeharto berakhir. Ketika pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden ditolak oleh mayoritas anggota MPR hasil Pemilihan Umum yang diadakannya, ia mengundurkan diri dari pencalonan sebagai

presiden. Maka MPR pun harus memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Karena keberhasilan “poros tengah” menggalang kekuatan maka Abdurrahman Wahid alias Gus Dur terpilih sebagai Presiden dan Megawati, ketua dari fraksi terbesar, PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), menjadi wakil Presiden. Tetapi Gus Dur tetaplah Gus Dur, yang tetap jujur dalam sikapnya yang serba spontan, dalam waktu yang relatif singkat konflik dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kemudian juga MPR tak terhindarkan. Ketika ia memutuskan untuk membubarkan MPR/DPR maka pembalikan yang teramat drastis pun terjadi. Seketika badan tertinggi negara, MPR/DPR, menolak untuk dibubarkan, waktu itu juga proses pembalikan terjadi. Maka ia pun kehilangan semua landasan kekuasaan. Ia diberhentikan oleh lembaga tertinggi negara yang telah memilihnya. Gus Dur berada di puncak kekuasaan kurang dari dua tahun (1999–2001). Ia harus digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Ketika itu juga Indonesia memperlihatkan pada dunia internasional bahwa perempuan bisa tampil sebagai presiden di Indonesia, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, yang kebetulan negara dengan penduduk beragama Islam yang terbesar.

Akan tetapi, siapakah mereka dan apakah asal usul mereka? Sukarno anak seorang guru sekolah pemerintah, yang kebetulan seorang bangsawan lokal Jawa. Ibunya seorang bangsawan Bali. Anak kedua Sukarno, Megawati Soekarnoputri, mengikuti jejak ayahnya. Ia, sang pemimpin PDI-P, yang umum dianggap sebagai partai oposisi dalam Orde Baru yang tidak mengenal partai oposisi. Ibunya, Fatmawati, berasal dari Bengkulu. Ia seorang gadis cantik yang dikenal Sukarno ketika tokoh pergerakan kebangsaan ini diasingkan pemerintah Belanda ke kota kecil di pantai Barat Sumatra. Jadi Megawati, presiden kelima RI ini, boleh

dikatakan anak istimewa yang juga secara biologis sangat Indonesia, karena hasil campuran dari tiga etnis. Ia adalah keturunan langsung “Bapak Bangsa”. Ia pun, tentu saja, seorang anak dari kota besar yang pernah tinggal di istana kenegaraan. Soeharto, presiden kedua, hanyalah, seperti katanya ketika mendapat penghargaan internasional karena keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi beras, “anak petani, dari Desa Kemusuk”, Jawa Tengah. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam, bukan anak kampung, tetapi seorang remaja dari sebuah kota kecil, Pacitan, Jawa Timur. Ayahnya opsir rendah TNI (Tentara Nasional Indonesia). Jadi orang biasa saja. Meskipun aslinya anak kota kecil juga, tetapi Gus Dur agak istimewa. Bukan saja di masa kecil ia pernah sekolah di kota, Jakarta, karena ayahnya, Kiai Wahid Hasyim, pernah menjadi Menteri Agama dua atau tiga kali. Sementara kakeknya dari pihak ayah, Kiai Hasyim Asy’ari, sang pendiri NU (Nadhlatul Ulama), yang biasa dikenal masyarakat sebagai Hadhratussyaikh, dan kakeknya dari pihak ibu adalah Kiai Bisri Syansuri, yang sampai akhir hayatnya tetap dianggap sebagai pemimpin NU paling terkemuka. Seperti Sukarno, Habibie adalah anak hasil campuran etnis: ayahnya orang Gorontalo, sedangkan ibunya seorang wanita bangsawan Jawa. Ia dibesarkan di Pare-pare, Sulawesi Selatan. Di kota Makassar, ketika masih remaja, Habibie berkenalan dengan Letnan Kolonel Soeharto yang kebetulan berdinastikan di sana.

Jadi kalau sekiranya asal usul mereka dikumpulkan menjadi satu, maka kita pun akan melihat juga peta Indonesia yang penuh keragaman. Ada tiga orang yang berasal dari perkawinan antaretnis. Ada yang merasa diri murni “anak kampung”, ada “anak kota kecil” di perbatasan dan ada pula yang dibesarkan di daerah etnis lain. Di samping itu, ada pula yang pindah-pindah. Ada yang biasa tinggal di rumah sederhana, tetapi ada juga yang sempat tinggal di

istana. Jika keragaman ini belum cukup juga, maka bisalah dikatakan bahwa ada yang sejak masih sekolah rendah telah memasuki sekolah yang paling elite, karena sebagian besar murid-muridnya orang Eropa (ELS), di sambung ke HBS, dan akhirnya THS, tetapi ada juga hanya tamat sekolah swasta saja, Muhammadiyah. Bukankah ini gambaran Indonesia yang berada dalam peralihan, ketika mobilitas geografis dan sosial telah bermula?

Meskipun menamatkan sekolah tinggi, Sukarno dan Gus Dur dibesarkan dalam keterlibatan yang intens dalam berbagai corak aktivitas kemasyarakatan, politik, ataupun bahkan dalam suasana perdebatan keagamaan. Ketika “peta-bumi” dari masalah-masalah ini harus dibuka, bagaimanakah akan menghindar dari nama-nama mereka? Dapatkah membicarakan pergolakan ideologi dengan melupakan nama Sukarno? Mungkinkah berdiskusi mengenai pemikiran tentang hubungan agama dan dinamika masyarakat di tanah air dalam periode 80-an dan seterusnya tanpa menyebut nama Gus Dur? Meski datang kemudian dan tidak pula terlalu intens jika dibanding dengan Gus Dur, apalagi dengan ayahnya, Megawati boleh dikatakan demikian juga, apalagi setelah kuliahnya telah dihalangi karena situasi politik yang semakin memanas. Meskipun dalam zaman yang berbeda-beda, Soeharto dan SBY praktis dibesarkan dalam suasana kemiliteran. Hanya saja kalau SBY dilatih untuk menjadi pemimpin di Akademi Militer, Soeharto harus ditempa oleh pengalaman yang keras di zaman Belanda, Jepang, dan di masa revolusi, di saat keberadaan Republik Indonesia yang masih labil. Tetapi bagaimanakah Soeharto bisa melupakan “Enam Jam di Yogya” ketika pasukan yang dipimpinnya menyerbu Yogyakarta di pagi tanggal 1 Maret 1949? Bukankah peristiwa ini sempat dipakai sebagai latar belakang kisah film dengan judul yang sama? SBY tentu tidak

bisa melupakan keterlibatannya dalam usaha reformasi ABRI, ketika “keausan” tatanan Orde Baru semakin merupakan gejala yang tak teringkar. Habibie harus bergumul di “negeri orang” untuk melanjutkan sekolah serta mendapatkan keberhasilan dalam karya teknologi tinggi. Bagaimana pula ia akan melupakan beberapa *patent* yang diterimanya, karena penemuan orisinal dalam perkembangan teknologi dunia penerbangan? Dan ia tidak merasakan adanya pengorbanan ketika semua keberhasilan internasional ditinggalkannya. Hanya kebanggaan yang tak terkatakan yang dirasakannya ketika panggilan tanah air sampai di atas pangkuannya. Ia pun pulang dan ia pun berbuat.

Berbagai keberhasilan dan ujian pernah dialami mereka yang sempat mendapat kepercayaan bangsa ini. Ada saat-saat yang menggembirakan dan membanggakan, tetapi ada juga masa ketika keseluruhan eksistensi kedirian sang presiden dipertanyakan. Dengan tekanan yang berbeda-beda, semua presiden sempat mengalami saat-saat yang menggetarkan ini. Ada kalanya hanya selintas, tetapi tak pula jarang harus dihadapi dengan pilihan yang pasti, “ya” atau “tidak”. Berbagai hal yang dialami sebelum akhirnya mereka diakui bangsa sebagai Kepala Negara, tetapi ketika ujian datang pilihan mereka hanya satu saja, yaitu “keutuhan negara dan bangsa merupakan segala-galanya”. Ujian inilah yang dialami Sukarno ketika pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden ditolak MPRS. Meskipun pendukungnya masih cukup kuat, tetapi ia—seperti katanya—tak ingin terjadi perang saudara. Masa Demokrasi Terpimpin pun digantikan oleh Orde Baru. Seketika Presiden Soeharto mengetahui bahwa mereka yang selama ini dipercayainya tidak lagi mau bekerja sama sebagai anggota kabinetnya, ia pun mengembalikan mandatnya kepada MPR. Sebagaimana pernah dikatakannya, ia pun akhirnya memilih untuk *lengser*

keprabon, meskipun tiada jaminan ia dimungkinkan untuk *madeg pandhita*.

Tiada keharusan bagi Habibie untuk membatalkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, seketika pidato pertanggungjawabannya sebagai pejabat presiden ditolak MPR. Namun seketika hal itu terjadi, ia memilih untuk membatalkan niatnya. Dalam proses ujian itu, ketika berbagai corak perilaku diperlihatkan oleh sebagian anggota MPR yang baru terpilih, ia menunjukkan pada bangsa yang dicintainya bagaimana sikap demokratis yang bisa diharapkan dari seorang pemimpin bangsa. Seketika mendengar bahwa MPR bukan saja telah menolak keputusannya untuk membubarkan lembaga politik tertinggi ini tetapi juga memberhentikannya sebagai presiden, Gus Dur, yang sedang memakai celana pendek, hanya melambaikan tangannya dari pintu istana.

Maka ketika pengalaman Indonesia dibandingkan dengan negeri-negeri lain yang mengalami tuntutan pergantian kepemimpinan di luar keharusan konstitusional, kesan apakah yang didapatkan kalau bukan keterharuan dan penghargaan akan sikap para pemimpin bangsa? Betapapun mungkin keras niat mereka untuk bertahan dan melanjutkan kekuasaan, tetapi seketika penentangan dirasakan cukup keras dan cukup luas pula, maka di waktu itu pula pangkat dan kekuasaan menjadi tak berarti apa-apa. Keamanan anak-bangsa dan ketenteraman tanah air adalah segala-galanya. Mereka pun dengan ikhlas mengundurkan diri. Patriotisme bukankah hal yang bisa ditawarkan. Kecintaan tanah air dan bangsa adalah segala-galanya.

Kadang-kadang mungkin terasa juga bahwa biografi hanyalah riwayat kehidupan seseorang, di mana dan bila dilahirkan, di mana sekolah, apa pengalaman hidupnya yang terpenting dan seterusnya. Entah kalau kisah kehidupan itu terjadi dalam keterpencilan, seperti cerita dongeng

Tarzan, misalnya perjalanan hidup terjadi dalam konteks kemasyarakatan. Maka biografi pula sesungguhnya penghadapan seseorang dalam dinamika kemasyarakatan. Maka dengan anjang-ancang begini bisa jugalah dikatakan bahwa rangkaian biografi para kepala negara sesungguhnya pantulan otentik sejarah kehidupan bangsa. Kepala negara dan negara yang dipimpinnya selamanya terlibat dalam situasi dialogis yang tanpa henti. Begitu ketika ia baru dilahirkan dan dibesarkan dan demikian pula ketika Sang Mahaabadi menjemputnya.

Seketika biografi Bung Karno menyebutkan bahwa ia dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan kemudian, keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, beberapa puluh orang dengan suara bulat memilih mereka sebagai presiden dan wakil presiden, maka kita pun tahu juga bahwa ketika itulah revolusi kemerdekaan bangsa telah bermula. Tetapi bagaimana dengan kasus di suatu ketika (2004) empat calon presiden dan wakil presiden berkampanye untuk dipilih sebagai pasangan kepala negara yang baru? Seketika hal itu terjadi kita pun sadar juga betapa proses demokratisasi politik telah sampai pada kematangan yang memberikan secara langsung hak rakyat kepada rakyat.

Siapa pun dia, apa pun mungkin profesinya, dan dari mana pun asalnya namun seketika telah menduduki jabatan tertinggi negara, maka seluruh alur kehidupannya, sejak ia dilahirkan, bisa saja dianggap sebagai bayangan dari corak dan alur dinamika masyarakatnya. Mengapa ia bisa tumbuh sebagai pribadi yang memungkinkan ia mendapat kepercayaan politik masyarakat? Landasan apakah yang dipakai masyarakat untuk menerimanya atau bahkan pernah menolaknya? Dan sebagainya.

Biografi adalah kisah hidup seseorang. Tetapi karena itulah biografi bisa berfungsi juga sebagai “kaca” untuk memahami

dinamika sosial. Kegelisahannya dalam menjalankan tugas kepresidenan yang pernah dialaminya adalah bayangan dari situasi sosial politik yang terjadi. Kegembiraan dan letupan kebanggaannya bukan saja refleksi dari ego sebagai penguasa, tetapi adalah pula sesungguhnya keberhasilan negara yang dipimpinnya mengatasi berbagai permasalahan kenegaraan dan kebangsaan.

Biografi adalah kisah hidup seseorang. Benar. Tetapi biografi adalah juga prisma memahami dinamika masyarakat dan lingkungan sang tokoh yang dikisahkan mengayuh kehidupannya.

Jakarta, Agustus 2014

TAUFIK ABDULLAH

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia





1

SUKARNO

SUKARNO

Penyambung Lidah Rakyat Yang Revolusioner



Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, para anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang terdiri dari wakil-wakil Sumatera, Jawa, Borneo, Selebes, Kepulauan Sunda Kecil, dan Maluku mengadakan rapat untuk pertama kalinya. Rapat itu dihadiri juga oleh beberapa tokoh pemuda dan mantan perwira PETA (Pembela Tanah Air). Mereka berkumpul untuk melengkapkan persyaratan yang harus dipunyai sebuah negara, yaitu UUD (Undang-undang Dasar) dan pemerintah sebagai pemegang sistem kekuasaan. Setelah membuat perubahan kecil tetapi fundamental maka rancangan UUD yang dibuat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pun ditetapkan sebagai UUD. Sukarno dan Hatta dipilih secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada kata berlebihan, hanya kata "Baiklah" yang bisa diucapkan Sukarno ketika terpilih sebagai Presiden.

Dua puluh tahun kemudian Sukarno menyebut dirinya sebagai "Penyambung Lidah Rakyat" dan "Pemimpin Besar Revolusi". Dalam otobiografinya *"as told to Cindy Adams"*, Sukarno mengisahkan bahwa setelah dipilih sebagai presiden, ketika berjalan pulang ke rumahnya, di jalanan ia bertemu dengan tukang sate. Lalu Sukarno memanggil pedagang yang telanjang kaki dan mengeluarkan perintah pertama sejak dipilih sebagai Presiden. "Sate ayam lima puluh tusuk!" Setelah itu Presiden Sukarno jongkok di dekat got dan tempat sampah, menyantap sate dengan lahapnya. Itulah seluruh pesta perayaan sebagai Presiden.

Sukarno menyaksikan pawai pertama kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 (Sumber: IPPHOS).



Searah jarum jam: Sukarno berboncengan sepeda dengan istrinya Fatmawati pada tahun 1951 (Sumber: KITLV). Sukarno berboncengan sepeda motor dengan Fatmawati disaksikan oleh ajudan dan putra-putrinya (Sumber: IPPHOS). Sukarno bersama putra-putrinya dalam suasana penuh bahagia dan bercanda ria (Sumber: IPPHOS).



Sesampai di rumah, Sukarno dengan penuh semangat menyampaikan pada istrinya bahwa ia dipilih sebagai presiden, namun Fatmawati tidak melompat-lompat kegirangan. Ia hanya berkata, "Di larut malam sebelum Bapak meninggal, hanya tinggal kami berdua yang belum tidur. Aku memijitnya untuk mengurangi rasa sakitnya, ketika tiba-tiba beliau berkata, 'Aku melihat pertanda kebatinan bahwa tidak lama lagi, anakku akan tinggal di istana yang besar dan putih itu.'" Sejak itulah Sukarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang diperjuangkan puluhan tahun lamanya. "Merdeka atau Mati" tidak lagi sekadar semboyan yang dipuisikan, tetapi pilihan realitas yang tidak terelakkan.



Sukarno muda, ketika menjadi siswa HBS di Surabaya tahun 1916, Sukarno lulus tanggal 10 Juni 1921 (Sumber: KITLV).

PUTRA SANG FAJAR

Pagi Kamis, tanggal 6 Juni 1901, kegelapan terasa masih menyelimuti alam, tiba-tiba saja Gunung Kelud meletus. Dalam tradisi Jawa peristiwa seperti itu merupakan pertanda kelahiran seorang calon pemimpin besar. Pada tanggal itulah seorang anak laki-laki, yang kemudian dikenal dengan nama Sukarno, dilahirkan. Ia dilahirkan di Lawang Seketeng, Surabaya, dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang keturunan raja-raja Kediri dan Ida Ayu Nyoman Rai, keturunan bangsawan Bali dari kerajaan Singaraja. Sebenarnya nama aslinya Kusno. Karena sering sakit-sakitan, maka namanya diganti menjadi Sukarno. Dalam tradisi Jawa kalau anak sering sakit-sakitan dianggap sebagai pertanda bahwa nama yang disandangnya kurang cocok.

Dalam autobiografinya, Sukarno berkisah: "Ketika aku masih bocah kecil, mungkin berumur dua tahun, ibu telah memberkatiku. Dia bangun sebelum matahari terbit dan di dalam kegelapan di beranda rumah kami yang kecil, dia duduk tidak bergerak, tanpa melakukan apa-apa dan tanpa bicara, hanya memandangi ke arah timur dan dengan sabar menantikan datangnya fajar. Ketika aku terbangun dan mendekatinya, dia mengulurkan kedua belah tangannya dan meraih badanku ke dalam pelukannya, lalu pelan-pelan mendekap tubuhku ke dadanya. Beberapa saat kemudian dia berkata dengan lembut: "Anakku, engkau sedang memandangi matahari terbit. Dan engkau anakku, kelak akan menjadi orang yang mulia, pemimpin besar dari rakyatmu, karena ibu melahirkanmu di saat fajar menyingsing. Kita orang Jawa memiliki suatu kepercayaan, bahwa seseorang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah digariskan sebelumnya. Jangan sekali-kali kau lupakan nak bahwa engkau ini putra sang fajar."

Dunia pendidikan dimulai di Tulungagung, tidak lama kemudian ia mengikuti orang tuanya ke Mojokerto. Di kota kecil ini ia dimasukkan ke sekolah tempat ayahnya mengajar, EIS (Eerste Inlandsche School) atau biasa juga disebut Sekolah Angka Satu. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-

Presiden Sukarno memberikan pidato di hadapan ribuan massa di lapangan Ikada pada 19 September 1945, pada peringatan satu bulan kemerdekaan Indonesia (Sumber: IPPHOS)



anak pegawai pemerintah dan pembayar pajak tinggi. Pada Juni 1911, Sukarno dipindahkan ke ELS (Europeesche Lagere School), yaitu sekolah untuk anak-anak Eropa dan elite pribumi, agar ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat diterima di HBS (Hogere Burgerschool). Pada tahun 1915, Sukarno menyelesaikan pendidikan di ELS dan melanjutkan ke HBS Surabaya atas bantuan seorang kawan ayahnya, H.O.S. Tjokroaminoto. Setamat dari HBS, Sukarno melanjutkan studi ke THS (Technische Hogeschool) di Bandung yang merupakan cikal bakal ITB (Institut Teknologi Bandung). Ia memperoleh gelar insinyur pada Jurusan Sipil spesialisasi jalan raya dan pengairan pada 25 Mei 1926. Dalam wisuda THS pada 3 Juli 1926 ada empat orang insinyur pribumi, yaitu R. Sukarno, M. Anwari, J.A.H. Oudang, dan M. Sutedjo.

PERKENALAN AWAL DENGAN NASIONALISME

Ketika bersekolah di HBS Surabaya, Sukarno mulai merasakan apa artinya hidup dalam suasana diskriminasi kolonial. Diskriminatif itu diwujudkan dalam hubungan sosial antara guru dan murid, bahkan juga pergaulan sesama murid. Sebagai contoh dalam tata cara berpakaian, murid bumiputera diwajibkan memakai stelan *beskap* Jawa dan sarung batik tanpa alas kaki, sedang murid-murid Belanda dan Eropa mengenakan stelan jas dan pantalon serta bersepatu tertutup.

Suasana diskriminatif inilah yang membangkitkan kesadaran Sukarno tentang ketimpangan struktur masyarakat kolonial. Perasaan perlawanan pun mulai menyelinap dan bersemi di hatinya. Suasana di rumah Tjokroaminoto semakin menempa rasa ketidakadilan struktural yang dialaminya. Di rumah pemimpin besar itu, Sukarno berkenalan secara langsung dengan dunia pergerakan nasional yang mulai tumbuh. Sukarno dapat melihat dan merasakan betapa Tjokroaminoto tampil sebagai seorang pemimpin yang inspiratif sehingga berhasil membawa Sarekat Islam (SI) ke arah kemajuan yang pesat.

Sukarno sering mendapat kesempatan dari Tjokroaminoto berinteraksi dengan para tokoh Sarekat Islam. Kekagumannya pada Tjokroaminoto pun menimbulkan hasratnya untuk meniru gaya berpidato sang pemimpin. Dalam proses peniruan itulah Sukarno menemukan gaya dan teknik pidato yang lebih sesuai bagi dirinya. Kesempatan mempraktekkan kemampuan pidato tersebut diperoleh ketika dalam suatu pertemuan H.O.S. Tjokroaminoto berhalangan hadir dan Sukarno diminta menggantikannya.

Kepiawaian Sukarno tidak hanya tampak pada gaya berpidato, tetapi juga dalam penyampaian gagasan yang cerdas, berani, dan inspiratif. Karena itu tidaklah mengherankan kalau pidatonya sempat juga menggegerkan para anak muda terpelajar anggota Trikorso Darmo dengan memakai bahasa Jawa *ngoko*. Dengan berbahasa Jawa



Berita di *Tjaja Hindia*, mengenai putusan hakim terhadap Tjokroaminoto yang dianggap melakukan sumpah palsu dalam kasus Haji Hasan Cimareme (Sumber: Perpustakaan Nasional RI).

ngoko ia secara simbolis ingin memperlihatkan semangat demokrasi yang telah memasuki kesadarannya. Kebetulan pula pada waktu itu Sarekat Islam cabang Surabaya sedang asyik dalam gerakan "Jawa Dwipa", yang ingin meniadakan tingkat-tingkat dalam bahasa Jawa dan menjadikan tingkat bahasa yang paling rendah sebagai satu-satunya bahasa yang dipakai. Maka tercatatlah bahwa di usia yang baru menginjak 20 tahun ia telah tampil menyampaikan pidato yang gemilang di samping gurunya, Tjokroaminoto, di perayaan Hari Buruh bulan Mei 1921.

NASIONALISME SEMAKIN MEKAR DI KOTA BANDUNG

Proses pematangan pemikiran dan gagasan Sukarno mengalami kemajuan pesat ketika ia pindah ke Bandung. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa Surabaya adalah pusat pergerakan politik Islam, Semarang pusat pergerakan yang cenderung beraliran komunis, dan Bandung pusat pemikiran nasionalisme sekuler.

Saat menjadi mahasiswa di THS Bandung ia berhasil mengajak teman-temannya mendirikan Kelompok Studi Umum (Algemeene Studie Club) di tahun 1924. Ia tampaknya terinspirasi oleh Indonesische Studie Club yang didirikan Dr. Soetomo (pendiri Budi Utomo) di Surabaya, organ kelompok studi ini diberinama Soeloeh Indonesia Moeda. Berawal dari kelompok studi inilah Sukarno dan kawan-kawan menerjunkan diri secara langsung dalam pergerakan politik kebangsaan.

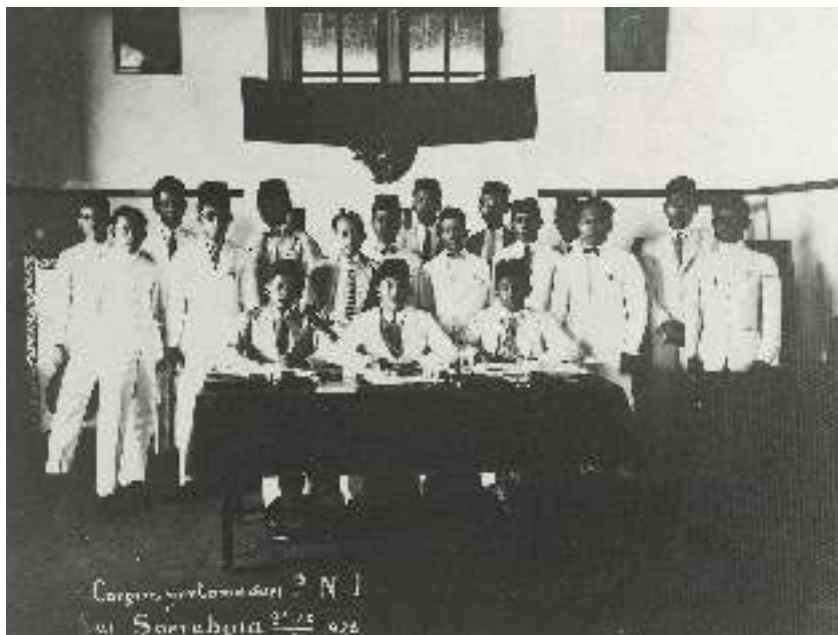
Pada tanggal 26 Juli 1926 Sukarno menyelesaikan studinya dan berhak menyandang gelar akademis insinyur. Bermodal ijazah itu ia bekerja sama dengan seorang teman sesama kuliahnya, Ir. Anwari, mendirikan biro arsitek. Sayangnya kelangsungan hidup biro arsitek kedua insinyur muda itu tidak bertahan lama. Karena terlalu sibuk terlibat dalam pergerakan kebangsaan, biro ini tidak menguntungkan secara finansial. Pada tahun 1929, biro arsitek ini membubarkan diri. Pada bulan Agustus 1932, ia kembali mendirikan biro arsitek. Kali ini ia bermitra dengan Ir. Roosseno, seorang ahli struktur. Biro arsitek yang didirikannya adalah Biro Insinyur Soekarno & Roosseno, beralamat di Jalan Banceuy No. 18 Bandung. Perusahaan ini pun tidak berlangsung lama, karena pada akhir tahun 1933 Sukarno diasingkan oleh pemerintah kolonial ke pembuangan tanpa melalui proses pengadilan. Ia disingkirkan ke Ende, Flores.

Jika saja tidak aktif dalam pergerakan politik, Sukarno sebenarnya dapat menerima tawaran menjadi pegawai tetap dari *Burgelijke Openbare Werken* (BOW), tetapi ia tidak menerima tawaran itu karena bertolak dari landasan prinsip nonkooperasi.

SUKARNO DAN PARTAI NASIONAL INDONESIA

Sukarno masih bersekolah di Surabaya ketika konflik internal ideologi mulai melanda Sarekat Islam. Dipengaruhi oleh tokoh sosialis Belanda seperti Sneevliet, SI cabang

Kongres Partai Nasional Indonesia (PNI) di Surabaya dilaksanakan pada 27 Mei – 30 Mei 1928, tampak Ketua PNI Sukarno, Sekretaris Iskaq Tjokroadisuryo dan Samsi Sastrowidagdo (Sumber: KITLV)



Semarang tertarik pada ajaran Karl Marx dan semakin menampilkan diri sebagai penantang Central Sarekat Islam di bawah pimpinan Tjokroaminoto. Tantangan inilah yang menyebabkan Tjokroaminoto menulis permasalahan hubungan ajaran Islam dengan Sosialisme. Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Abdul Muis mulai menampilkan diri sebagai ideolog Islam. Perbedaan ideologi itulah yang menyebabkan SI Cabang Semarang harus dikeluarkan. Sementara itu BU yang didirikan oleh para pemuda pelajar, yang anggotanya adalah para *priyayi*, telah merumuskan ide “nasionalisme Jawa”. Indische Partij, partai pertama yang dengan jelas merumuskan arti kolonialisme dalam realitas kehidupan, menampilkan diri dengan gagasan “nasionalisme Hindia”. Di negeri Belanda, para mahasiswa bumiputra semakin merasa asing dengan Indische Vereeniging, organisasi yang mereka dirikan. Pada tahun 1924, para mahasiswa *inlander* dari Hindia Belanda itu mengubah nama organisasi menjadi Indonesische Vereeniging. Akhirnya, di tahun 1925, nama itu diubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia.

Ketika kematangan dalam struktur kesadaran sosial diperlihatkan maka konflik ideologis pun tidak terhindarkan. Negeri yang masih secara resmi disebut Hindia Belanda ini pun semakin jauh memasuki periode “dasawarsa ideologi” (1920-an–1930-an). Ketika berbagai corak ideologi bermunculan dan di saat perdebatan dan

bahkan konflik ideologis dalam pergerakan kebangsaan tidak terhindarkan, saat itulah Sukarno yang baru saja menyelesaikan kuliahnya menerbitkan esei politiknya berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” dalam *Soelwoeh Indonesia Moeda*, 1926. Esei dalam karya klasik itu bukan saja memantulkan keresahan jiwanya, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan pemikirannya.

Ia pun membuat ulasan yang pintar dan menarik tentang corak dan orientasi ketiga ideologi itu. Ia menunjukkan berbagai persamaan yang memungkinkan ketiganya bergerak dalam kesatuan langkah. Dalam esei panjang ini, ia juga menjelajahi pengalaman pergerakan politik kebangsaan di berbagai negeri di Asia.

“Jikalau kita semua insyaf, bahwa kekuatan hidup itu letaknya tidak dalam menerima, tetapi memberi; jikalau kita semua insyaf, bahwa perceraiberaian itu letak benih perbudakan kita, jikalau kita semua insyaf, bahwa permusuhan itulah yang menjadi kita punya ‘via dolorosa’, jikalau kita insyaf, bahwa roh rakyat kita masih penuh kekuatan untuk menjunjung diri menuju sinar yang satu yang berada di tengah-tengah kegelapan gumpita yang mengelilingi kita ini, maka pastilah persatuan itu terjadi, dan pastilah sinar itu tercapai juga. Sebab sinar itu sudah dekat.”



Majalah Persatuan Indonesia, lampiran tulisan Sukarno tentang cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan rapat-rapat PPPKI untuk persiapan kemerdekaan (Sumber: Perpustakaan Nasional RI).

Tidak lama setelah menulis karya yang cemerlang itu Sukarno berhasil mengajak teman-temannya mengubah kelompok diskusi Algemeene Studie Club menjadi partai politik kebangsaan. Pada tanggal 4 Juli 1927, Perserikatan (kemudian Partai) Nasional Indonesia (PNI) pun resmi berdiri. Gerak-langkah PNI tampak sebagai penahapan strategi perjuangannya. Tahap pertama ialah agitasi massa. Inilah tahap yang dirancang untuk menggugah semangat nasionalisme, menggembleng semangat nasional untuk menjadi tekad nasional, dan kemudian peneguhan tekad nasional yang diwujudkan dalam aksi massa atau tindakan nasional yang nyata. Intinya ialah menggalang kekuatan dan menggunakan kekuatan itu. Setelah kongresnya yang kedua di Jakarta, Mei 1929, PNI menyatakan bahwa perjuangannya sudah berada pada tahap kedua. Agitasi kepada masyarakat umum harus dilakukan menyusul agitasi di kalangan buruh. Sukarno pun berpidato tentang terjadinya

pemulauan jika pada suatu saa. nanti Perang Pasifik pecah. Ia pun menggambarkan penjajah sebagai "naga Nyi Blorong", sedangkan PNI sebagai Kumbakarna. Nyi Blorong menggoyang ekornya yang terletak di Eropa, tetapi kepalanya di Asia mengisap milyaran keuntungan. Kendati kepalanya luka dilibas naga, Kumbakarna yang hendak membunuh sang naga tetap hidup. Maka begitu pula halnya dengan situasi di tanah air. Setelah PKI dilibas, PNI bangkit untuk memimpin pergerakan kebangsaan.

Rangkaian agitasi massa yang dilancarkan PNI menimbulkan kejengkelan dan kekuatiran pemerintah, tetapi semakin pemerintah kuatir semakin panas agitasi yang dilakukan Sukarno. Dalam suasana inilah Kongres Pemuda yang kedua, Oktober 1928, diadakan oleh organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan dan satu-dua yang telah bersifat antardaerah dan yang dibimbing oleh semangat modernisme Islam (Jong Islamieten Bond).

Kongres Permoefakatan
Perhimpunan-Perhimpunan
Politik Kebangsaan Indonesia
(PPPKI) di Surakarta pada 25 – 27
Desember 1929 (Sumber: KITLV).



Seketika kongres resmi ditutup, sebuah “batas simbolik” dalam proses pembentukan bangsa modern terjadi. Kongres Pemuda II ditutup dengan pembacaan tekad yang kemudian dikenal sebagai **Sumpah Pemuda** (28 Oktober 1928). Maka dengan begini “kelahiran bangsa Indonesia” secara simbolik telah dikukuhkan.

Sejalan dengan suasana yang diakibatkan lahirnya Sumpah Pemuda pengaruh Sukarno pun semakin meluas. Dua bulan setelah Sumpah Pemuda, Sukarno pun berhasil mengusahakan berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) sebuah federasi yang menggabungkan bukan saja berbagai perkumpulan dengan ideologi yang berbeda-beda, tetapi juga mempunyai sikap politik yang tidak pula sama. Ada di antaranya yang berpegang pada prinsip *nonkooperator*, yang menolak kerjasama dengan pemerintah; tetapi ada juga golongan *kooperator*, yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah. Dengan kerjasama ini golongan “ko” berharap dapat memperjuangkan kepentingan nasional di Volksraad (Dewan Rakyat), yang didirikan pada tahun 1917, dan juga di dewan-dewan daerah (*locale raaden*).

Ketika federasi ini terbentuk di waktu itu pula Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pengawasan yang lebih ketat terhadap PNI dan PPPKI.

INDONESIA MENGGUGAT

Kepopuleran Sukarno semakin meluas dan semakin cepat perluasan pengaruh PNI semakin mendalam pula kekhawatiran pemerintah kolonial. Maka dengan alasan menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), pemerintah akhirnya menangkap dan menahan beberapa orang aktivis PNI pada 29 Desember 1929. Penangkapan Sukarno dilakukan ketika sedang menginap di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Seorang inspektur dengan 50 anggotanya pada malam itu berkata kepada Sukarno, “Atas nama Sri Ratu, saya menahan tuan.” Selain Sukarno juga ditangkap beberapa tokoh PNI, seperti Maskoen, Gatot Mangkoepradja, dan Soepriadinata. Mereka dijebloskan ke penjara Banceuy di Bandung.

Sukarno ditempatkan di ruang tahanan Blok F, Nomor 5, berukuran 1,5 X 2,5 meter. Selama di penjara kegiatan utama Sukarno membaca dan menulis artikel. Buku bacaannya diperoleh dari istrinya, Inggit Garnasih, yang nekad menyelundupkannya di balik *stagen*. Dalam keterpencilan hidup di penjara inilah Sukarno mendapat waktu dan kesempatan belajar dan merumuskan gagasan baru dalam perjuangan kebangsaan. Dari bilik penjara ia semakin akrab berkenalan dengan pemikiran Karl Marx, Sun Yat Sen, dan lain-lain, bahkan juga dengan pemikiran Snouck Hurgronje, ilmuwan kolonial yang mendalami kehidupan masyarakat Islam di tanah air demi meneguhkan kekuasaan kolonial.



Ir. Sukarno beserta kawan-kawannya bersiap menghadapi sidang dengan didampingi tiga orang pembelanya di depan pengadilan kolonial Bandung pada tahun 1926 (Sumber: KITLV).

Ia menyadari juga bahwa proses peradilan yang akan dihadapinya bukanlah murni masalah hukum, tetapi akan menjerumuskan pada kecurigaan politik. Karena itulah ia meminta pengacaranya, Mr. Sastromoeliono, berkonsentrasi pada segi hukum, sedangkan ia menulis sendiri pleidoinya. Dalam menghadapi persidangan ini Sukarno dan teman-temannya didampingi oleh beberapa orang pembela, yaitu Ketua PNI Cabang Jawa Tengah Mr. Soeyoedi, tuan rumah ketika mereka ditangkap; Mr. Sartono, seorang rekan di Algemeene Studieclub, tinggal di Jakarta dan menjadi wakil ketua yang mengurus soal keuangan partai. Para pembela ini mendampingi Sukarno dan kawan-kawannya tanpa bayaran.

Setelah delapan bulan berada dalam tahanan, pada 18 Agustus 1930 Sukarno dihadapkan ke sidang pengadilan Bandung. Ia dituduh menyebarkan propaganda yang dapat mengganggu ketenteraman umum. Jadi, ia melanggar Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga menyalahi Pasal 161, 171, dan 153. Pasal-pasal tersebut adalah 'de Haatzaai Artikelen', yaitu pasal-pasal pencegah penyebaran rasa benci. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa "Seseorang yang terbukti mengeluarkan perasaan kebencian atau permusuhan secara tertulis maupun lisan, atau seseorang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan yang menghasut untuk mengadakan pengacauan atau pemberontakan terhadap pemerintah Belanda, dapat dikenakan hukuman

"Tak usah kami uraikan lagi, bahwa proses ini adalah proses politik: ia, oleh karenanya, didalam pemeriksaannya, tidak boleh dipisahkan dari soal-soal politik yang menjadi sifat dan azas pergerakan kami, dan yang menjadi nyawa fikiran-fikiran dan tindakan-tindakan kami ... "

setinggi-tingginya tujuh tahun penjara". Pasal-pasal tersebut dikenal pula sebagai "pasal karet" karena memberi ruang tafsir subjektif yang sangat luas, bahkan Sukarno menyebutnya sebagai "aturan karet yang keliwat karetnya".

Di dalam rumah tahanan itulah Sukarno menulis pidato pembelaannya, berjudul "Indonesia Menggugat", yang menguraikan penderitaan rakyat Indonesia karena pengisapan kolonialisme Belanda. Ia mengawali pleidoinya dengan mengatakan bahwa proses peradilan yang dialaminya sesungguhnya bagian dari politik penguasa kolonial untuk meredam gerakan nasional yang mulai tumbuh.

Sukarno tahu juga bahwa para hakim Landraad Bandung mempunyai pandangan politik tertentu sebelum menangani perkara yang dikenakan padanya. Pemberitaan koran-koran Belanda, seperti *AID de Preangerbode*, juga sibuk menghasut agar hakim menghukum kelompok Sukarno.

Dalam pidato pembelaannya, Sukarno tidak sekedar membeberkan ideologi dan perjuangan PNI, tetapi juga

Baginya imperialisme tidak lain daripada "suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri, suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain. Ia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapak perang, tak usah berupa "perluasan negeri daerah dengan kekerasan senjata" sebagaimana yang diartikan oleh van Kol, tetapi ia bisa juga berjalan hanya dengan "putar lidah" atau cara "halus-halusan" saja, bisa juga dengan berjalan dengan cara "penetration pacifique".

mengupas kapitalisme dan imperialisme yang sekian lama telah menghantui kehidupan rakyat di kepulauan Indonesia.

Untuk memperkuat argumennya, Sukarno mengutip pendapat para ilmuwan dan filsuf terkemuka. Bagi mereka, katanya, imperialisme adalah politik luar negeri yang tidak bisa dielakkan dari negara-negara yang mempunyai "kapitalisme keliwat matang", yaitu kapitalisme yang diwujudkan dalam pemusatan perusahaan dan bank yang mempunyai cabang-cabang sampai sejauh-jauhnya.

Sukarno tidak hanya menyandarkan diri pada pandangan kelompok Marxis dan sosialis Eropa saja. Ia juga mengutip laporan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, membahas gerakan Mahatma Gandhi, dan juga menyalin pandangan pejuang Islam Indonesia seperti Haji Agus Salim. Cara ini di samping melakukan *expose* dari ketidakadilan yang dialami rakyat pribumi, Sukarno juga memberikan dasar pemikiran nasionalismenya yang diwarnai sintesis pemikiran Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.

"Indonesia Menggugat" dengan jelas memperlihatkan keresahan rakyat berada di bawah himpitan eksploitasi kapitalisme agraria penguasa kolonial. Dalam pidato pembelaannya inilah Sukarno memperkenalkan istilah "marhaen", sebuah kata yang diambil dari nama seorang petani yang hanya mempunyai sebidang lahan yang sempit. Marhaen contoh seorang petani yang menderita karena tekanan kolonialisme. Kebetulan Sukarno sempat kenal

dengan petani yang tinggal dekat kota Bandung itu. Ia melihat petani itu sedang menggarap sawahnya. Petani ini bukanlah seorang proletariat. Ia tidak menjual tenaganya kepada orang lain. Ia tidak pula ikut dalam pemilikan produksi. Ia seorang miskin yang banyak menderita. Ia tidak mempunyai penghasilan yang memadai untuk hidup, padahal ia mempunyai sawah milik sendiri, bahkan bajak pun miliknya sendiri. Hasil yang didapatnya untuk kebutuhan sendiri pula. Maka Sukarno pun menggunakan kata "marhaen" sebagai identifikasi sosiologis *wong cilik*.

Dalam kesimpulannya Sukarno mengatakan bahwa yang terjadi di Indonesia bukanlah pertentangan kaum proletar dengan kapitalis, tetapi marhaen dengan kapitalis. Karena itulah kaum marhaen harus berada di garis depan. Ketika kereta kemenangan telah melintasi jembatan emas, yaitu kemerdekaan bangsa, maka kendalinya haruslah berada di tangan kaum marhaen. Hanya dengan beginilah arah perjalanan bangsa tidak membelok ke jalan kapitalisme dan borjuisme Indonesia.

"Indonesia Menggugat" atau "*Indonesië Klaagt Aan!*" adalah karya klasik kedua yang dihasilkan Sukarno. Dalam pidato pembelaan inilah ia memperkenalkan "trilogi sejarah" yang diwarnai romantisme perjuangan. Ia membayangkan masa lalu yang gilang-gemilang, masa kini yang gelap gulita, dan masa depan yang penuh harapan. Masa depan ialah ketika kemerdekaan bangsa sebagai "jembatan emas"



Penjara Sukamiskin. Sukarno dimasukkan ke penjara Sukamiskin, Sukarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin tanggal 31 Desember 1931 (Sumber: KITLV).

yang didapatkan untuk menuju kehidupan bangsa yang diidamkan. Karya klasik ini merumuskan dengan jelas alur pemikiran politik Sukarno.

Pengadilan Sukarno dan rekan-rekannya berlangsung dalam 19 kali sidang. Sebagaimana telah diduga, Sukarno mendapat hukuman paling berat, yaitu empat tahun penjara, Gatot Mangkoepradja divonis dua tahun, Maskoen divonis satu tahun delapan bulan, dan Soepriadinata divonis satu tahun tiga bulan. Meskipun mereka naik banding ke Raad van Justitie, keputusan yang telah ditetapkan tidak berubah. Setelah hukuman dijatuhkan, mereka pun dipindahkan ke penjara Sukamiskin.

Proses pengadilan dan tentu saja pledoi Sukarno tidak hanya menggemparkan kaum pergerakan tetapi juga menggoncang publik politik di negeri Belanda. Golongan oposisi Belanda mengangkat persoalan peradilan Sukarno sebagai kritik atas kegagalan pemerintah dalam mengendalikan wilayah koloninya. Di samping itu ada juga ahli hukum Belanda yang melakukan protes terhadap jalannya sidang yang mereka anggap lebih terbuai pada fakta dan bukti yang tidak meyakinkan. Karena berbagai protes itulah Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengubah masa hukuman Sukarno menjadi dua tahun. Pada 31 Desember 1931 Sukarno dibebaskan sesudah menjalani hukuman dua tahun dari yang seharusnya empat tahun.

PENGASINGAN DI ENDE

Ketika Sukarno dipenjara, PNI terbelah menjadi Partai Indonesia (Partindo) yang didirikan Mr. Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru (PNI Baru) yang didirikan Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir. Segera setelah dibebaskan dari penjara Sukamiskin tanggal 31 Desember 1931, Sukarno pun berusaha menyatukan kedua partai itu, tetapi gagal. Akhirnya pada Juli 1932, ia memutuskan bergabung dengan Partindo. Bagi Sukarno dan Partindo perbedaan strategi tidak menghalangi persatuan, sedangkan bagi PNI-Baru dan Hatta kaum kooperator adalah mereka yang mengakui keabsahan kolonialisme. Bekerja sama dengan golongan kooperator adalah suatu kasus ketika betapa "per-satu-an" yang dicari tetapi "per-sate-an" yang didapat.

Perdebatan strategi dari kedua partai nasionalis yang radikal itu tidak berlangsung lama. Tahun 1930-an merupakan awal pemerintahan Gubernur Jenderal De Jonge, seorang ultra-konservatif. Pada pertengahan tahun 1933 ia memerintahkan penahanan dan sekaligus pembuangan Sukarno ke sebuah kota kecil di Pulau Flores, Ende. Sementara Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, dan beberapa orang tokoh PNI-Baru dibuang ke Boven Digul. Sejak itu gerakan nasionalis tidak punya pilihan untuk melakukan perlawanan terbuka terhadap pemerintah Hindia-Belanda.

Dalam otobiografinya, Sukarno mengenang Ende yang terpencil itu sebagai kota kecil yang terletak di ujung dunia. Setelah mengarungi lautan selama delapan hari dari Surabaya, kapal Van Riebek yang membawa Sukarno dan keluarganya membuang sauh di pelabuhan Ende pada 14 Januari 1934. Dengan dikawal serdadu Belanda, Sukarno dan istrinya (Inggit Garnasih), ibu mertua, dan Ratna Djuami, anak angkatnya, memasuki rumah yang telah tersedia di Kampung Ambugaga, Ende.

Pada awal kedatangannya di Ende tidak ada orang yang berani mendekatinya. Penduduk setempat takut pada mata-mata pemerintah yang akan menanyai untuk keperluan apa berbicara dengan Sukarno. Masa awal pembuangan adalah waktu tersepi yang dirasakannya. Setelah berlangsung beberapa lama, ia menjalin persahabatan dengan Pastor Huijtink. Persahabatan ini bukan saja berarti adanya kawan untuk berdiskusi, tetapi juga tersedianya buku-buku di perpustakaan gereja yang bisa dinikmatinya. Berkat kepandaiannya bergaul, Sukarno berhasil juga menghimpun penduduk sekitar Ende yang terdiri dari petani dan pedagang untuk bersamanya menyibukkan diri dengan pementasan sandiwara. Melalui aktivitas di dunia teater ini ia dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat. Ide-ide kemerdekaan dan kepahlawanan dapat disampaikannya dengan simbolisasi cerita dan pertunjukan tonil yang dipentaskannya. Entah

kebetulan, entah murni hasil renungan, tetapi salah satu kisah tonil yang dipentaskannya berjudul "1945", seakan-akan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 sudah berada dalam rencana. Naskah yang ditulis sekitar tahun 1930-an itu berkisah tentang kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa tampaknya sudah menjadi obsesi di alam bawah sadarnya. Selama di Ende, Sukarno sempat membuat 12 naskah drama.

Di samping berkesenian, aktivitas lain Sukarno ialah mendalami Islam. Lewat korespondensi dengan T.A. Hassan, pemimpin Persatuan Islam di Bandung, ia mendiskusikan ajaran Islam dan implikasi ajaran dalam kehidupan sosial-politik. T.A. Hassan adalah ulama "modernis" yang biasa mengiriminya Sukarno buku-buku Islam. Dalam korespondensinya, ia pernah juga menganjurkan kepada Hassan agar pengetahuan Barat dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah Islam, sebab Islam lebih bisa dipahami dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan modern. Apalagi Islam harus pula mengambil bagian yang penting dalam kebangkitan nasionalisme Indonesia. Para pemimpin Islam harus mengembangkan rasa-hayat kesejarahan, karena Islam adalah agama kemajuan. Masyarakat Islam tidak bisa hanya menenggelamkan diri dalam kitab-kitab fiqh semata. Mereka harus juga menjelajahi dinamika dalam dunia pemikiran Islam. Dengan beginilah umat Islam akan sanggup menjawab tantangan zaman yang terus berubah dan berkembang.



Kiri & Kanan: Rumah pengasingan Sukarno di Bengkulu. Setelah di buang ke Ende Sukarno dipindahkan ke Bengkulu pada 14 Februari 1938 (Sumber: ANRI)

Pengasingan di Ende senantiasa melekat dalam kenangan Sukarno. Ia ingat betapa kadangkala ia mengalami kesepian yang teramat mencekam. Berjam-jam ia duduk bersandar di pohon sukun yang tumbuh di halaman belakang rumahnya. Dari tempat itu, ia memandang langit biru dan awan putih yang pelan melintas. Ia merenung dan melayangkan angan-angan dan khayalnya jauh ke masa depan. Di Ende, di tempat pembuangannya itu, Sukarno meramalkan bahwa nanti, di suatu ketika, Indonesia akan berhasil memutus belenggu yang kini mengikatnya. Di bawah pohon sukun itu ia mengkhayalkan juga dasar negara yang digunakan ketika kemerdekaan Indonesia diraihinya.

PENGASINGAN BENGKULU

Awal tahun 1938 Sukarno baru saja sembuh dari serangan malaria yang berat. Ketika itulah pemerintah menyadari bahwa ia harus dipindahkan ke tempat pengasingan yang lebih sehat. Ia dan keluarganya dibawa dari Flores menuju Surabaya. Tidak ada sambutan meriah untuk dirinya. Dari sini ia dibawa dengan kapal ke Bengkulu, kota kecil yang terletak di pantai Barat Sumatera. Seperti di Ende, ia harus puas dengan selingkungan kecil teman-teman setempat, guru, pedagang, ulama, petani, dan sebagainya.

Meskipun demikian ia merasa beruntung juga. Di Bengkulu ia bisa aktif dalam pergerakan Muhamadiyah dan bahkan diperbolehkan mengajar di sekolah organisasi Islam

“reformis” ini. Ia kerap kali mengirim karangan ke majalah *Pandji Islam* yang terbit di Medan dan *Pemandangan* di Jakarta. Ketika inilah perdebatan tentang Islam dan dunia modern yang bermutu tinggi terjadi antara Sukarno dan cendekiawan muda aktivis Persatuan Islam, Mohammad Natsir. Tulisan Bung Karno banyak mengulas hal-hal yang dianggap tidak membahayakan ketertiban Pemerintah Hindia Belanda. Karena aktivitasnya mengajar di Muhamadiyah inilah Sukarno menjadi akrab dengan Fatimah (kemudian dikenal dengan nama Fatmawati), putri seorang pemimpin Muhamadiyah setempat, yang dititipkan kepada keluarga Sukarno dan menjadi teman Ratna Djuami, anak angkat Sukarno. Sukarno menggambarkan Fatmawati sebagai seorang remaja dengan rambut hitam panjang seperti sutera, yang membawa keceriaan di rumah mereka. Sukarno kerap mengajak Fatmawati jalan-jalan ke tepi pantai, menikmati debur pantai dan matahari terbenam. Hubungan yang semakin akrab ini akhirnya mengantarkan Sukarno pada pernikahannya dengan Fatmawati yang pada waktu itu berusia 19 tahun.

Di pembuangan Bengkulu, Sukarno mendirikan perkumpulan sandiwara Monte Carlo. Sampai sekarang di bekas rumah pengasingan Sukarno masih dapat ditemukan lemari yang berisi properti perkumpulan tonil peninggalan Sukarno, seperti layar, panggung, dan kostum pemain. Sukarno sangat serius mengelola perkumpulan sandiwaranya.



Dalam setiap pertunjukannya ia sangat memperhatikan semua unsur dramaturgi. *Setting, lighting, tata rias, kostum*, bahkan pamflet dibuatnya semenarik mungkin sehingga bisa merangsang orang untuk membeli karcis masuk. Pernah juga ditulis tentang bagaimana sebelum pentas Sukarno mengarak para pemain tonil keliling kota untuk membuat penonton semakin penasaran. Dalam setiap naskahnya selalu ada pesan moral yang disampaikan, misalnya dalam naskah *Rainbow* Sukarno menekankan pentingnya suatu bangsa mempelajari sejarah agar bisa menata masa depan.

Ketika Sukarno sedang menjalani kehidupan di pengasingan inilah Perang Pasifik meletus. Bala tentara Dai Nippon dengan cepat berhasil memutus keberlanjutan kekuasaan Belanda dan menempatkan nasionalisme Indonesia di jalan baru yang arahnya belum dapat diduga. Namun bagi Sukarno, dan tokoh lain pergerakan Indonesia, era baru telah bermula. Ketika itu pulalah masa pengasingannya berakhir.

BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Pemerintah kolonial yang memperkirakan bahwa Sumatera telah berada di bawah ancaman serbuan balatentara Jepang, memindahkan Sukarno dan keluarganya ke Padang. Pemerintah Belanda memperkirakan dari kota pelabuhan inilah pengungsian Sukarno ke Australia lebih

mungkin bisa dilakukan, tetapi keinginan pemerintah Hindia Belanda ini hanya tinggal dalam rencana. Balatentara Kerajaan Matahari Terbit semakin mendekat. Bagi Sukarno, berada di daerah Minangkabau cukup menyenangkan juga. Namanya telah umum dikenal dan ia pun merasakan suasana persahabatan. Para aktivis politik di Tanah Minang ingat juga bahwa partai pimpinannya, Partindo, adalah teman akrab dari partai kebangsaan radikal yang terbesar di Minangkabau, PERMI (Perhimpunan Muslimin Indonesia). Partai yang dipimpin oleh para bekas mahasiswa al Azhar, Cairo, dan guru-guru Sumatera Thawalib, Padang Panjang.

Pada 9 Juli 1942, pemerintah militer pendudukan Jepang membawa Sukarno kembali ke Jakarta. Setelah berlayar empat hari, ia dan keluarga mendarat di Pasar Ikan, Jakarta. Setibanya di pelabuhan kecil itu ia menghubungi Anwar Tjokroaminoto dan Hatta. Mereka pun segera datang untuk menyambutnya. Mereka membawa Sukarno ke rumah tempat Hatta menginap. Di sinilah Sukarno, Hatta, dan Sjahrir mencapai kata sepakat. Mereka menyadari bahwa Sukarno dan Hatta terlalu dikenal umum untuk bermain di belakang layar. Mereka pun menyediakan diri untuk tampil bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang, sedangkan Sjahrir akan menyusun gerakan "bawah tanah". Meskipun demikian mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pertemuan itu menandai hubungan baru Sukarno dan Hatta. Sembilan tahun yang



Sukarno pada rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Sumber: IPPHOS).

lalu hubungan mereka diwarnai oleh perdebatan ideologi dan strategi perjuangan. Setelah persetujuan rahasia itu Sukarno pindah ke sebuah rumah sederhana yang cukup menyenangkan di daerah Menteng. Sejak itu persahabatan abadi terjalin antara Sukarno dan Hatta, betapapun kemudian perbedaan politik memisahkan mereka juga.

Penampilan pertama Sukarno dan Hatta di depan publik terjadi dua minggu kemudian di sebuah rumah tua bergaya kolonial di pusat kota Jakarta, bekas rumah orang Jerman. Pertemuan itu dihadiri ratusan anggota masyarakat yang gembira mendengar berita tentang kedua tokoh pergerakan nasional itu telah menyelesaikan pertentangan mereka. Dalam pidato sambutan mereka, baik Sukarno maupun Hatta menekankan bahwa telah tiba saatnya rakyat Indonesia bersatu. Mereka berjanji tidak akan membiarkan diri terlarut dalam pertentangan seperti pada masa lampau.

Betapa berat tanggung jawab moral yang harus dipikul kedua pemimpin itu. Mereka bekerja sama dengan Jepang sambil menunggu sampai datang saat yang tepat. Keduanya sadar bahwa gaya revolusioner yang tergesa-gesa hanya akan menimbulkan pertumpahan darah yang sia-sia.

Kehati-hatian ini membawa berkah politik juga. Pada 10 November 1943, Sukarno dan Hatta diundang ke Tokyo agar mereka bisa menyampaikan rasa terima kasih kepada Tenno Heika yang bermurah hati "mempercepat"

dan "mendukung" proses terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan tertib istana yang diberitahukan kepada mereka, para tamu membungkukkan badan ketika bertemu Tenno Heika, tetapi Kaisar Hirohito justru menjabat tangan mereka. Dalam pertemuan itu Tenno Heika menganugerahi Bintang Ratna Suci kepada Sukarno dan Hatta. Bagi Sukarno undangan ke Jepang merupakan kesempatan pertama berkunjung ke luar negeri.

Sebagai upaya menarik simpati pemimpin Indonesia, Jepang memberikan "janji kemerdekaan". Pada 1 Maret 1945, Saiko Sikikan (pemimpin tertinggi pemerintahan militer Jepang di Jawa), Jenderal Harada Kumakici, mengumumkan pembentukan badan yang bertugas menyelidiki hal-hal penting berkenaan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Badan ini diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai, disingkat Badan Penyelidik, yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat. Dalam sidangnya yang pertama tanggal 28 Mei–2 Juni 1945, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar negara yang kemerdekaannya telah dijanjikan Jepang. Tiga anggota menyampaikan hasrat mereka untuk menyampaikan pemikiran mengenai apa yang disebut sebagai *philosophische grondslag*, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Sukarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 Sukarno menyampaikan pidato di hadapan sidang BPUPKI.



Sukarno bersama dengan Mohammad Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo berkunjung ke Jepang selama 17 hari pada November 1943. (Sumber: KITLV).

Dalam pidatonya itu Sukarno mengupas lima dasar berharga milik bangsa Indonesia: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sukarno menjelaskan bahwa hari depan bangsa harus berdasarkan pada kebangsaan karena orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Sukarno menjelaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi harus pula menuju ke arah terbentuknya suasana kekeluargaan bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. "Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Bangsa Indonesia harus menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia." Masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita dan tujuan semua bangsa di dunia.

Sukarno mengatakan pula bahwa bila perlu kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Trisila", yakni sila kebangsaan Indonesia atau nasionalisme dan internasionalisme diperas menjadi sosio-nasionalisme. Demokrasi dan keadilan sosial dapat diperas menjadi sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang berdiri dengan kedua kakinya di tengah masyarakat, yakni nasionalisme yang berperni kemanusiaan, nasionalisme yang tidak chauvinistis. Demikian pula sosio-demokrasi tidak sama dengan demokrasi barat yang memandang

Saudara-saudara! "dasar-dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? (seorang yang hadir: pendawa lima). Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelimanya dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras sehingga tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah 'perasan' yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, weltanschauung kita...



Sukarno membicarakan tentang peralihan kekuasaan atas Jawa setelah Belanda berhasil diusir oleh Jepang dari Indonesia pada 1942 (Sumber: KITLV).



Penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang dan menandatangani perjanjian di Kalijati Subang tahun 1942 (Sumber: ANRI).

liberalisme politik dan ekonomi dijunjung tinggi sehingga hanya kaum borjuis yang mendapat kesempatan untuk berkuasa dan hidup mewah, sedangkan rakyat kecil ibarat mengupas nangka dan hanya kena getahnya. Sukarno juga mengatakan bahwa untuk membangun Negara Indonesia yang merdeka maka masyarakat harus gotong royong secara dinamis dan bersifat kekeluargaan. Gotong royong inilah yang disebut dengan istilah “Ekasila”.

Pidato Sukarno mendapat sambutan dan tepukan meriah dari anggota BPUPKI. Dalam pidato yang disampaikan tanpa teks ini setiap kata yang diucapkannya dicatat dengan cermat oleh para stenograf. Sukarno menekankan bahwa bila tidak bersandar pada azas Pancasila bangsa Indonesia bisa terpecah belah. Hanya Pancasila yang dapat mengutuhkannya Negara Indonesia. Pancasila merupakan satu-satunya landasan pemersatu bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam ini.

Sebelum sidang BPUPKI tahap pertama berakhir, dibentuklah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia Sembilan diketuai Sukarno. Panitia kecil ini bertugas merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan konsep Pancasila yang diusulkan Sukarno sebagai landasan awal. Akhirnya pada rapat 11 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyetujui isi Pembukaan UUD yang kemudian dinamakan (atas usul Yamin) “Piagam Jakarta”.

MEMPERSIAPKAN PROKLAMASI

Sukarno dan Hatta baru saja pulang dari Saigon. Mereka mendapat kepastian bahwa Jepang akan segera memenuhi janjinya “memberikan kemerdekaan” pada bangsa Indonesia. Di malam tanggal 15 Agustus 1945, jam 10.00, Sukarno bersama Sayuti Melik dan istrinya (Trimurti) sedang sibuk merencanakan rincian strategi proklamasi kemerdekaan. Ketika itulah mendadak datang beberapa pemuda sambil berteriak, “Sekarang Bung! Malam ini, mari kita kobarkan revolusi yang hebat malam ini juga,” kata Chairul Saleh. Para pemuda revolusioner itu telah mengetahui bahwa hari itu Jepang dengan resmi menyatakan tunduk pada Sekutu. Malam itu terjadilah perdebatan seru antara pemuda yang diwakili Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana dengan Sukarno tentang cara menyampaikan kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, di balik kusen jendela rumahnya, Fatmawati sedang murung dan tegang. Ia melihat dengan jelas semua kejadian di malam itu. Menyadari hasrat yang menyala-nyala di kalangan pemuda itu Sukarno mencoba menanggapi dengan tenang.

“Yang paling penting di dalam suatu peperangan dan revolusi adalah waktu yang tepat. Di Saigon aku sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17.”

“Tetapi mengapa tanggal 17,” kata Sukarni menyela, “apakah tidak lebih baik sekarang saja atau tanggal 16?”



Gambar kiri dan kanan: Seluruh rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan, tampak poster rakyat Rengasdengklok yang mendukung Republik Indonesia. Pawai pada 10 Januari 1950 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

“Aku percaya mistik,” kata Sukarno. “Aku tidak dapat menerangkan yang masuk akal, mengapa tanggal 17 memberikan harapan kepadaku. Tetapi aku merasakan di dalam relung hatiku bahwa dua hari lagi adalah saat yang baik. Tujuh belas adalah angka suci. Tujuh belas adalah angka keramat. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadhan, waktu kita berpuasa. Hari ini Jumat, Jumat Legi, Jumat yang manis, Jumat yang suci. Dan hari Jumat tanggal 17. Al Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam melakukan sembahyang 17 rekaat dalam sehari. Ketika aku pertama kali mendengar berita penyerahan Jepang, aku berpikir kita harus segera memproklamakan kemerdekaan. Kemudian aku menyadari adalah takdir Tuhan bahwa peristiwa ini akan jatuh di hari keramatnya. Proklamasi akan berlangsung tanggal 17. Revolusi mengikuti setelah itu.”

Para pemuda tampak seperti dapat menerima argumen Sukarno. Mereka pun bubar dan meninggalkan rumah Sukarno.

Pukul 03.00 menjelang subuh tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno tidak bisa tidur. Ia termenung sendiri di dalam kamar sambil mempersiapkan diri untuk makan sahur. Keadaan sekitar rumah sepi. Tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh kedatangan serombongan pemuda dengan pakaian seragam. Di antara mereka juga ada Sukarni. Ia membawa sebilah pedang samurai dan sepucuk pistol. Kemudian muncul pemuda lain sambil mengayun-ayunkan pedang

Jepang. Tiba-tiba si pemuda berkata, “Kami akan melarikan Bung ke luar kota di malam buta ini. Sudah diputuskan untuk memindahkan Bung, demi keamanan.”

Di peralihan malam dengan subuh menjelang sahur itu Sukarno diculik bersama dengan Fatmawati dan Guntur yang masih bayi. Rupanya Hatta juga telah mereka culik. Pada pukul 09.00 pagi, mobil mereka akhirnya sampai di Rengasdengklok. Hingga sampai sore Jakarta masih tenang dan tenteram. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada revolusi, dan tidak pula terjadi perebutan aset-aset Jepang. Maka para pemuda yang menculik Sukarno pun mulai gelisah.

Sementara itu rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang semestinya dibuka pada pukul 10.00, terpaksa harus ditunda. Peserta rapat pun bertanya-tanya, “Kemanakah Sukarno dan Hatta?” Wikana, salah seorang yang merencanakan penculikan itu, akhirnya memberi tahu tempat kedua pemimpin itu diculik dan disembunyikan. Mr. Subardjo, yang dekat dengan kelompok pemuda dan generasi tua, segera menjemput kedua pemimpin itu ke Rengasdengklok.

Pada tengah malam menjelang tanggal 17 Agustus rombongan tiba di Jakarta. Sesuai keinginan Sukarno malam itu juga langsung diadakan rapat di rumah Laksamana Maeda karena rapat PPKI tertunda.

Setelah itu, dengan diantar Miyoshi, Sukarno dan Hatta pergi ke rumah Mayor Jenderal Nishimura. Dalam



Naskah Proklamasi (atas). Sukarno membaca naskah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat (Sumber: IPPHOS).



Konferensi pers yang pertama pada 4 September 1945 di Pengangsaan Timur 56, Presiden Sukarno bersama wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa menteri (Sumber: ANTARA/IPPHOS).



Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Sutan Syahrir pada Desember 1946 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

pertemuan itu terjadi perdebatan sengit antara Sukarno dan Nishimura. Sukarno dan Hatta tetap bertahan pada rencana memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Nishimura terikat dengan keharusan yang telah dikenakan Sekutu, bahwa Jepang harus menyerahkan Indonesia kepada Sekutu dalam keadaan *status quo*, sehingga tidak boleh ada perubahan sama sekali. Hampir dua jam berlangsung perdebatan Nishimura dengan Sukarno dan Hatta tetapi tidak dicapai kesepakatan. Akhirnya para tamu yang sudah tidak sabar itu memutuskan untuk kembali ke rumah Maeda.

Di rumah Maeda, Sukarno mempersilahkan Hatta menyusun teks ringkas pernyataan proklamasi kemerdekaan, karena gaya bahasa Hatta cukup bagus, tetapi Hatta tidak bersedia. Ia lebih suka kalau hanya mendiktekan dan Sukarno yang menuliskannya. Kalimat pertama diambil dari kalimat ketiga dari draf Pembukaan UUD 1945: "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Ketika merumuskan kalimat kedua, timbul diskusi tentang dua kata. Versi pertama berbunyi bahwa "kekuasaan" yang ada akan "direbut" dari tangan penjajah. Menurut kisah Nishijima, Miyoshi melibatkan diri ketika pilihan kata ini dimasalahkan. Ia berpendapat pilihan kata itu terlalu menantang militer Jepang. Sukarno dan yang lain protes, tetapi Hatta dengan hati-hati mengubahnya menjadi kalimat

biasa: "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Mereka yang mengadakan rapat di ruang tersendiri ialah Sukarno, Hatta, Sayuti Melik, Subardjo, dan Sukarno setuju dengan rumusan tersebut. Setelah itu rumusan teks proklamasi ini pun dibawa ke ruang sidang untuk mendapatkan persetujuan. Para anggota PPKI dan perwakilan dari berbagai golongan menyatakan persetujuan mereka. Mereka pun memutuskan pula agar teks itu ditandatangani oleh Sukarno Hatta "atas nama bangsa Indonesia".

Berita tentang rencana pernyataan kemerdekaan Indonesia segera menyebar di kalangan masyarakat. Ketika waktunya telah semakin mendekat, Sukarno bergulat dengan demam suhu badannya panas. Sudah dua hari ia tidak tidur. Telah dua hari pula ia kerja keras karena tekanan peristiwa yang teramat penting ini. Malariannya kambuh kembali. Pukul 07.00 pagi sudah ratusan orang berkumpul di depan rumahnya. Para pemuda mendesak agar segera dibacakan teks proklamasi. Namun Sukarno tidak mau karena Hatta belum datang. Pukul 10.00 kurang 10 menit Hatta tiba dan masuk ke kamar. Sukarno masih terbaring ditemani Fatmawati. Sukarno mengenakan pakaian serba putih. Upacara berlangsung sederhana tanpa protokol.

Femberitaan berbeagai media yang
memberitakan suksesi Indonesia
pada awal kemerdekaan (Sumber:
Perpustakaan Nasional RI)



Di dalam mobil Soekarno, Moh. Hatta, (kursi kanan belakang) dengan
dan Amir Syarifuddin, pada awal tahun
kemerdekaan, 1945 (Sumber: KITLV)





Presiden Sukarno, dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Sutan Syahrir pada kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada tahun 1947 (Sumber: KITLV).



Amir Sjarifoeddin (dilihat dari belakang) berbicara pada Kongres Pemuda untuk seluruh Asia ke Yogyakarta yang dihadiri oleh Presiden Sukarno, 15 Oktober 1946 (Sumber: KITLV).

Istriku telah membuat sebuah bendera dari dua potong kain. Sepotong kain putih dan sepotong kain merah. Ia menjahitnya dengan tangan. Inilah bendera resmi yang pertama dari Republik. Tiang benderanya berupa batang bambu panjang yang ditancapkan ke tanah beberapa saat sebelum itu. Latief Hendraningrat mengambil bendera dan mengikatkannya di tiang bendera yang kusut dan mengibarkannya. Tidak ada musik, setelah bendera dikibarkan dinyanyikanlah Indonesia Raya.

Berita proklamasi segera menyebar ke seluruh daerah karena disiarkan melalui radio, pamflet, dan selebaran yang diedarkan sambung-bersambung.

Pada rapat tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah proklamasi, PPKI menerima naskah Undang-Undang Dasar setelah beberapa amandemen kecil tetapi fundamental dibuat. Tujuh kata dari Pembukaan UUD (dengan kewajiban umat Islam menjalankan syariah agamanya) dihapus dan diganti dengan kata-kata "yang Maha Esa" di belakang kata "Ketuhanan". Ditetapkan pula bahwa negara yang baru diproklamasikan itu adalah sebuah negara kesatuan yang demokratis dengan sistem pemerintahan presidensial. Maka pemilihan presiden dan wakil presiden pun dilakukan. Selanjutnya disusun

Rakyat kami senang sekali pada lambang-lambang. Jadi kuperintahkan membuat 10 juta bendera Merah-Putih kecil dari kertas untuk dibagi-bagikan oleh kurir ke pelosok-pelosok terpencil di tanah air. Ini membuat rakyat di pulau-pulau yang jauh dari Jakarta suatu perasaan bahwa mereka bagian dari perjuangan bangsanya. Pada 1 September aku menetapkan supaya setiap warganegara Republik memberi salam kepada orang lain dengan mengangkat tangan, membuka lebar kelima jarinya sebagai pencerminan dasar Negara dan meneriakkan MERDEKA

pula alat perlengkapan negara lainnya, yaitu membentuk kementerian, provinsi, komite nasional Indonesia. Setelah itu PPKI yang telah bekerja keras bubar dengan sendirinya. Tanggal 19 September 1945 Sukarno berpidato di hadapan massa yang menyemut di lapangan IKADA.

REVOLUSI KEMERDEKAAN TELAH BERMULA

Presiden dan Wakil Presiden menghadapi saat-saat yang sulit di awal kemerdekaan. Tentara Sekutu, sang pemenang dalam Perang Pasifik, dengan diboncengi intel Belanda mulai memasuki Jakarta dan kemudian kota-kota lainnya. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta.



Tampak dari sebuah kapal Inggris situasi pertempuran di Surabaya 10 November 1945. Tembakan meriam meninggalkan bubungan asap tebal (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

Pada tanggal 10 November 1945, Sekutu melakukan pengeboman dan penembakan besar-besaran di Surabaya. Negara yang baru memerdekakan diri ini telah resmi berada dalam suasana perang. Karena itulah peristiwa itu dikenang sebagai hari pahlawan. Dan ternyata kota-kota lain di Indonesia juga diserang secara besar-besaran pula.

Pukul 06.00 sore, tanggal 3 Januari 1946, serangkaian kereta sengaja digelapkan berhenti tanpa suara di belakang rumah Presiden Sukarno. Diam-diam rombongan masuk ke gerbong kereta. NICA memeriksa semua kereta api yang keluar masuk stasiun. Gerbong yang ditumpangi rombongan Presiden tidak disambungkan dengan gerbong yang lain dan dibiarkan gelap. Gerbong itu dibuat seolah-olah terpisah dari gerbong yang ada di depannya, sehingga bisa lolos dari pemeriksaan NICA.

Tentara Sekutu/Inggris dan NICA lelah juga menghadapi keberanian laskar rakyat dan kedisiplinan tentara resmi Republik Indonesia (mula-mula Badan Keamanan Rakyat, kemudian TKR, dan akhirnya TNI). Kemudian satu per satu sejumlah kota mulai jatuh di bawah kekuasaan tentara Belanda. Sementara itu, dunia pun sudah mengetahui tentang perjuangan kemerdekaan yang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk mengatasi situasi yang semakin tegang pimpinan tentara Sekutu/Inggris memaksa agar kedua belah pihak yang bersengketa menempuh jalan perundingan. Setelah beberapa pertemuan informal dilakukan, akhirnya

Tetapi Republik dilahirkan dengan risiko. Setiap gerakan revolusioner menghendaki keberanian. Dan begitulah, di malam gelap tanpa bulan tanggal 4 Januari 1946, kami membawa bayi Republik Indonesia ke ibukotanya yang baru, Yogyakarta.

di bawah pengawasan Sekutu, delegasi Indonesia di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahir dan Ketua Delegasi Belanda memaraf naskah persetujuan Linggajati pada tanggal 10 November 1946. Meskipun dalam persetujuan Linggajati disepakati Pemerintah Republik Indonesia hanya berkuasa defacto di Jawa dan Sumatra, optimisme akan kembalinya kesatuan bangsa dan negara tetap besar.

Perdamaian sementara ini dimanfaatkan Presiden Sukarno dengan sangat efektif. Ia, sang Presiden dari sebuah negara yang merdeka, berkeliling mengunjungi daerah-daerah Republik di Jawa dan Sumatra, bahkan sampai ke Aceh. Ke mana pun ia pergi rakyat setempat menyambutnya dengan penuh kecintaan. Di mana pun ia sempat menyampaikan pidatonya, semangat perjuangan rakyat pun semakin memanas. Kunjungannya di masa revolusi ini selalu diingat dengan penuh rasa nostalgia oleh masyarakat setempat, bahkan juga ketika konflik daerah dengan pemerintah pusat masih terasa, sampai kini pun kunjungannya ke Aceh di masa revolusi ini masih hidup dalam kenangan.

Setelah persetujuan Linggajati Pemerintah Republik Indonesia semakin intensif melakukan diplomasi. Ketika itulah India, Mesir, dan negara-negara Arab semakin tegas menyatakan dukungan mereka pada Republik Indonesia. Di lain pihak Belanda melanjutkan politik pecah belahnya. Hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda, yang masih merasa sebagai pemilik Hindia Belanda,



Penurunan bendera merah putih biru oleh arek-arek Surabaya di puncak hotel Yamato. Setelah warna birunya disobek dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih pada peristiwa perebutan kekuasaan 19 September 1945. (Sumber: ANTARA).



Pertempuran di Bandung, pada 23 Maret 1946, yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran melawan Belanda juga terjadi di kota-kota lain (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

semakin hari bertambah tegang dan panas. Belanda menyadari bahwa bangsa Indonesia sedang berlomba dengan waktu. Suasana *ceasefire* berlangsung lama, berarti memberi kesempatan kepada Republik Indonesia untuk berkonsolidasi, yang berarti keberhasilan Republik. Pada tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda melancarkan Agresi militer besar-besaran. Beberapa daerah dan kota diserbu dan diduduki. Hanya intervensi PBB yang menghentikan, kembali kemeja perindungan. Kedua belah pihak yang bersengketa kembali berunding. Perdana Menteri Amir Sjarifudin yang menggantikan Sjahrir, memimpin delegasi Republik berunding di kapal Renville. Hasil perundingan Renville dianggap sangat merugikan Republik Indonesia, karena TNI harus keluar dari wilayah yang telah diduduki tentara Belanda. Atau, dengan istilah teknisnya, angkatan bersenjata Republik harus berada di luar garis van Mook. Karena itu pasukan Divisi Siliwangi harus keluar dari wilayah Jawa Barat. *Long march* Divisi Siliwangi pun terjadi dan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Akibat langsung dari perundingan itu ialah terjadinya krisis internal Republik. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNI-P), yang berperan sebagai parlemen sementara, mengajukan mosi tidak percaya pada kabinet Amir Syarifuddin. Dengan jatuhnya kabinet itu maka Presiden Sukarno mengambil keputusan drastis. Ia menunjuk Wakil Presiden Hatta sebagai formatir kabinet dan pejabat Perdana Menteri. Maka Kabinet Hatta pun memulai program penyederhanaan dan rasionalisasi organisasi pertahanan. Dalam suasana inilah peristiwa Madiun meletus pada September 1948.

Kekecewaan Amir Sjarifuddin yang kehilangan kedudukan sebagai Perdana Menteri dan kenekatan Muso yang baru pulang dari Uni Soviet menjadi pemicu terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Keberhasilan pemerintah menyelesaikan peristiwa Madiun memberi pertanda bagi Dunia Barat bahwa revolusi Indonesia bukanlah seperti yang dipropagandakan Belanda. Revolusi Indonesia adalah letupan nasionalisme, bukanlah pemberontakan hasutan



Suasana perundingan Linggarjati pada Maret 1947, Prof. Schemerhorn, sebagai Ketua Delegasi Belanda dan Perdana Menteri Sutan Syahrir sebagai ketua delegasi Indonesia (Sumber: ANTARA/IPPHOS).



Perundingan di atas kapal Renville dengan ketua delegasi Indonesia PM Amir Syarifudin – 1947 (Sumber: IPPHOS).

komunisme. Tak lama setelah peristiwa Madiun, tentara Belanda melancarkan agresi militer yang kedua.

Minggu pagi tanggal 19 Desember 1948. Pesawat tempur berputar-putar di atas kota Yogyakarta. Semula rakyat merasa bangga karena menduga Republik telah mempunyai pasukan dan pesawat tempur yang hebat. Tetapi pada pukul 05.30 tiba-tiba saja pesawat-pesawat terbang itu menembakkan peluru dan menjatuhkan bom-bom.

Dalam situasi yang mencekam ini Presiden Sukarno dan Wakil Presiden/Perdana Menteri Hatta sempat mengirim dua buah telegram kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang sudah beberapa waktu berada di Bukittinggi dan kepada dr. Sudarsono yang menjadi wakil RI di New Delhi. Sjafruddin diberi mandat mendirikan pemerintah darurat dan Sudarsono diberi hak untuk melakukan hal yang sama seandainya Sjafruddin gagal.

Di bawah ancaman pesawat terbang Belanda yang menjatuhkan bom dan menurunkan tentara payungnya, Presiden Sukarno dan beberapa pemimpin sipil memutuskan tetap tinggal dalam kota. Mereka melihat jalan diplomasi

Perintah Sukarno yang terakhir sebelum ditangkap Belanda adalah memanggil Mutahar ke kamar pribadinya. "aku memberikan tugas kepadamu. Dalam keadaan yang bagaimanapun, aku memerintahkan kepadamu untuk menjaga bendera kita dengan nyawamu. Ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Di satu waktu, insya Allah, engkau harus mengembalikannya kepadaku sendiri dan tidak kepada siapa pun, kecuali kepada orang yang menggantikanku. Andaikata engkau meninggal dalam upaya menyelamatkan bendera ini dan dia kemudian harus menyerahkannya ke tanganku sendiri sebagaimana engkau harus mengerjakannya.



Presiden Sukarno dan Haji Agus Salim ketika beristirahat di Prapat tepi Danau Toba. Pada agresi militer Belanda kedua (1948) ibukota Yogyakarta diduduki. Beberapa tokoh ditangkap dan diasingkan (Sumber: KITLV).



Presiden Sukarno (tengah), Wakil Presiden Mohammad Hatta (kiri) dan Menteri Luar Negeri Haji Agoes Salim (2 dari kanan) dideportasi dari Yogyakarta selama agresi kedua, 1948 (Sumber: KITLV).

akan lebih menguntungkan, sebaliknya Panglima Besar Soedirman yang sedang sakit melihat pertempuran terbuka satu-satunya alternatif yang tersedia. Ia dengan pasukan kecil pengawal mengungsi melanjutkan perang gerilya. Begitulah pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta jatuh ke tangan tentara Belanda. Mereka pun menangkap para pemimpin sipil Republik yang berkumpul di istana negara. Tentara Belanda mengasingkan Sukarno, Sjahrir, dan Haji Agus Salim ke Brastagi kemudian ke Prapat, sebuah tempat peristirahatan di tepi Danau Toba. Wakil Presiden/Perdana Menteri Hatta dan beberapa orang menteri diasingkan ke Bangka. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dibiarkan terpencil di dalam keratonnya. Sultan memainkan peran sebagai penghubung antara para gerilyawan dan dunia luar.

Dua hari setelah ibukota Republik diduduki tentara Belanda, Sjafruddin dan beberapa pemimpin Republik dan daerah yang kebetulan sedang berada di Bukittinggi segera bertindak. Dari sebuah kampung dekat perkebunan teh, Halaban, mereka mengumumkan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), meskipun mereka belum tahu bahwa Presiden dan Wakil Presiden/Perdana Menteri telah mengirimkan perintah untuk melakukan hal ini. Dengan berdirinya PDRI maka pendudukan Yogyakarta serta penangkapan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan tentara Belanda sama sekali tidak berarti lenyapnya eksistensi Republik.

Seketika masyarakat dunia mengetahui bahwa tentara Belanda telah melancarkan agresi besarnya. Dewan Keamanan PBB mendesak penghentian segera tembakan-menembak dan menekan agar perundingan Indonesia-Belanda dilanjutkan kembali. Dalam perjalanan waktu ternyata tidak mudah menerima desakan PBB. Para pemimpin Republik yang sudah dipindahkan ke Bangka, menunjuk Mohammad Roem sebagai wakil Indonesia bertemu dengan wakil Belanda. Tembakan-menembak pun berhenti dengan ditandatanganinya Perjanjian Roem-Royen dan "Yogya Kembali" pun menjadi realitas. Persiapan Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai sarana untuk mengakhiri konflik Indonesia-Belanda mulai dilakukan. Dalam masa persiapan ini Bung Karno mendapat kesempatan berpidato dalam konferensi Inter-Indonesia yang diadakan untuk menyamakan visi dan sikap delegasi Republik dengan "negara-negara federal" sebagai negara yang didirikan Belanda.

Akhirnya KMB diadakan di Den Haag. Di bawah observasi PBB tiga kesatuan politik, yakni Republik Indonesia (dipimpin Perdana Menteri Mohammad Hatta), negara-negara federal, dan pemerintah Belanda, berunding di Den Haag sejak 23 Agustus sampai 31 Oktober 1949. KMB berhasil membuat sekian banyak keputusan yang secara teoretis mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Belanda mengakui kedaulatan RIS, sebuah negara federal yang terdiri atas Republik Indonesia dengan ibukota Yogyakarta dan negara-



Atas: Wisma Ranggani di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, tempat Presiden Sukarno, dan tiga tokoh pejuang lain diasingkan antara tahun 1948 hingga 1949 (Sumber: ANRI).

Kanan: Presiden RIS Ir. Sukarno dan rombongan mendarat di lapangan terbang Kemayoran dengan pesawat GIA tiba di Jakarta dari Yogyakarta pada 16 Desember 1949 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

negara federal bentukan Belanda. RIS harus membayar hutang perang, meskipun itu perang kolonial yang dilakukan Belanda. Sementara itu status Irian Barat masih harus diperundingkan lagi.

Setelah melalui perdebatan yang hangat, akhirnya pada 15 Desember 1949 KNIP meratifikasi hasil KMB. Ketika persetujuan KNIP itu didapatkan, Bung Karno sempat berkomentar, "Kalau KMB tidak disetujui, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Keesokan harinya ia dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Mr. Assaat, Ketua KNI-P, sesuai dengan konstitusi (UUD 1945) diangkat sebagai *Acting* Presiden Republik Indonesia, wilayah yang menjadi sebuah negara bagian RIS. Pada tanggal 27 Desember Ratu Juliana secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia (resminya menyerahkan *souvereniteit overdracht*) kepada Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta, di Den Haag. Sementara di Jakarta Wakil Mahkota Kerajaan Belanda Lovink menyerahkan kedaulatan kepada wakil RIS, Sultan Hamengkubono IX. Setelah itu bendera "tiga warna" diturunkan dan Sang Saka Merah Putih dinaikkan di bekas gedung kebesaran Gubernur Jenderal itu. Gedung itu kini bernama Istana Merdeka.

MEMBANGUN RUMAH INDONESIA

Tanggal 28 Desember 1949 Bung Karno dengan rasa penuh kemenangan kembali ke Kota Proklamasi, Jakarta. Dalam waktu semalam dua buah pesawat KLM milik



Belanda dicat kembali dengan lambang Garuda. Pada pukul 11.40 pesawat mendarat di lapangan terbang Kemayoran. Yang pertama keluar adalah pengawal kehormatan yang membawa Sang Merah Putih, bendera pusaka yang telah dijahit kembali oleh Mutahar mengikuti lubang jarumnya yang asli. Ribuan penduduk Jakarta menyambut kedatangan Presiden Sukarno, "Hidup Bung Karno! Merdeka!" Banyak di antara penyambut yang pingsan dan terluka karena berdesak-desakan. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia Serikat yang baru dilantik dua hari yang lalu di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, tidak pernah bisa melupakan sambutan yang penuh rasa kemenangan dan persatuan itu. Hari itu ia bukan saja seorang Presiden dari sebuah negara yang berdaulat, tetapi juga personifikasi otentik dari kemerdekaan bangsa.

Ketika memasuki Istana Merdeka, Presiden Sukarno tertegun sejenak. Ia melihat bangunan putih yang kosong melompong. Semua perabotan telah dibawa dan dihancurkan. Kaca-kaca dipecahkan, begitu juga lampu dan



Presiden Sukarno terbaring santai membaca di Istana Merdeka, Jakarta tahun 1950 (Sumber: KITLV).



Presiden Sukarno di meja kerjanya di Istana Merdeka, Jakarta tahun 1950 (Sumber: KITLV).

bahkan engsel pintu. Beranda depan pun sudah dirobokkan. Demikian pulalah kondisi bangsa ketika akhirnya kemerdekaan telah didapat dengan "darah dan airmata".

Krisis politik internal dan dorongan masyarakat menyebabkan negara-negara federal pun tidak lama bertahan. Mula-mula Negara Pasundan melepaskan diri, kemudian disusul oleh daerah lainnya. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno mengumumkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada sidang gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Pada tanggal 17 Agustus 1950 NKRI pun resmi terwujud kembali. Sukarno menjabat Presiden dan Hatta menjabat Wakil Presiden NKRI. UUD Sementara tahun 1950 menjadi landasan konstitusional dari sistem demokrasi parlementer.

DEMOKRASI TERPIMPIN: SUATU PROSES PENCARIAN FORMAT PEMERINTAHAN

Tahun 1950-an bukan saja suatu periode yang penuh gejolak secara kultural dan politik, tetapi juga saat ketika kehidupan bangsa sedang diwarnai oleh entusiasme dari negara yang baru mengecap kemerdekaan nasional. Dalam periode ini para politisi dari berbagai partai dengan ideologi yang beraneka-ragam saling bersaing atau saling beraliansi untuk mendapatkan jatah dalam pembagian kekuasaan, sementara nasib para mantan pejuang harus diselesaikan

oleh negara. Ketika ini pulalah Darul Islam (DI), yang mula-mula muncul di Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan, menyatakan kehadirannya dan menentang pemerintah nasional yang sah. Di saat itu pula Republik Maluku Selatan (RMS), yang diproklamkan oleh seorang mantan menteri NIT dan didukung oleh bekas KNIL, mengumumkan kehadirannya dan menjadikan Ambon sebagai ibukota.

Dalam suasana itulah pada bulan September 1955 Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota parlemen diadakan. Pada bulan Desember diselenggarakan pula pemilihan anggota Dewan Konstituante yang akan membuat UUD baru. Pemilu 1955 menghasilkan empat besar, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdathul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara PSI, Parkindo, Partai Katholik, dan lain-lain tampil sebagai partai-partai kecil. Di samping wakil-wakil partai politik dan perseorangan yang terpilih, terdapat 30 orang wakil golongan minoritas. Mereka terdiri atas 12 wakil keturunan Tionghoa, 12 wakil golongan Indo Eropa, dan enam orang mewakili wilayah yang masih diduduki Belanda, yaitu Irian Jaya (Irian Barat).

Jumlah keseluruhan anggota Konstituante yang terpilih dalam pemilihan umum 1955 sebanyak 514 orang. Di antara mereka terdapat juga anggota partai politik, wakil golongan, dan aliran. Tetapi kalau diperhitungkan jumlah kursi dan



Suasana kampanye partai peserta Pemilu pertama tahun 1955 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

Kanan: Presiden Sukarno mengikut Pemilu pertama pada 29 September 1955 (Sumber: IPPHOS).



Demokrasi Indonesia yang banyak disalahpahami di luar negeri, kami dasarkan pada prinsip mufakat, bukan pada jumlah suara. Kami tidak lagi memakai sistem demokrasi barat yang didasarkan atas suara terbanyak dimana 51 persen suara berhak untuk menang sementara yang 49 menggerutu.

sikap ideologis, maka sejak semula sudah dapat diduga bahwa tidak ada satu pun di antara blok-blok itu bisa meraih mayoritas dua per tiga (360 kursi) yang diperlukan untuk mendapatkan kemenangan.

Begitulah Pemilu ini ternyata tidak dapat mengantarkan bangsa ke arah penyelesaian dari berbagai permasalahan sosial-politik. Hasil Pemilu memperlihatkan hanya Masyumi, partai kedua terbesar, yang mendapatkan kursi di semua daerah pemilihan. Di sebagian besar daerah Masyumi tampil juga sebagai partai terbesar. Tiga partai besar lainnya, yaitu PNI, NU, dan PKI lebih menampilkan diri sebagai "partai Jawa", karena di daerah pemilihan di Jawa inilah mereka mendapat suara terbanyak. Dengan komposisi keanggotaan yang tak jauh berbeda, masalah lain muncul di Dewan Konstituante. Perdebatan ideologis dalam menentukan pilihan dasar negara Islam atau Pancasila mulai dan semakin menghangat. Dalam suasana inilah Bung Hatta memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai Wakil

Presiden. Ia melihat betapa Presiden Sukarno semakin gelisah menghadapi pertarungan politik antarpantai-partai sehingga membiarkan dirinya terbawa dalam irama perdebatan politik dan ideologi itu.

Dalam kegalauan politik yang semakin meningkat ini kabinet Ali Sastroamidjojo, yang didukung oleh tiga besar hasil Pemilu, mengembalikan mandatnya. Pertentangan politik dan ideologi menghambat usaha pemecahan masalah di beberapa daerah. Kabinet Djuanda akhirnya terbentuk. Pada bulan Mei 1957 Presiden menjalankan konsepsinya dan Dewan Nasional—yang berfungsi sebagai perantara dan penasihat dari tiga kelembagaan konstitusional, yakni presiden, kabinet, dan parlemen—pun dibentuk.

DEMOKRASI TERPIMPIN DAN REVOLUSI TANPA HENTI

Sejak partai-partai yang dianggap menentang orientasi ideologis dan politiknya dibubarkan, Presiden Sukarno yang memperkenalkan dirinya sebagai "Penyambung Lidah Rakyat" mulai dengan terang-terangan mengatakan bahwa Demokrasi Terpimpin didukung oleh kekuatan dan persatuan NASAKOM: nasionalisme, agama, dan komunisme.

Manifesto Politik, yang disarikan dari pidato Presiden pada Hari Kemerdekaan (1959), menjadi landasan ideologis dalam menjalankan pemerintahan. Sejak itu Indonesia bukan saja mulai menerapkan sistem pemerintahan yang otentik, kepribadian nasional, tetapi juga kembali ke semangat



Pelantikan Dewan Konstituante oleh Presiden Sukarno, pada 10 November 1956 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

revolusi. “*Onwards, ever onwards*” menjadi slogan dalam negara dan bangsa yang sedang melangkah menuju masa depan yang penuh tantangan. Indonesia yang masih berada dalam dinamika revolusi adalah Indonesia yang berada dalam irama “menghancurkan, membangun, *retooling*, *herordering*” yang tanpa henti. Revolusi Indonesia adalah revolusi multikompleks yang juga bisa dikatakan sebagai *a summary of many revolutions in one generation*. Dalam suasana serba-revolusi inilah Bung Karno menampilkan dan menamakan dirinya sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Indonesia yang mempunyai kepribadian adalah bangsa yang mendasarkan kehadiran dan kehidupannya pada Pancasila, tetapi pelaksanaan harian dari ideologi yang esensial ini diuraikan dalam MANIPOL-USDEK, yang bertolak dari berbagai ajaran yang pernah disampaikan Bung Karno. Manipol adalah Manifesto Politik, yang disarikan dari pidato 17 Agustus yang rutin disampaikannya setiap tahun. Sementara USDEK adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional. Manipol-USDEK inilah yang dijadikan sebagai bahan utama program indoktrinasi. Ketika kedudukan Demokrasi Terpimpin semakin mantap maka ketika itu pulalah “indoktrinasi” warga dijalankan. Dengan indoktrinasi maka proses *nation building* dan *character building* akan lebih mungkin berjalan lancar.

Sementara itu DEPERNAS (Dewan Perencanaan Nasional) di bawah pimpinan Mohammad Yamin mulai pula membuat

rancangan Pembangunan Semesta Berencana, terdiri atas bab-bab dan pasal-pasal yang menyalin angka keramat, 17, 8, dan 1945. Demokrasi Terpimpin juga sebuah dunia politik yang memberikan keseimbangan antara realitas empiris dan simbol-simbol yang inspiratif.

Trilogi sejarah yang merefleksikan perjalanan sejarah bangsa yang romantis segera diwujudkan. Kemerdekaan bangsa yang telah tercapai, belumlah berarti tercapainya “masa depan yang gemilang”, tetapi barulah bangsa sedang berada di atas “jembatan emas”. Untuk sampai ke seberang, ke wilayah kegemilangan bangsa, keterpaduan dari tiga hal menjadi suatu kemestian. Dalam mengayunkan langkah ke depan ikatan dari *nationale geest* (jiwa nasional), *nationale wil* (cita-cita nasional), dan *nationale daad* (perbuatan nasional) adalah suatu trilogi keharusan yang tidak bisa dielakkan.

Bertolak dari kesadaran bahwa kegemilangan dalam kehidupan bangsa hanya mungkin tercapai jika bertolak dari strategi yang menyeluruh dan mendasar maka Bung Karno pun memperkenalkan trilogi baru. Ketiganya merupakan landasan bagi sistem dialog negara dan bangsa dalam berhadapan dengan dunia internasional. Ketiga strategi dan bahkan pola dasar dalam sistem perilaku bangsa dan negara ialah “berdaulat dalam politik”, “berdikari dalam ekonomi”, dan “berkepribadian dalam kebudayaan”. Inilah TRISAKTI BUNG KARNO, yang dijalankan berdasarkan prinsip dan strategi RESOPIM: revolusi, sosialisme, dan pimpinan.

Presiden Sukarno membacakan dekrit presiden 5 Juli 1959 di istana negara (Sumber: IPPHOS).



Dalam suasana kebangkitan kesadaran politik-ideologis ini Presiden sangat memperhatikan arti Indonesia dalam konstelasi politik internasional. Pada tahun 1956, setelah melakukan lawatan ke Amerika Serikat yang disambut dengan penuh keramahtamahan, Presiden Sukarno melakukan lawatan ke Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Sepulangnya dari lawatan itulah Sukarno mulai memperkenalkan Demokrasi Terpimpin. Dalam penilaian Amerika Serikat, di bawah kepresidenan kaum Republik yang sedang terpaku pada pendekatan dunia yang terbagi atas Blok Barat dan Blok Timur, Indonesia semakin mendekat ke Blok Timur. Mereka menganggap Demokrasi Terpimpin adalah panji lain dari komunisme. Pers Amerika segera berbalik menentang kebijakan Sukarno.

SUKARNO DAN TATANAN POLITIK GLOBAL

Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 adalah awal dari keterlibatan langsung Presiden Sukarno dalam kancah pergolakan kemerdekaan Asia-Afrika.

Dalam pidatonya pada saat konferensi Asia Afrika Sukarno menyatakan:

"... Kita harus menggunakan kesempatan ini, sebab kalau tidak, kita kehilangan kesempatan ini, kita tidak akan mendapatkannya lagi kembali. Suatu Asia baru dan suatu Afrika baru telah timbul. Marilah kita membangun dunia kembali!

Marilah kita menciptakan suatu dunia baru tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Marilah kita membangun suatu dunia baru tanpa imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme. Maju, pantang mundur! Sekali maju, tak akan mundur!"

Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang pernah digariskan di masa revolusi tidak dibiarkan hanya berfungsi sebagai landasan untuk menghadapi persaingan Blok Barat, yang praktis di bawah pimpinan Amerika Serikat, dan Blok Timur, yang berada di bawah dominasi Soviet Rusia. Untuk mengatasi persaingan kekuatan kapitalis dan komunis, Presiden Sukarno tampil sebagai salah seorang pemimpin yang disegani dalam Gerakan Non-Blok. Dalam perkembangan selanjutnya Gerakan Non-Blok, yang berawal dari ikatan solidaritas Asia-Afrika, melebarkan sayap ke Amerika Latin. Sejak itu Sukarno, Tito (Yugoslavia), dan Jawaharlal Nehru (India) semakin aktif membina kerjasama Dunia Ketiga. Bagi Sukarno nasionalisme adalah mesin yang menggerakkan dan mengawasi semua kegiatan internasional, sebab nasionalisme adalah sumber inspirasi agung dari kemerdekaan. Jika di Barat nasionalisme berkembang sebagai kekuatan yang agresif dan ekspansionis demi keuntungan ekonomi nasional maka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, nasionalisme adalah gerakan pembebasan dari imperialisme dan kolonialisme. Nasionalisme di Dunia Ketiga adalah jawaban terhadap penindasan nasionalisme yang bersumber di Eropa.



Kanan: Pemberitaan koran Pikiran Rakjat Bandung yang memberitakan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (Sumber: ANRI).

Ditempa oleh semangat revolusi yang semakin mewarnai pemikiran politiknya itu Presiden Sukarno tidak lagi melihat Indonesia dan Asia-Afrika sebagai kelompok yang terjepit antara persaingan Blok Barat dan Blok Timur. Ia bahkan melihat dunia sebagai pentas tempat terjadinya persaingan yang tanpa kompromi dari dua kekuatan besar. *The New Emerging Forces* (NEFOS) menjadi kekuatan penyeimbang dari negara *The Old Established Forces* (OLDEFOS), yaitu negara-negara maju yang telah mapan dan berada dalam dua blok: Blok Barat dan Blok Timur. Maka pada tahun 1959 ia pun mengatakan:

"... Saudara-saudara, kita berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana terdapat keadilan dan kemakmuran untuk semua orang. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana kemanusiaan dapat mencapai kejayaannya yang penuh

Dalam hubungan internasional pun kemerdekaan merupakan suatu jembatan, suatu jembatan untuk perjuangan bangsa-bangsa bagi persamaan derajat, untuk pembentukan bangsa-bangsa dan negara-negara sehingga sanggup berdiri di atas kaki sendiri, politis, ekonomis dan dalam cara lain apa pun: suatu jembatan untuk keadilan antar-bangsa"

Pada Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960, Presiden Sukarno menyampaikan pidato berjudul "*To Build the World a New*". Dalam pidato itu ia mengecam kinerja dan struktur PBB yang didominasi negara-negara Barat dan mengabaikan keberadaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam usaha memperbaharui tata kehidupan dunia, katanya, prinsip persamaan dan kedaulatan semua bangsa haruslah menjadi pegangan. Itu berarti diakuinya hak asasi manusia dan hak-hak asasi nasional. Sukarno mencita-citakan terwujudnya PBB yang sukses dan efektif. Tetapi pengucilan suatu negara besar seperti Tiongkok akan menggagalkan perwujudan cita-cita itu. Mengucilkannya satu bangsa, apalagi

Searah jarum jam: Tampak beberapa kepala negara dan delegasi Konferensi Asia Afrika Bandung (KAA) 18 - 24 April 1955 berjalan menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri pembukaan konferensi (Sumber: ANTARA/IPPHOS). Suasana Konferensi Asia Afrika Bandung (KAA) tanggal 18 - 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung (Sumber: ANTARA/IPPHOS). Presiden Sukarno dan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser dalam Konferensi Asia Afrika Bandung (KAA) tanggal 18 - 24 April 1955 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).



Searah jarum jam: Presiden Sukarno dan putranya, Mohammad Guntur, di Gedung Empire State di New York tahun 1956 (Sumber: KITLV). Presiden Sukarno menerima gelar doktor kehormatan dari University of Michigan tahun 1956 (Sumber: KITLV). Presiden Sukarno tiba di bandara Karachi, Pakistan. Didampingi oleh Presiden Pakistan, Iskander Ali Mirza, Sukarno tampak sedang memberi hormat, diapit oleh bendera Indonesia dan bendera Pakistan (25 Januari 1958) (Sumber: IPPHOS).



Searah jarum jam: Kunjungan Presiden Sukarno di Uni Soviet (Rusia) pada Agustus 1956 disambut oleh pemimpin Uni Soviet, Nikita S. Khrushyev (Sumber: ANTARA/IPPHOS). Presiden Sukarno saat berkunjung ke Uni Soviet (Rusia) pada Agustus 1956 (Sumber: ANTARA/IPPHOS). Presiden Sukarno dengan Presiden John F. Kennedy pada kunjungannya ke Amerika Serikat tahun 1961 dalam rangka pembicaraan krisis Kuba (Sumber: Istimewa). Kunjungan kenegaraan Presiden RI Soekarno, tg 12-18 September 1956 di Yugoslavia, saat perundingan politik antara delegasi RI yang dipimpin Presiden RI Sukarno dan Delegasi Yugoslavia yang dipimpin Presiden Josip Broz Tito bertempat di "Beli Dvor" (Istana Putih) (Sumber: Kemlu).





Presiden Sukarno bertemu dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Cina, Chou En-Lai dan para pejabat lainnya tahun 1955. (Sumber: Tong Djoe)

seperti RRT yang besar, hanya akan melemahkan organisasi internasional ini.

Dinamika politik dunia akhirnya membenarkan wawasan internasional Presiden Sukarno. RRT bukan saja diterima sebagai anggota, namun juga sebagai satu dari lima anggota Dewan Keamanan PBB di samping Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia.

Sukarno mengemukakan keras imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Ia melihat ketiganya sebagai sumber semua kejahatan internasional yang mengancam dunia dan yang menjauhkan dunia dari perdamaian. Ia mengemukakan keras percobaan senjata nuklir serta mendorong penundaannya, juga mendorong pelaksanaan perlucutan senjata. Sukarno menganjurkan sebaiknya uang hasil perlucutan senjata digunakan untuk pembangunan negara-negara yang sedang bangkit. Gagasan yang dilansir Presiden Sukarno ini ternyata menjadi isu utama dunia internasional pasca perang dingin.

Betapapun besar kekagumannya pada *"The Declaration of American Independence"* dan *"Manifesto Komunis"*, tetapi di Sidang Majelis Umum PBB Sukarno menyatakan ketidaksetujuannya pada pembagian umat manusia ke dalam dua golongan. Sukarno menegaskan bahwa Indonesia tidak mengikuti konsepsi liberal ataupun konsepsi komunis. Betapapun Indonesia telah mengambil sari-sari kearifan dari keduanya.

Dalam pidatonya di PBB itu Bung Karno menyatakan juga kearifan politik bebas-aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Bebas artinya menentukan jalan sendiri dan aktif bergerak ke arah terwujudnya perdamaian dunia dengan menjalin persahabatan dengan segala bangsa. Maka Sukarno pun memperkenalkan prinsip yang berada di luar kedua aliran itu, yaitu "Pancasila".

Begitulah Indonesia, dengan dukungan delegasi-delegasi Ghana, India, Republik Persatuan Arab (UAR), dan Yugoslavia, mengajukan resolusi penataan peranan PBB agar benar-benar dapat berfungsi bagi tercapainya perdamaian dunia dalam suasana persaudaraan yang memungkinkan semua bangsa dapat hidup dalam kedamaian yang kokoh, kuat, dan sehat.

PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Sejak terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah Irian Barat tidak sekalipun lepas dari perhatian Presiden Sukarno. Kerenggangan politik antara Presiden Sukarno dan Mohammad Natsir (Masyumi), Perdana Menteri pertama (1950-1951) Negara Kesatuan, bermula dari perbedaan persepsi politik dalam mengatasi "masalah Irian Barat". Presiden Sukarno selalu berada di pihak yang radikal dalam usaha pemecahan masalah nasional yang sangat sensitif itu. Baginya masalah Irian Barat bukanlah sekadar wilayah yang masih berada di

Rapat Raksasa menuntut pembebasan Irian Barat 30 Desember 1961 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).



tangan kolonialis, tetapi juga menyangkut harga diri dari sebuah negara-bangsa yang berdaulat.

Pada akhir tahun 1961 Presiden memperkenalkan dan bahkan memerintahkan TRIKORA (Tiga Komando Rakyat), yaitu (1) gagalkan pembentukan negara Papua; (2) kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat; dan (3) bersiap melakukan mobilisasi umum. Keluarnya Trikora berarti Presiden Sukarno siap meninggalkan usaha diplomasi. Indonesia pun telah pula siap mengambil alternatif yang paling ekstrim.

Indonesia memperjuangkan pembebasan Irian Barat melalui berbagai perundingan panjang. Kebuntuan Konferensi Meja Bundar (tahun 1949) hampir terjadi karena Belanda menolak dekolonisasi Irian Barat. Hal ini hanya bisa diselesaikan dengan persetujuan bahwa pembahasan selanjutnya akan diadakan setahun kemudian.

Indonesia kemudian meminta bantuan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda mengenai soal Irian Barat. Pada saat itu, Amerika Serikat menolak memberi bantuan senjata kepada Indonesia. Sukarno akhirnya menggunakan jalan keras dalam membebaskan Irian Barat, di antaranya dengan strategi kekuatan bersenjata, misalnya aksi massa, pengerahan sukarelawan, dan penerjunan darurat di Irian Barat dengan bantuan senjata dari Uni Soviet. Aksi yang dilakukan Indonesia ini menarik perhatian Amerika Serikat.

Pada tahun 1962, Amerika Serikat menekan Belanda untuk menyelesaikan sengketa dengan syarat-syarat yang menguntungkan Indonesia.

Amerika Serikat menyadari bahwa masalah Irian Barat bisa memicu perang, karena itulah negara ini menekan Belanda. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia setelah diselenggarakan "penentuan dari kehendak rakyat". Setelah perjuangan yang begitu lama, akhirnya Belanda bersedia meninggalkan Irian Barat. Setelah pengesahan Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962, maka tanggal 5 September 1963 Irian Barat resmi diserahkan di bawah *trusteeship* PBB. Indonesia dipercaya sebagai pemelihara sampai "*the act free choise*" rakyat Irian Barat dilakukan pada tahun 1968.

Pada 1 Mei 1963 Irian Barat resmi berada di bawah pengawasan Indonesia. Bagi Presiden Sukarno, hal itu merupakan kemenangan besar. Irian Barat dikembalikan ke Republik Indonesia tanpa menggunakan kekuatan senjata. Sukses itu kemudian lebih banyak dilihat sebagai sukses strategi konfrontasi Sukarno dan bukan karena bantuan Amerika Serikat atau Uni Soviet.

DWIKORA

Jika tahun-tahun yang pernah dilalui boleh diberi nilai, maka tidak pelak lagi tahun 1962 adalah "tahun kemenangan" bagi Indonesia. Meskipun tidak menyinggung

Searah jarum jam: Pembangunan gelanggang olah raga Bung Karno dalam rangka persiapan pelaksanaan Asian Games pada 24 Agustus - 4 September 1962 (Sumber:Antara/ Djoni Litahalin). Pidato pembukaan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) dan suasana pembukaan GANEFO di Jakarta tahun 1963 (Sumber: KITLV).



Jembatan Ampera di Palembang, mulai dibangun pada April 1962 sebagai reparasi Jepang(Sumber: KITLV).



masalah kedaulatan bangsa, tetapi di tahun ini pula Indonesia mendapat kehormatan menjadi “tuan rumah” Asian Games. Meskipun sempat terjadi protes dari delegasi India karena Indonesia tidak mengundang Israel, tetapi secara keseluruhan Asian Games Jakarta adalah sebuah *success story*. Ketika inilah Stadion Utama dan kompleks olah raga Senayan yang bertaraf internasional mulai dipakai dalam *event* internasional. Pada saat Asian Games bangsa Indonesia, khususnya penduduk Jakarta, mulai berkenalan secara langsung dengan siaran televisi (TV) nasional. Pada Asian Games itu pula untuk pertama dan sampai kini terakhir kalinya tim Indonesia tampil sebagai juara kedua.

Dalam suasana yang cukup optimis ini tiba-tiba saja Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tengku Abdul Rahman mengumumkan bahwa negaranya akan tergabung dalam sebuah federasi yang terdiri atas Tanah Semenanjung Melayu, Singapura, Brunei, Sabah, dan Serawak dalam sebuah federasi yang dinamakan “Malaysia”. Federasi yang akan terbentuk itu mendapat dukungan dari Inggris (salah satu anggota utama NATO), sedangkan ANZUS (Australia, New Zeealand, United States Treaty) mempunyai basis militer di daerah yang akan menjadi bagian dari Malaysia. Indonesia merasa bahwa daerahnya akan dikelilingi oleh kekuatan Oldefos. Maka politik konfrontasi untuk menentang pembentukan Malaysia pun mulai dijalankan.

Masalah pembentukan Malaysia juga mendapat perhatian serius dari Filipina, sebab Sabah, salah satu daerah

yang akan menjadi bagian dari Malaysia, masih dianggap sebagai wilayah Kesultanan Sulu yang disewakan pada pengusaha Inggris. Kepulauan Sulu merupakan salah satu daerah bagian selatan Filipina. Sehari setelah pembentukan itu diumumkan, pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara federal yang baru berdiri itu.

Suasana konflik pun semakin mewarnai kehidupan bangsa. Pada tanggal 18 September demonstrasi besar-besaran menentang Inggris dan negara baru Malaysia terjadi di Jakarta. Kedutaan Besar Inggris hancur dibakar massa. Sementara itu suasana politik dalam negeri pun semakin memanas. Kampanye besar-besaran untuk menarik sukarelawan semakin digiatkan. Banyak juga sarjana yang dilatih untuk menjadi perwira angkatan perang. Dalam suasana politik yang semakin diwarnai semangat konfrontasi anti-Malaysia ini, pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Sukarno mengumandangkan Dwikora (Dua Komando Rakyat) dalam apel besar sukarelawan. Dwikora berisi dua perintah, yaitu (1) perbesar ketahanan revolusi Indonesia dan (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia. “Ganyang Malaysia” pun menjadi semboyan konfrontasi.

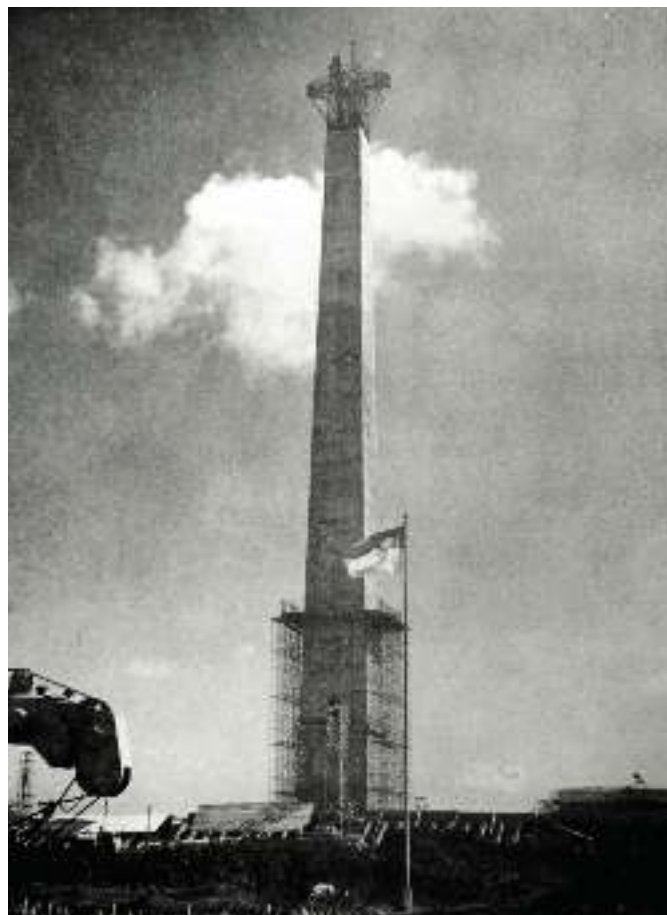
Dalam suasana konfrontasi inilah Kepulauan Riau berhasil dibebaskan dari dominasi “dollar Singapore” dan sejak itu rupiah menjadi satu-satunya alat tukar yang sah. Di Kalimantan Utara tentara Indonesia diduga melakukan infiltrasi untuk membantu pemberontakan etnis yang



Kiri atas: Susana pembangunan Hotel Indonesia pada tahun 1960 (Sumber: ANRI). Kiri bawah: Sukarno meninjau pelaksanaan pembangunan Hotel Indonesia pada 19 Oktober 1960 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).



Bawah: (kanan) Presiden Sukarno meninjau konstruksi awal pembangunan Monumen Nasional pada tahun 1959 (Sumber: Perpus. Museum Monumen Nasional). (kiri) Konstruksi akhir pembangunan Monumen Nasional yang diresmikan pada tahun 1961. (Sumber: Perpus Museum Monumen Nasional).





Presiden Sukarno bertemu dengan Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito pada Sidang Majelis Umum PBB ke-15 menyampaikan pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru" (To Build the World Anew), 30 September 1960 (Sumber: Kemlu).



Suasana Rapat Raksasa mendukung Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB 23 September 1960 (Sumber: ANRI).

menentang Malaysia. Dalam suasana inilah Malaysia mengadakan Indonesia kepada PBB, sehingga kasus Indonesia dibahas dalam Dewan Keamanan. Ketika tanggal 1 Januari 1965 Malaysia, sebagai wakil Asia, terpilih sebagai anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan, Indonesia menyatakan dirinya keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965 karena menilai PBB tidak adil dan terlalu mengutamakan negara besar, terutama Blok Barat. Meskipun demikian Indonesia tetap mempertahankan prinsip-prinsip kerja sama internasional yang tercantum dalam Piagam PBB.

Setelah keluar dari PBB, Indonesia tidak segan-segan mempererat hubungannya dengan negara-negara komunis dan menjalin kerjasama di berbagai bidang. Presiden Sukarno pun banyak berbicara tentang hubungan akrab yang terjalin dalam Poros Jakarta-Pyongyang-Hanoi-Peking. Sementara itu konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia terpencil dalam pergaulan internasional, pada hal Indonesia masih membutuhkan kerjasama dan bantuan asing dalam melancarkan roda pembangunan.

Dalam suasana inilah Presiden Sukarno semakin giat berusaha mengokohkan kerjasama dengan negara-negara yang tidak termasuk Blok Barat, terutama Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Ia pun mencanangkan akan diadakannya CONEFO (*Conference of the New Emerging Forces*). Untuk keperluan konferensi internasional ini pembangunan sebuah gedung megah pun mulai dikerjakan. Karena Indonesia menyatakan keluar dari *Olympic Games* (1964) di Tokyo, maka Indonesia mengundang negara-negara berkembang untuk ikut serta dalam GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*). GANEFO cukup sukses karena Indonesia berhasil mengundang negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk ikut serta. Keterpencilan Indonesia dari Dunia Barat mulai berakhir setelah janji perdamaian dengan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Pada tanggal 28 September tahun yang sama Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

Presiden Sukarno sedang mengamati lukisan Basuki Abdullah di Istana Negara pada bulan Oktober 1959 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).



73

SUKARNO DAN VISI KEBUDAYAAN INDONESIA

Sukarno adalah seorang presiden Indonesia yang dikenal piawai berpidato. Ia mampu menghipnotis ribuan massa pendengarnya. Pidato-pidatonya yang memukau sangat ditunggu-tunggu rakyat Indonesia yang selalu haus akan pengayaan semangat dan wawasan pada masa pergerakan nasional. Melalui kemampuannya ini ia menciptakan “psikologi revolusi” dalam sanubari bangsa. Kemampuan Sukarno berpidato diperkuat oleh cerita-cerita pewayangan, seperti cerita kepahlawanan dalam peperangan Mahabharata dan Ramayana, yang dikenalnya sejak kecil. Inilah yang menjadi medium komunikasi paling efektif dengan masyarakat umum terutama di Pulau Jawa.

Jika di masa pembuangan ia asyik bukan saja bertindak sebagai penulis naskah, tetapi juga sebagai sutradara, memilih dan melatih pemain, mendekorasi panggung, sekaligus sebagai manajer dan *marketing* pertunjukan, maka setelah menjadi Presiden ia lebih dikenal sebagai kolektor lukisan pelukis anak bangsa dan pemimpin yang asyik menikmati tari-tarian dan musik budaya bangsa. Ketika berhasil membawa bangsa “kembali ke UUD 1945”, ia pun dikenal sebagai pemimpin nasional yang paling aktif



Presiden Sukarno menerima persembahan wayang di Istana tanggal 4 Juni 1950. Tampak Sukarno sedang memainkan tokoh wayang Gatotkaca (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

Setiap pagi, dari pukul tujuh sampai sembilan, puluhan tamu yang diundang secara tidak resmi turut minum kopi. Mereka bisa para menteri, penasehat, pejabat tinggi ataupun penerbit yang baru kutugaskan untuk mencetak Injil dalam bahasa Indonesia, atau pematung yang baru saja ditunjuk membuat monumen bagi Angkatan Bersenjata atau arsitek yang minta persetujuan untuk rencana gedung bertingkat yang baru, wakil dari sejumlah kepala suku yang hendak mempersembahkan tanda kehormatan kepadaku atau bahkan dokterku yang di tengah kesibukan itu memberikan sesendok obat kepada Presidennya.

memajukan kesenian tradisional. Ia ingin kesenian tradisional yang beragam-ragam itu bisa juga dinikmati masyarakat bangsa yang sedang berada dalam proses perubahan. Ketika itulah modernisasi lagu-lagu tradisional daerah dilakukan. Maka bukan hal aneh kalau seorang pelajar yang berasal dari satu daerah tertentu dengan merdu menyanyikan lagu tradisional yang dimodernkan dari daerah lain. Periode Demokrasi Terpimpin juga akan diingat sebagai masa ketika tari pergaulan nasional diperkenalkan dan dikembangkan.

Meskipun tidak dikatakan, tetapi jelas sekali bagi Bung Karno bahwa kesenian tidaklah berhenti pada rasa keindahan. Apa pun bentuknya, entah bunyi, gerak, kata, atau bisa juga lukisan dan bangunan, kesenian baginya simbol untuk mengatakan sesuatu tentang sesuatu. Karena itulah Bung Karno memikirkan berbagai bentuk dan corak kesenian yang bisa memancarkan kontinuitas ideologis dan semangat perjuangan bangsa. Ia pun kadang terlibat langsung dalam perencanaan bangunan milik negara. Kalau hal ini terjadi, maka kaburlah batas-batas antara Sukarno sang presiden dan Sukarno sang arsitek. Bolehlah dikatakan

hampir semua bangunan baru yang didirikan pada masa pemerintahannya memperoleh sentuhan Sukarno, sang arsitek. Begitu pula halnya dengan Masjid Istiqlal, gedung Conefo yang kemudian beralih fungsi menjadi gedung DPR/MPR, gedung tambahan Bank Indonesia, dan sebagainya. Monumen Nasional tidak akan ada dan kalau pun ada mungkin berbentuk lain jika saja Bung Karno tidak merasa bahwa suatu peristiwa penting harus diabadikan.

Ketika Indonesia menerima pampasan perang maka Jakarta pun bisa membangun Hotel Indonesia yang megah dan hal yang sama bisa juga dinikmati Yogyakarta, Bali, dan pantai selatan Banten. Pembangunan jembatan Ampera yang menyeberangi Sungai Musi bukan saja menambah kemegahan kota Palembang, tetapi juga menjadi salah satu faktor dalam proses perubahan sosial di daerah.

Begitulah bagi Sukarno, penciptaan karya seni dan bentuk kreasi kultural bukan hanya hiburan tetapi juga usaha pengayaan wawasan sebagai bagian dari perjuangan. Semuanya adalah bagian esensial dalam proses *nation-building*.

Searah jarum jam: Presiden Sukarno dan Presiden Rumania Gheorghe Gheorghiu bermain musik angklung di Bandung pada 1962 (Sumber: KITLV). Presiden Sukarno berbicara-bindang dengan Ni Pollok di Sanur pada 1950 (Sumber: KITLV). Presiden Sukarno dalam kunjungan ke Universitas Gajah Mada menerima hadiah dari Prof. Dr. Sardjito yang di hadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX tahun 1955 (Sumber: KITLV), Peresmian Radio Telephone oleh Presiden Sukarno & Ibu Fatmawati & Jend. Soedirman di Yogya 17 Agustus 1949 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).





Beberapa tampilan koran Berita Yudha dan Pikiran Rakyat memuat berita peristiwa pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965 (Sumber: ANRI).

AKHIR KEKUASAANNYA

Jakarta, 1965, malam 30 September menjelang subuh 1 Oktober, enam perwira tinggi Angkatan Darat dan seorang perwira muda diculik dan dibunuh. Pada pukul 07.20, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan berita bahwa "Gerakan 30 September" (G30S) telah berhasil melindungi Presiden dari Dewan Jenderal yang berencana melancarkan *coup* kontra-revolusi pada tanggal 5 Oktober. Letkol Untung, pemimpin G30S, menyampaikan pengumuman bahwa Dewan Revolusi yang terdiri sekian banyak tokoh telah terbentuk, tetapi pengumuman itu sama sekali tidak mengatakan apa pun tentang kedudukan Presiden Sukarno.

Hari-hari yang dipadati peristiwa mengesankan dan mengerikan disertai kegalauan pikiran dan perasaan harus dilalui komunitas bangsa yang telah sekian lama didera kemerosotan ekonomi dan keterpencilan internasional. Dalam suasana yang penuh kekalutan itu kharisma yang mempesona dari Bapak Bangsa, sang Proklamator Kemerdekaan, mulai kehilangan daya pikatnya. Secara bertahap tapi pasti, Presiden Sukarno semakin tersingkir dari pusat kekuasaan yang riil. Ia masih berada di sana, di puncak kekuasaan yang formal, dan retorika serba revolusinya masih

Aku tidak mempunyai sisa uang untuk pengeluaran rumah tanggaku. Di sebuah Negara, Duta Besar kami terpaksa membeli piyama untukku. Satu-satunya piyama Presiden sudah sobek. Negara menyediakan tempat tinggal dengan cuma-cuma, bebas pemakaian listrik, empat buah mobil resmi dan tiga di dalam garasi untuk tamu Negara... Tetapi akulah satu-satunya presiden di dunia yang tidak mempunyai rumah sendiri. Baru-baru ini rakyatku menggalang dana untuk membangun sebuah gedung buatku, tapi di hari berikutnya aku melarangnya. Ini bertentangan dengan pendirianku. Aku tidak mau mengambil sesuatu dari rakyatku. Aku justru ingin memberi mereka.

dipakai, tetapi ia semakin dibiarkan berada dalam dunianya sendiri. Secara teratur sistem wacana yang dikembangkannya pun dikembalikan pada dirinya. Dan ia merasakan kepedihan yang semakin lama semakin nyeri dan pedih.

Setelah 20 tahun mengabdikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tanah air yang sejak awal diperjuangkannya, Sukarno akhirnya kembali menjalani kehidupan sebagai



Suasana wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni 1970 dan prosesi pemakaman di Blitar pada 22 Juni 1970 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

warga biasa. Kekuasaan yang diembannya harus diwariskan kepada generasi setelahnya. Pergantian generasi dan kekuasaan telah terjadi.

Semangatnya masih menyala tetapi ia sadar juga kesehatannya tidak bisa lagi berkompromi. Sukarno hanya mempunyai satu ginjal sehat yang harus dijaga dengan teliti oleh dokter, sedangkan satu ginjal lagi sudah membatu. Untuk menjaga itu, Sukarno selalu minum madu Arab setiap hari dan sepuluh vitamin setiap pagi. Dokter menyarankan agar Sukarno bisa tidur siang, tetapi ia merasa tidak bisa melakukannya. Pikirannya berpusing seperti pusaran air. Betapa pahit dan pedih ia rasakan ketika hasrat terakhir tak mungkin terlaksana. Bekerja dan berbakti untuk bangsa sampai tarikan napas terakhir tidak bisa terwujud. Dan kepedihan sangat menusuk hatinya.

Tiba-tiba dia menyadari kehampaan materi yang dimilikinya. Setelah berpuluh-puluh tahun berjuang, ternyata ia tidak mempunyai rumah yang bisa dikatakan miliknya. Tidak mempunyai tabungan dan mobil.

Doa dan harapan Sukarno hanya satu, ketika tiba waktunya untuk menghadap illahi ia ingin meninggal dengan tenang di atas tempat tidur. Ia mendambakan kesempatan untuk bernaung di bawah pohon yang rindang, di tengah keindahan alam di pinggir sungai dihembus udara segar. Ia membayangkan keindahan tanah air yang dicintainya. Ia meresapkan kembali kesederhanaan tempat

ia berasal. Dan ia ingin rumahnya yang abadi terletak di daerah Priangan yang sejuk bergunung-gunung dan subur. Di daerah inilah ia pertama kali bertemu dengan Marhaen, sang petani pemberi inspirasi.

Setelah lengser dari kursi kepresidenan, sakit yang berkepanjangan menyebabkan kesehatannya terus menurun dengan cepat. Pada 21 Juni 1970 sang Proklamator Kemerdekaan bangsa memenuhi panggilan Sang Pencipta. Tiba-tiba seluruh anak bangsa terkejut. Kesedihan yang mendalam pun menyelimuti kehidupan bangsa. Ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, bukan di tengah-tengah keindahan alam Priangan yang diinginkannya.

Apabila aku telah mencapai sesuatu selama di atas dunia, ini adalah karena rakyatku. Tanpa rakyat aku tidak berarti apa-apa. Kalau aku mati, kuburkanlah Bapakmu menurut agama Islam dan di atas batu kecil yang biasa engkau tulislah kata-kata sederhana: DISINI BERISTIRAHAT BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAYAT.





2

SOEHARTO

SOEHARTO

Bapak Pembangunan Yang Ideologis



Dikisahkan pada malam, tanggal 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto sedang sakit flu berat. Ia batuk-batuk dan tidak bisa bicara keras. Ia hanya mengenakan piyama, lehernya dibebat dengan kain *angkin* milik istrinya. Ketika itulah Menteri Veteran Mayjen Basuki Rahmat, Menteri Perindustrian Ringan Brigjen M. Jusuf, dan Pangdam V Jaya Brigjen Amir Machmud datang melaporkan. Mereka baru saja kembali dari menemui Presiden Sukarno di Istana Bogor. Mereka pun menyerahkan sepucuk surat yang mereka bawa dari istana. Surat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Serentak Jenderal Soeharto selesai membaca surat perintah itu ia pun langsung membuat sebuah keputusan yang ternyata membuka periode baru dalam sejarah kontemporer Indonesia. Surat Perintah itu memberinya senjata untuk melaksanakan apa yang telah berkali-kali diusulkannya kepada Presiden Sukarno: "Bubarkan PKI".

Di malam itu juga ia langsung memimpin rapat di markas Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat). Rapat dibuka dengan laporan Mayor Jenderal Basuki Rahmat, yang mengisahkan kejadian yang dialaminya di Istana Kepresidenan Bogor. Presiden Sukarno memarahi para jenderal itu karena merasa tentara tidak berbuat apa-apa ketika demonstran melecehkan kewibawaannya. Barulah ketika kemarahan itu sudah agak reda, Presiden Sukarno bertanya kepada mereka tentang tindakan apa yang harus dilakukan agar hal itu tidak terulang lagi. Ketiga jenderal itu hanya bisa menyampaikan pesan dari Jenderal Soeharto

Presiden Soeharto di dampingi oleh ibu Tien Soeharto membuka munas pertama dengan mahasiswa di istana Bogor pada tahun 1970 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



dan menganjurkan agar mempercayakan saja masalah pengamanan Presiden kepada Jenderal Soeharto, tetapi jawaban itu malah semakin menaikkan darah Presiden Sukarno. Bukankah ia telah memberi kepercayaan kepada Jenderal Soeharto? Tetapi tindakan apa yang dilakukannya?

Ketika itulah salah seorang dari ketiga jenderal itu mengatakan bahwa Jenderal Soeharto sebenarnya memerlukan "surat perintah" agar lebih leluasa menjalankan apa yang diharapkan padanya. Bung Karno pun menjawab, "Baik. Siapkan surat perintah itu." Maka, begitulah. Dengan dibantu oleh ajudan Presiden, yakni Brigjen Sabur, ketiga jenderal itu pun menyiapkan *draft* surat perintah. Tiga Waperdam (Wakil Perdana Menteri), yakni Subandrio, Chaerul Saleh, dan Leimena, yang kebetulan juga sedang ada di istana Bogor juga ikut memberi saran. Presiden sendiri yang memperbaiki *draft* surat perintah itu. Barulah setelah segala sesuatu dianggap memuaskan, **Surat Perintah 11 Maret** pun ditandatangani Sukarno, Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi.

Isi surat itu memerintahkan Jenderal Soeharto untuk, atas nama Presiden, mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan dan kelancaran jalannya revolusi. Jenderal Soeharto juga diperintahkan untuk menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Sukarno, demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jenderal Soeharto harus juga menjaga agar ajaran Pemimpin Besar Revolusi terlaksana dengan baik dan melaporkan perkembangan tindakannya kepada Presiden.

Berdasarkan Surat Perintah itu, pada jam 24.00, Brigjen Soetjipto, ketua KOTI G-5 dan Letkol Soedharmono membuat surat perintah pembubaran PKI. Surat ini langsung diparaf Brigjen Alamsyah Ratu Perwira Negara dan akhirnya ditandatangani Jenderal Soeharto. Maka pada pukul 06.00 tanggal 12 Maret 1966 RRI mengumumkan pembubaran PKI. Begitulah pengembalian Supersemar telah menjalankan perintah pertama berlandaskan Surat Perintah Sebelas Maret. Berita ini segera menyebar luas dan disambut meriah. Selaku pengembalian Surat Perintah 11 Maret, Jenderal Soeharto pun melakukan serangkaian tindakan, di antaranya membuat pengumuman penjelasan tentang Supersemar dan seruan agar masyarakat tidak bertindak sendiri-sendiri. Maka ternyata bahwa Surat Perintah 11 Maret bukanlah alat untuk mengadakan *coup* secara terselubung, tetapi awal kebangkitan Orde Baru.

Kiri: Potret keluarga Presiden Soeharto dan ibu Tien Soeharto bersama putra putrinya (Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Haryoyudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati, Hutomo Mandala Putra, dan Sri Hutami) pada tahun 1970 (Sumber: KITLV). Kanan: Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto bersantai bersama anak dan cucu di kediaman jalan Cendana pada tahun 1980 an (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Yang mengiang di telinga saya sampai sekarang ialah ucapan ayah saya waktu beliau menyerahkan saya kepada paman dan bibi saya: "Saya menyerahkan Soeharto kepadamu. Silahkan asuh. Saya kuatir, kalau dia terus tinggal di Kemusuk, dia tidak akan menjadi orang. Saya sangat bersyukur jika anak ini memperoleh pendidikan dan bimbingan yang baik".

SAYA DARI DESA: CERITA DARI KEMUSUK DAN WONOGIRI

Soeharto lahir di desa Kemusuk, Argomulyo, Godean, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921, dari ibu bernama Sukirah. Ayahnya, Kertosudiro, seorang pejabat pengatur air (*ulu-ulu*). Belum lagi berumur empat puluh hari, Soeharto harus dibawa ke rumah Mbah Kromodiryo karena ibunya sakit sehingga tidak bisa menyusuinya.

Masa kecil dilaluinya di Kemusuk dengan kehidupan keluarga petani yang tekun. Ia sering diajak ke sawah oleh Mbah Kromo yang kadang-kadang menggendongnya sambil membalik-balik tanah atau menaikkannya ke atas *garu*. Ketika usianya sudah lanjut, Soeharto tetap terkenang pada pengalaman di masa kecilnya ini. Bilamana ia dibawa ikut ke sawah oleh mbah Kromo, Soeharto senang sekali mencari belut yang memang menjadi makanan kesukaannya.

Ketika lengannya dilengkungkan di atas kepala dan ternyata telah bisa memegang telinga, Soeharto pun masuk sekolah di desa Puluhan, Godean. Kemudian ia pindah ke Pedes, karena ibu dan ayah tirinya pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Karena kepindahan inilah ayahnya, Kertosudiro, memutuskan untuk membawa Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, dan menitipkannya kepada bibinya (satu-satunya adik ayahnya). Kebetulan suami bibinya, Prawiroharjo, bekerja sebagai mantri tani. Soeharto dipindahkan karena ayahnya berharap agar ia mendapat pendidikan yang lebih baik, meskipun sebenarnya daerah Wuryantoro bukanlah

daerah yang subur jika dibandingkan dengan kehidupan di daerah Godean.

Selama bersekolah di Wuryantoro, Soeharto menekuni semua pelajaran. Mata pelajaran yang paling disukainya berhitung; ia biasa juga mendapat pujian dari gurunya. Karena keluarga pamannya taat dalam menjalankan agama maka Soeharto pun mendapat pelajaran agama yang lumayan baik. Pamannya juga memberinya latihan spiritual, seperti puasa setiap Senin dan Kamis dan tidur di *tritisan* (di bawah ujung atap di luar rumah). Ketekunan dan kesungguhan pamannya selalu membekas dalam kenangan Soeharto dan menjadi pegangan baginya dalam mengarungi gelombang kehidupan. Ajaran dan anjuran pamannya dijalani dengan tekun dan penuh keyakinan.

Setelah tamat Sekolah Rendah di Wuryantoro, Soeharto masuk Sekolah Lanjutan Rendah (*schakel school*) di Wonogiri. Mula-mula ia tinggal dengan anak Prawirowihardjo di Selogiri; tetapi karena terjadi keretakan dalam rumah tangga Citratani, Soeharto pun dititipkan ayahnya kepada keluarga Harjowiyono. Seperti kebiasaan orang yang menumpang, Soeharto biasa membantu kerja rumah tangga Harjowiyono, yang kebetulan tidak mempunyai anak. Ia biasa membantu menjualkan hasil kerajinan tangan Ibu Harjowiyono. Selama tinggal di rumah itu, Soeharto berkenalan dengan Kiai Darjatmo, seorang mubalig yang terkenal di Wonogiri. Dari ulama inilah Soeharto mendapat pengetahuan agama

yang memadai. Di samping mengaji Al Qur'an, ia juga mempelajari berbagai masalah kehidupan, mulai dari perihal pemeliharaan kesehatan sampai ke filsafat hidup. Di tengah-tengah suasana yang serba ala kadarnya ini Soeharto berhasil menamatkan pendidikannya di sekolah *schakel* Muhammadiyah pada tahun 1939. Sebenarnya ia masih ingin melanjutkan sekolahnya, tetapi baik ayahnya maupun keluarga lain tidak ada yang sanggup membiayai. Keadaan ekonomi keluarganya memang pas-pasan saja.

Tamat *schakel school* mendapat pekerjaannya yang pertama di Wuryantoro. Ia diterima sebagai pembantu *klerk* (pegawai rendahan) dari *Volksbank* (Bank Rakyat). Tugasnya mengikuti *klerk* itu berkeliling desa, naik sepeda dengan mengenakan seragam masa jaman itu, bebed kain *blangkon* dan baju *beskap*. Ia mengurus peminjaman uang dari para petani, pedagang kecil (bakul), dan pemilik warung. Pekerjaan ini sebenarnya tidak begitu disukainya, tetapi ia tidak mau hidup menganggur dan menjadi beban orang lain. Pekerjaan ini dijalannya.

Sekali Soeharto meminjam kain bibinya karena kain yang biasa dipakainya untuk berkeliling sudah usang dan tidak pantas lagi untuk mendampingi *klerk* bank desa. Pada suatu hari nasib baik rupanya sedang menjauhinya. Waktu turun dari sepedanya yang sudah reot, kain pinjaman yang dipakainya tersangkut pada per sadel yang menonjol ke luar.

Karena memakai kain yang sobek, ia pun dicela *klerk* yang didampinginya. Setiba di rumah ia juga dimarahi bibinya. Kain yang dipinjamnya merupakan satu-satunya kain bibinya yang masih baik. Peristiwa itu menjadi awal perpisahan dengan tempatnya bekerja. Ketika Soeharto menganggur, kegiatannya hanya mengikuti gotong royong di desanya yang biasa dengan tertib dilakukannya.

PRAJURIT PENDIAM DI JANTUNG GERILYA: PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN DAN SERANGAN OEMOEM 1 MARET 1949

Ketika mendengar berita adanya pengumuman yang menyatakan terbukanya kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger*), Soeharto mengirim lamaran. Agak lama menunggu akhirnya ia mendapat balasan bahwa lamarannya diterima dengan status *Kortverband* (ikatan dinas pendek). Selama tiga bulan ia dilatih sebagai prajurit di Gombong. Setelah lulus dari pendidikan, Soeharto dilantik sebagai *corporaal* (kopral) KNIL. Soeharto ditempatkan di Batalyon XIII di Rampal, Malang, dengan jabatan sebagai wakil komandan regu. Ketika pangkatnya naik menjadi sersan KNIL, perang Pasifik meletus (1942). Batalyonnya ditempatkan di Cisarua, Bandung, sebagai pasukan cadangan di Markas Besar Angkatan Darat.



Atas: Letkol Soeharto dikirim oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman didaerah gerilya sebelum kembali ke ibukota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949 (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi). Kanan: Letkol Soeharto beserta rombongan Jenderal Soedirman kembali ke Yogya dari gerilya pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 1949 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).



Panglima Besar Jenderal Soedirman didampingi Letkol Soeharto menerima apel pasukan gerilya TNI di Yogyakarta, 1949 (Sumber: Sejarah Perang Kemerdekaan AH. Nasution).

Pada tanggal 8 Maret 1942 Panglima KNIL menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati. Karena tidak mau menjadi tawanan militer Jepang, dengan berpakaian sipil Soeharto menyelamatkan diri, selanjutnya pulang ke Wuryantoro. Penyakit malarianya malah kambuh. Setelah sembuh, ia pergi ke Yogyakarta. Ia membaca pengumuman bahwa kepolisian (*keisatsu*) Yogyakarta memerlukan tenaga ajun inspektur (*keibuho*). Hampir dua tahun ia bertugas di kepolisian. Perwira atasannya menyarankan agar ia

mendaftar masuk tentara Pembela Tanah Air (PETA) pada tahun 1944. Setelah selesai mengikuti pendidikan calon *Shodanco*, ia ditempatkan di *daidan* di Bogor (batalyon) Yogyakarta. Pada pasca pemberontakan Tentara PETA di Blitar, Soeharto ditugaskan menjaga para pemberontak yang ditawan di daerah Nganjuk. Jabatannya dinaikkan sebagai *Cudanco* (komandan kompi)

Setelah PETA dibubarkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Soeharto menggabungkan diri ke Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Yogyakarta. Ketika Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Yogyakarta dibentuk, Soeharto diangkat menjadi komandan Batalyon dengan pangkat mayor. Setelah pertempuran Ambarawa, ia diangkat sebagai komandan Resimen 2 Divisi X dengan pangkat letnan kolonel. Kemudian Soeharto diangkat sebagai komandan Brigade 10 merangkap Komandan Werhkreise 3 Divisi III di Yogyakarta. Karier militer pun menjadi bagian kehidupan Soeharto.

Ketika Yogyakarta diserang tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dan ibukota Republik saat itu jatuh di tangan Belanda, Panglima Jenderal Soedirman melakukan perlawanan dengan taktik gerilya ke luar kota. Untuk meyelamatkan Republik Indonesia yang baru terbentuk, Sukarno dan Hatta melalui telegram memerintahkan Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera Tengah (saat itu meliputi Sumatera Barat dan Pekanbaru). Soeharto segera

berpikir mencari jalan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Yogyakarta kepada TNI. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukannya ialah mengadakan serangan balasan secepat mungkin ke ibukota Republik ini. Setelah melakukan koordinasi dengan Kapten Widodo (Komandan Kompi Batalyon Sardjono), kemudian dengan sektor barat di bawah pimpinan Mayor Ventje Sumual, dan Mayor Kasno untuk sektor utara, sebelah timur dengan Mayor Soedjono, dan di kota dipimpin oleh Letnan Marsudi, pada malam 30 Desember serangan pertama pun dilancarkan. Sepuluh hari kemudian dilakukan serangan kedua, serangan ketiga (Januari), dan serangan keempat (Februari 1949) pun dilakukan.

Semua serangan itu untuk menunjukkan kepada rakyat dan Belanda bahwa TNI merupakan sebuah kekuatan militer yang tetap bisa mengancam kehadiran tentara pendudukan Belanda. Sementara itu beberapa pendukung Republik juga mendengar siaran radio luar negeri yang mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB sedang bersidang dan memperdebatkan Indonesia. Dalam sidang itu delegasi Belanda mengatakan bahwa Aksi Polisionil yang dilancarkan telah berhasil menduduki ibukota Yogyakarta dan pemerintahan Belanda pun berjalan lancar. Mendengar kabar itu Soeharto merasa heran. Bukankah ia dan pasukannya sudah empat kali melakukan serangan ke Yogyakarta? Rupanya empat kali serangan yang dilancarkannya tidak diketahui dunia. Andaikan diketahui pun serangan itu tidak



Letkol Inf. Soeharto ketika menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Diponegoro 03 September 1956 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

dipedulikan dan bahkan dilecehkan. Menyadari hal itu ia pun memikirkan kemungkinan melancarkan serangan di siang hari untuk menunjukkan kepada dunia internasional mengenai kebohongan yang telah dipertontonkan Belanda.

Soeharto pun mempersiapkan serangan umum yang akan dilancarkan di pagi hari. Pasukan ditetapkan dengan menggunakan janur kuning sebagai tanda pengenal. Serangan militer ini tidak dimaksud untuk menduduki dan mempertahankan kota sesuai dengan strategi yang digariskan TNI memilih perang gerilya dalam menghadapi tentara Belanda yang mempunyai persenjataan serba lengkap. Salah satu taktik perang gerilya adalah melemahkan kekuatan musuh, bukannya mempertahankan kota yang telah direbut. Apalagi tujuan utama penyerangan bersifat politis, yakni memberitahukan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan bahkan sanggup mengadakan perlawanan. Persiapan penyerangan pun dilakukan dengan cermat.



Upacara penyematan Hiu Kencana kepada Panglima Mandala Mayjen Soeharto bertempat di kapal selam Nagarangsang perairan Makassar (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi).

Tepat pukul 06.00 tanggal 1 Maret 1949, bersamaan dengan suara sirene akhir jam malam, tiba-tiba terdengarlah tembakan bergemuruh di semua penjuru kota. TNI melakukan penyerangan dari pelbagai arah. Dalam waktu singkat seluruh kota berhasil dikuasai TNI. Bendera merah putih berhasil dikibarkan di pusat kota, di Jalan Malioboro, dan beberapa tempat lainnya. Rakyat menyambut kehadiran TNI dengan pekik "Merdeka!". TNI menguasai Yogyakarta sekitar enam jam. TNI telah mencapai tujuannya. Serangan umum itu diberitakan ke seluruh dunia melalui pemancar radio di Wonosari dan siaran PDRI "*somewhere in the jungle*" di Sumatera Tengah. Berita itu kemudian merambah ke Birma, New Delhi, dan akhirnya sampailah ke PBB.

Serangan umum itu menyadarkan Dewan Keamanan PBB bahwa konflik Indonesia-Belanda tidak bisa dilihat sebagai pemberontakan jajahan. Dewan Keamanan pun mendesak agar perundingan dimulai kembali. Pada 7 Mei 1949 ketua delegasi Indonesia dan van Roijen ketua delegasi Belanda, sama-sama mengeluarkan Pernyataan yang dikenal dengan Pernyataan Roem - Roijen. Intinya adalah kedua belah pihak sepakat menghentikan konflik bersenjata, membebaskan tanpa syarat pemimpin-pemimpin RI yang ditawan, dan menyelenggarakan KMB, peristiwa itu kemudian dikenal dengan "Yogya kembali". Para pemimpin Republik kembali ke Yogyakarta. Tetapi di manakah Panglima Besar Soedirman? Meskipun Sri Sultan

membujuknya, dan Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto juga sudah mengirim surat, tetapi tidak ada jawaban Panglima Besar belum yakin atas kejujuran pihak Belanda. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX menugasi Letkol Soeharto untuk menjemput Panglima Besar. Soeharto bersama dr. Irsan dan Rosihan Anwar berangkat menuju Karangmojo. Ketika bertemu segera saja Panglima Besar mengeluarkan isi hatinya dan mempertanyakan pengaruhnya dalam perjuangan. Pertemuan ini lebih mirip curah hati yang sentimental dari dua pejuang daripada bawahan terhadap opsir atasannya. Akhirnya Panglima Besar bersedia untuk kembali. Iapun harus dibawa dengan tandu sampai di Piyungan. Dari sinilah ia dipindahkan ke mobil. Panglima Besar naik jeep yang sudah disediakan oleh Kolonel Simatupang. Dengan jeep ini Panglima Besar menghadap Presiden Sukarno di istana. Itulah pertemuan pertama sejak mereka berpisah pada 19 Desember 1948. Tidak lama kemudian Ketua PDRI, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, tiba di Yogyakarta. Pada sidang pertama Kabinet RI tanggal 13 Juli 1949, dengan resmi ia menyerahkan mandatnya kepada Perdana Menteri Hatta.

Pada suatu hari yang berbahagia di masa revolusi kemerdekaan, tanggal 26 Desember 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah, putri seorang wedana, pegawai Mangkunegaran. Usia Soeharto pada waktu itu 26 tahun, sedangkan Siti Hartinah 24 tahun. Pada tanggal 23

Mayjen Soeharto dilantik sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat oleh Presiden Sukarno, 16 Oktober 1965 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

Serangan umum 1 Maret merupakan bagian dari strategi perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya dari satuan yang bergabung dalam Wehrkreise III ketika itu, untuk mengusir penjajah Belanda. Penyerangan ini mempunyai tujuan politis, militer dan psikologis, karena kota Yogyakarta pada waktu itu adalah ibukota negara Republik Indonesia.



Januari 1949 putri sulungnya, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut), lahir. Soeharto dan Siti Hartinah dikaruniai enam orang anak, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Haryoyudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati, Hutomo Mandala Putra, dan Sri Hutami.

SETELAH TRIKORA DAN DWIKORA: JALAN MENUJU ISTANA

Setelah Ratu Belanda menandatangani Piagam *souvereniteit overdracht* organisasi militer, pada tanggal 27 Desember 1949, Republik Indonesia merupakan suatu negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara baru ini yang dilahirkan sebagai hasil kompromi yang dicapai dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), yang diadakan di Den Haag. Beberapa bulan kemudian ternyata kehadiran RIS yang hakekatnya penghentian permusuhan Indonesia-Belanda pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia, satu per satu negara bagian bentukan Belanda, langsung ataupun tidak langsung, berguguran. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Republik Indonesia mendeklarasikan kembali menjadi Negara Kesatuan dengan ibukota Jakarta.

Konferensi Meja Bundar yang berakhir masih menyisakan berbagai masalah. Antara lain masalah organisasi militer, integrasi mantan KNIL ke dalam TNI. Masalah integrasi militer ini sangat sensitif yang berarti mempersatukan musuh lama dalam suatu kesatuan. Rasa ketidakpastian tentang

masa depan dan timbulnya ketidakpuasan berada di bawah opsir TNI memicu terjadinya konflik. Di Makassar Andi Aziz, seorang kapten mantan KNIL melakukan pemberontakan. Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Mataram Divisi III Diponegoro diharuskan kembali bertempur. Ia ditugaskan untuk menumpas pemberontakan bekas tentara KNIL.

Seusai penumpasan pemberontakan Andi Aziz, pada akhir September 1950 Brigade Mataram kembali ke Jawa Tengah. Tujuh belas orang anggota brigade gugur dalam menunaikan tugas. Sejak akhir 1950 sampai awal 1956, Soeharto ditugaskan memimpin Brigade O di Salatiga. Selama itu kesibukannya yang utama ialah memimpin operasi penumpasan DI/TII dan penyelesaian pemberontakan Batalyon 426. Pada 3 Juni 1956 Soeharto diangkat menjadi panglima TT-IV/Diponegoro, menggantikan Kolonel M. Bachrum. Pangkatnya dinaikan menjadi Kolonel.

Situasi politik dalam negeri semakin bertambah rumit. Lahirnya gerakan PRRI/Permesta terjadi di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara, sementara tuntutan nasional agar Belanda menyerakan kembali Irian Barat bertambah sulit untuk bisa tercapai. Eskalasi konflik mengenai Irian Barat semakin mendekati klimaks. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Sukarno, dalam suatu rapat umum di Yogyakarta, mengumumkan Tiga Komando Rakyat (Trihora), yaitu 1) gagalkan pembentukan negara boneka Papua, buatan Belanda Koloneal 2) kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat, dan



Ketua MPRS. Jenderal A.H. Nasution melantik Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, pada 11 Maret 1967 (Sumber: DEPPEN).

Paling lambat tanggal 17 Agustus 1962 bendera merah putih harus berkibar di Irian Barat. Ini berarti saya cuma diberi waktu 7 bulan. 'masya allah' kata saya pada waktu itu. Tetapi saya taat saja, tunduk pada perintah

3) bersiap untuk mobilisasi umum. Dalam rangka pembebasan Irian Barat inilah Presiden, Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala. Pasukan yang dipersiapkan untuk operasi Trikora pembebasan Irian Barat.

Masalah Irian Barat akhirnya diselesaikan melalui jalur diplomasi tatkala Amerika Serikat dan PBB ikut terlibat sebagai penengah. Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda yang dikenal dengan Perjanjian New York. Soal yang terpenting dalam perjanjian ini, ialah mengenai penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari pihak Belanda kepada pemerintah RI. PBB membentuk *United Nations Temporary Executif Authority* (UNTEA) atau Pemerintahan sementara PBB. Pada 31 Desember 1962, pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada UNTEA pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan kekuasaan sementara pemerintahan kepada RI. Pemerintah RI menerima penyerahan kekuasaan dengan kewajiban mengadakan penentuan pendapat rakyat, sebelum akhir 1969.

"*The Federation of Malaysia*". Negara federal baru yang akan didirikan dengan dukungan Inggris dan kekuatan Barat lainnya itu dirasakan Indonesia sebagai ancaman terhadap revolusi Indonesia. Federasi baru ini dianggap bisa menjadi negara yang mengepung Indonesia. Dalam masa "konfrontasi" inilah, pada tanggal 1 Mei 1963, Soeharto diangkat menjadi Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Ketika konfrontasi dengan Malaysia semakin memanas pada 2 September 1964, Presiden Sukarno membentuk Komando Siaga (KOGA), kemudian diubah menjadi Komando Mandala Siaga (KOLAGA) di bawah pimpinan Laksamana Madya Udara Omar Dhani, Soeharto diangkat sebagai wakil panglima satu.

Berbeda dengan perjuangan pembebasan Irian Barat, konfrontasi anti-Malaysia dalam masyarakat tidak terjadi kesatuan pendapat. PKI tampil sebagai kekuatan yang paling radikal dalam usaha menggelorakan semangat "ganyang Malaysia". ABRI, khususnya Angkatan Darat, merupakan kekuatan militer yang paling awal melihat bahwa konfrontasi Malaysia adalah suatu kesia-siaan. Ketika layar sejarah konfrontasi terbuka, setelah peristiwa G-30-S PKI, tampaklah bahwa Soeharto adalah seorang aktor penting yang mendorong proses penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia melalui jalan damai. Oleh sebab itu, bagi rakyat Malaysia, Soeharto merupakan tokoh Indonesia yang mereka hormati. Hal ini diungkapkan oleh mantan Menteri Penerangan

Orde Baru menyatakan bahwa kehadirannya disebabkan oleh dorongan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara "murni dan konsekwen". Begitulah Badan Koordinasi Kesatuan Aksi dan Front Pancasila pada 31 Desember 1965 mengeluarkan deklarasinya. Simposium Kebangkitan Semangat 66 *Menjelajahi Tracee Baru* yang dilaksanakan Universitas Indonesia dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia pada 6–9 Mei 1966 menampilkan tema "Indonesia Negara Hukum". Setelah menyoroti berbagai penyimpangan asas dan norma hukum pada era sebelumnya, simposium mengajukan kerangka pikir tentang pelaksanaan negara hukum. Berbagai gagasan dan wawasan ditampilkan dalam berbagai forum. Namun ternyata seminar Angkatan Darat yang diadakan di Bandung

yang paling dalam memberikan dampaknya. Seminar ini menyumbangkan pemikiran tentang konsep strategi dan operasi kabinet. Semua secara tegas menyatakan bahwa ABRI adalah bagian utama dari derap langkah Orde Baru. Syaratnya adalah kehadiran ABRI yang kompak dan terintegrasi. Seminar ini mengajukan usul kerangka operasional jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang semestinya dilaksanakan kabinet Orde Baru. Khusus untuk program jangka pendek, diusulkan agar Kabinet Ampera melaksanakan empat tahapan kerja: penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi. Jangka menengah dan jangka panjang ialah berhasilnya kekuatan Pancasila memenangkan Pemilu dan memanfaatkan DPR dan MPR bagi wahana Orde Baru.

Malaysia Tun Sri Zainudin Mahidin yang hadir mewakili mantan PM Mahathir Muhammad dalam peluncuran buku berjudul *Pak Harto The Untold Stories* di Taman Mini Indonesia Indah (Rabu 8 Juni 2011). Ia mengatakan bahwa Malaysia berhutang budi pada mantan Presiden Soeharto karena perannya dalam mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Tun Sri Zainudin Mahidin, yang juga seorang mantan jurnalis, melihat Soeharto sebagai seorang yang sangat berwibawa. Di samping seorang tentara, ia juga sesungguhnya seorang diplomat ulung. Karena itu bisalah dipahami juga kalau rakyat Malaysia memperlihatkan rasa hormat mereka kepada Suharto dengan menamakan suatu wilayah Kampung Soeharto. Kampung ini berada di sebelah utara Hulu Selangor. Kampung yang berdiri di atas tanah seluas 174.047 hektar ini dihuni 178.500 jiwa, terdiri dari etnis Melayu, Jawa, Banjar, dan India.

MENGATASI KRISIS NASIONAL: TRAGEDI BANGSA

Tanggal 30 September 1965, sekitar pukul sembilan malam Soeharto bersama istri sedang berada di Rumah Sakit Gatot Subroto menengok putranya, Tomy, yang masih berumur empat tahun, sedang dirawat karena tersiram air sup yang panas. Kira-kira pukul sepuluh malam, Mayjen Soeharto melihat Kol. Latief berjalan di depan *zaal* tempat Tomy dirawat. Kira-kira pukul 12.00 malam, Soeharto pulang ke rumah, sementara istrinya tetap menunggui Tomy. Sesampai di rumah ia cepat tidur. Besoknya, tanggal 1 Oktober 1965, pukul 05.00 pagi,

Deg-deg perasaan Soeharto. Ia tahu siapa Letkol Untung itu. Ia ingat perwira ini adalah seorang yang dekat dan rapat berhubungan dengan PKI. Letkol Untung bahkan pernah menjadi anak didik dari salah seorang pemimpin terkemuka PKI, Alimin.

seorang kameraman TVRI, Hamid, melaporkan bahwa telah terjadi penembakan di beberapa tempat. Mendengar berita itu Soeharto bergegas menuju markas Kostrad. Pada pukul 07.00 pagi tepat ia mendengarkan siaran RRI pertama mengenai "Gerakan 30 September" yang dipimpin oleh Letkol Untung.

Siaran Letkol Untung dilakukan beberapa kali. RRI rupanya sudah dikuasai oleh pasukan pemberontak. Setelah mendapat laporan lengkap, Soeharto bertindak cepat, menyimpulkan bahwa peristiwa itu suatu aksi perebutan kekuasaan. Dalam waktu singkat Angkatan Darat memerintahkan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Soeharto, Sarwo Edhi untuk merebut RRI dan menguasai kota Jakarta. Pada hari itu juga Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma yang diduga sebagai pangkalan pemberontak berhasil dikuasai. Langkah selanjutnya Soeharto memimpin operasi pemulihan keamanan dalam negeri. Operasi pengejaran dan pembersihan terhadap pimpinan dan penggerak Gerakan 30 September pun dilakukan di mana-mana.

Pada tanggal 4 Oktober 1965 jenazah enam jenderal yang terbunuh ditemukan di sumur tua Lubang Buaya. Upacara



Mayjen Soeharto menyaksikan pengangkatan jenazah pimpinan TNI-AD dari sumur di Lubang Buaya pada tahun 1965 (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi).

Kanan: Berita koran Pikiran Rakyat tentang peristiwa pembunuhan terhadap pimpinan jenderal Angkatan Darat pada September 1965 (Sumber: ANRI).



penguburan yang pantas bagi mereka pun diadakan dalam suasana kesenduan yang mendalam. Jenderal Nasution yang kakinya masih sakit karena jatuh ketika menyelamatkan diri dari usaha pembunuhan menyampaikan pidato perpisahan yang sangat mengharukan. Anak perempuannya yang masih bersekolah Taman Kanak-Kanak tewas ditembak anak-buah Untung.

Presiden Sukarno kemudian mengangkat para perwira yang tewas itu sebagai "Pahlawan Revolusi". Penamaan ini sesuai dengan jiwa zaman yang masih bisa dipelihara Presiden Sukarno. Demokrasi Terpimpin biasa dikatakan Presiden Sukarno sebagai zaman dari "*the discovery of our revolution*".

Sejak peristiwa pembunuhan para jenderal itu terjadi, situasi negara semakin lama semakin tidak menentu. Ekonomi rakyat mengalami kemerosotan tajam. Selain terjadi devaluasi nilai uang dari Rp 1,000,00 menjadi Rp 1,00, harga BBM naik tajam sehingga harga karcis bus dan kendaraan umum pun melambung. Kondisi sosial-ekonomi ini mendorong mahasiswa bergerak. Sejak itu hari-hari selalu dipenuhi oleh demonstrasi mahasiswa di hampir semua kota dan universitas. Ketika demonstrasi mahasiswa sedang mewarnai suasana Jakarta, Soeharto terlibat dalam suatu dialog yang mengharukan di Istana Merdeka dengan Presiden Sukarno. Mereka pada waktu itu kebetulan sedang berdua. Presiden Sukarno bertanya dalam bahasa Jawa, "Harto, *jane*

aku iki arep kok kapakake?" (Harto sebenarnya aku ini akan kamu apakan?). Aku ini pemimpinmu."

Soeharto pun dengan sopan menjawab, "Bapak Presiden, saya ini anak petani miskin, tetapi ayah saya setiap kali mengingatkan saya untuk selalu menghormati orang tua. Saya selalu diingatkan agar dapat *mikul dhuwur mendhem jero.*"

Mendengar jawaban ini Presiden Sukarno mengatakan bahwa kalau Soeharto jujur dengan kata-katanya ini, ia harus menghentikan demonstrasi mahasiswa yang sudah semakin liar dan tidak lagi menghormati orang tua; tetapi Soeharto berprinsip bahwa masalah ini sangat tergantung pada Sukarno sendiri yang masih kukuh tidak bersedia membubarkan PKI.

Pada tanggal 25 Februari 1966, Sukarno membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, tetapi setelah pembubaran itu mahasiswa beralih berjuang melalui Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Demam demonstrasi dengan tuntutan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), yaitu bubarkan PKI, turunkan harga, dan bubarkan kabinet Dwikora, mewarnai kehidupan ibukota tiada henti. Situasi semakin tidak bisa dikendalikan, bahkan pelantikan kabinet baru pun dihalang-halangi sehingga korban pun jatuh. Dalam ketegangan suasana inilah akhirnya Presiden Sukarno mengeluarkan



Pelantikan Jenderal Soeharto oleh MPRS RI sebagai Presiden 27 Maret 1968 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memberi perintah kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan negara. Supersemar inilah yang menjadi landasan yuridis bagi pembubaran PKI, yang dilihat Soeharto sebagai sumber segala macam konflik.

Setelah mengalami turun-naik hubungan pribadi dan politik serta semakin kerasnya tuntutan pada dirinya untuk mengundurkan diri, Presiden Sukarno akhirnya sampai juga pada kesimpulan bahwa keutuhan negara dan terpulihkannya keamanan anak bangsa adalah segala-galanya. Apalah arti kekuasaan jika disintegrasikan dalam kehidupan anak bangsa dibiarkan berlarut-larut. Maka di tengah-tengah berbagai corak krisis yang sedang melanda tanah air di saat keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin harus dipelihara, Presiden Sukarno merasa bahwa sudah waktunya ia mengundurkan diri. Sang Proklamator itu pun akhirnya menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Tap MPRS. No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967. Sebagai tindak lanjut, pada 7–12 Maret 1967 diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS. Pada 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi Pejabat Presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS.

PEMILIHAN UMUM 1971: KONSOLIDASI DEMOKRASI PASCA TRAGEDI NASIONAL

Ketika ia dilantik sebagai Pejabat Presiden, meskipun lebih suka menyebut dirinya sebagai “Pengemban Ketetapan MPRS”, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa prajurit ABRI menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Maka ABRI akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar, menjunjung tinggi Pancasila, dan tetap akan melawan diktatur baik perseorangan, golongan, ataupun militer. Dapatlah dipahami juga kalau di samping masalah rekonstruksi kehidupan ekonomi, pemerintah yang menyebut diri Orde Baru ini mulai pula mengarahkan perhatian pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Sudah sekitar lima belas tahun Republik Indonesia tidak pernah menyelenggarakan keharusan konstitusional ini.

Berdasarkan amanat Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966, Pemilu selambat-lambatnya harus diselenggarakan pada tahun 1968, tetapi karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan Pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 23 tanggal 23 Mei 1970 jumlah partai politik yang boleh ikut serta dalam Pemilu adalah sembilan partai politik, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti, Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Murba, IPKI, PNI, dan ditambah dengan Golkar.

Selama tiga bulan, sejak 27 April sampai 25 Juni 1971, arena kampanye Pemilu dipenuhi oleh janji dan adu program.



Atas (kiri dan kanan): Suasana Pemilu 1971 dan penghitungan suara hasil Pemilu 1971 untuk TPS luar negeri di Kemenlu tanggal 3 Juli 1971 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

Sebagai Pemilu yang pertama pada masa Orde Baru, kampanye masih harus mencari bentuknya.

Dengan terlaksananya Pemilu maka MPR dan DPR telah bisa kembali berfungsi. Setelah pelantikan anggota DPR/MPR hasil Pemilu maka pada bulan Maret 1973 MPR pun mengadakan Sidang Umum. Pada kesempatan ini MPR menyetujui rancangan GBHN dan memilih Soeharto sebagai Presiden dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden. Sejalan dengan keharusan UUD 1945 maka ketika itu pula Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang dikatakan UUD berfungsi sebagai pemberi nasihat (diminta atau tidak diminta) kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai pula difungsikan.

MELAKSANAKAN DEMOKRASI MELALUI PEMILU

Hasil Pemilu tahun 1971 memperlihatkan bahwa masyarakat masih terpaku pada tradisi 1950-an ketika berbagai aliran dan ideologi menampilkan diri sebagai partai politik. Rupanya masa serba revolusioner Demokrasi Terpimpin tidak begitu banyak pengaruhnya terhadap kecenderungan ideologis masyarakat-bangsa. Meskipun demikian Soeharto sadar bahwa hal ini tidak bisa diteruskan. Ia mengambil keputusan "zaman serba revolusioner" tidak bisa dilanjutkan dengan suasana serba ideologi zaman demokrasi parlementer. Indonesia sudah waktunya memasuki "zaman pembangunan". Bukankah

pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa sistem politik yang berpartai banyak ini bukan saja bisa menghambat proses pembangunan tetapi juga menyebabkan bangsa mudah tergelincir pada situasi yang bersifat disintegratif.

Dengan argumen bahwa setiap partai pada dasarnya bertolak dari kesadaran penggabungan unsur spiritual dan material maka demi terjaminnya kesatuan nasional dan stabilitas politik semacam reformasi dalam kehidupan kepartaian harus dijalankan. Partai-partai yang lebih menekankan kehidupan spiritual daripada material (spiritual-material) harus digabung menjadi satu kesatuan. Maka pada tanggal 5 Januari 1973 partai-partai politik Islam, seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabungkan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai-partai yang lebih mempunyai kecenderungan pada "material-spiritual" seperti Partai Katolik, Parkindo, PNI, dan IPKI sejak tanggal 10 Januari 1973 resmi tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Soeharto, dalam otobiografinya, mengatakan bahwa dalam usaha mencari keseimbangan dan keharmonisan antara kehidupan material dan spiritual kita akhirnya menemukan jalan keluar. Di samping kedua kelompok tersebut ada pula kelompok tengah, yaitu Golongan Karya (Golkar), yang semula bernama Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya). Pengelompokan tersebut secara formal berlaku pula pada fraksi di lingkungan DPR dan MPR.

Presiden Soeharto mengikuti Pemilu di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1977 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).



Sebelum pelaksanaan Pemilu 1977, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No. 3 tahun 1975 untuk mengatur proses penyederhanaan jumlah partai. Hanya ada dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Dengan komposisi kepartaian seperti ini maka pada Pemilu 1977, yang diikuti oleh tiga kontestan, menghasilkan 232 kursi untuk Golkar, 99 kursi untuk PPP, dan 29 kursi untuk PDI.

Pemilu ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982. Hasil perolehan suara Golkar secara nasional meningkat. Golkar hanya gagal memperoleh kemenangan di Aceh, tetapi di Jakarta dan Kalimantan Selatan berhasil merebut suara PPP. Golkar berhasil memperoleh tambahan 10 kursi, sedangkan PPP dan PDI masing-masing kehilangan lima kursi.

Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada 23 April 1987. Hasil Pemilu 1987 adalah PPP memperoleh 61 kursi, mengalami pengurangan 33 kursi dibanding dengan Pemilu 1982. Hal ini terjadi karena adanya larangan penggunaan asas Islam dan penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas pada waktu itu. Sebagai akibat praktis dari keharusan ini ialah diubahnya lambang partai, dari ka'bah menjadi bintang. Golkar memperoleh tambahan 53 kursi, sehingga jumlah kursi yang dikuasainya menjadi 299. PDI memperoleh kenaikan 40 kursi. Hal ini dicapai karena PDI berhasil membentuk DPP PDI sebagai hasil kongres tahun 1986 yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam.

Pemilu tahun 1992 diselenggarakan pada 9 Juni 1992 dengan hasil perolehan Golkar menurun dari 299 kursi menjadi 282 kursi, sedangkan PPP memperoleh 62 kursi dan PDI meningkat menjadi 56 kursi. Pemilu keenam dilaksanakan pada 29 Mei 1997 dengan hasil Golkar memperoleh mayoritas suara hingga 74,51 % dengan perolehan kursi 325 kursi. PPP mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 5,43 % dengan perolehan kursi 27 kursi. PDI mengalami kemerosotan perolehan suara karena hanya mendapat 11 kursi di DPR. Pemilu pada masa Orde Baru ini boleh dikatakan dapat berlangsung secara tertib karena peristiwa politik secara formal dijiwai oleh asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia).

TAMAN MINI INDONESIA INDAH: POTRET KERAGAMAN NUSANTARA

Serangkaian kunjungan resmi kenegaraan yang dilakukan Presiden Soeharto ke luar negeri ternyata memberi kesan khusus bagi Ibu Negara Tien Soeharto. Kunjungan ke luar negeri melahirkan hasrat di hati Ibu Tien Soeharto untuk membangun sebuah pusat kebudayaan Indonesia. Ia membayangkan sebuah pusat kebudayaan Indonesia yang sekaligus berfungsi sebagai tempat rekreasi, pendidikan, dan sarana pengembangan kebudayaan bangsa. Ia pun mulai melansir ide akan perlunya pembangunan apa yang kemudian disebut Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ia



membayangkan taman ini akan menyediakan sarana rekreasi yang sehat bagi masyarakat, tempat pendidikan dalam arti luas, serta tempat bagi pengenalan dan pengembangan pembangunan seni budaya bangsa. Taman ini bisa pula berfungsi sebagai salah satu pusat pengembangan dunia kepariwisataan. Ibu Tien Soeharto melontarkan gagasan untuk membangun sebuah miniatur yang menggambarkan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia ini dalam rapat Yayasan Harapan Kita pada bulan Maret 1971. Taman ini dibayangkannya akan bisa pula mendorong kesadaran Wawasan Nusantara.

Ternyata rencana itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Beberapa kalangan masyarakat, terutama para mahasiswa dan generasi muda, mengemukakan rencana yang mereka anggap mewah ini. Mereka menyebut rencana ini suatu pemborosan uang negara. Memang harus diakui juga bahwa rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indonesia ini disampaikan persis di saat harga beras sedang naik dan

Sementara pihak merasa lautan kita itu lautan bebas, maka mereka melakukan dengan caranya sendiri melewati lautan kita yang mengakibatkan kedaulatan kita diinjak-injak. Maka kita tawarkan kepada mereka: "Kamu harus mengakui kedaulatan wilayah Indonesia dan kami akan mengakui pada kepentinganmu". Kalau mau lewat, ini porosnya. Kita ijin mereka menggunakan poros yang kita tentukan itu. Tetapi tentu saja dengan syarat harus memberi tahu lebih dahulu, 'saya mau lewat' begitu isyarat mereka dan kita ijin mereka lewat. Demikian arahan Presiden Soeharto mengenai tata krama di lautan Indonesia.

Kiri (atas dan bawah): Ibu Negara Tien Suharto melakukan peletakan batu pertama pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 30 Juni 1972. Pembangunan yang dilakukan secara bertahap mulai dibuka untuk umum pada tanggal 20 April 1975. (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi).

krisis minyak tengah melanda dunia internasional, tetapi pemerintah mengambil keputusan mendukung gagasan yang melihat jauh ke depan ini. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Soeharto tanggal 11 April 1973 tempat bangunan utama *joglo*.

Ketika keputusan pasti dibuat, reaksi menentang terhadap rencana pembangunan TMII pun semakin mereda pula. Pelaksanaan proyek berjalan lancar sampai diresmikan penggunaannya pada 20 April 1975. Penambahan sarana baru di TMII pada tahun 1986 berupa Istana Anak-Anak Indonesia, Taman Bunga, Keong Mas, Museum Asmat, Pusat Informasi Budaya dan Wisata, serta Taman Among Putera mendapat sambutan meriah dari masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Kini TMII sudah menjadi objek wisata yang menarik dan dianggap sebagai jendela untuk melihat keragaman kebudayaan Indonesia yang mempesona.

MENGUTUHKAN WILAYAH INDONESIA: PENGAKUAN WAWASAN NUSANTARA

Deklarasi 13 Desember 1957, yang biasa juga disebut Deklarasi Djuanda, adalah satu sendi pokok kebijaksanaan negara tentang perairan Indonesia. Dengan deklarasi ini



Satelit Palapa A-1 meluncur dengan sukses, tanggal 8 Juli 1976 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Soeharto melakukan peresmian pemakaian satelit bumi Palapa, di Gedung DPR, tanggal 16 Agustus 1976 (Sumber: Istimewa).

wilayah NKRI ditentukan. Wilayah kelautan dihubungkan pulau-pulau Indonesia adalah Wilayah Indonesia. Karena itu ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Konsepsi inilah yang dikembangkan menjadi "Wawasan Nusantara" yang ditetapkan melalui Tap IV/MPR/1973. Maka sejak Juli 1974 Indonesia memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara ini di pelbagai forum hukum internasional, seperti Konferensi Hukum Laut Internasional dan Konferensi PBB tentang Hukum Laut. Setelah DPR menyetujui konvensi itu bulan Desember 1975, Presiden Soeharto pun mensahkan konvensi dengan UU No. 17 tahun 1975.

Dalam sidang bulan April 1982 rumusan-rumusan tentang Hukum Laut yang telah dibahas selama 10 tahun itu menjadi konvensi hukum laut. Di tahun ini perumusan Wawasan Nusantara dalam bentuk prinsip-prinsip mengenai negara kepulauan telah diselesaikan. Akhirnya Konvensi Hukum Laut

1982 ditandatangani Indonesia dan juga oleh lebih dari 150 negara lainnya. Ketika klaim Indonesia mendapat pengakuan internasional, maka luas wilayah Indonesia darat dan laut yang sebelumnya lebih kurang 2.027.807 kilometer persegi menjadi 5.193.250 kilometer persegi. Orde Baru bukan saja telah berhasil memperluas wilayah Indonesia secara hukum, tetapi juga menyelesaikan proses integrasi teritorial Indonesia.

PALAPA DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

Sejalan dengan Wawasan Nusantara, program bagi tersedianya sarana komunikasi dari satu daerah ke daerah mulai pula menjadi perhatian pemerintah. Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) mulai dibangun tahun 1974 dan selesai tahun 1976. Satelit ini diberi nama Palapa, sesuai dengan sumpah yang konon pernah diucapkan Gajah Mada, Mahapatih. Konon Sang Mahapatih ini ingin mempersatukan



Presiden Soeharto melepas perahu dan kapal nelayan pada peringatan Hari Koperasi di Desa Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 12 Juli 1989 (Sumber: ANTARA).

seluruh Nusantara dalam kemaharajaan Majapahit (abad ke-14). SKSD Palapa digunakan untuk pemancar TV, radio, dan telepon. Secara bertahap seluruh daerah dapat dijangkau oleh komunikasi SKSD. Sejak Pelita II, Indonesia telah menggunakan satelit komunikasi; tiga di antaranya masih berfungsi, yaitu satelit Palapa B2P, satelit Palapa B4, dan satelit B1 yang digunakan pihak swasta. Kapasitas seluruh satelit 72 transponder melalui 277 stasiun bumi. Selain dipakai di dalam negeri, satelit Palapa juga dimanfaatkan oleh negara tetangga, seperti Australia, Papua New Guinea, Macao, Selandia Baru, dan Vietnam.

Sentral telepon otomatis (STO) dibangun di berbagai tempat di semua provinsi. Pada bulan Agustus 1989 Presiden Soeharto meresmikan 33 STO di 15 provinsi dari Wonosari, Yogyakarta. Pada akhir Pelita V, pengembangan jaringan telepon otomatis telah mencapai seluruh wilayah, sehingga Indonesia bisa menyatakan bebas dari telepon engkol.

Pembangunan warung telekomunikasi (wartel) yang banyak diminati swasta dimulai pada tahun 1993. Melalui wartel masyarakat pun dapat dengan mudah menggunakan jasa telepon, faksimile, telegram, dan e-mail. Pada Pelita I, sambungan telepon di Indonesia baru 172.000, sedang pada Pelita V sudah mencapai 2.305.877 satuan sambungan. Jaringan telepon tidak hanya menyatukan seluruh daerah, tetapi juga mempermudah kontak dengan dunia luar. Indonesia menjadi bagian yang tidak terputus dalam hubungan internasional.

INDUSTRI DAMAI UNTUK KESEJAHTERAAN: SWASEMBADA PANGAN

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang tahap I, pembangunan pertanian mendapat prioritas utama. Sasaran pokoknya ialah swasembada beras. Sebagai tokoh yang lahir dan dibesarkan dalam suasana perdesaan dan pertanian, Presiden Soeharto sangat memahami kehidupan para petani, mayoritas rakyat Indonesia. Untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani di pedesaan, pada pertengahan tahun 1970-an Soeharto sering mengadakan kunjungan diam-diam (*incognito*) ke desa-desa. Benar-benar *incognito*, karena ia melakukan kunjungan ini secara rahasia dengan menggunakan mobil jeep dan bukan mobil kepresidenan. Jeep yang digunakan Toyota hardtop yang populer ketika itu dan dapat masuk ke pelosok-pelosok desa. Rombongan *incognito* Presiden tidak lebih dari tiga kendaraan, termasuk ajudan dan pengawal. Begitu rahasianya kunjungan diam-diam itu hingga dilakukan tanpa memberitahukan kepada para menteri, apalagi pejabat daerah setempat. Soeharto ingin mendapat informasi langsung dari sumber pertama. Rakyat yang diajak berdialog. Hasil dialog dengan rakyat secara langsung ini beliau gunakan dalam merancang berbagai kebijakan ekonomi.

Pada masa awal Orde Baru, Indonesia masih menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun 1969 produksi



Atas: Berkat keberhasilan dalam swasembada pangan, Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jendral FAO, Edward Saouma dalam forum dunia pada 14 November 1985, di Roma, Italia. (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi)
Bawah: Presiden Soeharto menerima Direktur Jendral FAO Edward Saouma saat menerima medali emas FAO, pada 21 Juli 1986 di Binagraha, Jakarta. (Sumber: Back Tohir/Setneg)





Atas ke bawah: Presiden Soeharto meninjau pameran pertanian di Bengkulu, tanggal 23 Maret 1982. Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto melakukan panen raya. Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984. Presiden Soeharto memberikan penjelasan kepada para tamunya tentang peternakan sapi di Tapos. Peternakan sapi di Tapos, yang merupakan percontohan peternakan sapi. (Sumber: Back Tohir/Setneg)





Temu wicara Presiden Soeharto dengan para petani teh di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 8 September 1987 (Sumber: ANTARA).



Presiden Soeharto Resmikan Pabrik Susu INDOMILK pada 3 Juli 1969 (Sumber: Istimewa).

beras Indonesia hanya 12 juta ton. Krisis pangan pernah terjadi di tahun 1972/1973. Mengawali masa pemerintahannya pada 1966, Presiden Soeharto memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk menunjang produksi pangan. Hal ini harus ditempuh karena, menurut pendapat Presiden Soeharto, kemiskinan dan kelangkaan pangan adalah prahara sosial dan sekaligus pemantik konflik dan krisis politik.

Sepanjang 1970-an hingga 1980-an pemerintah melakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan lima tahun. Swasembada pangan menempati tempat tersendiri dalam rencana pembangunan. Titik berat Pelita I ialah pembangunan sektor pertanian dengan tujuan mengejar keterbelakangan ekonomi. Dengan meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian, yang ditopang oleh kekuatan koperasi, maka dasar pembangunan tahap berikutnya telah pula bisa diletakkan.

Melalui program intensifikasi penanaman padi, pemerintah memberi kredit kepada para petani untuk modal pembelian bibit unggul dan obat-obatan. Pada tahun 1969 hasil padi 21,3 kuintal per hektar dan pada tahun 1993 dengan teknologi baru menghasilkan 43,8 kuintal per hektar. Dalam tahun 1970 sampai 1980-an, peningkatan produksi beras mencapai 4% per tahun, mengimbangi pertumbuhan penduduk yang 1,7 sampai 2 % per tahun. Dalam tahun 1984 produksi beras Indonesia

meningkat dari 23 juta ton menjadi 24 juta ton dan dengan demikian Indonesia telah mencapai swasembada beras.

Semakin meningkatnya pertumbuhan ini, tidak heran kalau Presiden Soeharto, dalam otobiografinya, menyatakan keterharuannya yang mendalam pada saat mendapat medali emas dari Direktur Jenderal FAO (*Food and Agricultural Organization*). Sudah sepantasnya bila di bulan Juli 1986 Presiden Soeharto menerima penghargaan internasional. Dunia internasional menilainya sebagai Kepala Negara yang berhasil mengubah Indonesia "*From Rice Importer to self-sufficiency*".

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Dalam upaya menuju negara industri yang berbasis pertanian, Presiden Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi dan institusi yang akan bisa menjalankan program-program tersebut. Pemerintah mengembangkan sistem kelembagaan yang dapat mendukung pertanian, seperti lembaga penelitian untuk menghasilkan inovasi dan pengembangan pertanian hingga berbagai bentuk kerjasama antar lembaga penyediaan sarana pertanian, seperti irigasi dan pabrik pupuk.

Dalam usaha mengembangkan ekonomi pedesaan, pemerintah menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Maka lahirlah Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bagian dari



Presiden Soeharto didampingi Mensesneg Moerdiono, Mentamben TB Sudjana, Menkop dan PPK Subiakto Tjakrawerdya dan Meneg Kependudukan Haryono Suyono sedang mengamati briket batubara, pada peresmian pabrik briket batubara di Gresik, Jawa Timur (Sumber: ANTARA).



Presiden Soeharto didampingi Mensesneg Moerdiono meninjau simpang susun Tomang, Jakarta Barat, pada November 1988 (Sumber: ANTARA).

derap pembangunan nasional. BUUD dan KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional, yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, dan obat-obatan).

Penyediaan sarana penunjang, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Para petani pun diberi kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pupuk. Di samping itu diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Inmas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Melalui subsidi yang terkontrol dengan baik pemerintah memberi fasilitas bagi ketersediaan benih unggul, pupuk, dan pestisida. Beberapa pabrik pupuk, seperti Petro Kimia di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh, merupakan bagian dari proyek pembangunan pertanian.

Jaringan irigasi teknis dibangun di berbagai daerah dan program pembibitan ditingkatkan. Teknologi pertanian diperkenalkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, Kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa) juga menjadi salah satu program penyuluhan pertanian Orde Baru yang khas, karena

menyuguhkan temu wicara langsung petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau presiden. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian. Kompetisi ini diikuti oleh para petani yang berprestasi dari berbagai daerah. Kelompencapir merupakan program Orde Baru di bidang pertanian yang diselenggarakan oleh Departemen Penerangan. Kelompencapir diresmikan pada tanggal 18 Juni 1984 melalui keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia (No.110/Kep/Menpen/1984).

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

Untuk meningkatkan pelayanan bagi tuntutan mobilitas penduduk dan barang-barang dari satu ke tempat yang lain, maka pembangunan sarana dan prasarana di darat, laut, dan udara tentu saja harus pula dilaksanakan. Pemerintah pun membangun jalan tol dan jalan layang agar dapat mengatasi peningkatan tuntutan transportasi yang cepat di kota-kota. Terminal baru dibangun untuk menggantikan terminal lama yang sudah tidak mampu lagi menampung penumpang dan kendaraan. Di daerah yang dapat memanfaatkan sungai untuk angkutan, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya pemerintah membangun dermaga baru dan menambah jumlah kapal pengangkutan. Selama PJP (Pembangunan Jangka Panjang) I, penyeberangan di seluruh Indonesia meningkat tajam. Pada Pelita I kapasitas penumpang baru



Bawah: Presiden dan Ibu Tien Soeharto dan beberapa Menteri meninjau Pembangunan Tahap II Bandar Udara Internasional di Cengkareng, Jawa Barat, Senin tanggal 7 Mei 1988 (Sumber: ANTARA).



Presiden dan Ibu Tien Soeharto didampingi Menristek B.J. Habibie memperhatikan maket sebuah jembatan gantung se usai meresmikan Bandara Hang Nadim di Batam, Riau (Sumber: ANTARA).

mencapai 11 juta orang, sedangkan pada akhir Pelita V jumlahnya mencapai 56 juta orang. Armada pelayaran, baik pelayaran Nusantara, pelayaran rakyat, pelayaran khusus, maupun perintis, terutama peran swasta, meningkat tajam. Pada Pelita I jumlah kapal 1812 buah, sedangkan pada Pelita V telah menjadi 9.148 buah. Pada Pelita I pelayaran luar negeri belum dimiliki, tetapi pada Pelita V pemerintah telah mempunyai 27 kapal. Dengan dibangunnya pelabuhan peti kemas Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan, pembangunan pelabuhan juga meningkat tajam.

Transportasi udara juga mengalami perkembangan pesat. Selama PJP I dikembangkan 240 *rute* penerbangan yang mencakup semua provinsi. Angkutan udara dari dan ke negara asing terutama dilayani oleh Garuda Indonesia dengan daya angkut yang semakin banyak dan semakin canggih. Bandar udara yang canggih dibangun di Cengkareng dan diresmikan pada tahun 1985 dengan nama Bandar Udara Internasional Sukarno-Hatta. Perkembangan jalan raya juga mengalami peningkatan sangat tajam. Pada Pelita I baru dibangun 50.000 kilometer, sedangkan pada Pelita V telah mencapai panjang 350.000 kilometer.

PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Soeharto menjadikan perkembangan pendidikan sebagai hal yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. Pada 1973 Presiden

Soeharto mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) No 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Tujuan kebijakan ini untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan sektor perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD, yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Dana pembangunan SD Inpres berasal dari hasil penjualan minyak bumi yang kebetulan harganya sedang naik sekitar 300 persen dari masa sebelumnya.

Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program SD Inpres, hampir setiap tahun ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun. Sebelum program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dilaksanakan, jumlah gedung SD pada tahun 1968 sebanyak 60.023 unit dan gedung SMP sebanyak 5.897 unit. Pada awal Pelita VI, jumlah itu meningkat menjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung SMP. Pembangunan paling besar terjadi pada periode 1982/1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga periode 1993/1994, tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.

Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh penambahan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berada pada kisaran angka ratusan ribu, pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta. Para guru ini ditempatkan di sekolah-sekolah Inpres yang telah dibangun tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu



Presiden Soeharto meninjau program pendidikan dasar 9 tahun (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Program pendidikan dasar 9 tahun merupakan prioritas pembangunan pendidikan masa Orde Baru (Sumber: Back Tohir/Setneg).

juga terjadi pada pengajar di tingkat SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai hampir 6,5 triliun rupiah.

Setelah giat membangun sarana pendidikan, maka pada tanggal 2 Mei 1984, di akhir Pelita III pemerintah pun mencanangkan Program Wajib Belajar. Dalam sambutan peresmian wajib belajar itu Presiden Soeharto menyatakan bahwa adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7–12 tahun untuk menikmati pendidikan dasar. Upacara pencanangan rencana ini dilakukan secara besar-besaran di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Program wajib belajar mewajibkan setiap anak usia 7–12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar enam tahun.

Program ini tidak sama dengan kebijakan wajib belajar di negara lain, yang mempunyai unsur paksaan dan pemberian sanksi bagi siapa saja yang mengabaikan. Pemerintah Orde Baru hanya mengimbau orang tua agar memasukkan anaknya yang sudah cukup umur ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah dan peralatan sekolah, di samping tenaga guru dan kepala sekolah. Meski program Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah menyiasatinya melalui program beasiswa. Kemudian muncullah program

Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Program tersebut menawarkan konsep dukungan dan peran-serta masyarakat untuk penuntasan Wajar Sembilan Tahun.

Di tingkat pendidikan tinggi, diprogramkan beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga miskin. Program yang disalurkan melalui Yayasan Supersemar ini dikenal dengan nama “beasiswa Supersemar”. Program ini mulai dijalankan pada tahun 1984. Sampai tahun 1998, Yayasan Supersemar telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa program sarjana (S1) tidak kurang dari 254.889 orang dan 581.839 orang siswa sekolah menengah kejuruan (SMK), sedangkan mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) tercatat 5.703 orang. Sebanyak 9.038 orang atlet berprestasi pun menerima beasiswa Supersemar. Yayasan Supersemar yang didirikan oleh Soeharto memposisikan diri sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi masalah dana pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Hal ini disebabkan pemerintah sendiri belum sanggup mengatasi beban biaya pendidikan sepenuhnya.

Keberhasilan program wajib belajar enam tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar (SD) sebesar 1,4 persen. Angka partisipasi SD menjadi 89,91 persen pada akhir Pelita IV. Kenaikan angka partisipasi itu menambah kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak yang ikut program wajib belajar selanjutnya, menjadi 7–15 tahun, atau tamat sekolah menengah pertama.



Kirab Remaja Nasional ke-4 tahun 1995 (Sumber: Republika)

Sepuluh tahun kemudian, program Wajar berhasil ditingkatkan menjadi sembilan tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Upaya pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun pada kelompok usia 7–15 tahun mulai diresmikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1994.

Program Wajar diakui berbagai kalangan telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia. Fokus utamanya adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Pembangunan pendidikan masih terfokus pada peningkatan secara kuantitatif, belum begitu memperhatikan unsur kualitas atau mutu pendidikan. Program pemerataan kesempatan bersekolah bagi anak-anak usia sekolah bertujuan untuk menaikkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM), yang diharapkan memberikan implikasi positif terhadap prestasi pembangunan pada masa pemerintah Orde Baru.

Setelah perluasan kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa masih banyak penduduk yang buta huruf. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan pencanangan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus

1978. Cara yang ditempuh ialah dengan jalan pembentukan kelompok belajar atau Kejar.

Kejar ialah program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10–45 tahun dengan tujuan agar bisa membaca serta menulis huruf dan angka Latin. Tutor atau pembimbing setiap kelompok ialah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap Kejar bersifat fleksibel.

Salah satu keberhasilan program Kejar terlihat pada semakin menurunnya angka statistik penduduk buta huruf. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi hanya 28,8 persen. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen.

Karena terjadinya perluasan pendidikan, maka perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pun terus pula meningkat. Pada tahun 1971, persentase penggunaan bahasa nasional mencapai 40,8%. Dalam sensus 1980, statistik telah menunjukkan angka 61,4%, dan pada 1990 mencapai 80%. Penggunaan bahasa nasional dalam surat kabar dan majalah serta media elektronik memberikan sumbangan yang berarti bagi kenaikan persentase penggunaan bahasa nasional di seluruh Indonesia.



Atas ke bawah: Presiden Soeharto didampingi Ketua LIPI Prof.Dr. Bachtiar Rifai sedang meninjau pameran LIPI di Bina Graha, tahun 1976 (Sumber: ANTARA). Presiden Soeharto didampingi Menristek/Ketua BPP Teknologi BJ.Habibie meninjau Pameran IPTEK di Taman Mini Indonesia Indah, tanggal 10 November 1995 (Sumber: ANTARA). Presiden Soeharto meninjau ruang instalasi radio metalurgi di kawasan Puspitek Serpong, Tangerang Jawa Barat, pada 9 Desember 1990 (Sumber: ANTARA).

Atas ke bawah: Kapal Palindo Jaya 500 buatan PT PAL tahun 1995 (Sumber: Back Tohir/Setneg). Pesawat N250 buatan putra-putra bangsa Indonesia, 10 November 1994 (Sumber: Back Tohir/Setneg). Presiden Soeharto melakukan pelepasan kereta api bersama Menristek BJ. Habibie di stasiun Gambir, Jakarta (Sumber: Back Tohir/Setneg).



PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA KEBUDAYAAN NASIONAL

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang, maka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi pengembangan pertanian dan industri, ditingkatkan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang mendukung pertanian, seperti biologi, bioteknologi, perikanan, kehewan, kehutanan, dan hidrologi, serta ilmu metalurgi, geologi, pertambangan, dan sebagainya dikembangkan untuk mempercepat pengembangan dunia industri.

Instansi pemerintah yang menangani bidang ilmu pengetahuan dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu Universitas, Badan Litbang Departemen, dan Lembaga Penelitian non Departemen (LIPI, BATAN, LAPAN, dan BPPT). Untuk mendapatkan hasil yang tertinggi serta menjaga tidak terjadinya tumpang tindih dalam penelitian, pemerintah membentuk Dewan Riset Nasional yang bekerja merumuskan kebijaksanaan riset nasional dan memilih prioritas bidang masalah yang mendesak untuk diteliti. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1990 Presiden dengan resmi menyatakan berdirinya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), yang anggotanya terdiri para ilmuwan yang dinilai paling terkemuka dalam bidang keilmuan masing-masing. AIPI terdiri atas lima bidang keilmuan, yakni ilmu kedokteran, ilmu rekayasa, ilmu dasar, ilmu sosial dan kebudayaan. Di samping memajukan semua cabang ilmu pengetahuan serta



Atas ke bawah: Presiden Soeharto menyerahkan naskah Negara Kertagama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), Mashuri, S.H. yang diperolehnya dari Ratu Juliana dari Belanda tahun 1972 (Sumber: Istimewa). Presiden Suharto meresmikan pemugaran Candi Borobudur di Yogyakarta tahun 1983 (Sumber: DEPPEN). Presiden Soeharto peringatan Eka Dasa Rudra di Bali, 28 Maret 1979 (Sumber: Setneg).





Atas: Ibu Tien Soeharto sedang melakukan imunisasi di Puskesmas. (Sumber: Back Tohir/Setneg)



Atas: Presiden Soeharto beserta Ibu Negara Tien Soeharto saat meresmikan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita didampingi Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Sujudi. (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi).

memantau perkembangan dunia ilmu pengetahuan, AIPI juga bertugas menjalin kerjasama keilmuan internasional.

Meskipun berbagai usaha telah dilakukan, tetapi ternyata kemampuan dunia pendidikan kesarjanaan dan keilmuan masih saja tertinggal dibanding kebutuhan. Pada tahun 1975 ilmuwan dan peneliti ilmiah berjumlah 10.225 orang, sedangkan kebutuhan pada tahun itu adalah 33.650 orang. Proyeksi kebutuhan tenaga ilmiah dan penelitian Indonesia tahun 2000 adalah 392.000 orang atau harus dapat dilipatkan sebanyak 38 kali dari jumlah tahun 1975. Kebutuhan tenaga peneliti terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Pembangunan bidang kebudayaan juga mendapat prioritas yang sangat penting. Taman Ismail Marzuki yang dibina oleh Dewan Kesenian Jakarta dapat dikatakan sebagai pelopor dalam penyediaan wadah bagi para seniman kreatif dari segala cabang kesenian. Daerah-daerah kemudian juga membentuk dewan kesenian mereka masing-masing. Pemerintah DKI bahkan membentuk lembaga kehormatan kebudayaan, Akademi Jakarta. Sejak tahun 1990-an berbagai pertemuan kebudayaan daerah pun diadakan. Semua usaha ini mencapai puncak dengan diadakannya Kongres Kebudayaan tahun 1991. Hasil pemikiran dan gagasan kongres ini dipakai BAPPENAS dalam merumuskan Repelita.

PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

Masalah kesehatan yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan pencemaran lingkungan, kekurangan gizi, banyak anak, dan lemahnya jaringan pelayanan kesehatan. Semua faktor ini secara bersama-sama merupakan penyebab munculnya penyakit yang bersifat parasitis, infeksi, dan kematian dini. Masih meluasnya malaria, diare, kolera, tifus, disentri, batuk kronis, polio, tetanus, dan penyakit lain adalah bukti dari betapa masalah tersebut belum bisa diatasi dengan memuaskan.

Pada bulan November 1967, pemerintah mensponsori seminar yang membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan kondisi dan kemampuan rakyat Indonesia. Pada waktu itulah dibahas konsep Puskesmas, yang disepakati sistem tiga Puskesmas: tipe A, B, dan C. Dengan menggunakan rekomendasi seminar ini, Departemen Kesehatan menyiapkan rencana induk pelayanan kesehatan terpadu. Akhirnya pada tahun 1968 dalam rapat kerja kesehatan nasional dicetuskan bahwa Puskesmas adalah sistem pelayanan kesehatan terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah (Departemen Kesehatan) menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).



Suasana di Posyandu, di berbagai Posyandu dilakukan penyuluhan kesehatan dan imunisasi kepada Balita (Sumber: Republika)



Penyuluhan keluarga berencana dilakukan oleh ibu-ibu PKK (Sumber: Tempo)

Pada tahun 1969, sistem Puskesmas yang disepakati hanya tipe A dan B saja. Tipe A dikelola oleh dokter, sedang tipe B dikelola oleh paramedis saja. Dengan terjadinya perkembangan tenaga medis, maka pada tahun 1979 tidak lagi diadakan perbedaan Puskesmas tipe A atau tipe B. Sejak tahun itu hanya ada satu tipe Puskesmas, yaitu yang dikepalai oleh seorang dokter. Pada tahun 1984 tanggung jawab Puskesmas ditingkatkan lagi dengan berkembangnya program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana.

Pada tahun 1984 pemerintah memperkenalkan Posyandu (pos pelayanan terpadu), yaitu pengembangan kesehatan anak mulai dari pos penimbangan badan dan kurang gizi. Posyandu mempunyai lima program, yaitu kesehatan ibu dan anak/KIA, keluarga berencana/KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Dalam perkembangan selanjutnya Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga difungsikan untuk pelayanan ibu hamil, bahkan pada waktu-waktu tertentu posyandu dimanfaatkan untuk promosi dan distribusi vitamin A, fe, garam yodium, dan suplemen gizi lainnya.

Posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyakit, khususnya pada ibu dan anak. Apalagi Kementerian Kesehatan menjadikan metode pencegahan daripada penyembuhan untuk peningkatan kesehatan. Di samping itu, Posyandu juga memberi vaksinasi dan makanan suplemen kepada bayi dan balita. Posyandu juga menjadi

media deteksi dini kasus-kasus malnutrisi dan kekurangan gizi pada bayi dan balita.

Gebrakan Soeharto lewat Posyandu menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan angka kematian ibu ketika melahirkan menurun dari 390 kematian per 100.000 kelahiran pada 1990 menjadi 228 kasus pada tahun 2007. Angka kematian bayi juga menurun dari 70 kematian per 1.000 bayi lahir pada 1986 menjadi 34 pada 2007. Demikian pula halnya dengan angka kematian balita menurun dari 69 kematian per 1.000 kelahiran pada 1993 menjadi 44 pada 2007. Prestasi ini bahkan membuat sebuah negara Amerika Latin, Honduras, mengadopsi konsep Posyandu dan mengembangkannya bahkan lebih baik daripada Indonesia saat ini.

Puskesmas yang digagas Presiden Sukarno berkembang pesat di era presiden Soeharto. Melalui program Inpres Sarana Kesehatan pada 1994 hingga 1995 telah berdiri 6.984 unit Puskesmas, 20.477 unit Puskesmas Pembantu, dan 3.794 unit Rumah Dinas untuk dokter di daerah terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, pemerintah mengupayakan penempatan dokter di daerah-daerah tertinggal yang dikenal dengan program dokter Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada 1994–1995 telah ditempatkan lebih dari 3.000 dokter PTT dan 800 dokter gigi PTT. Jumlah tersebut terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.



Presiden Soeharto menandatangani spanduk KB mandiri terpanjang di dunia dengan ukuran 5.500 m, di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis, 12 Juli 1990 (Sumber: ANTARA).

Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Presiden Soeharto memulai kampanye “Keluarga Berencana” yang menganjurkan setiap pasangan untuk mempunyai cukup dua anak saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit, sampai kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Keberhasilan Soeharto melakukan pengendalian jumlah penduduk ini dicapai melalui program Keluarga Berencana Nasional yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program pengendalian kependudukan di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui jumlah anak dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia. Indonesia mengakui pula bahwa pembatasan jumlah penduduk adalah unsur yang penting dalam perencanaan ekonomi dan sosial. Direktur UNICEF James P. Grant memuji Indonesia karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan melakukan berbagai upaya lain dalam rangka menyejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Grant bahkan mengemukakan bahwa apa yang telah dicapai pemerintah Indonesia sebaiknya menjadi contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi.

Di era Soeharto, pengendalian penduduk berjalan dengan efektif. Hasilnya adalah menurunnya angka kelahiran setiap tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk tahunan pun turun dari 2,32% pada tahun 1960-an menjadi 2,10% pada tahun 1970-an dan 1,97% pada tahun 1980-an. Hal ini menjadikan program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikutinya.

Pada umumnya sterilisasi dan aborsi tidak dapat diterima secara kultural dan secara religius, sehingga program KB dilakukan terutama dengan pil kontrasepsi dan alat kontrasepsi intra-uterus. Pemerintah pun mengalokasikan sumber daya dan dana yang besar untuk program ini.

Gebrakan menarik lainnya ialah pengadaan bidan. Akseptor dan calon akseptor Keluarga Berencana (KB) semakin merebak di berbagai pelosok desa dan tidak bisa lagi dilayani dokter karena lokasi tempat tinggal mereka jauh dari Puskesmas. Memperhatikan situasi ini Presiden Soeharto pun menggelar Inpres Bidan (*crash* program pengadaan bidan) dengan membuka sekolah bidan di mana-mana. Maka dalam masa tiga tahun saja ternyata kebutuhan bidan bisa terpenuhi. Secara khusus, Posyandu adalah pusat penyebaran informasi tentang betapa pentingnya KB di samping pusat pelayanan kesehatan sebelum dan setelah persalinan. Posyandu mengajarkan warga bagaimana cara mengelola nutrisi yang baik, pakaian yang bersih, dan rumah yang sehat.



Program ABRI Masuk Desa (AMD) di daerah Curug dan Pensar, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang (Sumber: Tempo)



Defile pasukan pada peringatan hari ulang tahun ABRI di Parkir Timur Senayan (Sumber: J. Sihombing/Kompas).

Program Keluarga Berencana dan program lain yang terkait berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk secara nyata. Bersamaan dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk, tingkat kesejahteraan rakyat pun terus membaik. Angka kematian kasar turun dari 19,1 per 1.000 penduduk pada kurun 1967–1970 menjadi 7,9 per 1.000 penduduk pada tahun 1993. Angka kelahiran total wanita juga menurun, dari 5,6 anak dalam kurun waktu 1967–1970 menjadi 2,87 anak pada akhir PJP 1. Perkembangan ini mencerminkan peningkatan derajat kesehatan rakyat yang sekaligus mendorong bertambah panjangnya umur rata-rata orang Indonesia.

PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK PENERAPAN KONSEP DWIFUNGSI ABRI MASA ORDE BARU

Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang memperkenalkan konsep “dwifungsi ABRI”. Konsep Dwifungsi ABRI dirumuskan sebagai “jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang Hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Bertolak dari pemahaman ini, maka ABRI berkeyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) tetapi juga meliputi wilayah yang berada di luar bidang ini. Sebagai

kekuatan Hankam, ABRI adalah unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sedangkan sebagai kekuatan sosial ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional.

Sebagai kekuatan sosial, setidaknya ada dua fungsi yang dimiliki ABRI, yaitu fungsi stabilisator dan fungsi dinamisator. Identitas ABRI sebagai pejuang dan kemanunggalannya dengan rakyat secara otomatis menjadikan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator dalam kehidupan bangsa dan negara. Maka begitulah, di samping berperan sebagai kekuatan militer ABRI juga mempunyai fungsi di bidang politik. Di era Presiden Soeharto tampak jelas bahwa betapapun fungsi kemiliteran ABRI tidak bisa diabaikan, namun peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan. Hal ini wajar karena ABRI memang memiliki kekuatan yang paling besar.

Maka bisalah dipahami bahwa konsep dwifungsi ABRI menampilkan wajahnya yang jelas dalam peranan militer di DPR, MPR, dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Seperlima dari jumlah perwira yang aktif menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), tetapi mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat. Perwira ABRI yang bertugas di MPR dan DPR bertanggung jawab langsung

Searah jarum jam: Defile Pasukan dan kendaraan tempur pada peringatan HUT ABRI ke 39 dengan Inspektur Upacara Presiden Soeharto di Parkir Timur Senayan tahun 1984 (Sumber: ANTARA). Presiden Soeharto mencoba pesawat tempur Mirage -2000 buatan Perancis pada Pameran Kedirgantaraan Indonesia 1986 di Kemayoran, Jakarta (Sumber: ANTARA). Presiden dan Ibu Tien Soeharto meninjau KRI Teluk Banten tahun 1994, seusai meresmikan pembangunan pangkalan AL Teluk Rantai (Sumber: ANTARA).



kepada panglima ABRI. Para perwira ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian kondisi sosial politik serta mengamati kondisi demografi melalui aparat teritorial di seluruh daerah, seperti gerakan AMD (ABRI Masuk Desa). Karena menyadari bahwa militer adalah golongan yang setia kepada modernisasi dan pembangunan maka bisalah dimaklumi kalau dalam bidang politik secara umum militer cenderung bersifat anti-partai.

Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata kelihatan dalam Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar biasa disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Pada Munas I Golkar di Surabaya (4–9 September 1973), umpamanya, ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat I dan daerah tingkat II jabatan ketua Golkar dipegang perwira aktif ABRI. Terpilihnya Sudharmono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar (pada Munas III) juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer.

Selain dalam sektor eksekutif, peranan ABRI dalam bidang politik kelihatan juga dalam pemilihan umum. Melalui Fraksi Karya ABRI mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah besar

(dalam DPR dan MPR). Dengan demikian keberadaan ABRI dalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak, terutama dalam rangka pengamanan kebijaksanaan eksekutif dan pengecilan kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif. Efektivitas ini semakin dimungkinkan karena adanya sinergi antara Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan dalam proses kerja DPR, di samping tentu saja adanya perangkat aturan kerja DPR yang membatasi peran satu fraksi secara otonom. Dalam MPR, ABRI (wakil militer) mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah dalam formulasi kebijakan oleh MPR.

PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (P4)

Soeharto menyadari benar betapa keragaman ideologi dan bahkan landasan serta sentimen kultural bisa menjadi sumber disintegrasi bangsa; bahkan di masa revolusi nasional ketika musuh bersama sedang dihadapi, konflik sebangsa bisa meletus. Sebagai contoh, di Sumatra terjadi apa yang disebut Revolusi Sosial, di Jawa meledak peristiwa Tiga Daerah dan Peristiwa Madiun. Setelah kedaulatan telah



Pengibaran bendera Merah Putih oleh siswa sekolah dasar pada program penataran P4 bagi sekolah dasar (Sumber: Republika).

berada di tangan bangsa sendiri pun Republik Indonesia masih diguncang oleh berbagai corak konflik internal, mulai dari pemberontakan separatis, seperti Republik Maluku Selatan, sampai pada yang bercorak keagamaan, seperti Darul Islam, dan ideologi, seperti usaha *coup d'etat* yang dilancarkan oleh G-30-S PKI. Karena itulah Presiden Soeharto melihat betapa perbedaan ideologi dan pandangan tentang kemasyarakatan dan kenegaraan bisa menjadi sumber perpecahan bangsa. Ia melihat bahwa UUD 1945 dan Pancasila bukan saja landasan hidup kenegaraan yang harus dijaga, tetapi juga sumber abadi persatuan dan kesatuan. Orde Baru bukan saja sebuah rezim yang melihat persatuan bangsa adalah landasan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang tidak boleh disaingi, tetapi juga *raison d'être* kehadiran negara.

Maka sejalan dengan pemikiran ini pemerintah pun mengadakan penyelenggaraan kursus wajib tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) bagi pegawai negeri, pelajar, dan kelompok lain. Kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 1978. Melalui kegiatan ini warga negara mendapat kesempatan untuk secara terorganisasi membicarakan jati diri kita sebagai sebuah bangsa, falsafah dan nilai yang mendasarinya, sejarah masa lalunya, dan cara bagaimana peradaban bangsa ini hendak ditegakkan. Melalui pemahaman terhadap masalah-masalah ini maka elemen-elemen bangsa relatif lebih mudah membangun konsensus untuk mengalokasikan energinya bagi

pembangunan peradaban bangsa. Melalui kesatupaduan orientasi kebangsaan itu pula Indonesia bisa diharapkan muncul sebagai bangsa yang kuat dan disegani.

P4 juga merupakan sarana pendidikan masyarakat untuk memupuk toleransi dalam keragaman agama, pendalaman falsafah bangsa, kesadaran Wawasan Nusantara, dan pengertian tentang arah kebijakan pembangunan bangsa. Pendidikan masyarakat yang dikelola secara sistematis dan terorganisasi memungkinkan seluruh elemen bangsa mengalokasikan energinya dalam satu kesamaan orientasi kebangsaan melalui peran dan tanggung jawab masing-masing.

Materi utama P4 adalah nilai-nilai yang mendasari bangunan peradaban bangsa (falsafah bangsa) yang secara formal disarikan ke dalam Pancasila sebagai Dasar Negara. Selain memperoleh kesadaran yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, peserta P4 juga diharapkan mengadakan dialog antara nilai-nilai ideologis dengan realitas keseharian dan juga dengan nilai-nilai eksternal yang masuk ke dalam kesadaran masyarakat Indonesia. Pada level tertentu peserta P4 juga diharapkan mengadakan konfrontasi nilai-nilai Pancasila dengan konsepsi atau teori pembangunan serta sistem penyelenggaraan negara yang datang dari luar.

Dalam P4 juga diperkenalkan Wawasan Nusantara sebagai suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang mengutamakan



Presiden Soeharto sedang beramah-tamah dengan para peserta Penataran P₄ angkatan II Pemuka Agama Seluruh Indonesia di Istana Negara (Sumber: ANTARA).



Presiden Soeharto meresmikan perkemahan Wirakarya Dunia I, *The world comdeka*, di Malang tahun 1993 (Sumber: ANTARA).

persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara tidak hanya menekankan kesadaran akan keutuhan wilayah (wawasan teritori fisik), tetapi juga mencakup nilai-nilai kenusantaraan, kesadaran kesejarahan akan eksistensi peradaban Nusantara, manajemen peradaban Nusantara, dan interaksinya dengan kawasan di luarnya.

Melalui transformasi itu semua masyarakat Indonesia pada akhirnya menyadari bahwa (1) adanya ikatan batin antara dirinya dan wilayah (teritori fisik) Nusantara, (2) memahami cita-cita luhur pembangunan peradaban Nusantara, (3) memahami kenapa negara Indonesia modern dibangun di atasnya, serta (4) memahami keterkaitan antara cita-cita pembangunan peradaban Indonesia modern dan cita-cita peradaban Nusantara. Transformasi Wawasan Nusantara menjadikan segenap komponen bangsa menyadari jati dirinya sebagai sebuah bangsa dan memunculkan elan vital pembangunan peradaban dalam lingkup Negara Indonesia modern.

Selain penyebaran program edukasi masyarakat melalui P₄, Presiden Soeharto juga memperkenalkan konsep Kadarkum (keluarga sadar hukum). Melalui program Kadarkum setiap warga negara didorong untuk memahami batasan-batasan yang dikategorikan sebagai bentuk pencideraan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban

sesuai dengan aturan formal perundang-undangan. Di samping memahami peraturan perundang-undangan, masyarakat didorong memahami sistem penegakan hukum sehingga bisa melakukan upaya hukum manakala hak-haknya dicerai.

Pada tahun 1983 pemerintah memutuskan bahwa semua organisasi harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologis. Satu rancangan undang-undang diajukan ke DPR yang kemudian disahkan pada bulan Februari 1985. Maka untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila dapat diresapi dan diamalkan setiap warga negara Indonesia harus mengikuti penataran P₄. Di sekolah, setiap siswa baru mulai tingkat sekolah menengah pertama sampai tingkat perguruan tinggi harus mengikuti penataran P₄ selama satu atau dua minggu. Demikian juga masyarakat yang baru menjadi pegawai negeri atau pegawai negeri yang akan naik jabatannya diharuskan mengikuti P₄. Pemerintah secara khusus mengatur P₄ berdasarkan Tap MPR No II Tahun 1978.

MELEMBAGAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pembinaan kerukunan umat beragama merupakan salah satu strategi dasar pembangunan Orde Baru. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara mencanangkan “trilogi kerukunan”, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan Pemerintah. Pada tahun 1980 wadah



Presiden Soeharto didampingi oleh ibu Tien Soeharto meresmikan penggunaan Masjid Istiqlal Jakarta, 22 Februari 1978 (Sumber: Istimewa).



Presiden Soeharto membuka Festival Istiqlal ke II tahun 1995 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

musyawarah antarumat beragama pun dibentuk. Wadah musyawarah ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja se-Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI). Berbagai kegiatan untuk membina kerukunan, seperti pekan orientasi antarumat beragama dengan pemerintah, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan perjalanan silaturahmi majelis-majelis agama pusat ke daerah pun dijalankan. Kegiatan yang secara terus-menerus dijalankan bukan saja berhasil mengatasi konflik-konflik lokal yang kadang-kadang terjadi. Keberhasilan Indonesia dalam memajukan kerukunan agama boleh jadi merupakan dasar pertimbangan Inter Action Council untuk mengundang ketua MUI KH. Hasan Basri untuk berpidato mewakili umat Islam dalam pertemuan konsultatif antara tokoh politik dan agama dunia di Roma bulan Maret 1987.

POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

Politik luar negeri Orde Baru dianggap sebagai antitesis politik luar negeri Demokrasi Terpimpin (yang kemudian disebut Orde Lama) yang bersifat *high profile*, revolusioner, dan tegas. Pada era Orde Baru sifat dan sikap politik luar negeri lebih mengutamakan visi dan misi jangka panjang. Presiden Soeharto terkenal pandai dalam hal mengatur strategi, detail, dan cerdas dalam mengolah kesempatan. Berbeda dengan Sukarno yang hangat dan populer, Soeharto cenderung muncul sebagai sosok yang formal dan tidak hangat, tetapi justru hal ini menjadikan tindakan yang diambilnya cenderung efisien dan tidak pandang bulu. Maka boleh dikatakan bahwa sampai dengan tahun 1980-an, politik luar negeri Indonesia cenderung bersifat *low profile* tanpa banyak gerakan politik namun konsisten.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia lebih fokus pada pembangunan sektor ekonomi. Presiden Soeharto percaya tanpa adanya stabilitas politik keamanan

Penandatanganan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia, oleh Menlu RI Adam Malik, Menlu Malaysia, Tun Abdul Razak di Gedung Pancasila 11 Agustus 1966 (Sumber: DEPPEN).



dalam negeri dan regional pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik. Pemikiran inilah yang mendasari Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan "*good neighbourhood policy*" melalui *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Tujuan utama politik luar negeri Soeharto adalah berusaha memobilisasi sumber dana internasional untuk membantu rehabilitasi ekonomi negara dan menjalankan pembangunan serta menjamin lingkungan regional yang aman untuk memudahkan Indonesia berkonsentrasi pada agenda domestiknya.

Presiden Soeharto mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia yang berprinsip non-blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif, karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia bebas: Indonesia bebas dari ikatan apa pun, baik secara militer, politik maupun secara ideologis; bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak mana pun, baik secara militer, politis, maupun ideologis.

Untuk mewujudkan politik luar negeri yang "bebas dan aktif" Soeharto menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia. Karena itulah ia menandatangani persetujuan

Indonesia-Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Sejak 31 Agustus 1967 kedua negara kembali membuka hubungan diplomatik. Pemerintah Indonesia juga mendaftarkan diri menjadi anggota PBB lagi. Pada tanggal 19 September 1966 Indonesia mengumumkan bahwa negara ini bermaksud melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB. Maka pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya dan menjadi anggota PBB, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Soeharto juga menjalin kembali hubungan baik dengan dunia Barat dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund/IMF, tetapi menjauhi ideologi komunis.

Presiden Soeharto tampaknya meletakkan tumpuan politik luar negeri pada konsepsi geostrategi Gajah Mada yang didasarkan pada konsep Wawasan Nusantara dalam skala makro. Sebuah strategi politik luar negeri yang diletakkan pada kendali stabilitas keseluruhan Nusantara yang terdiri dari wilayah inti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara-negara lingkaran dekat dan lingkaran luar Nusantara.

Stabilitas lingkaran luar Nusantara diwujudkan dengan pembentukan ASEAN lima bulan setelah pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden oleh MPRS. Menteri Luar Negeri Adam Malik dapat meyakinkan Thailand, Philipina, Singapura, dan Malaysia bahwa



Atas kebawah: Berbagai pertemuan
Kepala Negara ASEAN di Bali pada 23
– 25 Februari 1976 (Sumber: Kemlu).



Indonesia di bawah Orde Baru mempunyai keinginan kuat dan komitmen untuk bersikap konstruktif terhadap eksistensi dan kedaulatan negara-negara tetangga. Ia juga berhasil meyakinkan bahwa Jenderal Soeharto sebagai pucuk pimpinan baru Indonesia tidak merepresentasikan kelompok militer yang agresif. Ia bahkan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan solidaritas negara-negara Asia Tenggara. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ketika deklarasi Bangkok ditandatangani, tonggak berdirinya ASEAN pun telah pula dipatirkan.



Indonesia, yang memainkan peran utama dalam pembentukan organisasi ASEAN, memandang kerja sama ASEAN sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negerinya. Negara-negara anggota ASEAN mempunyai konvergensi kepentingan nasional, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap nonkomunis. Dengan demikian stabilitas negara-negara anggota ASEAN juga sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Forum regional ini juga merupakan wadah untuk memenuhi berbagai corak kebutuhan masyarakat Indonesia. Di samping itu forum ASEAN adalah juga suasana untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai negara demokratis yang sangat layak bagi investasi industri. Keberhasilan pemerintah Soeharto membangun Indonesia sebagai salah satu negara industri baru di kawasan Asia



Presiden Soeharto membuka Konferensi OPEC kr 97 di Bali (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Kunjungan Presiden Soeharto dalam rangka memberikan dukungan penyelesaian konflik Balkan (Sarajevo-Bosnia Herzegovina) (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Tenggara menyebabkan Indonesia pernah disebut sebagai salah satu “macan baru Asia”.

Setelah mengukuhkan pijakannya atas kendali stabilitas keseluruhan Nusantara, dalam negeri Indonesia, negara-negara lingkaran dekat dan lingkaran luar Nusantara, Presiden Soeharto melancarkan politik luar negeri dalam skala lebih luas. Indonesia mulai proaktif dalam agenda pembebasan dunia dari bentuk-bentuk *soft and hard colonialism*, seperti mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Ia juga mengarahkan politik luar negeri Indonesia terlibat secara proaktif dalam proses-proses perdamaian, seperti menjadi mediator dalam usaha penyelesaian perang saudara di Kamboja, bantuan mediasi penyelesaian pemberontakan bangsa Moro di Filipina, memfasilitasi serangkaian diskusi negara-negara yang mempunyai klaim-klaim teritorial tumpang tindih di Laut Cina Selatan, serta dukungan terhadap umat Islam Bosnia. Indonesia juga proaktif dalam mengirimkan pasukan bersenjata dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB sehingga reputasi tentara Indonesia memperoleh pengakuan internasional.

Upaya mewujudkan pranata internasional yang berkeadilan, khususnya dalam bidang ekonomi, perlindungan hukum dan HAM, sosial budaya, serta pola relasi antarnegara dan antarkawasan, tercermin dari upaya Presiden Soeharto merevitalisasi orientasi gerakan Non-Blok di penghujung perang dingin. Karena sikap inilah Indonesia terpilih menjadi

ketua gerakan ini pada tahun 1992. Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan puncak *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) atau Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Bogor, November 1994. Wadah ini dibentuk atas prakarsa PM Australia Paul Keating dan keanggotaannya melibatkan AS dan bahkan Presiden Bill Clinton pernah datang ke Bogor. Selain itu Indonesia juga aktif dalam forum Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan organisasi negara pengekspor minyak (OPEC).

Politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto dinilai sejumlah kalangan terlalu cenderung ke Barat. Penilaian ini menegaskan ketegasan sikap Presiden Soeharto ketika menolak pengiriman pasukan untuk membantu Amerika Serikat dalam misinya di Vietnam pada tahun 1970-an. Walaupun anti komunis dan relatif mesra dengan dunia Barat, ia juga tidak pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet ataupun Vietnam yang komunis.

Setelah saluran-saluran potensi subversif berhasil dikendalikan, pada tahun 1980 Presiden Soeharto merehabilitasi hubungan diplomatiknya dengan RRC. Sikap tegas terhadap Barat juga pernah ditunjukkannya. Ketika Menteri Bidang Bantuan Internasional Belanda Jan Pronk dalam kunjungan persiapan IGGI ke Indonesia menunjukkan sikap kecongkakan dan mengusik masalah-masalah politik dalam negeri Indonesia, Presiden Soeharto mengambil keputusan drastis. Ia memindahkan lokasi rapat tahunan



Atas: Presiden Suharto foto bersama dengan Pemimpin negara-negara APEC di Istana Bogor, 15 November 1994 (Sumber: Republika).

Kanan: Peresmian Monumen pohon persahabatan KTT Non Blok (NAM) pada 1–6 September 1992 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



IGGI dari Belanda ke Paris dan minta Bank Dunia sebagai moderator atau pengundang untuk menggantikan Belanda.

Keberhasilan penting lainnya dalam bidang politik luar negeri adalah diterimanya konsep negara kepulauan oleh dunia internasional yang kemudian dituangkan dalam konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982. Sejak hal ini disepakati, Zone Ekonomi Eksklusif berada hingga jarak 200 mil dari garis pantai suatu negara kepulauan. Hal ini memberikan sumbangan besar bagi pembangunan nasional, baik secara politis maupun ekonomis.

Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Di paruh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan *low profile*. Pada paruh terakhir kepemimpinannya, sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi *high profile*. Gaya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik-ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif (di dalam negeri) dan akomodatif (di luar negeri). Seorang



Searah jarum jam: Presiden Soeharto bersama PM Tiongkok Li Peng saat kunjungan di Tiongkok dalam Normalisasi Hubungan Indonesia-Tiongkok. Kunjungan PM Singapura Lee Kuan Yew dan Istri ke Indonesia pada 25-28 Mei 1973 (Sumber: Kemlu). Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip menerima kunjungan Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto di Istana Buckingham pada November 1989 (Sumber: Kemlu). Jamuan makan malam di Gedung Putih oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan kepada Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto, tanggal 12 Oktober 1982 (Sumber: Kemlu). Ibu Tien Soeharto menerima kunjungan Lady Diana di Jakarta, pada November 1989 (Sumber: Kemlu). Ratu Juliana dari kerajaan Nederland disambut Presiden Soeharto di Bandara Kemajoran di Jakarta untuk kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun 1971 (Sumber: KITLV).



Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Tanggal 21 Mei 1998 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

sahabatnya, mantan Perdana Menteri Singapore Lee Kuan Yew, mengatakan bahwa Soeharto adalah salah satu pemimpin ASEAN yang sangat dihormati. Menurut Lee, Asia Tenggara berhutang besar pada Soeharto karena *policy* beliaulah yang berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap selama hampir 30 tahun di kawasan ini, sehingga kawasan Asia Tenggara menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

LENGSER KEPRABON MADEG PANDHITA

Suatu sore pada tahun 2004, Probosutejo menemani Pak Harto menonton televisi. Terlihat rakyat berbaris panjang, antre mendapatkan dan membeli minyak tanah. Pak Harto terus menyimak berita itu kemudian berucap pelan “kasihan rakyat kecil”. Tak lama kemudian air matanya menetes. Pak Harto menangis menyaksikan penderitaan rakyat, tentang nasib rakyat kecil, bahwa untuk memasak saja harus antre minyak. Itu gambaran kecil kehidupan Pak Harto setelah tidak menjabat sebagai Presiden yang ditinggalkannya sejak 21 Mei 1998 dan menyerahkan kepada penggantinya B.J. Habibie.

Setelah tidak menjabat Presiden, Soeharto kembali menjadi rakyat biasa. Hari-hari kehidupannya dilalui dengan bercengkerama bersama cucu-cucu dalam kesederhanaannya. Beliau mengetahui situasi yang harus dihadapinya, namun sesuai janjinya untuk *lengser keprabon, madeg pandhita* maka ketika ada tamu yang berkunjung ke rumahnya, Soeharto selalu mendengarkan cerita tamunya dan sesekali memberinya nasihat. Seperti yang diceritakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berkunjung pada

saat Hari Raya Idul Fitri 2007, “Dalam pertemuan tersebut dengan suara yang dalam dan senyum yang tulus, Pak Harto memberi ucapan selamat kepada saya yang dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden RI yang baru saja menuntaskan perdamaian di Aceh. Pak Harto juga menyampaikan nasihat-nasihatnya sebagai bentuk dukungan untuk kami, agar dapat membawa bangsa ini lebih baik.”

Setelah keluar masuk rumah sakit beberapa kali akhirnya Soeharto meninggal dunia pada 28 Januari 2008 dan sesuai dengan permintaannya dimakamkan di Astana Giribangun, Surakarta.

Seperti yang pernah diucapkan oleh Soeharto sendiri, bahwa selama bertugas sejak tahun 1966 sampai selesai jabatannya, sebagai manusia biasa, ia mempunyai keterbatasan, baik fisik maupun psikis. Tentu pekerjaan yang dipikul itu terasa melelahkan, akan tetapi terasa menghibur pula baginya, karena memperoleh kepercayaan dari rakyat. Maklumlah tugas kepresidenan adalah pekerjaan yang berat, tetapi akhirnya ia harus menerimanya juga, semata-mata karena rakyat mendesakkannya. Di balik itu Soeharto berpikir bahwa sebagai warganegara yang baik ia tidak boleh menghindarkan diri dari apa yang diharapkan rakyat, maka laksanakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Soeharto pun berwasiat ketika ajal menjemputnya kelak, “Agar mereka yang sesudah kita benar-benar dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, agar tercipta masyarakat adil dan makmur, *“tata tentrem kerta raharja, gemah ripah loh jinawi tuwuh kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku”*.”



Searah jarum jam: Presiden Soeharto meninggal dunia pada Senin, 27 Januari 2008 dikebumikan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Tampak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta ibu negara, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melayat jenazah di rumah kediaman Alm. Presiden Soeharto. (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi). Prosesi pemakaman jenazah mantan Presiden Soeharto di Astana Giribangun (Sumber: ANTARA). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghormatan terakhir dengan mengawali penutupan *liang lahat* dan meletakkan karangan bunga (Sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi)

Kalau saatnya tiba saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka mengenai diri saya selanjutnya sudah saya tetapkan: saya serahkan kepada istri saya. Sebetulnya istri saya telah menerima pula 'Bintang Gerilya' dan 'Bintang RI'. Jadi dia juga bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tetapi sudahlah, ia dengan Yayasan Mangadeg Surakarta sudah merencanakan lain dan sudah membangun makam keluarga di Mangadeg tepatnya di Astana Giribangun. Dan masa akan pisah dengan istri saya. Dengan sendirinya saya pun akan minta dimakamkan di Astana Giribangun bersama keluarga. Kami tidak mau menyusahkan anak cucu kami, jika mereka nanti berziarah.





3

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Membuka Gerbang Demokrasi



Jakarta, hari Jumat, tanggal 21 Mei 1998, pukul 8.30. Dengan tergesa-gesa dan tegang Wakil Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie menuju ke Medan Merdeka Utara. Di Istana Merdeka hari itu, sejarah baru terukir. Presiden Soeharto membacakan keputusan penting terkait pengunduran dirinya sebagai presiden Republik Indonesia. Acara ini dilakukan di Istana Negara dengan dihadiri Wakil Presiden B. J. Habibie dan beberapa menteri kabinet saat itu. Seusai Presiden Soeharto menyampaikan pidato ringkasnya, Habibie diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Bapak Soeharto. Dengan demikian, B. J. Habibie resmi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-3.

Pengambilan sumpah Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 di Istana Negara (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Searah jarum jam: Pernikahan B.J. Habibie dan Hasri Ainun secara adat Jawa di Bandung, 12 Mei 1962. (Sumber: Arsip Keluarga Habibie). Pernikahan B.J. Habibie dan Hasri Ainun di Bandung, 12 Mei 1962 (Sumber Arsip Keluarga Habibie). B.J. Habibie bersama kedua putranya Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie ketika masih di Jerman, tahun 1968 (Sumber: Arsip Keluarga Habibie). B.J. Habibie dan Hasri Ainun Habibie bersama keluarga dan keluarga di Belanda tahun 1963 (Sumber: Arsip Keluarga Habibie). B.J. Habibie bersama Hasri Ainun Habibie di Hamburg, tahun 1970 (Sumber: Arsip Keluarga Habibie). Presiden B.J. Habibie beserta istri dan dua cucunya, Nadya Habibie dan Pasha Habibie, keduanya putra putri dari Ilham Akbar Habibie, di Istana Bogor, tahun 1999 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Kiri: B.J. Habibie bersama kedua orangtua dan saudara-saudari kandung, nampak Ayahanda Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ibunda R.A. Tuty Marini Puspowardojo Tjitrowardojo (paling kanan), di Pare-pare (Sumber: Arsip Keluarga Habibie).

Kanan: B.J. Habibie saat masih remaja, dalam sebuah acara upacara adat Gorontalo, di Pare-pare. (Sumber: Arsip Keluarga Habibie).

SI JENIUS INDONESIA DARI SULAWESI

Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Anak keempat dari delapan bersaudara ini adalah putra Alwi Abdul Djalil Habibie dari Gorontalo, keturunan Bugis, dan R.A. Tuty Marini PuspowardojoTjitrowardojo, berasal dari Jawa.

Kedua orang tua Habibie berasal dari keluarga terhormat dan terpelajar. Kakek Habibie adalah ulama Islam terkenal. Ayah Habibie adalah lulusan sekolah pertanian di Bogor. Pada 1948, Alwi Habibie menjabat Kepala Pertanian Negara Indonesia Bagian Timur. Sementara ibunya datang dari keluarga dokter.

Sejak kecil, Habibie menyukai mesin. Jika ditanya, "Kalau besar mau jadi apa?" ia selalu menjawab, "Insinyur". Pendidikan menengahnya ditempuh di HBS (Hogere Burger School). Pada tahun 1950, ia pindah ke Bandung dan di *Concordante HBS*. Karena bahasa Indonesianya tidak fasih, akhirnya masuk (turun) ke SMP di jalan Jawa Bandung. Tiga bulan kemudian menempuh ujian bahasa dan lulus, kemudian di *Christeljk Lyceum* yang kemudian namanya jadi Sekolah Menengah Atas Kristen di jalan Dago dari 1951 sampai 1954.

Selama sekolah, kepandaian anak Parepare ini di bidang ilmu alam dan matematika sangat menonjol. Teman sekelas Habibie, Suaedah Djumiril, bercerita, "Dalam pelajaran Stereo, BM, Goneo, biar dua jam waktu yang diberikan, tidak akan ada yang bisa. Tetapi, Habibie dalam waktu lima menit

"Kelak jika kembali ke Tanah Air, haruslah bisa menjadi anak yang berhasil dan mencurahkan semua perhatian dan ilmu yang saya peroleh berperan serta membangun bangsa. Anak yang menjadi kebanggaan dan menjunjung nama orang tua saya."

sudah menyelesaikan soal tersebut. Jika ujian diberikan 50 menit untuk tiga soal, maka jika murid lain bisa menyelesaikan satu soal saja, itu sudah bagus. Tetapi, Habibie bisa selesai ketiga soal dalam 20 menit."

Rudy—demikian Habibie dipanggil sehari-hari—fasih berbahasa Belanda, pandai berenang, bernyanyi, dan lincah meliuk dengan sepatu roda. Minatnya pada *aeromodelling* juga sudah tampak sejak SMA. Ia memiliki model pesawat terbang buatan sendiri yang selalu ia peragakan dan jelaskan.

Selepas SMA tahun 1954, ia masuk Departemen Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (sekarang Institut Teknologi Bandung). Dengan biaya dari ibunya, pada tahun 1955 ia melanjutkan kuliah di Jurusan Konstruksi Pesawat Terbang di Rheinisch Westfälische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Jerman Barat. Ia menyelesaikan jenjang S-1 hingga S-3 selama 10 tahun. Pada tahun 1965, Habibie meraih gelar doktor *ingenieur* (doktor teknik) dengan predikat *summa cum laude*.

*Terlentang!!
 Djatuh! Perih! Kesal!
 Ibu pertiwi
 Engkau pegangan
 Dalam perjalanan
 Djanji pusaka dan sakti
 Tanah tumpah darahku
 makmur dan sutji!!!

 Hantjur badan
 Tetap berdjalan
 Djiwa besar dan sutji
 Membawa aku, padamu!!!*

DI JERMAN BELAJAR REKAYASA PESAWAT DAN MENIMBA PENGALAMAN BERDEMOKRASI

Ketika datang ke Aachen tahun 1955, Habibie menjadi satu-satunya mahasiswa yang tidak memperoleh bantuan beasiswa. Biaya belajarnya sepenuh-penuhnya ditanggung ibundanya. Oleh karena itulah ia harus menyelesaikan kuliahnya secepat mungkin. Di tahun kedua, Habibie ditunjuk sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Aachen. Di bawah kepemimpinannya, PPI menyelenggarakan "Seminar Pembangunan" yang mengundang semua mahasiswa Indonesia yang tinggal di Eropa. Acara ini berlangsung di Hamburg, Jerman Barat, pada 20–25 Juli 1959. Sayangnya, Habibie tak hadir lantaran dua bulan sebelum seminar digelar ia dirawat intensif di rumah sakit di Bonn karena menderita tuberkulosis tulang. Di RS Klein Wasserthal Habibie pernah koma selama 24 jam dan hampir saja penyakit itu merenggut nyawanya. Di saat kritis itulah ia membuat sumpahnya yang terkenal. Sebuah janji tentang penyerahan segenap kekuatan diri di pangkuan Ibu Pertiwi.

Lulus diploma pada 1960, Habibie kemudian bekerja sebagai asisten peneliti di Institut Konstruksi Ringan RWTH. Pada awal 1962, Habibie cuti pulang ke Indonesia. Di Bandung, ia bertemu dengan temannya di sekolah menengah, Hasri Ainun Besari. Perkenalan singkat itu mengantarkan Habibie-Ainun menikah pada 12 Mei 1962.

Kini, saat kembali ke Aachen, Habibie tak lagi membawa diri sendiri. Ada Ainun yang selalu di sampingnya. Untuk menanggung biaya hidup berdua, sementara bekerja di Institut Konstruksi Ringan, Habibie bekerja di perusahaan gerbong kereta api Talbot. Saat itu, Talbot tengah mengikuti tender gerbong perusahaan kereta api Jerman *Deutsche Bundesbahn*. Habibie diminta menjadi kepala tim untuk membuat prototipe gerbong kereta api. Ia lalu mengubah konstruksi konvensional yang sudah dipakai puluhan tahun dengan teknologi konstruksi ringan, seperti pada pesawat. Ide Habibie awalnya dipandang tidak biasa oleh anggota timnya yang usianya dua kali lipat darinya, tapi Habibie dengan kemampuannya bisa meyakinkan tim itu dan akhirnya tender itu dimenangkan tim Habibie.

Usai menyelesaikan pendidikan doktor teknik tahun 1965, Habibie mendapat dua tawaran. Pertama, menjadi pengajar di RWTH. Kedua, bekerja di perusahaan pesawat komersial Boeing. Setelah meminta pertimbangan dari istrinya, ia menolak keduanya. "Dari kepentingan pribadi mungkin tawaran ini harus diterima namun dipandang dari kepentingan pembangunan bangsa, sebaiknya tawaran ini kami tolak dan berusaha bekerja di industri dirgantara untuk mendapatkan informasi dan pengalaman berkarya mengembangkan dan membuat pesawat terbang yang memang dibutuhkan untuk mempertahankan dan membangun Benua Maritim Indonesia," kata Habibie.



B.J. Habibie bersama dengan rekan sejawat, ketika baru keluar dari Sanatorium Aachen karena sakit TBC tulang pada 17 Agustus 1959 (Sumber: Arsip Keluarga Habibie).

Habibie kemudian mendaftar di perusahaan pembuat pesawat Hamburger Flugzeug Bau (HFB) yang tengah mengembangkan pesawat Fokker F28 dan Hansajet 320. Di tahun 1969 dan 1970, Habibie meyakinkan HFB untuk memperkerjakan sejumlah insinyur Indonesia. Kedatangan mereka, menurut rencana Habibie, adalah sebagai kader pembangunan untuk menimba pengalaman bekerja di industri pesawat terbang modern yang kelak akan kembali ke Indonesia membangun industri dirgantara. Setelah HFB berganti nama menjadi Messerschmitt-Boelkow-Blohm (MBB), ia diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Jabatan tersebut adalah yang tertinggi di MBB yang pernah dijabat orang asing di mana semuanya ditimbang dari sisi kemampuan diri. Hasil penemuan dan risetnya dalam dunia penerbangan di dunia, Habibie dijuluki "Mr. Crack" karena keahliannya dalam menghitung *crack propagation* atau 'menjalarnya suatu retakan'. Di samping itu Habibie juga dikenal menciptakan Metode, Fungsi, dan Teori Habibie. Penemuan ini tercantum dalam buku AGARD (Advisory Group for Aerospace Research Development) edisi Agardogra PH No.176 (1994) dan edisi Agardogra PH 257 (1980) terbitan NATO.

Demikianlah, Jerman mengajarkan Habibie iklim demokratis yang kemudian mempengaruhi pandangan hidupnya. Manusia dinilai dan dihargai bukan karena latar keluarga, ras, status sosial, keyakinan, usia, melainkan

"Saya selalu menganggap keberadaan saya di rantau sebagai masa transisi untuk mencari pengalaman. Pengalaman ini saya perlukan untuk kelak dapat membantu bangsa saya dalam perjuangan yang sedang mereka laksanakan."

karena kemampuan dan kapasitas individunya. Habibie sudah mengalaminya berkali-kali. Tak hanya lingkungan yang merangsang daya intelektual yang disediakan Jerman, melainkan profesionalisme dalam bekerja dan komunikasi yang berjalan setara. Ini tampak dalam sebuah dialog Habibie dengan Hasri Ainun, tak lama setelah Presiden Soeharto memintanya mengembangkan industri manufaktur dalam negeri.

"Bukankah keputusan yang didasarkan hanya pada pertimbangan seorang presiden saja merupakan kebijaksanaan yang otoriter dan tidak demokratis? Semuanya ini berlawanan dan tidak sesuai dengan perilaku dan sifat saya sendiri, yang telah ditempa dan berkembang dalam lingkungan intelektual, bebas, dan demokratis," ujar Habibie. Iklim demokratis di Jerman telah membuka seluas-luasnya peluang Habibie untuk mengembangkan diri. Setelah dua tahun di Jerman, di usia 21 tahun, ia sudah dipercaya sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Aachen. Di usia 25 tahun, ia telah memimpin tim di perusahaan Talbot,



Kiri: B.J. Habibie bersama Ibu Ainun, Ilham Akbar Habibie di Kampus RWTH Aachen, tahun 1965 (Sumber: Arsip Keluarga Habibie). Kanan: Ibu Hasri Ainun, kedua putranya, Thareq Kemal Akbar Habibie dan Ilham Akbar Akbar Habibie, Bapak B.J. Habibie dan dan guru besar Universitas RWTH Aachen, Prof Dr. Ing Wilhelm Heinrich Dettmering, yang merupakan guru besar B.J. Habibie semasa kuliah di kampus tersebut (Sumber: Arsip Keluarga Habibie).

membawahi direktur dan kepala yang usianya dua kali lipat lebih tua dari Habibie.

TANAH AIR MEMANGGIL DAN “TRUK TERBANG”

Pada 26 Januari 1974, Habibie tiba di Jakarta untuk bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo. Keduanya pertama kali bertemu di Dusseldorf 14 Desember 1973. Duta Besar Indonesia untuk Jerman Barat Achmad Tirtosudiro memberitahu Habibie bahwa Ibnu Sutowo ingin bertemu. Pada tatap muka pertama itu, Ibnu Sutowo berkata, “Mengapa saudara masih berada di rantau sementara saudara-saudaramu membanting tulang untuk membangun bangsanya. Saudara ikut membangun bangsa lain. Saudara harus malu dan segera ikut bergabung dengan saudara-saudaramu menempa masa depan yang lebih baik bagi Indonesia yang kita cintai!!!”

Pada pertemuan itu, Ibnu Sutowo menginstruksikan Dr. Erich Sanger untuk segera mengangkat Habibie sebagai penasehat Direktur Utama Pertamina. Habibie juga diminta untuk bisa secepatnya pulang ke Indonesia.

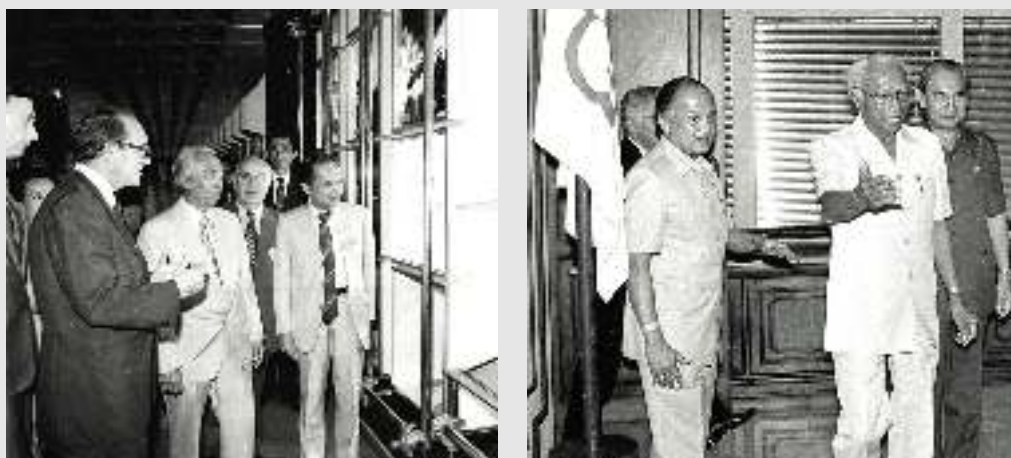
Sebelumnya, pada September 1966, setahun setelah bekerja di HFB, Habibie juga bertemu dengan Panglima Angkatan Udara Roesmin Nuryadin. Pada waktu itu Roesmin tengah berkunjung ke HFB atas undangan pemerintah Jerman Barat. Kemudian pada Oktober 1966, Habibie ganti bertemu dengan Mashuri Saleh, Direktur Jenderal Perguruan

Tinggi; lalu pada Desember 1966 bertemu dengan Menteri Luar Negeri Adam Malik. Dengan ketiga tokoh tersebut Habibie berdiskusi mengenai industri dirgantara nasional. Roesmin dan Mashuri menghimbau Habibie untuk pulang dan merintis industri dirgantara. Sementara Adam Malik memintanya untuk memikirkan tempat penampungan bagi calon ahli dirgantara Indonesia yang belum bisa ditampung di dalam negeri.

Pada tahun 1968 Habibie bersama istri dan dua anaknya pulang ke Indonesia dan atas undangan pemerintah Indonesia beliau mengunjungi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Sala, Surabaya, dan Malang. Kunjungan itu untuk meninjau tempat-tempat yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi Industri Dirgantara. Kemudian pada tahun 1969 dan 1970 beliau meyakinkan MBB untuk mempekerjakan sejumlah insinyur Indonesia dalam industri dirgantara.

Kedatangan Habibie selanjutnya di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1974 untuk memenuhi panggilan Presiden Soeharto. Pertemuan itu diadakan pada tanggal 28 Januari 1974, pukul 19.30, di jalan Cendana, Menteng, di kediaman pribadi Presiden Soeharto. Keduanya terlibat pembicaraan serius mengenai pentingnya Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya alam tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga gagasan. Pertama, membentuk industri pesawat terbang sebagai ujung tombak industri strategis.

Search jarum jam: B.J. Habibie menerima sertifikat dari Direktur Solar Turbines internasional, Glen Barton, tanggal 10 November 2007 (Sumber: ANTARA). Menteri Negara KLH Emil Salim, Menristek B.J. Habibie dan Ibnu Sutowo pada rapat Badan Pengembangan Wallacea di Jakarta, 21 Oktober 1992 (Sumber: ANTARA). Menteri Riset dan Teknologi B.J.Habibie melapor kepada Presiden Soeharto atas hasil kunjungan kerjanya ke Eropa tanggal 1 Mei 1980 (Sumber: ANTARA). Menristek B.J. Habibie mendampingi Wakil Presiden Adam Malik meninjau pameran industry CASA Spanyol di pekan Raya Jakarta Fair tahun 1981 (Sumber: ANTARA).



B.J. Habibie bersama President General
Electric Aircraft Engine Brian Row di
Pabrik Mesin Pesawat GE-Boston USA
1979 (Sumber: Arsip Keluarga Habibie).



*"Sepertiga lebih dari hidupnya, Habibie turut menyumbangkan tenaga dan pikiran mengisi Kemerdekaan RI melalui pembangunan lima tahun. Sejak memasuki Repelita kedua saya mengajak Habibie turut membangun industri di Indonesia"—
SOEHARTO, Presiden RI (1968–1998).*

Kedua, membentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek). Ketiga, membentuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dari diskusi tersebut, pemerintah kemudian merancang pembangunan industri-industri yang bertumpu pada teknologi dan sumber daya manusia. Sesuai dengan keahlian Habibie, industri pertama yang dibangun adalah industri pesawat terbang. Habibie diangkat sebagai penasihat Pemerintah RI bidang Teknologi Dirgantara dan Advance Teknologi dan menjadi penasihat utama Ibnu Sutowo. Ketika menerima perintah tersebut, Habibie masih memegang jabatan wakil presiden direktur di MBB.

Sebagai ahli penerbangan kelas dunia, pada tahun 1973 Habibie ditawarkan Presiden Filipina Ferdinand Marcos untuk membangun industri pesawat terbang di negaranya. Namun permintaan Ferdinand Marcos itu ditolak dengan tegas. Habibie memilih kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa dan negaranya, namun adanya kontrak kerja dengan MBB, mengharuskan Habibie pergi-pulang Jakarta-Hamburg selama lima tahun. Habibie baru benar-benar menetap di Indonesia setelah diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada 1978 pada Kabinet Pembangunan III.

Habibie mulai mengajak sahabat-sahabatnya di Jerman untuk mempersiapkan pembangunan Industri Pesawat

Terbang Nurtanio (IPTN) yang pembangunannya sudah dimulai pada 1975. Namun, hanya beberapa orang yang bersedia, antara lain Pusponegoro, Ramelan, Paramajuda, Suparlan, Gayo, Sofyan, dan Djermani. Pada 23 Agustus 1976, PT IPTN diresmikan oleh Presiden Soeharto. IPTN merupakan industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara. Sementara BPPT, Lembaga pemerintah bukan departemen dalam bidang penelitian dan penerapan teknologi, diresmikan pada 21 Agustus 1978.

Pesawat pertama yang dibuat IPTN adalah CN-235 Tetuko, bekerja sama dengan CASA Spanyol. Tetuko—nama yang diambil dari nama kecil tokoh wayang Gatotkaca—terbang perdana pada Desember 1983 dan muncul di Indonesian Airshow 1986 di Jakarta. Tetuko adalah pesawat kecil yang hanya berkapasitas 35 orang; padahal impian Habibie memberikan Indonesia "truk terbang" untuk menjelajahi dengan cepat seluruh kepulauan Indonesia dengan biaya yang murah.

"Truk terbang"—demikian Habibie mengistilahkan pesawat ketika suatu hari bicara dengan istrinya, Ibu Hasri Ainun—berkapasitas 70 orang selesai dibuat 12 tahun kemudian. "Truk terbang" ini dinamai N-250 Gatotkoco dan terbang perdana di cakrawala Kota Bandung pada 10 Agustus 1995, sepekan menjelang ulang tahun emas kemerdekaan RI ke-50.

Pembuatan Gatotkoco sepenuhnya dilakukan oleh IPTN. Saat memulai pekerjaannya di tahun 1974, Habibie disertai



Presiden Soeharto dan Menristek B.J. Habibie meninjau alat pengempes limbah padat di Serpong Tangerang, tanggal 5 Desember 1988 (Sumber: ANTARA).

"Mata dunia internasional membuktikan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, bukanlah hak prerogatif sebuah bangsa tertentu, atau bangsa yang disebut bangsa negara maju dan industri saja."

tim berjumlah 20 orang, yang kemudian mengembangkan dan memproduksi pesawat CASA 212 dan CN 235, sebelum memproduksi N250/Gatotkaca. Saat Gatotkaca tinggal landas, sebanyak 16.000 orang terlibat dalam pengerjaannya. Tanggal 10 Agustus, saat si "truk terbang" sukses lepas landas, kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

Atas keberhasilan Tetuko, tahun 1992, Habibie dianugerahi *Von Karman Award for International Cooperation in Aeronautics* oleh International Council of the Aeronautical Sciences. Dua tahun kemudian, Habibie mendapat *Edward Warner Award* dari International Civil Aviation Organization (ICAO), penghargaan tertinggi ICAO pada anggotanya, tanggal 7 Desember 1994 di kantor pusat ICAO di Montreal Canada.

N-250 adalah pesawat jenis *subsonic speed* yang pertama menggunakan teknologi *fly by wire*. Dengan teknologi ini gerakan pesawat dikendalikan secara komputerisasi. Saat itu hanya ada tiga pesawat yang menggunakan *fly by wire*, yaitu Airbus A-340 dan Boeing 767, keduanya pesawat jet komersial, serta N-250. Habibie memperkirakan, pada 2000–2020, N-250 sudah mampu menjadi pesawat komersial.

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA: SEBUAH VISI HABIBIE TERHADAP BANGSA INDONESIA

Dalam pertemuan Habibie dengan Soeharto, 28 Januari 1974, Soeharto bertanya, "Apakah kita harus terus mengandalkan pada Sumber Daya Alam? Berapa lamanya? Suatu ketika semuanya akan habis? Lalu bagaimana selanjutnya?"

Habibie menjawab, "Memang di negara maju mana pun, termasuk yang memiliki Sumber Daya Alam, adalah sumber daya manusia yang terampil dan terbarukan itulah yang selalu diandalkan. Terbarukan berarti tidak akan habis. Oleh karena itu pengembangan sistem pendidikan, pangan, air minum, gizi, kesehatan, perumahan, dan lapangan pekerjaan harus mendapat perhatian utama dan merata."

Dari dialog tersebut, Habibie berpandangan perlu mengembangkan industri berteknologi tinggi dalam mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap sumber daya alam. Untuk itu, menurut Habibie, bangsa Indonesia bertekad kuat mengembangkan beragam industri yang bertumpu pada teknologi tinggi dan memiliki daya saing di pasar domestik, regional, dan internasional.

Dari pandangan Habibie tersebut sebetulnya sudah jelas bahwa sumber daya manusia menjadi hal yang terpenting dalam rancangan industri teknologi Indonesia hingga 25 tahun ke depan. Pandangan Habibie kemudian diwujudkan dalam pembangunan industri nasional, antara lain pabrik

Searah jarum jam: Menristek B.J. Habibie menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Industri Finlandia, Esko Ollila, di Jakarta, pada 26 Januari 1983 (Sumber: ANTARA). Produksi pertama Industri Pesawat Terbang Nusantara *test flight* di Lapangan Udara Kemayoran Jakarta, tanggal 6 Pebruari 1986, duduk sebelah Menristek B.J. Habibie adalah Dr. Said Jenie, penanggung jawab *test flight* (Sumber: ANTARA). PM Kerajaan Inggris Ny. Margaret Thatcher meninjau PT. Nurtanio di Bandung tanggal 11 April 1985 (Sumber: ANTARA). Peresmian reaktor serbaguna G.A Siwabessy di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong, Tangerang, Jawa Barat, tanggal 20 Agustus 1987 (Sumber: ANTARA).





Presiden Soeharto didampingi Menteri Riset dan Teknologi Prof. Dr. Ir. B. J. Habibie dalam peninjauan keliling pada Pameran Widyia Karya Teknologi Pedesaan, tanggal 12 Maret 1979 (Sumber: ANTARA).

pesawat terbang (PT IPTN), pabrik galangan kapal (PT PAL), pabrik pembuatan kereta api (PT Inka), dan pabrik senjata dan amunisi (PT Pindad).

Untuk mendukung industri tersebut, Habibie mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), mendidik sumber daya manusia yang berbakat dan mampu mengerti Iptek, serta bekerja sama dengan mitra luar negeri yang berpengalaman.

Seperti dalam perintisan industri pesawat terbang, tahap pertama berupa produksi komponen dan integrasi komponen pesawat menjadi produk dalam negeri NC 212 yang diselesaikan pada 1978. Tahap kedua adalah kemandirian dalam mengembangkan dan memproduksi komponen baru. Ini dilakukan IPTN bersama perusahaan asing CASA, dengan persentase peran 50 : 50. Hasilnya berupa pesawat CN-235 Tetuko yang terbang perdana pada akhir 1984.

Tahap ketiga adalah penelitian, pengembangan teknologi canggih, dan SDM yang bekerja di pusat keunggulan nasional seperti LAGG, LUK, KIM yang ada di Puspiptek, BPPT, LAPAN, ITB dengan SDM di IPTN. Hasilnya adalah pesawat N-250 Gatotkoco.

Setelah keberhasilan pembuatan N-250 barulah memasuki tahap keempat, yakni memulai penelitian besar-besaran untuk memasuki dan menandai puncak keunggulan kompetitif, namun besarnya biaya pengembangan proyek Habibie menimbulkan perdebatan. Mengapa harus membuat jika dengan membeli dari negara lain biayanya lebih murah?

Menurut Habibie, kemampuan membuat pesawat sendiri akan menjadi posisi tawar tersendiri bagi Indonesia di mata negara maju. Yang juga penting, industri pesawat dalam negeri melibatkan partisipasi SDM Indonesia dalam pembuatannya. Yang lebih penting lagi, Habibie menyentuh unsur terdasar dari nasionalisme: kebanggaan pada kemampuan dan kemandirian diri sendiri.

“Yang penting dikejar sesungguhnya bukan teknologi itu sendiri,” kata Habibie, melainkan, “pembangunan sumber daya manusia yang terampil dan tangguh yang mampu menguasai, mengendalikan, dan mengembangkan teknologi ke arah yang lebih maju demi peningkatan kesejahteraan bangsa.” Hanya dengan begitu, sambung Habibie, bangsa Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan industri tekstil dan sejenisnya yang *footloose* atau sumber minyak yang terbatas dan bisa habis.



Searah jarum jam: Menristek B.J. Habibie melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PT. IPTN dengan perusahaan Penerbangan MBB Jerman Barat dan Boeing Amerika Serikat (Sumber: ANTARA). Presiden Soeharto didampingi Menristek B.J. Habibie selaku Dirut PT PAL Indonesia melakukan peresmian PT. Pabrik Kapal Indonesia (PT.PAL) di Surabaya 16 April 1985 (Sumber: ANTARA). Menristek/ Ketua BPPT Prof.Dr. B.J. Habibie selaku Direktur Utama PT. PAL (Pabrik Kapal Indonesia), meninjau PT. PAL di Surabaya. PT. PAL tengah disiapkan pengembangannya hingga menjadi pabrik kapal terbesar di Asia Tenggara (Sumber: ANTARA). Menristek B.J. Habibie dan Menteri Perhubungan Azwar Anas, melepas ekspor perdana 150 gerbong kereta api produksi PT. INKA ke Malaysia, di Madiun, April 1991 (Sumber: ANTARA). Presiden Soeharto memeriksa senjata buatan PT. Persero Pindad, Bandung, 20 Maret 1989 (Sumber: ANTARA).

"Hanya manusia sajalah, yang dapat berpikir, bekerja dan berkarya. Hanya manusia, yang dapat meningkatkan kualitasnya sepanjang masa."



Pada kunjungan kenegaraan PM Inggris Margaret Thatcher ke Indonesia tahun 1985, Thatcher bertemu dan berdiskusi dengan Meristek BJ Habibie di ruang kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi di Jakarta (Sumber Arsip Keluarga Habibie).



Menristek B.J. Habibie dan pesawat N 250, di hanggar PT IPTN Bandung (Sumber: Republika).

Industri maju membuka lapangan kerja bernilai tambah tinggi. Bidang ini hanya bisa disokong oleh SDM produktif dan menguasai teknologi. Suatu kali, ia mengilustrasikan pentingnya industri berteknologi maju, *"I have some figures which compare the cost of one kilo of airplane compared to one kilo of rice. One kilo of airplane costs thirty thousand US dollars and one kilo of rice is seven cents. And if you want to pay for your one kilo of high-tech product with one kilo of rice, I don't think we have enough."* (Saya mempunyai angka untuk perbandingan harga sekilo (pembuatan) pesawat udara dengan sekilo beras. Sekilo pesawat udara seharga 30.000 dolar Amerika sementara sekilo beras berharga tujuh sen rupiah. Dan bila Anda hendak membayar sekilo produk berteknologi tinggi dengan sekilo beras, saya merasa kita tidak cukup (untuk membayarnya).)

Selama menjadi Menteri Riset dan Teknologi (1978–1998), visi Habibie adalah melakukan "evolusi yang dipercepat" dari negara agraris ke negara industri maju; dan yang dibutuhkan sebuah negara maju adalah kecakapan daya budi. Habibie menginginkan munculnya kelas baru dalam masyarakat ini,

yakni kelas cendekia dengan dua kecakapan sekaligus: jenius dalam pikiran dan terang dalam hati. Jenis kecendekiaan yang memadukan ilmu pengetahuan-teknologi (iptek) dan iman-takwa (imtak) itulah menjadi sandaran mengapa Habibie dan puluhan cendekiawan Islam pada tahun 1990 mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Industri maju di Indonesia membutuhkan kecendekiaan berbasis "iptek" dan "imtaq" ini; manusia yang mempunyai pikiran cemerlang dan memiliki budi pekerti yang baik. Tanpa diimbangi budi pekerti yang baik, peradaban yang ditopang kecendekiaan pikiran semata dalam industri maju berjalan dalam satu dimensi.

Dalam kenyataannya, Habibie memang memadukan itu dalam rancangan kerja jangka panjangnya. Industri nasional dan ICMI merupakan manifestasi "iptek" dan "imtak".

DARI TEKNOKRAT KE NEGARAWAN

B.J. Habibie adalah ahli pesawat terbang. Tidak hanya ilmuwan, beliau juga teknokrat yang membangun pelbagai industri teknologi di Indonesia. Teknokrat itu diberi

Searah jarum jam: N250 Gatotkaca sedang melakukan persiapan first flight, penerbangan perdana di hanggar milik PT. IPTN, Bandung, 1995 (Sumber: Republika). Presiden Soeharto mendengarkan penjelasan teknis atas maket pesawat N250 Gatotkaca di PT. IPTN (Sumber: Back Tohir/Setneg). *Roll Out* pesawat N250 oleh Presiden Soeharto didampingi oleh Menristek B.J. Habibie pada November 1994 (Sumber: Back Tohir/Setneg).





Presiden Soeharto bersama Menristek B.J. Habibie melakukan olahraga otomotif sepeda motor besar di halaman Istana Merdeka, tahun 1996 (Sumber : Arsip Keluarga Habibie).



Penyelenggaraan simposium yang digalang oleh mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang sekaligus Deklarasi Peresmian Pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) tanggal 6-8 Desember 1990 (Sumber : Arsip Keluarga Habibie).

wewenang yang lebih besar, menjadi seorang presiden. Jabatan itu diterima Habibie dalam situasi yang sangat sulit. Situasi krisis multidimensional mengubah seluruh peta perpolitikan Indonesia. Habibie menunjuk dirinya sebagai kopilot dalam metafora pesawat terbang. Sebagai kopilot, ia harus mengambil alih kendali pesawat ketika turbulensi terjadi, ditambah kemacetan mesin yang parah dan pilot utama dalam kondisi tak sadarkan diri. Dalam bayangan Habibie, Indonesia di masa transisi adalah pesawat yang tengah mengalami "super stall". Daya angkatnya nol dan hendak jatuh. Sementara 210 juta penduduk Indonesia adalah penumpang yang tidak menyadari pesawat tengah menuju kejatuhannya. Sebagai kopilot, Habibie harus segera mengambil alih kendali dan menyelamatkan pesawat.

Saat itu Habibie hanya memiliki dua pilihan. Masuk kabin dan menjelaskan kepada penumpang bahwa pesawat akan jatuh atau tetap diam dan mencoba menyelamatkan pesawat. Sementara ia berlomba dengan waktu yang berjalan dalam hitungan mundur.

Siapa pun yang menjadi pilot di saat-saat seperti itu, menurut Habibie, tidak bisa melakukan sesuatu menurut keinginannya. Beliau harus berkompromi dengan keadaan. Jika tidak melakukan itu, maka Indonesia terpecah-belah. Indonesia tidak boleh lagi mengalami ketidakstabilan politik sebagaimana yang terjadi antara tahun 1947 hingga 1950. Habibie menyatakan, "Kalau saya tidak mengambil kebijakan

"Sebagai seorang yang menekuni pengembangan dan penerapan iptek canggih, cara berfikir selalu langsung dan radikal. Sehingga perilaku dan sifat saya menjadi radikal pula, langsung ke inti permasalahan tanpa memperhatikan liku-liku yang memang tidak perlu diperhatikan."

yang sesuai dengan kriteria yang saya tentukan, kondisi di Indonesia bisa lebih tidak rasional. [...] Bangsa Indonesia dapat terpecah-pecah mengalami "Balkanisasi". [...] Negara yang besar terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil. Di Afghanistan dan Irak dibayar dengan darah. Jika ini terjadi, maka yang menderita adalah rakyat."

Menurut Habibie, jika hingga September 1998 krisis politik dan ekonomi tak teratasi, maka pemerintahan Indonesia akan jatuh. Karena itu kebijakan-kebijakan yang diambilnya mencerminkan situasi kedaruratan itu, kebijakan yang *irreversible* dan *redundancy*.

KEBIJAKAN pertama yang dilakukan Habibie bisa memberikan gambaran bagaimana ia mengurai langkah demi langkah untuk mencegah negara dari ancaman "super stall". Sehari setelah dilantik, pada 22 Mei 1999 Habibie langsung melantik kabinet baru yang dinamai Kabinet Reformasi Pembangunan. Terdapat 36 menteri dalam kabinet ini, terdiri dari empat menteri negara koordinator,



BJ. Habibie mengucapkan sumpah di hadapan para anggota MPR setelah terpilih secara aklamasi menjadi Wapres masa bhakti 1998-2003 di gedung MPR RI (Sumber: ANTARA).



Presiden B.J. Habibie dan Kabinet Reformasi Pembangunan setelah pelantikan, Mei 1998, di depan Istana Negara (Sumber: Back Tohir/Setneg).

20 menteri negara pemimpin departemen, dan 12 menteri negara yang menangani tugas khusus.

Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan bangsa, meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, ABRI, unsur daerah, kaum cendekia, dan lembaga swadaya masyarakat. Merangkul semua potensi politik dan sosial adalah langkah demokratis awal untuk menjawab tuntutan Reformasi.

Di saat yang sama, Habibie juga mengumumkan pemisahan Bank Indonesia (BI) dari pemerintahan dengan tidak memasukkan Gubernur BI dalam kabinet barunya. Ia beralasan bahwa dengan demikian BI menjadi lembaga independen yang dapat membuat kebijakan yang logis, tanpa intervensi politik. Selain itu, negara juga tidak diperbolehkan meminjam dana ke BI, melainkan harus ke pasar modal. Ini merupakan cara Habibie untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah guna menyelesaikan krisis moneter.

Kebijakan Habibie lainnya adalah tetap memperbolehkan mata uang rupiah bergerak sesuai dengan ekonomi pasar, membebaskan semua tahanan politik, memberi kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan berdemonstrasi, serta berkunjung ke DPR/MPR untuk berkonsultasi tentang jadwal Sidang Istimewa MPR dan Pemilu.

Habibie juga memberi garansi kebebasan berpendapat dan menguatkan legitimasi DPR/MPR. Pertimbangannya, dalam krisis politik 1998, salah satu tuntutan rakyat adalah

adanya kebebasan dan kemerdekaan. Turunan dari dua tuntutan ini adalah penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi. Tuntutan ini wajar. Seiring dengan kemajuan yang dibawa pembangunan, sistem pendidikan memang semakin baik dan sistem informasi semakin sempurna sehingga kualitas SDM makin meningkat. Meskipun demikian perkembangan ini tidak disertai dengan proses keterbukaan dan demokratisasi, terutama dalam hal politik dan kepemimpinan nasional.

Dari pengalaman belajarnya di Eropa, Habibie mengetahui dinamika sejarah bahwa para pemula paling banyak lahir dan berkembang menjadi unggul dan andal dalam satu masyarakat yang bebas dari dogma, merdeka, dan demokratis. Para pemula ini menjadi salah satu penggerak utama dalam peningkatan produktivitas dan daya saing suatu masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Habibie memutuskan untuk menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mengeluarkan pendapat dan berunjuk rasa tanpa rasa takut. Pers juga diberi kebebasan mengeluarkan pendapat dengan segala konsekuensinya. Tahanan politik juga dibebaskan. Menurut Habibie, kelak, tidak boleh terjadi seseorang dipenjarakan karena bertentangan pendapat atau rencana dengan sang presiden.

Kuatnya pengaruh lembaga eksekutif dalam lembaga yudikatif dengan keberadaan Keluarga Besar Golkar membuat



Presiden B.J. Habibie menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Istana Negara tanggal 23 Juli 1998 (Sumber: ANTARA).



Presiden BJ. Habibie bersama Ibu Hasri Ainun duduk lesehan sambil bernyanyi "Di Sini Senang, Di Sana Senang" bersama Para anak-anak panti asuhan dalam rangka penyerahan santunan oleh Yayasan Orbit di Istana Bogor, Jawa barat tanggal 16 Mei 1999 (Sumber: ANTARA).

DPR/MPR tidak memiliki legitimasi di mata rakyat, ditambah lagi dengan adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih Golkar dalam pemilu. Menurut Habibie, DPR dan MPR harus diberi legitimasi yang kuat berdasarkan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, sebelum Pemilu 1999, Habibie membubarkan Keluarga Besar Golkar dan menghapus kewajiban bagi PNS untuk memilih Golkar. Ia juga membuka kesempatan untuk membuat partai politik apa saja, asalkan tidak melanggar UUD 1945 dan ketetapan MPR. Sebelumnya, pemerintah hanya mengizinkan dua partai, yakni PDI dan PPP serta Golongan Karya menjadi peserta pemilu.

Secara keseluruhan, selama menjadi presiden ke-3, ia telah melakukan reformasi di bidang ekonomi, politik, HAM, dan birokrasi, serta menuntaskan permasalahan Timor Timur. Semua kebijakannya dilakukan dalam kerangka demokratisasi Indonesia. Habibie mengambil langkah pertama penyelamatan negara dari "super stall" dengan mengambil tindakan-tindakan perubahan pada hal-hal yang substansial tersebut.

MENATA SISTEM KENEGARAAN: REFORMASI BIROKRASI

Dalam pidatonya, Habibie menyatakan bahwa Kabinet Reformasi Pembangunan memiliki tugas pokok untuk menyiapkan proses reformasi, yang dijabarkan dalam tiga hal. Pertama, di bidang politik, memperbaharui pelbagai

perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik dengan menyelenggarakan Pemilu demokratis, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Kedua, di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi. Ketiga, di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Dengan pengalaman selama 24 tahun berada disekitar "pusat kekuasaan" (4 tahun Penasehat Presiden dan kemudian 20 tahun Menteri), Habibie berpendapat masalah utama mereformasi birokrasi adalah memisahkan birokrasi dengan pengaruh kepentingan politik praktis. Adanya dominasi pengaruh kepentingan politik tersebut akan melahirkan suatu "kekuasaan eksklusif" pada figur pimpinan, yang pada gilirannya menimbulkan kecenderungan perilaku dan sistem otoritarian.

Untuk itu langkah utama yang dilakukan adalah reformasi Golkar, karena sudah cukup lama Golkar mendominasi birokrasi, baik pusat maupun di daerah. Habibie memutuskan untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar dalam rangka mereformasi Golkar. menjadi Partai Politik. Ia juga membubarkan Keluarga Besar Golkar, yang merupakan koalisi Golkar, ABRI dan Utusan Daerah.

Langkah Habibie berikutnya adalah melarang rangkap jabatan pemerintahan dengan pimpinan partai politik.



Presiden B.J. Habibie memimpin rapat kabinet bidang ekonomi, 23 Juni 1999 (Sumber: ANTARA).

"Menjadi presiden, bukan segalanya bagi saya, tetapi yang penting apa yang terbaik bagi bangsa ini."

Dengan kebijakan ini dimaksudkan agar birokrasi dapat sepenuhnya melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan rakyat. Sebagai akibat kebijakan ini, terpaksa Akbar Tanjung dan Hamzah Haz harus meninggalkan jabatan Menteri, karena mereka ketua partai Golkar dan PPP.

JALAN MERITOKRASI DAN AMANDEMEN KONSTITUSI

22 Mei 1998. Habibie dengan cepat akhirnya menyebutkan satu per satu nama menteri yang menjadi anggota Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam susunan kabinet tersebut mulanya Habibie bermaksud memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan Panglima ABRI (Pangab). Pangab haruslah seorang jenderal dan posisi ini diberikan bergiliran kepada semua angkatan: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sementara posisi Menhankam bisa dijabat oleh tokoh sipil.

Oleh Habibie, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dipisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama ABRI lalu diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemisahan ini disertai dengan pembedaan kerja yang jelas. TNI bertugas mengamankan dan memelihara kedaulatan negara dan mencegah terjadinya perang, sementara polisi bertanggung jawab menegakkan hukum dan memerangi kejahatan. Semua bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945, Tap MPR, UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah ditangani polisi. Kepala Kepolisian

RI (Kapolri) bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan anggaran Polri akan dimasukkan dalam anggaran Departemen Dalam Negeri.

Namun, untuk sementara waktu, kebijakan tersebut belum dijalankan dengan pertimbangan menghindari polemik baru. Habibie mengetahui, di saat suasana genting dengan hitungan waktu mundur, menciptakan polemik yang bisa berkepanjangan hanya mempercepat ke arah kehancuran. Namun yang pasti, Gubernur BI dan Jaksa Agung tidak disertakan dalam kabinet untuk menjaga independensi kedua lembaga tersebut.

Salah satu misi terpenting pemerintahan Habibie adalah membuka jalan peralihan demokratis dengan mempercepat pelaksanaan pemilu. Bagi Habibie, pemilu adalah instrumen demokrasi yang membagi kekuatan potensial masyarakat untuk bersaing secara terbuka dan bukannya tersalurkan dengan cara destruktif. Untuk itulah tugas Habibie adalah menyiapkan instrumen aturan baru dan ia mengambil inisiatif mendatangi Gedung DPR/MPR pada 25 Mei 1998. Misi Habibie adalah berkonsultasi dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi mengenai jadwal Sidang Istimewa (SI) MPR.

Dalam pertemuan konsultasi selama 90 menit tersebut, dihasilkan lima kesepakatan. Pertama, keinginan pemerintah mengenai agenda percepatan pemilu memiliki semangat yang sama dengan dewan dan dewan telah membentuk Tim



Kasum ABRI Letjen TNI Sugiono (tengah) menyerahkan Panji-Panji Kepolisian RI kepada Sekjen Dephankam Fachrul Rozi (kanan) disaksikan Kapolri Jendral Pol Roesmanhadi (kiri) pada acara pemisahan Polri dari ABRI di Cilangkap, Jakarta tanggal 1 April 1999 (Sumber: ANTARA).



Beberapa anggota Polri berjabat tangan dengan rekan-rekannya dari korps Marinir TNI AL, usai upacara pemisahan Polri dari ABRI di Cilangkap, Jakarta, tanggal 1 April 1999 (Sumber: ANTARA).

Program Legitimasi Nasional (Prolegnas) untuk menghadapi percepatan pemilu, khususnya penyempurnaan, perubahan, dan pembuatan perangkat perundang-undangan: UU tentang Pemilu, UU tentang Kepartaian, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Kedua, pihak pemerintah juga menyiapkan tim undang-undang tersebut, termasuk reformasi dalam bidang ekonomi dan hukum, sehingga antara tim dari pemerintah dan tim dari dewan dapat saling mengisi, kemudian untuk dibahas dan diwujudkan dalam undang-undang produk dewan yang mengambil waktu diperkirakan enam bulan.

Ketiga, untuk menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, diperlukan Sidang Istimewa MPR dengan agenda mencabut, mengubah, dan membuat ketetapan-ketetapan MPR yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Keempat, setelah MPR menetapkan waktu diselenggarakannya pemilu, diperlukan waktu untuk mensosialisasikan persiapan pemilu, termasuk peserta, system, dan pelaksanaannya, sesuai perangkat perundang-undangan yang baru yang diharapkan selesai tahun 1999.

Kelima, dengan demikian jadwal program percepatan pemilu sesuai dengan penataan perangkat perundang-undangan dan sesuai dengan konstitusi.

Habibie juga mendorong amandemen konstitusi, terutama soal masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode berturut-turut. Menurut Habibie, ini

untuk menghindari kultus individu figur presiden. Institusi presiden tidak boleh menjadi terlalu sakral dan berkuasa sebab kedaulatan ada pada rakyat.

Pada presiden-presiden sebelumnya, awal kepemimpinan berjalan lancar dan transparan, sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Namun, seiring berjalannya waktu, terbentuk lingkaran kekuatan politik, kekuatan birokrasi, kekuatan keluarga, dan kekuatan kerabat di sekitar kekuasaan. Lingkaran tersebut menyebabkan distorsi dan manipulasi informasi sehingga kualitas kebijakan presiden menurun. Pembatasan ini berlaku pada jabatan eksekutif lain dalam pemerintahan, dari gubernur hingga lurah. Habibie juga menganggap bahwa tokoh yang menduduki jabatan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat.

Sebagai ilmuwan pesawat terbang, Habibie tahu sekecil apa pun kelalaian bisa mengakibatkan pesawat kolaps. Makanya dalam dunia penerbangan dikenal istilah, "*beware the crack*". Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan Habibie sebisa mungkin memiliki landasan konstitusi. Dalam bernegara, konstitusi adalah *holybook* yang menjadi sandaran kolektif untuk melangkah mengatur ketatanegaraan.

Dasar itulah yang melandasi Habibie mendesak MPR untuk segera menggelar Sidang Istimewa (SI). Tujuan utamanya adalah mengubah ketetapan MPR sebelumnya yang perlu disesuaikan tanpa menunggu hingga lima tahun, yakni tahun 2003. Ketetapan yang hendak diubah adalah



Pembukaan Sidang Istimewa MPR, di gedung DPR/MPR, Jakarta, tanggal 10 November 1999 (Sumber: ANTARA).



Layar monitor sebuah stasiun TV menyorot ke arah juru bicara F-ABRI Letjen TNI Hari Sabarno saat membacakan tanggapan fraksi terhadap pidato Presiden, di gedung Grahasabha Paripurna DPR/MPR, Jakarta, tanggal 4 Maret 1998. F-ABRI menerima pidato pertanggung jawaban Presiden Soeharto yang dibacakan pada hari pertama SU (Sumber: ANTARA).

mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengatur Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan mengatur jadwal pemilu secepatnya. Dengan demikian, reformasi memiliki landasan hukum yang kuat dan bertahan lama.

Sidang Istimewa MPR kemudian terlaksana pada 10–13 November 1998, bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sebelumnya, Munaslub Golkar telah digelar pada 9–11 Juli 1998. Munaslub tersebut menghasilkan empat poin reformasi dalam tubuh Golkar yang kemudian berdampak pada pelaksanaan pemilu. Poin-poin reformasi tersebut adalah pertama, seluruh pegawai negeri yang merangkap jabatan struktural di Golkar, baik di DPP, DPD Tingkat I, dan DPD Tingkat II, segera ditarik. Kebijakan ini sejalan dengan usaha untuk melepaskan birokrasi dari cengkeraman salah satu kekuatan politik. Kedua, di tubuh Golkar tidak ada lagi Keluarga Besar Golkar yang terdiri dari jalur A (ABRI), jalur B (Birokrasi), dan jalur G (Golkar). Ketiga, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tidak boleh memihak Golkar atau partai politik lain, dan harus memerhatikan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Keempat, semua partai politik, termasuk partai Golkar, harus menjadi lebih mandiri dan kredibel.

Dengan demikian, pada saat Sidang Istimewa MPR, Golkar telah menjadi partai politik dan KBG yang mengoordinasikan Fraksi ABRI, Fraksi Utusan Daerah, dan Fraksi Golkar sudah tidak berfungsi.

Berbeda dengan apa yang sempat dikhawatirkan sejumlah kalangan, Habibie tidak mengangkat wakil presiden dalam SI MPR ini. SI MPR berfokus pada penyusunan ketetapan MPR sebagai dasar hukum reformasi. Ada dua alasan mengapa Presiden Habibie tidak menunjuk wakil presiden. Pertama, dalam proses transformasi dari sistem tertutup ke sistem demokrasi yang terbuka Habibie merasa wakil presiden hanya akan membatasi perannya. Kedua, oleh karena semua dilakukan presiden sendiri, mau tidak mau ia harus menyelesaikan transformasi tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Habibie merasa transparansi birokrasi perlu diperbaiki, terutama transparansi antaranggota kabinet dalam menyelesaikan masalah politik, ekonomi, dan penegakan hukum yang saling berkaitan. Untuk itu, Habibie menetapkan sidang kabinet rutin dilaksanakan seminggu sekali, tidak dibatasi waktu, dan dihadiri semua anggota kabinet. Dengan demikian pula Presiden dapat proaktif mengambil kebijakan yang tegas dan pragmatis berdasarkan laporan menteri terkait, sehingga dapat mendahului perkembangan masalah.

Sebagai pemimpin dalam krisis, Habibie dengan sigap memimpin semua sidang kabinet. Pengaturan jadwal sidang kabinet adalah bidang Ekonomi di minggu pertama dan bidang Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan di minggu kedua. Di minggu ketiga, Presiden memimpin sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan



Demo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di halaman FKUI Salemba, Jakarta, tanggal 6 November 1998 (Sumber: ANTARA).

(DPKEK). Sementara bidang Politik dan Keamanan di minggu keempat.

Menyikapi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi yang menjadi tuntutan masyarakat, disusun UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN serta merevisi UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta ditambah dengan diajukannya RUU tentang Pencucian Uang dan RUU tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara. Habibie membentuk lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) untuk mencegah praktik KKN. Berkat UU No 31 Tahun 1999 itulah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan oleh pemimpin penerus mendapat dasar hukum.

OTONOMI DAERAH: UPAYA MENGATASI KESEJANGKAPAN SOSIAL-EKONOMI

Dalam pelaksanaan reformasi, terdapat tiga masalah nasional yang senantiasa membayangi stabilitas ekonomi dan politik, yakni soal Timor Timur, Aceh, dan Irian Jaya. Dewan Keamanan PBB mempermasalahkan status Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ingin melepaskan provinsi tersebut dari Indonesia. Demikian pula di Irian Jaya, di mana kelompok separatis ingin melepaskan provinsi ini dari Indonesia.

Untuk menghindari kekacauan dan destabilisasi politik-ekonomi ketika proses reformasi sedang berlangsung, Habibie mengajukan otonomi daerah sebagai solusi penanganan Aceh dan Irian Jaya. Secara umum, dasar pemikiran dari otonomi daerah adalah adanya kesenjangan antara pusat dan daerah, kesenjangan antargolongan masyarakat, dan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

Lebih dari 90% rakyat Indonesia tinggal di daerah, sementara sebagian besar pimpinan, tokoh, teknokrat, ahli teknologi, dan pakar nasional berkedudukan terpusat di Jakarta. Demikian pula dengan prasarana ekonomi, pendidikan, iptek, dan media informasi, semua terpusat di Jakarta. Tidak mengherankan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta menjadi yang tertinggi, sebab perputaran uang dan modal berkitar di daerah ini.

Kondisi tersebut kontras dengan daerah penghasil sumber daya alam, seperti Riau, Irian Jaya, dan Kalimantan yang justru penduduknya banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Habibie, situasi itu yang membuat pembagian porsi kue pembangunan tidak adil. Singkatnya, otonomi daerah merupakan usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sejumlah peraturan dicoba untuk diperbaiki agar dapat lebih memberdayakan pembangunan di daerah. Juga meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses perubahan yang diusulkan para pemimpinnya. Habibie menekankan bahwa otonomi daerah berbeda dengan sistem



Kunjungan Presiden B.J. Habibie beserta ibu Hasri Ainun Habibie ke Aceh, diterima oleh Gubernur Aceh di pendopo gubernuran Banda Aceh, Maret 1999 (Sumber: Arsip Keluarga Habibie).



Setelah mengadakan dialog dengan masyarakat Aceh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Presiden BJ. Habibie melaksanakan shalat berjamaah, Maret 1999 (Sumber: Arsip Keluarga Habibie).

federal. Otonomi daerah adalah desentralisasi yang masih berada dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Payung hukum otonomi daerah terletak dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Dalam penyusunan UU tersebut, Habibie mendengarkan analisis dari tim pakar di bidang administrasi dan pemerintahan daerah yang dibentuk Menteri Dalam Negeri. Tim ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ryaas Rasyid.

Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka turut diatur di dalamnya mengenai tugas dan wewenang DPRD beserta otonominya. UU ini memberikan wewenang seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan semua kewenangan pemerintahan, kecuali dalam lima hal, yakni bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter, sistem peradilan, dan kebijakan masalah keagamaan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga diatur dalam Tap MPR No. XV/MPR/1998.

Oleh karena pelaksanaan otonomi daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah, maka pelaksanaannya bervariasi antardaerah. Besaran kewenangan daerah dipertimbangkan dengan memperhatikan asas kebutuhan (apakah sebuah kewenangan benar-benar dibutuhkan?), manfaat (seberapa bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah di daerah?),

dan kapasitas (apakah tersedia sarana-prasarana dan SDM pendukungnya?).

Dengan otonomi tidak ada sistem daerah bertingkat. Juga tidak ada lagi lembaga pemerintah pusat di kabupaten dan kota. Semua instansi menjadi otonom dengan titik berat otonomi di kabupaten/kota. Pergeseran dari pusat ke kabupaten/kota berlatar pada tiga alasan. Pertama, untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Semua urusan dapat diselesaikan di kota kabupaten. Birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, meletakkan titik berat otonomi di kabupaten/kota akan semakin mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Ketiga, titik berat otonomi di kabupaten/kota akan menghilangkan *micronationalism* yang merupakan bibit disintegrasi negara.

Lebih khusus mengenai masalah Aceh, DPR mengeluarkan UU No. 44 tentang Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh. Dengan UU ini Aceh memperoleh keleluasaan yang luas dalam mengatur kehidupan keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat mereka sendiri. Melalui otonomi daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah lebih seimbang. Aceh dapat mengendalikan dan mengelola kehidupan politik serta sumber ekonominya secara mandiri.

Otonomi daerah menjadi panduan bagi seorang pemimpin untuk lebih memahami kehidupan dan permasalahan rakyatnya. Pemimpin yang sukses di daerah bukan mustahil dapat menanjak naik sebagai pemimpin pusat. Kata Habibie,



Presiden B.J. Habibie bersama Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan, melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPR RI tanggal 3 Desember 1998 (Sumber: ANTARA).

"Tokoh-tokoh nasional dan daerah kelak harus diberikan kesempatan, untuk berprestasi dan lebih dikenal oleh rakyat, sehingga pemilihan seorang presiden dan wakil presiden secara langsung dapat dilaksanakan ..."

"Bisa saja terjadi bahwa pada suatu ketika presiden RI yang dipilih adalah para tokoh yang pernah sukses memimpin daerah, misalnya gubernur dari salah satu provinsi. Ini sudah terjadi di Amerika Serikat, seperti Presiden Reagan, Presiden Clinton, Presiden Bush, dan seperti di Jerman Kanselir Helmut Kohl dan Kanselir Schoeder. Mengapa tidak?"

KEPARTAIAN DAN PEMILU 1999

Menurut Habibie, sistem sebelum reformasi yang mengistimewakan Golkar membuat susunan anggota DPR dan MPR tidak memiliki legitimasi di mata rakyat, padahal legitimasi atau kepercayaan rakyat dibutuhkan untuk mengubah situasi krisis yang tidak terprediksi menjadi terprediksi. Atas alasan tersebut salah satu hal yang pertama dan utama dilakukan Habibie setelah dilantik adalah menyiapkan pemilu secepatnya.

Pemilu sebelumnya baru saja dilaksanakan pada 1997. Sesuai dengan GBHN, seharusnya pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 2002. Namun, Indonesia adalah "pesawat" yang sedang mengalami "super stall" sehingga pemilu, sebagai langkah penyelamatan "pesawat", tidak bisa menunggu selama itu. Dalam konsultasi dengan DPR/MPR pada 25 Mei 1998, DPR/MPR bersepakat dengan presiden untuk memajukan jadwal pemilu. SI MPR pada 10–13 November 1998 kemudian memutuskan bahwa pemilu digelar pada 7 Juni 1999.

Pemilu 1999 bertujuan memilih langsung anggota MPR, DPR, dan DPRD. Menurut Habibie, kelak pemangku jabatan eksekutif juga akan dipilih secara langsung. Dengan demikian, bobot legitimasinya meningkat. Habibie membandingkan situasi saat itu dengan kondisi Indonesia di awal kemerdekaan. Saat ini, tingkat melek aksara rakyat Indonesia telah mencapai 85%, berbeda dengan awal kemerdekaan yang hanya 15%. Seiring dengan kemelekan ini, rakyat Indonesia menjadi semakin terdidik dan menyerap pelbagai informasi. Ditambah dengan iklim globalisasi, dengan demikian, pemilihan langsung menjadi kebutuhan dalam demokrasi.

Saat SI MPR berlangsung, beberapa anggota MPR menyarankan agar presiden dan wakil presiden serta DPD dipilih langsung dalam Pemilu 1999, namun, menurut pertimbangan Habibie, hal tersebut belum dapat dilaksanakan secepatnya. Diperlukan kesabaran.

Habibie menyebut tokoh-tokoh yang harus diberi kesempatan dalam berpartisipasi aktif dalam panggung pemerintahan adalah mereka yang berasal dari "generasi peralihan dan generasi penerus yang potensial". Bila pemilihan langsung pejabat eksekutif dilakukan pada Pemilu 1999, Habibie khawatir tokoh-tokoh muda tersebut akan terdesak oleh tokoh-tokoh yang sudah lama berada di dalam sistem, sehingga pembaruan tidak sempurna.

Untuk pemilihan DPD, Habibie berpendapat, kebiasaan penentuan Utusan Daerah yang berpola "atas ke bawah"

Presiden B.J. Habibie memberikan ucapan selamat kepada Rudini selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 11 Maret 1999 (Sumber: ANTARA).



yang sudah berlangsung selama 32 tahun jika diubah dalam sekejap, tidak ada garansi jika tidak menimbulkan kekacauan.

Sebenarnya, beberapa hari setelah Habibie dilantik, ia bertemu dengan enam tokoh nasional, yaitu Emil Salim, Rudini, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan John Sapi'ie. Mereka meminta agar pemilu diselenggarakan sebelum September 1998.

Habibie menolak permintaan ini dengan alasan ada banyak perubahan dalam pemilu. Perubahan itu mencakup jumlah partai, kehidupan politik dalam suasana demokrasi, kebebasan keterbukaan, dan demokrasi. Sementara perubahan itu hanya mungkin dilakukan dalam SI MPR. Jika pemilu dilaksanakan sebelum SI, hanya ada dua kemungkinan. Pemilu 1999 sama saja dengan pemilu sebelumnya. Atau, jika ada perubahan, maka perubahan tersebut tidak konstitusional. Di samping itu, dengan membayangkan pemilu selanjutnya akan diikuti oleh banyak partai baru, Habibie merasa tidak adil jika rakyat tidak diberikan waktu untuk bersiap. Bersiap dalam arti membentuk partai politik baru dan memasyarakatkan aspirasi dan wawasan partai tersebut. "Lima tahun kemudian, pada tahun 2004, insya Allah sudah dapat diadakan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, para anggota DPD langsung, bupati dan wali kota langsung. Semuanya baru, tokoh-tokoh baru, dan aliran-aliran baru muncul," ujar Habibie.

Pemilu 1999 yang diselenggarakan pemerintahan transisi Habibie adalah tonggak penting demokrasi baru di Indonesia; sebagaimana eksperimentasi yang sama saat Indonesia menyelenggarakan pemilu demokratis tahun 1955. Pembatasan peserta pemilu di pemerintahan sebelumnya yang hanya terdiri dari dua partai dan Golongan Karya dihapuskan. Melalui Undang-Undang No 2 1999 tentang Partai Politik yang ditetapkan pada masa Habibie bermunculan partai politik baru. Jumlah partai politik tidak dibatasi. Syarat partai peserta Pemilu hanyalah (1) mengakui Pancasila dan UUD 1945, (2) tidak dinyatakan terlarang oleh Tap MPR, dan (3) masyarakat sudah bisa mendirikan partai sejak Juni 1998. Pada Pemilu 1999, tercatat ada 48 partai peserta. Selain itu, TNI dan PNS dilarang memihak salah satu kontestan pemilu.

Habibie mengatakan bahwa Pemilu 1999 harus berjalan secara luber (langsung-umum-bebas-rahasia), jujur-adil, dan demokratis. Untuk itu, dikeluarkan sejumlah kebijakan. Lembaga pengawasan masyarakat dan pemantau pemilu tidak lagi dilarang. Habibie juga mengundang pihak asing untuk mengawasi jalannya pemilu. Pencoblosan dilakukan di sekitar rumah tinggal, bukan di kantor. Hari pelaksanaan pemilu dijadikan hari libur nasional. Menteri tidak boleh berkampanye, kecuali saat sedang mengambil cuti. PNS dilarang terlibat aktif dalam partai politik; jika demikian, ia harus mengundurkan diri. PNS juga bebas



Pelaksanaan kampanye partai peserta pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik (Sumber: ANTARA).

menyalurkan aspirasinya kepada partai politik mana pun.

Untuk menghindari campur tangan pemerintah dan menjaga objektivitas, pelaksanaan pemilu ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU terdiri dari 48 anggota yang mewakili masing-masing parpol peserta pemilu, ditambah empat orang wakil pemerintah. KPU Pemilu 1999 dipimpin oleh Rudini. Adnan Buyung Nasution dan Harun Alrasyid menjadi wakil ketua.

Selepas pemungutan suara 7 Juni 1999, KPU tak kunjung merilis hasil pemilu karena 27 dari 52 anggota KPU menolak menandatangani berita acara dan sertifikat tabulasi hasil penghitungan suara. Oleh karena jumlah anggota KPU wakil partai politik yang menandatangani hasil perhitungan telah mewakili 93,03% dari seluruh pemilih (setara dengan 98.348.208 suara), Habibie mengambil alih untuk mengumumkan hasil pemilu di televisi dan radio.

Hasilnya, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak (35.689.073 suara), disusul dengan Golkar (23.741.749 suara), PPP (11.329.905), PKB (13.336.982), PAN (7.528.956), dan PBB (2.049.708).

EKONOMI HABIBIE

Ketika dilantik, Presiden ke-3 RI mewarisi krisis ekonomi. Inflasi mencapai 650%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar lepas landas dari Rp 2.432,00 per dolar pada Juli 1997 menjadi Rp11.050,00 per dolar pada Januari 1998, bahkan mencapai

Rp15.000,00 per dolar pada Juni 1998. Sistem perbankan Indonesia tidak berfungsi, bisnis mengalami stagnasi, disambung dengan krisis pangan yang membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Jumlah pengangguran naik hampir satu juta orang, dari 4,68 juta di tahun 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998. Krisis ekonomi ini menimbulkan efek domino menjadi krisis politik, krisis sosial, bahkan krisis psikologis.

Menurut Bilveer Singh, dalam konteks tersebut, pencapaian Presiden Habibie selama 517 hari pemerintahannya dianggap luar biasa. Kebijakan ekonomi yang pertama-tama ia lakukan berfokus pada dua hal: menyelesaikan krisis ekonomi dengan cara meningkatkan kualitas mata uang rupiah dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan obat-obatan.

Kerangka strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan Habibie adalah dengan (1) mengeluarkan kebijakan moneter untuk mematahkan spekulasi dan hiperinflasi, (2) restrukturisasi hutang-hutang swasta, (3) membuat program Jaring Pengaman Sosial, (4) mengusahakan ketersediaan dana dari bantuan luar negeri dan membatasi pengeluaran negara hanya pada kebutuhan mendesak. Kesuksesan Habibie tersebut dapat dinilai berdasarkan fakta-fakta berikut.

Pertama, menstabilkan nilai tukar rupiah dari Rp15.000,00 per dolar pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000,00 per dolar pada Oktober 1999. Kedua, berhasil mengontrol inflasi. Pada

"Terus terang saja yang menyelamatkan Demokrasi Indonesia adalah B.J. Habibie. Beliau yang pertama melaksanakan pemilu secara adil di Indonesia dengan melibatkan banyak partai politik"—WILLIAM LIDDLE, Guru Besar Ilmu Politik, Ohio State University

periode Januari–September 1998, inflasi mencapai 75,47 %. Pada periode Januari–September 1999, inflasi sebesar 2%. Ketiga, berhasil menekan angka pemutusan hubungan kerja. Fakta keempat adalah pertumbuhan positif PDB (produk domestik bruto). Pada triwulan I dan II tahun 1999, besarnya 1,31 % dan 0,46 % terhadap bulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut berkisar antara 0 dan 1 persen, lebih baik dibandingkan penurunan sebesar minus 13,2 % pada 1998. Kelima, menahan laju suku bunga Setifikat BI, dari 70 % pada Agustus 1998 menjadi 13 % pada Oktober 1999. Keenam, meningkatkan jumlah devisa, dari US\$19 miliar (setara dengan 6,7 bulan impor) pada Mei 1998 menjadi US\$26,9 miliar (setara dengan 10,4 bulan impor) pada September 1999. Kemampuan mengundang aliran dana investasi asing (Foreign Direct Investment, FDI) ke pasar modal Indonesia di situasi politik yang masih goyah adalah fakta ketujuh. Hasilnya dapat dilihat di Indeks Harga Saham Gabungan, di mana nilainya hanya 250 poin pada September 1998, melewati 600 poin pada Juni 1999. Fakta kedelapan, merestrukturisasi sektor perbankan. Dari 160 bank komersial yang ada, 48 bank dilikuidasi, 16 bank diambil alih, dan 11 bank direkapitalisasi dengan bantuan pemerintah. Aset bank yang dibekukan diambil alih dan dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Nilainya mencapai Rp350 triliun. Kesembilan, berdasarkan TAP MPR No. X dan No. XVI/MPR/1998 kondisi ekonomi usaha kecil, menengah, dan

koperasi dipulihkan. Pemerintah menyederhanakan perizinan dan menyalurkan kredit usaha yang dananya diambil dari APBN. Fakta kesepuluh, membuat BI mandiri dengan tujuan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Ditinjau dari Indeks Harga Konsumen, eskalasi harga menurun drastis. Pada September 1998, harga melonjak 82,4 % dibandingkan harga pada September 1997. Pada September 1999, harga hanya naik 1,25 % dibanding harga pada September 1998. Tingkat konsumsi kembali naik.

Setelah memutuskan posisi mandiri BI di hari kedua setelah pelantikannya, Habibie mulai memikirkan tentang pentingnya mengembalikan laju *foreign direct investment* (FDI) ke Indonesia. Pada 25 Juni 1998, ia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 170/M/1998 tentang pengangkatan duta-duta besar keliling. Orang-orang yang direkrut merupakan pebisnis profesional. Mereka ditugaskan untuk memperbaiki citra Indonesia di luar negeri, serta memberi pengertian mengenai proses reformasi dan demokratisasi yang sedang berlangsung di dalam negeri.

Tujuh orang yang diangkat sebagai duta besar keliling adalah Iman Taufik untuk wilayah kerja ASEAN; James Tjahaya Riady untuk wilayah kerja negara-negara RRC, Hong Kong, Taiwan, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara Oseania; Kusumo Martorejo untuk wilayah kerja negara-negara Jepang dan Korea Selatan; Muchrim Hakim untuk wilayah kerja negara-negara Timur Tengah dan



Presiden B.J. Habibie memberikan keterangan pers menyikapi Sidang Istimewa MPR tanggal 4 Oktober 1999 (Sumber: ANTARA).

Afrika Utara; Suryo Bambang Sulistio untuk wilayah kerja negara-negara Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan; Hashim Sujono Djojohadikusumo untuk wilayah kerja negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur; serta Marimutu Sinivasan untuk wilayah kerja negara-negara Asia Selatan, Afrika Selatan, dan Afrika Timur.

Dalam sektor riil, Pemerintah melakukan restrukturisasi utang-utang swasta terhadap perbankan nasional. Ada sekitar 1600 debitur dengan hutang macet yang ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Tujuh puluh kesepakatan restrukturisasi telah dicapai, dengan nilai Rp50 triliun.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ditetapkan lewat TAP MPR No. X/MPR/1998. Tujuannya untuk membantu masyarakat miskin melewati krisis. Yang dilakukan lewat program ini adalah penyaluran beras murah ke 10 juta keluarga lewat operasi pasar, penyaluran beasiswa kepada empat juta anak yang terancam putus sekolah, penyaluran bantuan operasional ke 130 ribu sekolah di seluruh Indonesia, penyaluran bantuan operasional ke 7.000 puskesmas, penyediaan dana program pemberdayaan masyarakat di 36 ribu desa, dan pemberian makanan tambahan kepada 8,1 juta anak di sekolah dasar dan madrasah.

PEMISAHAN BANK INDONESIA DARI KABINET

Pemisahan Bank Indonesia (BI) dari kabinet adalah kebijakan yang berani. Habibie mengakui harus berhati-hati

"Darah daging saya memang engineer. Saya meng-engineering politik, ekonomi dan sebagainya sehingga dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah saya tentukan."

sekali dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat dalam keadaan yang semakin kompleks, tidak menentu, dan terus berkembang ke arah destabilisasi politik dan ekonomi.

Sementara pada saat itu, 22 Mei 1998, situasi ekonomi Indonesia terus berkembang menuju hiperinflasi. Suku bunga berkisar antara 60–90%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar antara Rp 14.000,00–Rp17.000,00 per dolar. Cadangan devisa mengecil menjadi 56 % dari cadangan semula.

Untuk menghambat nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus jatuh, menurut Habibie, kunci penyelesaiannya ada pada peran BI. BI harus menjadi mandiri, bebas, kuat, dan independen, bahkan terhadap Presiden. Sebelumnya, kebijakan BI dapat dikendalikan oleh Presiden karena Gubernur BI merupakan bagian dari kabinet. Ini merupakan hasil penafsiran UU No 13 Tahun 1968 yang menyatakan bahwa BI adalah lembaga negara yang membantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan.

Terhadap UU tersebut Habibie menyatakan bahwa dengan menjadikan BI mandiri dan objektif dianggap dapat membantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan. Dalam SI MPR, pemberian dasar hukum yang kuat kepada BI menjadi salah satu agenda. Dalam mempersiapkan UU BI yang baru, Habibie meminta bantuan pakar moneter Jerman dan mantan Presiden Deutsche Bundesbank Prof. Dr. Schlessinger dan pakar dari IMF.



Nasabah bank yang mengalami likuidasi melakukan unjuk rasa menuntut dananya kembali di Jakarta tanggal 16 Maret 1999 (Sumber: ANTARA).



Karyawan bank yang dilikuidasi berunjuk rasa menuntut pesangon kepada pemerintah setelah di PHK, tanggal 10 Mei 1999 (Sumber: ANTARA).

Dengan demikian, kepada BI diputuskan lima hal. Pertama, Gubernur BI tidak lagi menjadi anggota kabinet dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Kedua, Gubernur BI harus mandiri dan profesional. Ketiga, akan disiapkan UU untuk BI, dengan amandemen UUD atau TAP MPR jika diperlukan. Keempat, BI diharap segera mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas mata uang rupiah dengan menjadikan BI lebih transparan. Kelima, jika pemerintah membutuhkan dana untuk proyek apa pun, pinjaman tersebut harus dicari di pasar modal. Pemerintah hanya dapat berkonsultasi dengan BI. Setelah memutuskan pemisahan BI dan kabinet, Habibie memerintahkan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin memanfaatkan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kualitas mata uang rupiah dan menjaga suku bunga dan inflasi satu angka, yang berarti di bawah 10 %.

Tim yang terdiri dari pakar keuangan dan perbankan dan komisi yang bersangkutan menyusun UU baru untuk BI, yakni UU 23 Tahun 1999. UU yang disahkan pada 17 Mei 1999 ini mengatur bahwa BI dipimpin oleh tim pimpinan yang disebut Dewan Gubernur (DG). DG dipimpin oleh Gubernur BI yang merangkap anggota DG serta wakil gubernur BI yang juga Deputy Gubernur Senior merangkap anggota DG.

Kemudian sistem pembayaran BI berdasarkan prinsip syariah. Peraturan BI mengikat semua badan dan orang, sementara peraturan DG hanya berlaku di lingkungan internal BI. Kebijakan Moneter BI ditujukan untuk mencapai

dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang BI, dibuat cadangan yang diambil dari sebagian surplus BI.

Habibie menganalisis bahwa krisis perbankan 1997–1999 di Indonesia dapat digeneralisasi menjadi tiga fase. Fase pertama antara Juli 1997 hingga akhir Januari 1998. Pada fase ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meredakan krisis, dengan menjamin bank umum dan mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Fase kedua adalah ketika terjadi bank *rush* pada awal Februari 1998 hingga Oktober 1998. Fase ketiga adalah periode pemulihan perbankan, yakni sejak Oktober 1998 hingga selesai. Untuk segera memasuki fase ketiga, Habibie harus segera menuntaskan fase kedua secepat-cepatnya, yakni dengan membentuk BPPN dengan tugas menyetatkan bank dan menyusun mekanisme program jaminan pemerintah. Pada 14 Februari 1998 BI menyerahkan 54 bank untuk dimasukkan dalam program penyehatan BPPN. Peserta program tersebut terdiri dari empat bank persero, 37 bank umum swasta nasional, 2 bank campuran, dan 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Oleh BPPN, bank-bank tersebut dikategorikan menjadi dua jenis, yakni bank yang dapat mengikuti program penyehatan diambil alih pengelolaannya, disebut bank *take-*



Presiden B.J. Habibie menerima anggota Komnas HAM di Istana Merdeka, tanggal 15 November 1998 (Sumber: ANTARA).

"Dialah 'Mr Human Rights', benar, itulah julukan tepat yang pantas diberikan kepada Presiden B.J. Habibie"—BILVEER SINGH, National University of Singapore

over (BTO) dan bank beku operasi (BBO). BTO adalah apabila bank telah menerima bantuan likuiditas BI (BLBI) lebih dari Rp 2 triliun atau sama/lebih dari 500 % modal bank. BBO adalah apabila rasio kecukupan modal (RKM) kurang atau sama dengan dua persen, atau mendapat BLBI senilai 500 % modal bank dan melampaui 75 % total aset. Suatu bank dianggap tidak dapat diselamatkan setelah tidak mampu memenuhi tahapan peyeteran tambahan modal oleh pemegang saham, mendapat tambahan modal dari investor baru, dan mengusahakan merger dengan bank lain yang sehat. Pada 7 April 1998 BPPN menetapkan enam bank sebagai BTO dan tujuh bank BBO. Pada Mei 1998, BCA turut diambil alih sehingga BTO berjumlah tujuh bank. Pada Agustus 1998, dua bank BTO berubah status menjadi BBO.

Untuk menyelesaikan masalah perbankan, Habibie melebur empat bank BUMN, yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 lewat Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998. Pada Juli 1999, keempat bank BUMN tersebut bergabung dengan Bank Mandiri.

PANGGUNG BAGI SUARA YANG BISU: KEBEBASAN, REFORMASI HUKUM, DAN PENGHORMATAN PADA MANUSIA

Habibie berpendapat bahwa tuntutan rakyat menjelang reformasi dilatari oleh kesadaran pada penghormatan atas

"Saya menyadari, rakyat Indonesia sedang dalam puncak euphoria. Jika dulu mereka takut berbicara, sekarang mereka bebas menyatakan pendapat. Begitu pula pers yang baru dinikmati kebebasannya tanpa batas."

hak-hak dasar seorang manusia yang didukung dengan sistem informasi yang makin sempurna. Kebebasan dan kemerdekaan yang dituntut oleh rakyat adalah HAM dan demokrasi. Meskipun kesadaran atas HAM itu belum diimbangi dengan kesadaran atas Kewajiban Asasi Manusia (KAM), Habibie memutuskan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi HAM dan demokratisasi.

Hal tersebut tampak dalam kebijakan pertama Habibie sebagai presiden. Terdapat tiga hal yang berkaitan dengan HAM, yakni keputusan untuk memberikan: (a) kebebasan pers; (b) kebebasan berpendapat, yang menyatakan bahwa semua orang bebas berpendapat dan berunjuk rasa; dan (c) membebaskan semua tahanan politik selama tidak terkait dengan tiga hal, yakni tindakan yang bertujuan mengubah falsafah negara, tindakan kriminal dan terorisme, dan bukan anggota organisasi terlarang PKI.

Dampak positif dari kebebasan pers tampak dalam statistik. Di masa Orde Baru, terdapat 289 media cetak dan 996 stasiun radio swasta. Setelah reformasi, jumlah media cetak mencapai 1.398 dan penyiaran swasta berjumlah 74



Demo menuntut Komnas HAM melakukan investigasi terhadap kekerasan yang dialami buruh migran, tanggal 24 Maret 1998 (Sumber: ANTARA).



Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) melaporkan insiden Semanggi 13 November kepada Komnas HAM tanggal 18 November 1998 (Sumber: ANTARA).

stasiun. Maraknya penerbitan pers itu disebabkan karena pemerintah mencabut statuta kepada pelaku pers untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) kepada pemerintah. Prinsip yang dipegang teguh Habibie adalah konsepsi bahwa kemerdekaan pers yang profesional merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Untuk memberi garansi pada kemerdekaan pers itu ia membuat Undang-Undang No 40 Tentang Pers yang memberi jaminan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, termasuk kemerdekaan membentuk organisasi wartawan lebih dari satu. Lahirnya Undang-Undang Pers itu kemudian dijadikan tonggak kebebasan pers di Indonesia.

Untuk kemerdekaan berpendapat di muka umum, pemerintahan Habibie memberikan garansi dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini mengatur dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat tanpa mengakibatkan terganggunya hak dan kebebasan orang lain. Kehadiran undang-undang ini mendorong tumbuhnya kekuatan-kekuatan sosial politik masyarakat lewat organisasi dan pendirian beragam asosiasi di semua lini profesi.

Secara umum, reformasi yang dilakukan Habibie di ranah kebebasan pers dan menentukan orientasi sosial dan politik bisa dibaca dalam satu ikatan yang padu: penghormatan pada hak-hak asasi yang melekat dalam diri manusia, misalnya kebijakan kebebasan mendirikan partai politik,

penghapusan "kewajiban" bagi PNS untuk memilih Golkar, pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur, program JPS, dan pemberantasan KKN.

Penghormatan Habibie pada HAM dalam konteks pembangunan SDM adalah dengan mencari terobosan agar keluarga miskin bisa menyekolahkan anak mereka. Habibie berambisi agar Wajib Belajar 9 Tahun bisa tuntas. Untuk membuka peluang kerja, dibuka kesempatan bagi keluarga tertinggal untuk mengikuti latihan dan bekerja dalam kegiatan wirausaha. Pada mahasiswa kurang mampu, diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.

Akantetapi penegakan HAM terkendala oleh bervariasinya interpretasi atas HAM. Menurut Habibie, interpretasi HAM dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) sangat bergantung pada budaya dan kualitas hidup manusia, termasuk GNP per kapita. Interpretasi atas kebebasan, demokrasi, HAM, dan KAM dalam pelaksanaan reformasi antara masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan GNP-nya hanya tiga persen dari GNP per kapita masyarakat Barat yang mayoritas Kristen tentu saja berbeda.

Pada 25 Juni 1998, pemerintahan Habibie meluncurkan Program Lima Tahun Aksi Program Hak-Hak Asasi Manusia 1998–2003. Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tahun 1969 tentang pembersihan semua bentuk diskriminasi sosial dan Konvensi PBB tahun 1987 tentang penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi. Di Aceh, untuk menyelesaikan



Suasana pelaksanaan jajak pendapat warga Timor Timur di Dilli, tanggal 30 Agustus 1999 (Sumber: ANTARA).



Presiden CNRT, Xanana Gusmao memasukkan kertas suara sesuai melakukan pencoblosan dalam jajak pendapat, di Jakarta, tanggal 30 Agustus 1999 (Sumber: ANTARA).

masalah-masalah pelanggaran HAM, pemerintah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Di kemudian hari, Habibie mengganti UU Anti-Subversi dan menyiapkan UU tentang HAM. Untuk pemuliaan kaum perempuan, pada Oktober 1998, Habibie membentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan.

Demikianlah, bersandar pada TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang reformasi di bidang hukum, pemerintahan Habibie yang pendek tak menghalanginya untuk melahirkan demikian banyak produk perundang-undangan sebagai landasan bersama sebagai bangsa untuk melangkah meniti masa depan. Melahirkan 68 produk perundang-undangan untuk waktu 16 bulan usia pemerintahan adalah sebuah prestasi. Rata-rata setiap bulan menghasilkan 4,2 produk undang-undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif di era sebelumnya yang hanya 4,07 undang-undang per tahun atau 0,34 per bulan.

MELEPAS BEBAN POLITIK KAWASAN, MEMBUKA JALAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR

Ketika Uskup Dili Carlos Filipe Ximenes Belo berkunjung ke kantor kerja Presiden di Bina Graha, 24 Juni 1998. Ia menyampaikan bahwa inilah pertama kalinya diterima Presiden RI. Uskup Belo datang ke Jakarta atas undangan Habibie untuk membicarakan masalah Timor Timur. Dalam pertemuan itu Habibie bertanya, "Apa

yang dapat saya laksanakan untuk memenuhi keinginan rakyat Timtim?" Uskup Belo lalu membacakan dua helai kertas berisi catatan tentang Timor Timur. Habibie mengatakan sembilan puluh persen dari keinginan Uskup Belo akan dipenuhi. Setelah pertemuan tersebut, Habibie menyimpulkan masalah Timor Timur harus segera diselesaikan sebelum presiden ke-4 terpilih. Timor Timur tidak boleh membebani reformasi.

Persoalan Timor Timur adalah satu di antara masalah nasional yang mengganggu Habibie. Sejak berintegrasi dengan Indonesia pada 17 Juli 1976, status provinsi ke-27 ini telah dipersoalkan oleh Dewan Keamanan PBB dan menyebut Indonesia menganeksasi Timor Timur. Sidang Umum PBB 19 November 1976 menyatakan menolak aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur.

Secara hukum, masuknya Timor Timur diikat lewat UU No 7 Tahun 1976, yang kemudian diperkuat dengan TAP MPR No VI/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978. Ini merupakan hasil permohonan gerakan aspirasi masyarakat Timor Timur yang dicetuskan dalam Deklarasi Balibo, 30 November 1975.

Sejak bertahun-tahun sebelumnya, usulan penyelesaian lewat referendum sudah diusulkan pelbagai pihak dalam forum internasional, termasuk tokoh Timor Timur seperti Xanana Gusmao, Uskup Belo, dan Jose Ramos Horta. Alasan mendasarnya adalah karena setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan

Presiden B.J. Habibie berjabat tangan dengan Uskup Bello sesuai pertemuan khusus di Istana Negara, tanggal 24 Juni 1998 membahas masalah Timor Timur (Sumber: ANTARA).

"Langkah penyelesaian Timor Timur secara komprehensif memungkinkan Indonesia memasuki percaturan internasional yang semakin kompetitif dengan kepala tegak dan langkah yang pasti"

UUD 1945. Dalam perundingan Tripartit, PBB dan Portugal turut mendesak Indonesia untuk mengadakan referendum di Timor Timur.

Sidang Kabinet Bidang Politik dan Keamanan pada 27 Januari 1998, menyatakan bahwa jika tawaran otonomi diperluas ditolak rakyat Timor Timur, maka MPR akan mempertimbangkan kemungkinan melepaskan Timor Timur. Pilihan ini disebut "opsi kedua".

Beberapa hari setelah SIMPR 1998, Habibie menerima surat dari Perdana Menteri Australia John Howard yang mengusulkan agar penyelesaian Timor Timur dilakukan seperti penyelesaian bekas koloni Prancis. Kaledonia Baru dipersiapkan selama lima sampai sepuluh tahun oleh negara penjajah Prancis untuk memperoleh kemerdekaannya melalui suatu referendum. Saran ini diabaikan Habibie karena, menurutnya, Timor Timur bukan koloni Indonesia. Juga bukan referendum yang akan dilakukan di Timor Timur, sebab presiden tidak berwenang untuk menentukan pelaksanaan referendum, melainkan MPR. Yang akan dilaksanakan di Timor Timur adalah jajak pendapat, yang pelaksanaannya tidak membutuhkan ketetapan MPR, tetapi MPR dapat menolak hasilnya.

Dalam Perjanjian Tripartit yang disahkan pada 5 Mei 1999 di New York, pihak Indonesia, PBB, dan Portugal sepakat untuk menyelenggarakan jajak pendapat. Dengan jajak pendapat, warga Timor Timur akan menentukan pilihan mereka, tetap bersatu dan menerima otonomi luas atau berpisah dari



Indonesia. Hasil jajak pendapat itu kemudian akan dibahas oleh MPR untuk disetujui atau ditolak. Sebagai tindak lanjut, United Nations Mission in East Timor (Unamet) dibentuk pada 11 Juni 1999. Habibie dan Sekjen PBB Kofi Annan bersepakat untuk merahasiakan hasil jajak pendapat hingga 72 jam setelah hasilnya diketahui.

Jajak pendapat diselenggarakan pada 30 Agustus 1999. Hasilnya, 78,5% menolak otonomi luas dan 21,4% menerima. Habibie menerima kabar hasil jajak pendapat lewat telepon dari Sekjen PBB Kofi Annan pada 4 September 1999. Sekjen PBB itu menyampaikan akan segera mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil jajak pendapat Timor Timur.

Habibie memandang tindakan Sekjen PBB tersebut melanggar kesepakatan. Kerusuhan sosial pun meledak di Timor Timur. Pada tanggal 6 September 1999, mulai pukul 00.00, Timor Timur diumumkan dalam Keadaan Darurat Militer. Dalam Sidang Umum MPR, 19 Oktober 1999, hasil jajak pendapat tersebut diterima. Hal tersebut diatur dalam TAP MPR No V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Dengan demikian Timor Timur resmi berpisah dari Indonesia.

Tindakan Habibie melepas Timor Timur untuk merdeka adalah tindakan yang beradab. Habibie tak ingin bangsa Indonesia terus dihantui masalah aneksasi sejarah sebagaimana dituduhkan masyarakat internasional. Menyelesaikan soal Timor Timur dengan cara demokratis



Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan diapit oleh Menteri Luar Negeri Portugis dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas (Sumber: Reuters).



Presiden B.J. Habibie dan Ketua Unamet Ian Martin bersama Utusan Khusus PBB untuk Timtim, Jamsheed Marker di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 12 Agustus 1999 (Sumber: ANTARA).

"Untuk menyelesaikan permasalahan yang begitu multikompleks dan multidimensi, the best son and the best daughter of this country is just good enough."

adalah melepaskan beban bagi pemimpin penerus Habibie untuk berkonsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia dalam sistem politik yang demokratis.

"DENGAN demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak," demikian Ketua MPR Amien Rais menutup Sidang Paripurna tepat pukul 00.35. Saat itu kalender menunjuk 19 Oktober 1999. Habibie dan keluarganya menyaksikan pemungutan suara ihwal diterima atau ditolaknya pertanggungjawabannya sebagai Presiden RI dan Mandataris MPR dari kediamannya, Kuningan, Jakarta. Pagi harinya pukul 08.30 Habibie menyelenggarakan jumpa pers di hadapan sekitar 77 wartawan dari 45 media massa dalam dan luar negeri. Di bagian awal ia mengucapkan rasa gembiranya bahwa sidang MPR yang menolak pertanggungjawabannya telah dilaksanakan secara demokratis. Konsekuensinya, Habibie menolak pencalonannya menjadi presiden untuk masa bakti 1999–2004.

Habibie juga menyumbangkan kemenangan akal sehat dan politik demokratis tatkala ia hadir dan duduk di Senayan dan wajahnya yang terus ceria dan tertawa lebar disorot secara utuh oleh kamera televisi di tengah orang-orang

merayakan kekalahannya. Sebagaimana dituliskan dengan baik oleh Goenawan Mohamad, kehadiran Habibie yang gembira itu sebagai kemenangan akal sehat. Kemenangan demokrasi. Ia telah memulai tradisi "para-politik" dengan kompetisi dan konflik yang dilangsungkan dalam lembaga yang beraturan dan bukan lewat barikade. Untuk itulah kita perlu bertepuk tangan.

NEGARAWAN YANG MEMILIH JALAN MANANDHITA

Ketika sedang makan siang bersama, suatu hari di bulan Mei 1999, Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Luar Negeri Dewi Fortuna Anwar bertanya kepada Habibie tentang komitmennya tentang demokratisasi di Indonesia setelah beliau tak lagi menjabat. Habibie menjawab, "Kita harus tetap mendorong proses demokratisasi, dalam posisi apa pun kita nanti."

Sepanjang pemerintahannya, Habibie dikenal dengan komitmennya atas demokrasi. Meski memerintah dalam waktu singkat, Habibie mampu mempertahankan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Bilveer Singh menulis, *"Even though his tenure as president was relatively short-lived, what he introduced, achieved and left behind as far as democratic reforms were monumental by any yardstick."* (Meskipun masa jabatannya sebagai presiden relatif singkat, apa yang Habibie perkenalkan, capai, dan tinggalkan sejauh menyangkut pembaharuan-



Presiden B.J. Habibie bersama Ainun Habibie dalam suatu penerbangan melakukan kunjungan kerja ketika menjabat sebagai presiden (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden B.J. Habibie di ruang kerja kepresidenan Istana Negara bersama salah seorang cucu (Pasha, 3 tahun), 1998 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

pembaharuan yang demokratis adalah sangat penting dalam ukuran apapun.)

Bagi Habibie, demokrasi adalah proses dan demokratisasi Indonesia membutuhkan waktu berdekade-dekade: dibutuhkan kesabaran yang revolusioner untuk terus berikhtiar. Di sinilah kita memahami mengapa Habibie melontarkan keinginannya saat usia terus bergerak perlahan dan pasti ke barat: menjadi pertapa (*manandhita*). Ya, Habibie ingin menjadi seorang pertapa, begawan, yang berarti melepas segala keinginan berpolitik praktis. Jika pertemuannya dengan elit-politik digelar, itu semata bagian dari merangkul seluruh potensi bangsa. Habibie sadar, seorang *manandhita* cenderung merangkul mereka yang berbeda ketimbang mengelak dan menolak. Jika politik memisahkan, kependaitaan menyatukan.

Tetapi jangan kita bayangkan, setelah Habibie berkeinginan *mandhita* berarti ia kini hanya tinggal di rumah tanpa lagi memikirkan persoalan bangsa. Selepas tugas-tugas kenegaraan, ia "dipinang" oleh Inter Action Council, perhimpunan bergensi mantan-mantan pemimpin negara di dunia, antara lain, Malcolm Fraser (Australia), Helmut Schmidt (Jerman), Bill Clinton, Jimmy Carter (AS). Mereka secara periodik mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan masalah bangsa di dunia dan solusi yang menguntungkan bagi masyarakat dunia.

Habibie juga sering diundang menghadiri seminar penting di berbagai belahan dunia, memberikan nasihat

dan pandangan bagi berbagai kalangan di Tanah Air. Keprihatinannya pada persoalan bangsa bahkan berkali-kali dilontarkannya pada berbagai ceramah dan pidato yang disebutnya: "Situasi paradoksal". Menurut Habibie, situasi paradoksal tersebut terjadi karena seolah-oleh kita menderita "penyakit orientasi", yaitu wawasan, kebijakan, atau langkah yang sejatinya akan melemahkan produktifitas, daya saing, dan bahkan ekonomi kita, dan pada gilirannya akan melemahkan bangsa kita secara keseluruhan."

Apalagi itu penyakit orientasi? Menurut Habibie, kita lebih mengandalkan sumber daya alam daripada sumber daya manusia; kita lebih berorientasi jangka pendek daripada jangka panjang (mentalitas "kasir"); kita lebih mengutamakan citra daripada karya nyata; kita lebih memilih makro daripada mikro ekonomi; kita lebih mengandalkan *cost added* daripada *value added* (*more comparative rather than comparative advantages*); kita lebih berorientasi pada neraca perdagangan dan pembayaran daripada neraca jam kerja; kita lebih menyukai "jalan pintas" (korupsi, kolusi, penyelewengan, dan sebagainya) daripada kejujuran dan kebajikan; kita lebih menganggap jabatan (*power*) sebagai tujuan daripada sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*power centered than accountable [amanah] orientation*).

Keadaan paradoksal tersebut amat berbahaya kalau tidak segera kita sadari dan koreksi. Koreksi yang dapat kita lakukan ialah dengan "penyembuhan" orientasi atau "pelurusan"



Mantan Presiden B.J. Habibie usai berpidato di Jakarta Convention Centre pada peresmian The Habibie Center, tanggal 22 Mei 2000 (Sumber: Reuters).



Mantan Presiden B.J. Habibie memberi penjelasan kepada Presiden Abdurrahman Wahid seputar The Habibie Center, tanggal 22 Mei 2000. Nampak Mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan Prof. Dr. Muladi, SH. (Sumber: ANTARA).

orientasi, yaitu "Kita harus lebih mengandalkan sumberdaya manusia daripada sumberdaya alam. Kita harus lebih berorientasi jangka panjang daripada jangka pendek. Kita harus lebih mengutamakan karya nyata daripada citra. Kita harus menyeimbangkan pendekatan makro dengan mikro ekonomi. Kita harus lebih mengandalkan *value added* daripada *cost added*. Kita harus menyeimbangkan secara proporsional orientasi neraca perdagangan, neraca pembayaran dan neraca jam kerja. Kita harus memberantas berbagai perilaku "jalan pintas" (korupsi, kolusi, penyelewengan, dsb), menindak tegas tanpa pandang bulu para pelakunya, dan menekan sekecil mungkin berbagai peluang dan penyebab terjadinya perilaku jalan pintas tersebut. Kita harus lebih menyadari bahwa "jabatan adalah amanah", yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat pemberi amanah dan juga kepada Tuhan, yang tidak pernah lalai (dan tidak dapat dibohongi atau direkayasa) dalam "perhitungan" baik-buruknya amal-perbuatan manusia. Kita juga harus menyadari akan betapa besar risiko yang kita hadapi sebagai suatu bangsa apabila keadaan "paradoks bangsa" tersebut terus berlanjut tanpa adanya kesadaran dan upaya koreksi yang berarti dan serius serta berkesinambungan. Tidak mustahil kita akan menjadi bangsa yang gagal. Memang kita perlu memahami kesalahan (kolektif) bangsa—yang diindikasikan dengan "penyakit orientasi"—dan kesadaran serta kesungguhan kita untuk melakukan upaya "penyembuhan" yang serius dan berkelanjutan."

"Kepada setiap Presiden setelah saya, saya selalu merasa memberikan masukan-masukan penting soal negara dan rakyat Indonesia, bukan kepada presiden sebagai pribadi, tetapi kepada seorang 'Nahkoda' sebuah bangsa yang bernama Indonesia."

"Kita mesti berkeyakinan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh keunggulan sumberdaya manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai budaya dan agama yang tinggi, serta memahami dan menguasai mekanisme pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secanggih apapun".

Prasyarat merdeka dan bebas telah kita raih bersama untuk masa depan yang lebih sejahtera, tentram dan cerah merata bagi kita!!! Namun, akankah kita dapat meraih cita-cita masa depan kita? Habibie bertanya, "Akan ke sanakah kita menuju?"

Lembaga nirlaba bernama "The Habibie Center" yang dibangunnya bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya pada 10 November 1999 itu adalah konkretisasi dari jalan *manandhita* itu; sebuah jalan sosial, jalan kultural, sekaligus jalan penghormatan kepada sesama dan bangsa.

Habibie tentu saja terinspirasi dari Carter Center yang didirikan mantan presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Fokus lembaga ini adalah pengembangan demokrasi dan



B.J. Habibie foto bersama dengan pemeran utama film HABIBIE & AINUN Aktor Reza Rahadian dan artis Bunga Citra Lestari. Kanan: Mantan presiden BJ. Habibie (kiri) bersama Reza Rahadian (kanan) pemeran Habibie dalam film Habibie & Ainun pada konferensi pers film HABIBIE & AINUN (Sumber: ANTARA).

penghormatan HAM. Semboyannya, "Demokratisasi Tak Boleh Henti (*Democratization Must Go On*)".

Bagi Habibie, basis negara yang langgeng adalah demokrasi. Berdasarkan pengalamannya selama hidup di Eropa, negara maju sekali pun tidak akan langgeng jika tidak demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). "Karena, demokrasi dan HAM itulah yang menjaga harkat dan martabat manusia dalam negara tersebut," ujar Habibie yakin.

The Habibie Center juga melakukan pemantauan media dan kajian di bidang maritim. Bagi Habibie, salah satu *core* demokrasi adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab. Untuk itu perlu ada pemantau yang memastikan pers berkembang secara bertanggung jawab sebagaimana yang diperankan Dewan Pers. Sementara keberadaan kajian maritim disebabkan oleh citra Habibie yang lekat dengan bidang teknologi. Habibie juga kerap menyampaikan pendapatnya tentang Indonesia sebagai benua maritim.

The Habibie Center pada awal didirikan memiliki enam bagian kecil lain yang mendapat perhatian yang semuanya dikelola orang-orang terpilih yang ada di sekitar Habibie. Keenam bagian itu adalah (1) The Institute for Democracy and Human Rights; (2) The Habibie Foundation for Human Resources in Science and Technology; (3) The Media Development Centre; (4) The Maritime Continent Institute;

(5) The Centre for the Socialisation and Dissemination of Technology; dan (6) The Affiliate Centre.

"Yang diperhatikan bukan hanya 'Neraca Perdagangan' dan 'Neraca Pembayaran' namun juga 'Neraca Jam Kerja'. Khususnya dalam proses globalisasi, 'Neraca Jam Kerja' ini, harus segera mendapat perhatian khusus."

Tak hanya The Habibie Center tentu saja, melainkan juga yayasan-yayasan yang lain yang dibuat Habibie dan Ainun yang sudah eksis sebelumnya, seperti Yayasan SDM IPTEK, bermisi semata untuk pemanusiaan manusia dengan cinta sebagai visi tertinggi yang teladannya diberikan Habibie kepada bangsanya. Cinta sejati Habibie kepada sang ibu negara, Hasri Ainun, sebagaimana romantikanya terpancar dalam lembar novel dan seluloid *Habibie & Ainun*, adalah risalah yang dibawa seorang pembuka gerbang demokrasi untuk kesejahteraan Republik Indonesia, kejayaan peradaban Nusantara.

Habibie adalah sosok yang telah membentangkan hidupnya dalam dua transformasi besar: dari ilmuwan menjadi teknokrat dan kemudian menjadi negarawan. Obsesinya untuk membuat putra-putri bangsanya "menjadi SDM yang pintar setara dengan bangsa di manapun di dunia ini" adalah obsesi tanpa akhir. Untuk itu, katanya, kita tidak boleh lelah apalagi menyerah.



A black and white photograph of a person sitting in an ornate chair. The person is wearing a patterned dress and a watch. The background is a blurred interior space with columns. A large white number '4' is overlaid in the center of the image.

4

ABDURRAHMAN WAHID

ABDURRAHMAN WAHID

Bapak Pluralisme Yang Menjaga Keberagaman



Pasca Pemilihan Umum 1999, arus politik untuk menentukan calon presiden, bergerak di antara dua aliran yang sama kuat. Satu aliran di Golkar, dan aliran berikutnya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang keduanya saling berhadapan. Kemudian lahir kekuatan baru 'poros tengah' sebagai jalan keluar dari ketegangan itu. Tokoh yang diusulkan oleh poros tengah, Gus Dur, karena Gus Dur bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Sampai minggu-minggu terakhir sidang Umum MPR untuk memilih Presiden, Gus Dur belum menampakkan minat untuk menjadi Presiden. Namun karena dorongan kuat dari kelompok 'poros tengah' untuk mencalonkannya, barulah Gus Dur menerima pencalonan itu. Dalam Sidang Umum MPR, Gus Dur terpilih sebagai presiden, dilantik pada 20 Oktober 1999 dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Ini adalah era baru yang dianggap sebagai kemajuan demokrasi Indonesia.

Sebagai Presiden, Gus Dur kita tampilkan di dalam buku bertujuan menelusuri kembali perjalanan intelektual, rohaniah, maupun kebudayaan, dan politiknya yang bernuansa Islam, NU, dan Pesantren, yang merupakan bagian dari sejarah hidupnya.

Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin rapat kabinet Persatuan Nasional di Istana Negara, 2000 (Sumber: Back Tohir/Setneg)



Searah jarum jam: Presiden Abdurrahman Wahid melakukan sholat berjamaah bersama warga (Sumber: Back Tohir/Setneg). Presiden Abdurrahman Wahid dan ibu Sinta Nuriyah beserta kedua orang putri dan mantu di istana negara (Sumber: Back Tohir/Setneg). Bertemu dengan pimpinan PLO Yaser Arafat dlm rangka KTT G-77 di Havana Kuba (Sumber: Back Tohir/Setneg). Presiden Abdurrahman Wahid menerima baret jingga yang dipasangkan ke kepala oleh Komandan Korps Pasukan Khas TNI AU, Marsma TNI Nanok Suratno, pada acara silaturahmi Kepala Negara dengan para prajurit pasukan tersebut, di Mako Korpaskhasau, Lanud Sulaiman, Bandung (Sumber: ANTARA)

GUS DUR DAN KITA

Mungkin kita bisa menempatkan buku ini dalam kategori buku sejarah politik terbitan resmi pemerintah yang bermaksud mengenang dan memberikan apresiasi yang tulus dan penuh hormat pada Gus Dur sebagai Presiden. Kita mengenang jasa-jasanya melalui pemikiran, sikap dan kebijakan-kebijakan resmi kenegaraannya selama menjabat sebagai presiden. Apresiasi tersebut dimaksudkan sebagai representasi dari penghormatan warga negara secara keseluruhan, terutama dari kalangan orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang mengenal secara umum maupun secara pribadi, yang bersentuhan langsung dengan presiden Gus Dur maupun yang tidak ada hubungan historis dan emosional apapun.

Gus Dur memperoleh tempat istimewa di hati rakyat Indonesia terutama golongan minoritas. Mereka ini sangat menaruh hormat kepadanya. Pendidikan politik terutama dilihat dari sudut "civic education", mengenang jasa-jasa presiden dan memberi apresiasi kepadanya, merupakan hal penting. Apresiasi seperti itu tidak ada hubungannya dengan kultus dan fanatisme.

Kenangan terhadap Gus Dur di sepanjang buku ini menekankan, bahwa kita memang harus berpijak pada sejarah dan tindakan-tindakannya di dunia ini, sekaligus menengok pemikiran dan wawasan kosmologinya tentang kehidupan di dunia 'sana'. Gus Dur memang memiliki

pemikiran-pemikiran cerdas mengenai kedua hal itu. Tokoh yang memiliki pemikiran politik, kebudayaan, dan keagamaan yang rasional serta modern ini, jejak-jejak pemikiran dan sikap 'tradisionalnya' bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita tahu Gus Dur sangat gemar melakukan ziarah kubur, ke makam-makam para tokoh sejarah maupun spiritual yang dianggap memiliki kewibawaan dan karomah yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Inilah antara lain, yang membuatnya tampil secara unik, aneh, tetapi istimewa. Pendalaman pemahaman tentang makna hidup --yang sering tidak menjadi perhatian orang banyak-- memupuk kekayaan batin dan rohaninya. Sikap dan pandangan yang kompleks dan mendalam itu membuat pemikiran-pemikirannya tidak mudah dipahami karena melampaui batas-batas zaman. Sikapnya yang memberikan perlindungan terhadap golongan minoritas dan kecenderungannya membela kelompok-kelompok tertindas membuktikan kecenderungan tingkah lakunya yang tidak lazim dan sukar dipahami sebagaimana disebutkan di atas. Tapi kita juga tahu, ketidaklazimannya itu merupakan tanda keistimewaannya sekaligus menunjukkan tingkat keunggulannya sebagai pemimpin yang selalu punya waktu dan hati untuk orang lain. Gus Dur orang yang murah hati, akomodatif, dan humanis.

KH Abdurrahman Wahid berbicara di depan ratusan kiai muda pada acara silaturahmi di Madrasatul Quran, Tebuireng, Jombang pada 23 Juli 2004. (Sumber: ANTARA).



MENJADI SANTRI: DARI PESANTREN KE PESANTREN

Gus Dur adalah putera sulung dari pasangan K.H. Wahid Hasyim dan Solichah, lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940, dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti sang penakluk. Nama itu diambil dari pendiri Dinasti Umayyah di Spanyol.

Dalam silsilah keluarganya, Gus Dur termasuk golongan "darah biru" pesantren. Ayahnya adalah putera dari Hadratu al-Syaikh Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebuireng, Jombang, dan sekaligus peletak dasar berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926. Sementara ibunya, adalah anak dari K.H. Bisri Syansuri, pendiri pesantren Denanyar, Jombang. Baik dari kakek pihak bapak maupun Ibu, keduanya pendiri NU.

Gus Dur kecil meniti kehidupan awalnya, saat Indonesia berada di masa sulit dan genting. Pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa yang dialami pada masa kanak-kanak Gus Dur.

Setelah Indonesia merdeka, ayahnya diangkat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Pertama Republik Indonesia. Keluarga Gus Dur pindah ke Jakarta setelah K.H. Wahid Hasyim ditunjuk sebagai Menteri Agama sampai tahun 1952. Ayah Gus Dur meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Cimahi saat Gus Dur berusia 12 tahun. Sejak itu ia lebih banyak dididik dan dibesarkan dalam kasih-sayang kakek dan ibunya, Solichah.

*"Duh poro kanca priya wanita;
Aja mung ngaji syare'at blaka;
Gur pinter ndongeng nulis lan maca;
Tembe mburine bakal sangsara.
(Wahai para sahabat pria dan wanita;
Jangan hanya belajar syari'at saja;
Hanya pandai mendongeng (bicara), menulis, dan
membaca; Akhirnya hanya akan sengsara)"*

Pendidikan formal Gus Dur dimulai sejak kepindahannya ke Jakarta. Tradisi di kalangan pesantren, putra-putri kiai dimasukkan ke sekolah yang berbasis agama atau biasa dikenal dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI), tetapi lain bagi keluarga Kiai Wahid Hasyim. Putra pertamanya ini justru sekolah di swasta SR (Sekolah Rakyat) KRIS di Jalan Sam Ratulangi, Jakarta Pusat, lalu pindah ke SR Perwari di Matraman. Setelah itu, ia melanjutkan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), namun ia tidak naik kelas karena lebih sering menonton pertandingan sepakbola daripada ke sekolah.

Pada tahun 1954, Gus Dur pindah ke Yogyakarta melanjutkan di SMEP. Gus Dur tidak tinggal di pondok pesantren, melainkan tinggal di rumah teman ayahnya, Kiai Haji Junaidi, seorang ulama di Kauman. Selain bersekolah di SMEP, Gus Dur juga mengikuti pendidikan



Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta tempat dimana Abdurrahman Wahid juga menempuh pendidikan agama tahun 1954 (Sumber: ANTARA)



agama di Pesantren Al Munawwir, Krapyak. Ia belajar bahasa Arab di bawah bimbingan secara khusus dan langsung oleh K.H. Ali Maksum, Pendiri Pesantren. Ia sangat menyayangi dan menghormati Gus Dur, karena faktor Sang Kakek. Di sini Gus Dur diizinkan belajar ilmu-ilmu tasawuf yang jauh mendahului santri-santri lain. Dia diberi tempat khusus di ruang dalam dengan lemari khusus untuk menyimpan buku-buku Barat. Buku-buku itu dijaga secara ketat agar tidak dibaca oleh para santri lainnya. Karena buku yang dibaca Gus Dur pada umumnya dianggap “terlarang” bagi para santri. Gus Dur menamatkan pendidikan SMEP di Yogyakarta pada tahun 1957.

Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar memang memberi dorongan kuat untuk mengembangkan intelektualitas Gus Dur melalui kemudahan mengakses buku-buku bacaan bermutu dan novel-novel dari pengarang dunia dari pelbagai bahasa seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Sebagai remaja, Gus Dur sudah membaca novel Andre' Gide *La Potre Etroite*. Atau karya Ernest Hemingway, *The Old Man and The Sea* dan karya Turgenev *Captain's Daughter*. Karya-karya pengarang terkemuka Rusia juga dibaca Gus Dur, seperti karya Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, dan Sholokov.

Lewat perantaraan gurunya, Gus Dur juga berkenalan dengan pemikiran para filosof dan pemikir besar dunia seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Di saat yang sama, Gus Dur menggeluti karya Karl Marx, *Das Kapital*,

dan tulisan Lenin, *What is To be Done*. Gus Dur pun sangat menikmati limpahan bacaan yang terdapat di toko buku loak Yogyakarta, seperti karya William Bochner, John Steinbeck, William Faulkner, Johan Huizinga, Andre Maltraux, Ortega Y. Gasset, Mao Tse Tung, maupun Antonio Gramsci. Sebenarnya, buku-buku ini bukan bacaan buat anak-anak remaja seusia Gus Dur; tetapi Gus Dur membuktikan bahwa dia memiliki hobi membaca yang begitu luar biasa, sehingga buku apapun dibacanya. Gus Dur juga menggemari berbagai macam cerita silat dan memetik kearifan dari dalamnya. Di sana secara khusus Gus Dur memetik pelajaran mengenai kesetiaan seorang murid kepada gurunya. Kecuali itu, dia belajar mengenai berbagai macam nilai dan wujud kebajikan, yang diunggulkan di dalam hidup.

Disamping buku serial silat-silat China, Gus Dur juga menggemari filmnya, drama-musik India, dan film bertema Perang Dunia II. Gus Dur juga gemar melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan, dengan menonton berbagai jenis film di gedung-gedung bioskop yang ada di Yogyakarta pada waktu itu.

Gus Dur sangat menyukai semua jenis musik klasik dan bisa hafal dengan baik setiap corak musik tersebut dan tahu dengan baik pula kelemahan maupun kekuatan masing-masing. Seorang sahabat ayahnya, orang Jerman bernama Williem Iskandar Bueller yang telah masuk Islam, kabarnya memiliki pengaruh pada Gus Dur dalam urusan musik klasik

ini. Melalui tokoh tersebut, Gus Dur pertama kali tertarik pada karya Beethoven.

Pada periode itu, Gus Dur pindah ke Pesantren Tegalrejo, Magelang, di bawah asuhan Kiai Khudori, yang juga menyayangi dan menghormati Gus Dur. Di pesantren ini, Gus Dur membawa satu kopor besar berisi buku-buku Barat yang oleh Kyai diberi tempat di ruang khusus dengan lemari khusus yang dikunci, seperti yang di pesantren al-Munawwir, Krapyak. Di sini pun Kiai bersikap hati-hati, memperhatikan buku-buku yang secara leluasa dibaca oleh Gus Dur, tidak dibaca oleh santri lainnya. Disamping “nyantri” pada Kiai Khudori, Gus Dur juga diminta mengajar. Kiai memberinya kebebasan penuh. Waktu itu Gus Dur mengubah kurikulum pesantren, dan menambahkan mata pelajaran aljabar. Hal itu merupakan sesuatu yang aneh di dunia pesantren, dan beberapa pengajar mempertanyakan pada Kiai Khudori. Tetapi, Kiai berkata, “tidak apa-apa, wong namanya juga Gus Dur. Jadi, biarkan saja. Tambahan mata pelajaran itu tidak merugikan pesantren”. Di sana Gus Dur diasuh secara khusus oleh Kiai Khudori sendiri dan diberi pelajaran ilmu-ilmu tasawuf, seperti yang diterimanya di Pesantren Al-Munawwir, Krapyak. Ilmu-ilmu tasawuf yang belum diajarkan pada para santri yang lain, sudah diajarkan pada Gus Dur dengan model pendekatan sebagaimana kita kenal dalam pendidikan Barat sekarang. Gus Dur disuruh membaca kitab *Ihya Ulumuddin* karangan Imam Ghazali yang termashur itu, dan kemudian

mereka berdiskusi atau membahas butir-butir kearifan hidup terdalam yang terpancar di dalam karya agung tersebut. Kiai Khudori juga memberi tugas agar Gus Dur membaca dengan cermat kitab klasik lainnya, yaitu kitab *al-Hikam*, karangan sufi besar Muhammad Athoillah. Kitab ini sering didiskusikan berdua untuk mengambil inti sari “rohaniyah” dan kearifan yang hingga sekarang tetap relevan. Kenangan Gus Dur yang begitu mendalam terhadap kitab ini, sering diceritakan pada pihak lain. Baginya ajaran yang paling berkesan dari kitab ini ialah kearifan yang mengatakan, “kuburkan dirimu dalam bumi kekosongan”. Artinya bagi Gus Dur, kita diminta agar di dalam hidup ini kita selalu beramal secara ikhlas dan tak perlu mengingat-ingat kembali amalan tersebut, karena ibaratnya sudah dikubur di bumi kekosongan tadi.

Kenangan terdalam Gus Dur di pesantren itu ialah mengenai kearifan Kiai Khudori yang sangat humanis, yang menerima dengan baik dan memberi pengayoman dengan ikhlas, kepada orang-orang yang disebut komunis yang memerlukan perlindungan. Sebagian dari mereka itu mungkin komunis, mungkin sekedar dituduh komunis. Ada yang sudah pernah ditahan oleh pihak yang berwajib, ada yang dicurigai dan dicari-cari. Namun dengan penuh tanggung jawab kemanusiaan, sang Kyai memberi mereka akomodasi dengan baik.

Gus Dur butuh waktu dua tahun untuk lulus dengan baik. Setelah itu, tahun 1959 – 1963 Gus Dur pindah ke pesantren

kakeknya dari pihak ibu yaitu Kiai Bisri Syansuri di Pesantren Denanyar Jombang.

Selama di pesantren, Gus Dur banyak menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu dari para guru-gurunya. Waktunya benar-benar ia manfaatkan untuk memperoleh sebanyak mungkin ilmu di sana. Pagi-pagi setelah Subuh ia telah mengaji tiga kitab dengan seorang kyai pengasuh pesantren Tambak Beras, Jombang yaitu K.H. Abdul Fatah Hasyim. Siangnya ia mengajar para santri. Sehabis sholat Dhuhur, ia melanjutkan kembali menimba ilmu kepada kiai yang lain seperti K.H. Masduki yang kemudian dilanjutkan mengaji dengan Kiai Bisri Syansuri, kakeknya.

Sejak masa nyantri di Krapyak Gus Dur memang sudah memiliki keistimewaan-keistimewaan. Kecuali bacaannya yang luar biasa luas, penafsiran dan pemahaman Gus Dur terhadap bacaannya sangat mendalam. Ketekunan dan kegigihannya membuatnya berbeda jauh dibandingkan dengan santri-santri yang lain. Dia memiliki kemampuan "melahap" isi buku tebal baik dalam bahasa Arab maupun Inggris, baik dalam ilmu-ilmu agama maupun nonagama dalam waktu sangat pendek. Santri lain memerlukan waktu berhari-hari untuk memahaminya, Gus Dur hanya memerlukan waktu semalam. Tidak mengherankan apabila dalam usianya yang masih sangat muda, Gus Dur telah menguasai gramatika bahasa Arab dan fasih pula dalam pengucapannya. Kitab gramatika bahasa Arab, Alfiah, yang tersohor itu (1000 bait), dipelajari

Gus Dur di Pesantren Tegalrejo dengan melakukan puasa "ngrowot" (hanya boleh memakan umbi-umbian).

Pendidikan dari pesantren ke pesantren yang ditempuh Gus Dur itu dapat dibaca sebagai penegasan terhadap apa yang kelak disebut sebagai akar ke-NU-an. Hal ini bagi Gus Dur merupakan faktor penting, karena NU memberinya kekayaan khazanah keislaman klasik dan cerminan tradisi intelektual di kalangan dunia pesantren yang begitu kaya, mendalam, dan penuh kearifan yang dipetik dari ajaran-ajaran fiqh maupun ajaran-ajaran tasawuf yang dipraktekkan dalam tarekat. Dari sana Gus Dur bisa memetik pelajaran penting yang bisa disebut sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan tanpa memandang asal-usul kebangsaan, etnisitas, maupun agama yang dianut. Di sini yang penting digarisbawahi ialah sikap hormat terhadap nilai kemanusiaan. Selain itu, pendidikan pesantren juga menanamkan wawasan dan semangat kebangsaan yang mendalam, terutama dari fatwa-fatwa "politik" para kyai semenjak zaman penjajahan Belanda. Dapat dipahami bahwa keislaman dan kebangsaan itu bukan dua hal yang bertentangan satu sama lain, melainkan sebaliknya keduanya saling mengisi dan memperkokoh.

Dari segi pendidikan formal di luar pesantren, sikap dan wawasan kebangsaan itu diperkuat lagi sehingga pendidikan yang diperoleh Gus Dur memungkinkannya untuk menjelajahi problem kemanusiaan yang sangat luas dan kompleks. Patut dicatat di sini bahwa pemahaman dan sikap hormat pada

Gus Dur di depan patung Sphinx,
di Mesir, 13 Januari 1964 (Sumber:
Arsip Keluarga Gus Dur).



nilai-nilai kemanusiaan ini yang membuat Gus Dur tampak istimewa di dalam perjuangannya kelak sesudah pindah ke Jakarta dan menjadi tokoh pejuang kemanusiaan. Dengan kata lain, perjumpaan antara ajaran-ajaran dunia pesantren yang disebut “elemen tradisional” dan pendidikan di sekolah umum, yang disebut “elemen modern dan Barat”, telah berhasil membangun watak dan sikap kosmopolitan di dalam diri Gus Dur. Dengan begitu tidak mudah untuk memisahkan Islam, nasionalisme, dan kemanusiaan di dalam diri Gus Dur, karena keislaman memang penuh dengan kemanusiaan dan nasionalisme yang begitu kental. Unsur - unsur inilah yang kelak, sesudah memasuki perjuangan kebangsaan di zaman Orde Baru, merupakan “special stamp” yang melekat di dalam pribadi Gus Dur.

PEMATANGAN DIRI DI MESIR, IRAK, DAN EROPA

Gus Dur adalah seorang peziarah yang tekun dan gigih. Peziarah berbeda dengan pelancong. Peziarah melakukan perjalanan dengan niat awal mencari pemenuhan dahaga ruhaniah dan pengetahuan lewat pengalaman. Sementara pelancong melakukan perjalanan untuk memenuhi rasa kesenangan. Gus Dur misalnya, untuk bisa menghafalkan teks Arab klasik melakukan peziarahan dengan berjalan kaki ke makam-makam kiai di daerah selatan Jombang. Agar tak banyak orang mengenalinya sebagai cucu pendiri NU, Gus Dur menempuh rute yang tak biasa.

Ia menghabiskan beberapa hari lamanya menempuh peziarahan puluhan kilometer.

Pengalaman Gus Dur yang berpindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, menjadi pengalaman perjalanan awal sebelum ia melanjutkan pendidikan tinggi. Pada tahun 1964 Gus Dur mendapat beasiswa untuk kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, mengambil spesialisasi bidang Syari’ah. Di Kairo ini, Gus Dur jarang mengikuti kuliah formal di kampus, ia lebih suka menyusuri dunia buku secara intens karena materi kuliah tidak berbeda dengan kitab-kitab yang dipelajari di pesantren.

Gus Dur selalu pergi bersama sahabatnya Mustofa Bisri (yang kini dikenal sebagai Gus Mus atau Kiai Mustofa Bisri dari Rembang). Mereka berangkat ke kampus tetapi tidak sampai di kampus, mereka pergi ketempat lain atau nonton bioskop, tidak mengikuti kuliah. Gus Dur pernah menyatakan menempuh pendidikan tidak harus lulus dan tidak harus memiliki ijazah. Baginya, sekolah itu merupakan usaha untuk menjadi orang pandai, syukur pula bila sesudah menjadi orang pandai juga dapat menjadi orang bijak. Gus Dur diakui dunia dan memperoleh setidaknya tujuh penghargaan keilmuan berupa gelar *doctor honoris causa* dari berbagai universitas kelas dunia. Satu di antara ketujuh universitas itu ialah Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dalam pidato sambutannya di depan dewan guru besar dan seluruh hadirin



Gus Dur dalam berbagai kegiatan selama menimba ilmu di Universitas Al Azhar, Kairo, tahun 1965 (Sumber: Arsip Keluarga Gus Dur).



Gus Dur bersama dengan kerabat di Samara, Turki, 11 Desember 1969 (Sumber: Arsip Keluarga Gus Dur).

yang di ruangan upacara pengukuhan itu, Gus Dur memulai sambutan dengan humor yang mengejutkan, khas humor Gus Dur, “terima kasih saya yang dulu di-*drop out* dari sini sekarang diberi penghargaan tertinggi bagi dunia akademis”.

Selama kuliah kesibukan Gus Dur makin bertambah sejak ia bekerja paruh waktu di Kedutaan Republik Indonesia. Tantangan terberat tatkala bekerja di Kedutaan adalah ketika terjadi malapetaka politik di tahun 1965. Saat itu Kedutaan RI di pelbagai negara diperintahkan untuk memeriksa mahasiswa yang mempelajari pemikiran-pemikiran Marx dan Lenin. Gus Dur melindungi rekan-rekannya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah kalangan santri yang jauh dari kemungkinan tertarik dengan pemikiran Marx-Lenin.

Karena berbagai kesibukan itu, pelajaran Gus Dur dalam kampus tertinggal jauh. Ia pun dinyatakan gagal dalam studinya di Universitas Al-Azhar. Kegagalan itu disampaikan kepada Shinta Nuriyah, putri H. Abd. Syukur Thoyyib yang masih satu kota dengannya di Jombang. Keduanya telah melakukan surat-menyurat selama beberapa tahun ketika Gus Dur berada di luar negeri. Gadis yang dicintainya itu menguatkan hati Gus Dur. Korespondensi yang intens mengantarkan keduanya ke kursi pelaminan. Lantaran Gus Dur masih berada di luar negeri, pernikahan itu diwakilkan kepada kakeknya dari pihak ibu, yaitu KH. Bisri Syansuri. Resepsi pernikahan baru digelar setelah Gus Dur tiba

kembali di Indonesia pada tahun 1971. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai empat orang putri yaitu Alissa Ootrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh, Anita Hayatunnufus, Inayah Wulandari.

Gus Dur kembali mendapat beasiswa belajar ke Irak, Universitas Baghdad. Gus Dur mengambil spesialisasi Sastra dan Ilmu Humaniora. Di sinilah Gus Dur berkenalan dengan pemikiran tokoh-tokoh pemikir antara lain Emile Durkheim. Di sinilah ia memperdalam ilmu-ilmu kebudayaan secara intens. Ketertarikan Gus Dur terhadap ilmu budaya diperkuat dengan banyaknya literatur yang ada di Universitas Baghdad tersebut. Ia menemukan kembali gairah belajar, lebih aktif di kelas, dan menjadikan perpustakaan sebagai laboratorium intelektualitasnya. Bagi Gus Dur, Baghdad adalah kota yang terbuka untuk pencarian dan elaborasi gagasan lantaran telah mengadopsi sistem pendidikan Barat. Di masa lampau, kota Baghdad menjadi tempat tumbuhnya tradisi sufisme. Dari sini pula nama-nama sufi besar lahir dan berkembang di tingkat dunia. Rabi’ah al-Adawiah, sufi besar wanita, berasal dari Basrah di negeri ini juga.

Empat tahun belajar di Universitas Baghdad, Gus Dur lulus dengan predikat baik. Ia pun pindah ke Belanda untuk mencoba kesempatan melanjutkan studinya di jenjang pascasarjana. Namun ia kecewa, karena Universitas Leiden yang ia tuju tidak mengakui studi perbandingan agama yang diperolehnya dari Baghdad. Ia bisa saja diterima di universitas



Kongres Nahdatul Ulama di Pondok Krapyak Yogyakarta, November 1989, KH. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah NU periode 1989 – 1994 (Sumber: ANTARA).



KH Abdurrahman Wahid mengikuti peringatan haul K.H. Asy'ari di Jombang, Jawa Timur pada Januari 2000 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

itu asalkan mau mengulang tingkat sarjana. Gus Dur menolak tawaran itu. Ia memilih melakukan pengembaraan di negeri itu dengan menyerap ilmu-ilmu sosial Barat yang kritis dan pemikiran Barat pada umumnya di pelbagai tempat di luar kelas formal.

KETELADANAN GUS DUR DALAM MENJALIN SILATURAHMI DAN ZIARAH KUBUR KE PARA WALI DAN LELUHUR

Gus Dur menjaga dan mengamalkan silaturahmi dengan konsisten, dengan suka cita, yang mungkin hanya satu dua orang kiai yang bisa menyamainya. Gus Dur menegaskan pada banyak pihak, bahwa silaturahmi menempati posisi sentral, salah satu ajaran penting dan mendasar dalam agama. Ada rujukan-rujukan teks dan ungkapan penuh hikmah, yang menjelaskan bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperlebar pintu rezeki. Pentingnya pesan penuh hikmah semacam itulah yang membuat Gus Dur mengamalkannya dengan kegembiraan, dan diikuti dengan keikhlasan. Mengunjungi teman, sahabat, keluarga, kiai-kiai, tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh Islam dan non-Islam, diadikannya “tradisi”. Mereka yang sakit didatanginya pula, dan itu demi menjaga agar silaturahmi tidak terputus.

Bagi Gus Dur, silaturahmi itu berlaku bukan hanya di masyarakat, dan berhubungan dengan orang-orang yang masih hidup, melainkan juga dengan mereka yang sudah

meninggal. Banyak orang yang bersaksi bahwa dalam berbagai perjalanan, di suatu daerah, dan pada malam hari pula, tiba-tiba Gus Dur minta berhenti sebentar, karena di tempat itu ada makam orang terhormat, yang besar jasanya bagi kehidupan. Ini menunjukkan bahwa Gus Dur sangat waskito terhadap makam-makam orang yang mempunyai jasa besar bagi umat manusia. Sebagai contoh, ketika suatu hari Gus Dur berkunjung ke daerah Jawa Barat pada malam hari. Dalam perjalanan itu Gus Dur tiba-tiba minta berhenti. Menurut Gus Dur ditempat itu ada makam seorang tokoh yang ingin di ziarahnya. Orang-orang setempat mencari dengan teliti tetapi makam yang dimaksud tidak ditemukan. Gus Dur menjelaskan, kita harus berjalan disisi sebuah sungai, lalu belok ke kiri sedikit sebelum akhirnya menaiki bukit kecil. Tapi tempat semacam itu tidak bisa ditemukan. Gus Dur memerintahkan agar dicari lebih teliti lagi. Tiba-tiba salah seorang dari rombongan ingat ada sebuah makam tua yang terlantar dan tidak ada yang mengunjunginya. Tempatnya masih agak jauh, diperlukan beberapa saat lagi untuk sampai ke sana.

“Itu makam terlantar Gus”

“Ya ndak apa-apa terlantar. Manusia yang masih hidup saja banyak yang terlantar kok, apa lagi makam, dan makam yang sudah sangat tua. Ya ndak apa-apa, karena itu saya perlu menziarahinya biar yang bersemayam di sana tidak terlalu kecil hati menghadapi keterlantarannya.



KH Abdurrahman Wahid menghadiri peletakan Batu Pertama Kantor DPC PKB di JATIM pada November 2000 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Tokoh besar, seikhlas beliau tak mungkin mengharap yang bukan-bukan”

Konon makam tersebut adalah makam orang non-muslim, seorang tokoh tua yang ada di tempat tersebut jauh sebelum Islam. Jadi tidak ada orang Islam yang memperhatikannya.

Gus Dur menjawab : “Ya memang, orang non-Muslim. Saya sudah tahu orang Islam tak pernah menziarahinya. Biar saya yang datang berziarah. Beliau orang hebat di zamannya, yang bagi warga masyarakat di zaman itu, arti perjuangan kemanusiaannya luar biasa.”

“Kalau tidak salah beliau orang Buddha Gus”

“Kenapa kalau Buddha? Saya sering bersilaturahmi pada orang Buddha, Banyak tokoh-tokoh Buddha, yang menjadi sahabat saya, dan saya datangi rumahnya. Banyak pula makam orang Buddha yang saya datangi. Juga orang Hindu. Silaturahmi itu bukan hanya pada mereka yang masih hidup. Dan bukan hanya pada mereka yang muslim”. Gus Dur menjelaskan bahwa orang yang dimakamkan ditempat itu yang pada zaman kita disebut seorang pluralis dan mempunyai komitmen kemanusiaan yang sangat besar.

“Dengan begitu, apa beliau Islam, apa bukan, ya apa urusannya? Saya menghormati, mengagumi jasanya. Tentang iman dan keyakinannya, dan bagaimana beliau berhubungan dengan Tuhan, itu urusan pribadi beliau. Apakah imannya benar apa salah, biar Tuhan saja yang menilai. Itu urusan hati, yang tersimpan begitu dalam dan rahasia. Kita hanya bisa menilai apa yang tampak di mata”.

Gus Dur sendiri yang terkenal sebagai pengamal silaturahmi baik kepada mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ketika wafat diantar oleh orang yang tidak terbilang jumlahnya. Orang-orang yang mengagumi, yang mencintai, teman, sahabat, saudara, keluarga, dan siapa saja yang mengenal kebesarannya.

Makam Gus Dur bagaikan makam para wali pada umumnya, banyak orang yang ziarah membaca Tahlil dan Surat Yassin yang kadang diringi isak tangis tertahan-tahan.

MENGGALANG TERBENTUKNYA MASYARAKAT SIPIL

Tanggal 4 Mei 1971 Gus Dur kembali ke Indonesia, saat itu terjadi peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru.



KH Abdurrahman Wahid melakukan dialog dengan para jamaah, se usai menunaikan shalat Jumat di Masjid Al Munawaroh Ciganjur (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Hal itu membuat para ilmuwan muda Indonesia yang baru pulang dari luar negeri terdorong untuk melakukan diskusi tentang kebangsaan, Gus Dur kemudian bergabung dengan Lembaga Pengkajian Pengetahuan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta. Di lembaga yang sangat bermutu ini Gus Dur mengembangkan pemikirannya tentang politik dan keislaman. Gus Dur juga menuangkan pemikiran-pemikirannya melalui jurnal ilmiah Prisma yang sangat prestisius. Gus Dur pula yang memperkenalkan pemikiran khas Kiai dari dunia pesantren sehingga organisasi NU menjadi lebih terkenal dan memiliki daya tarik tingkat dunia bagi para pengkaji keislaman dan keindonesiaan. Selain itu Gus Dur juga mengejutkan media massa dengan esai-esai yang cerdas dan kocak, penuh humor dan dengan konten keilmuan dan keislaman yang belum pernah dijamah pihak lain. Kritik-kritiknya yang tajam tapi humoris dan berani membuatnya dikenal sebagai cendekiawan yang disegani di Indonesia. Tidak mengherankan bila kemudian Gus Dur dipilih sebagai ketua Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1982 – 1985.

"Demokrasi adalah persyaratan bagi kebesaran bangsa kita di masa depan."

Di masa itu dan berlanjut di tahun-tahun kemudian, sebagai cendekiawan Gus Dur sering mengkritik kebijakan pemerintahan Orde Baru. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pun direspons Gus Dur dengan sikap kritis.

Gus Dur mencoba menggalang kekuatan dengan ikatan sosial yang melintasi sekat-sekat keagamaan dengan mendirikan Forum Demokrasi (Fordem). Fordem berdiri dengan tujuan untuk menguatkan posisi masyarakat sipil yang diperlemah oleh kebijakan politik Orde Baru. Selanjutnya Fordem dan NU merupakan dua kendaraan bagi Gus Dur untuk memperjuangkan dan membumikan pemikiran pluralisme dan penguatan masyarakat sipil di Indonesia. Beliau memprakarsai beragam dialog yang membuka ruang terciptanya toleransi beragama dan otonomi sipil.

Gus Dur juga selalu berada di barisan paling depan ketika terjadi ketidakadilan yang menimpa kaum minoritas. NU di

"Tanpa Pancasila, negara RI tidak akan pernah ada. Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan pertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa-raga saya, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak jarang dikebiri atau dimanipulasi ..."

bawah pimpinan Gus Dur menjadi organisasi keagamaan dengan membawa terobosan-terobosan penting dalam pemikiran modern.

Untuk memperkuat peran sosial dan pendidikan NU, Gus Dur mengambil kebijakan yang fundamental bagi masa depan NU, yakni menarik dukungan formal NU ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sikap politik ini dirumuskan dalam kebijakan "kembali pada Khitah Perjuangan 1926", untuk memosisikan kembali NU sebagaimana tujuan berdirinya yaitu sebagai organisasi sosial keagamaan. Menurut Gus Dur, peran agama dan negara mesti diberi garis yang tegas. Gagasan ini dipegang teguh oleh Gus Dur sebagai agenda utamanya memperkuat posisi masyarakat sipil agar memiliki daya tahan lebih besar terhadap penetrasi negara.

Oleh karena itu, garis perjuangan NU memperlihatkan komitmennya dengan jelas pada tata kehidupan nasional yang tidak sektarian dan sekaligus mengangkat universalitas kemanusiaan. Prinsip yang dijunjung tinggi oleh kaum Nahdhiyyin : ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Hal ini membuktikan, bahwa NU memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Maka dari itu, Gus Dur selalu menghindari formalitas dalam berpolitik, karena yang paling penting ialah terwujudnya tatanan yang adil dan beradab di dalam masyarakat Indonesia. Perjuangan ke arah ini jauh

lebih penting dan lebih mendasar dibandingkan dengan usaha memformalkan Islam di dalam tatanan politik menjadi negara Islam secara resmi tetapi basis pendukung sosiokulturalnya belum ada.

Dengan argumen kultural seperti itu, mudah sekali dimengerti bahwa NU menerima "asas tunggal", karena hubungan antara Pancasila dan Islam dapat dirumuskan dalam idiom politik keagamaan yang penuh hikmah sebagaimana tampak di dalam tatanan nilai luhur yang dipraktekkan beratus-ratus tahun yang lampau oleh bangsa kita. Kaum Nahdhiyyin tidak akan lupa bahwa, Bung Karno merumuskan Pancasila yang digali dari anasir-anasir tradisi yang hidup di masyarakat kita. Perpaduan antara Islam, Pancasila, dan tradisi bangsa, membuat kita menjadi lebih arif dalam merumuskan tatanan politik yang adil dan manusiawi.

Gus Dur berpendapat, paradigma baru yang harus dikembangkan oleh umat Islam adalah pembentukan *civil society*. Penguatan *civil society* sejalan dengan kebijakan NU karena NU juga memiliki komitmen untuk memperkuat kemandirian masyarakat.

CIGANJUR DAN PINTU PEMBUKA REFORMASI

Gerakan Reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah bagi lahirnya politik di Indonesia yang demokratis. Mundurnya Presiden Soeharto dan para pendukungnya membuka kesempatan lahirnya tata pemerintahan yang diharapkan



Tokoh reformasi: Abdurachman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amin Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono berkumpul di kediaman Gus Dur, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 1998 (Sumber: Istimewa).

mampu menjawab aspirasi politik seluruh rakyat Indonesia. Segenap rakyat Indonesia mengharapkan terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif, dan memiliki akuntabilitas politik sebagaimana layaknya pemerintahan demokratis. Menghadapi situasi yang seperti itu Gus Dur bersama para tokoh politik yang lain, media massa dan kekuatan *civil society* mengadakan pertemuan koordinasi untuk merumuskan jalan keluar dari kemungkinan yang tidak terduga. Pertemuan tersebut seringkali dilakukan di kediaman Gus Dur di Ciganjur, hadir pada saat itu empat tokoh penting yaitu : Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Amien Rais.

Pertemuan para tokoh di Ciganjur tersebut yang kemudian dikenal dengan pertemuan Ciganjur menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Konsisten pada kesatuan dan persatuan bangsa;
2. Memberdayakan lembaga perwakilan;
3. Desentralisasi pemerintahan sesuai dengan kemampuan daerah;

4. Pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif generasi baru;
5. Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana independen. Pemilu ini untuk mengakhiri pemerintah transisi yang dipimpin B.J. Habibie dan selambat-lambatnya tiga bulan sesudahnya pemerintah baru sudah terbentuk;
6. Penghapusan dwifungsi ABRI paling lama enam tahun dari sekarang;
7. Pengusutan pelaku korupsi dimulai dari Soeharto;
8. Serta mendesak Pengamanan Swakarsa SI MPR agar membubarkan diri.

Setidaknya, ada tiga poin penting yang bisa disimpulkan dalam pertemuan tersebut :

1. Memberikan apresiasi atas kemajuan pendidikan politik;
2. Menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik dan positif;
3. Membuka babak baru dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis.



Atas: Pengambilan sumpah anggota MPR/DPR hasil Pemilu 1999 di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, tanggal 1 Oktober 1999 (Sumber: ANTARA).

Bawah: Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri berfoto bersama dengan para Kabinet Persatuan Nasional di Istana Negara, Jakarta, tanggal 26 Agustus 2000 (Sumber: ANTARA).



GUS DUR MENUJU KURSI KEPRESIDENAN

Tahun 1999 Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadikan Matori Abdul Jalil sebagai ketua umum. Dalam Pemilu yang digelar pada tanggal 7 Juni 1999, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang. PDIP yakin Megawati Soekarnoputri dapat merebut kedudukan sebagai presiden. Namun suasana politik menjadi tegang ketika para politisi Islam menolak tokoh perempuan sebagai pemimpin. Akibat penolakan tersebut ketegangan makin memuncak. Masyarakat merasa khawatir kemungkinan terjadinya pertumpahan darah antara sayap-sayap yang bersitegang. Namun dengan tidak terduga tiba-tiba Amien Rais membangun kekuatan baru yang dikenal sebagai "Poros Tengah", kelompok ini kemudian

mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden dengan argumen bahwa Gus Dur merupakan satu-satunya tokoh Islam yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dengan demikian timbul harapan bahwa naiknya Gus Dur sebagai presiden akan dapat mencegah terjadinya pertumpahan darah diantara sesama anak bangsa.

Akhirnya Gus Dur terpilih secara aklamasi menjadi Presiden RI yang ke-4, sedang Megawati Soekarnoputri menjadi Wakil Presiden RI yang ke-8.

Naiknya Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden dan Wakil Presiden diterima dengan lega karena mereka merupakan pejuang demokrasi dan pluralisme yang gigih dalam menghadapi kekuatan otoriter-otoriter baru. Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Perlu dicatat

closing statement Gus Dur dalam pidato pelantikannya, “saya kira cukup sekian dulu yang saya sampaikan di hadapan sidang MPR yang terhormat ini supaya kelak dengan sendirinya tidak terlalu banyak yang harus saya pertanggungjawabkan”.

RESOLUSI KONFLIK: ACEH DAN PAPUA

Dalam masa pemerintahannya konflik politik yang terjadi di Aceh maupun di Papua masih belum selesai. Konflik di kedua tempat tersebut diselesaikan dengan cara militer sehingga menutup penyelesaian melalui jalan dialog terbuka. Pemerintah menggunakan kekuasaannya secara dominan kepada masyarakat di kedua daerah tersebut. Aspirasi masyarakat tidak didengar, sehingga konflik tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Secara sepintas konflik kelihatannya sudah selesai, tetapi kelompok yang oleh pemerintah disebut elemen radikal melakukan perlawanan secara diam-diam. Mereka ini diberi ‘stigma’ sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

Aceh sebagai daerah operasi militer untuk waktu lama merasa sangat tertekan. Mereka merasa takut, cemas, dan ketidakpastian masa depan. Untuk menjawab persoalan-persoalan keamanan di kedua daerah tersebut Gus Dur mencoba menggunakan pendekatan kebudayaan yang memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk melakukan dialog secara terbuka. Cara yang ditempuh Gus Dur seperti ini, membawa kesejukan dan



Seorang bocah mengepalkan tangan di depan poster Gus Dur dan Matori Abdul Djamil saat kampanye Pemilu Mei 1999, di Jakarta Timur (Sumber: ANTARA).



Atas: Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Kehakiman dan HAM Baharudin Lopa terlibat pembicaraan serius se usai menerima komponen masyarakat Aceh, di Bina Graha, Jakarta, pada 10 April 2001 (Sumber: ANTARA).



Tengah: Abdurrahman Wahid menerima plakat penghargaan dari Dewan Adat Papua yang diberikan oleh Tom Baenal, di GOR Cendrawasih, Jayapura tanggal 14 November 2006 (Sumber: ANTARA).



Bawah: Abdurrahman Wahid menaburkan bunga saat berziarah di makam Theys H. Eluay tokoh masyarakat adat Papua di Sentani, Papua pada 13 November 2006 (Sumber: ANTARA).

kelegaan bagi masyarakat Aceh dan Papua. Bahkan mempunyai dampak yang luas dalam pandangan politik dunia. Gus Dur juga mengeluarkan Keppres No 88 Tahun 1999 mengenai Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Langkah ini pun memberi harapan baru bagi masyarakat Aceh, sehingga Gus Dur dikenal sebagai presiden yang kaya akan pendekatan kebudayaan dan semangat humanis. Langkah ini juga dipergunakan oleh Gus Dur untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Irian Jaya yang menginginkan tanah tumpah darah mereka diberi nama Papua.

Dalam suatu wawancara dengan Radio Nederland (Hilversum), Gus Dur menyatakan: "Sebagai seorang Demokrat saya tidak bisa menghalangi keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri. Akan tetapi sebagai seorang Republik, saya diwajibkan untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia".

Atas: Presiden Abdurrahman Wahid menerima peserta Rakornas TNI tahun 2000 di Bina Graha (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Tengah: Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan ke Komplek Divisi Kostrad di Cilodong Jawa Barat (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Bawah: Selama kunjungan ke Kostrad Cilodong Presiden melakukan pemeriksaan dengan mengendarai mobil pasukan (Sumber: Back Tohir/Setneg).



REFORMASI ABRI

Presiden Gus Dur memiliki visi untuk melakukan reformasi internal dalam tubuh ABRI agar ABRI bisa berdiri secara mandiri dan menjadi kekuatan nasional, TNI yang profesional. Polisi secara mandiri dapat mengatur permasalahannya sendiri. TNI dan Polisi masing-masing tidak saling mempengaruhi, tidak saling mensubordinasi tetapi di dalam situasi-situasi tertentu kedua kekuatan ini bisa bekerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bangsa dan negara.

Itulah sebabnya Gus Dur bisa sangat kritis terhadap TNI dan memberikan sanksi terhadap mereka yang memainkan peran politik penguasa sehingga menodai kemandirian Lembaga TNI. Kebijakan yang dilakukan Gus Dur ini dirumuskan di dalam Ketetapan MPR Nomor VI dan Nomor VII Tahun 2000 yang secara konstitusional memisahkan antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Fungsi pertahanan terhadap berbagai ancaman yang menjurus kearah perpecahan dan keutuhan negara, sepenuhnya diserahkan kepada TNI. Sementara masalah keamanan diserahkan kepada Polisi. Pemisahan lembaga Kepolisian dari TNI ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1999, langkah ini juga untuk menghindarkan terjadinya peran Dwi Fungsi ABRI.



Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menghadiri HUT TNI 5 Oktober 2000 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

POLITIK AKOMODASI: PENGUATAN PLURALISME DAN PENGHORMATAN HAK-HAK WARGA

Sebelum menjabat sebagai presiden, Gus Dur dikenal di tingkat dunia sebagai tokoh Pluralisme. Dalam pandangannya setiap warga negara tanpa memperhatikan etnisitas, agama, dan aliran politiknya memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Pandangan ini merupakan esensi dari ajaran Islam yang tidak membedakan siapapun, dari golongan manapun maupun agama apapun, karena Islam merupakan rahmat bagi semesta alam. Gus Dur mengamalkan prinsip ajaran ini melalui berbagai tindakan pribadi maupun tindakan-tindakan institusional baik di dalam NU maupun dalam LSM semenjak masih aktif sebagai tokoh pergerakan.

Kita hanya akan mampu menjadi bangsa kokoh, kalau umat beragama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama lain, bukan sekadar saling menghormati. Yang diperlukan adalah rasa saling memiliki (sense of belonging), bukannya hanya saling bertenggangrasa satu terhadap lainnya.

Sikapnya yang penuh pengayoman kepada kaum minoritas, baik minoritas etnis maupun minoritas agama dan minoritas dalam segmen-segmen kultural lainnya, merupakan perwujudan dari ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Di sini Gus Dur menunjukkan sebagai tokoh Islam yang konsisten dengan keyakinannya. Dalam perjuangannya untuk kemanusiaan, pluralisme dan pembelaan terhadap hak-hak kelompok minoritas, Gus Dur seringkali menghadapi berbagai rintangan dan hambatan, dicekal, difitnah, dicaci, bahkan sampai pada ancaman fisik. Namun ketulusan dan kesabaran beliau mengalahkan berbagai hambatan dan tekanan tersebut.

Ketika menjabat sebagai Presiden, gagasan tentang pluralism dan pembelaan terhadap hak-hak kelompok minoritas, direalisasikan dengan cara mencabut Inpres No.14 tahun 1967 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya Gus Dur mengeluarkan PP No.6 tahun 2000 tentang penetapan Imlek sebagai Hari Libur Nasional. PP No.6 Tahun 2000 ini diberlakukan sejak 31 Maret 2000. Disamping itu, Konghucu juga diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Sebagai ungkapan rasa terimakasih yang tak terhingga, masyarakat Tionghoa mengangkat Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia.

Atas: Presiden Abdurrahman Wahid memberikan sambutan pada acara perayaan Cap Go Me Imlek 2551, di Surabaya, 19 Pebruari 2000 (Sumber: ANTARA).

Tengah: Presiden Abdurrahman Wahid menghadiri peringatan Hari Imlek 2552 di Senayan, Jakarta, Minggu, 28 Januari 2001 (Sumber: ANTARA).

Bawah: Presiden Aburrahman Wahid melakukan open house Idul Fitri di Istana Merdeka untuk menerima masyarakat dari berbagai lintas agama pada 8 Januari 2000 (Sumber: ANTARA).





Atas: Presiden Abdurrahman Wahid membuka peringatan Hari Lingkungan Hidup Se Dunia di Istana Negara (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Tengah: Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan kerja ke dermaga perdagangan bebas di Sabang Aceh (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Bawah: Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin rapat terbatas di Wisma Negara (Sumber: Back Tohir/Setneg).

MENGEMBALIKAN KEJAYAAN MARITIM DAN PERUBAHAN ORIENTASI KELAUTAN

Ketika Marsekal TNI AL Widodo AS diangkat oleh Gus Dur sebagai panglima TNI pertama yang bukan berasal dari Angkatan Darat, Gus Dur sebenarnya sedang menyusun visi Indonesia baru yang berorientasi pada dunia kelautan. Pengangkatan Widodo AS itu sejalan dengan ide Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Kelautan; suatu departemen yang menjawab tantangan bahwa kita belum lupa pada laut, dan dunia maritim.

Pada 26 Oktober 1999 atau enam hari setelah diambil sumpahnya, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 yang berisi pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ini sangat tepat mengingat 85 % Wilayah Indonesia merupakan kawasan laut. Kekayaan laut yang berlimpah harus dieksplorasi dengan serius demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Berdasarkan usulan DPR dan pelbagai pihak, Gus Dur merevisi penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan pada 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut



Munculnya berbagai macam surat kabar dan majalah menandakan kebebasan pers pada jaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Sumber: ANTARA).

dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999. Setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, nomenklatur DELP diubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000.

Disamping pembentukan departemen kelautan, Gus Dur juga mengesahkan beberapa peraturan yang mendukung pengelolaan masalah kelautan seperti pengesahan dan pemakaian Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 di Indonesia (Keppres No 178 Tahun 1999), Pembentukan Dewan Maritim Indonesia (Keppres No 161 Tahun 1999), mengadakan perjanjian kerjasama RIdengan Jerman bidang pelayaran (Keppres No 55 Tahun 1999), dan pemakaian Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak (Keppres No 52 Tahun 1999). Dengan kebijakan baru dan visioner itu, Gus Dur mengembalikan lagi perhatian yang terabaikan pada laut.

PENGUATAN EKONOMI RAKYAT

Sebetulnya Gus Dur tidak terlalu asing dengan perekonomian yang berbasis pedesaan. Saat memimpin NU, Gus Dur pernah mengimpikan adanya suatu jaringan bank pedesaan, seperti yang terdapat di Bangladesh dengan Grameen Bank. Kemudian pada Dasawarsa 1990-an, Gus Dur menawarkan terobosan dalam menumbuhkan perekonomian

rakyat, terutama perekonomian kaum Nahdliyin, yang bekerja sama dengan Bank Summa. Kerjasama NU-- Summa itu menghasilkan lembaga keuangan baru yang diberi nama "Nusumma", sebagai institusi pemberi fasilitas kredit bagi usaha rakyat di pedesaan.

Terobosan Gus Dur di bidang ekonomi rakyat ini terbentur pada masalah berat di bidang keuangan terutama karena Bank Summa dinyatakan bangkrut. Meskipun begitu, Gus Dur terus berusaha melanjutkan gagasan ini dengan menggandeng Jawa Pos, dan proyek kerjasama ini tetap menggunakan nama Nusumma walaupun kepanjangannya berbeda. Kalau yang pertama kepanjangan dari NU dan Bank Summa sedang yang kedua menjadi NU Sumber Manfaat.

Gus Dur kembali melontarkan gagasan "ekonomi rakyat" ini saat ia menjadi presiden. Tentu suasananya menjadi lain karena saat menjadi presiden, Gus Dur memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengimplementasikannya menjadi kebijakan negara. Rizal Ramli yang ditugasi Gus Dur menangani ekonomi menerjemahkan pemikiran Gus Dur dalam kerangka ekonomi rakyat dan nasionalisme ekonomi. Program alternatif yang dikembangkan adalah pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Program ini bertujuan meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Selain itu, untuk menetralisasi dampak krisis ekonomi yang masih tetap terasa di zaman pemerintahannya, Gus Dur membentuk Badan Keamanan Ekonomi Nasional.

Atas ke bawah: Presiden Abdurrahman Wahid dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X berdialog dengan warga di masjid Taqwa Wonokromo, Bantul usai shalat Jumat, tanggal 16 Februari 2001 (Sumber: ANTARA). Presiden Abdurrahman Wahid berdialog dengan jamaah Masjid Gedhe, Kauman, Yogyakarta, se usai shalat Jumat tanggal 18 Februari 2000 (Sumber: ANTARA). Presiden Abdurrahman Wahid melakukan dialog sehabis shalat Jumat, di Mesjid Jami' Al-Riyadh, Kwitang, Jakarta Pusat, tanggal 25 Mei 2001 (Sumber: ANTARA).



Mantan Presiden RI, KH Abdurahman Wahid saat menemui pendukungnya di gedung DPC PKB Kota Malang, Jawa Timur, tanggal 4 Februari 2007 (Sumber: ANTARA).



Jika dipadatkan dalam poin-poin penting, paling tidak inilah kebijakan ekonomi terpenting yang dijalankan saat Gus Dur menjadi Presiden RI: (1) diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001; (2) penajaman visi ekonomi; (3) merevitalisasi hubungan dengan insitusi keuangan dunia seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan beberapa Negara donor lainnya; (4) penajaman restrukturisasi perbankan; (5) Penajaman restrukturisasi BUMN; (6) penajaman restrukturisasi sektor riil; dan (7) relokasi subsidi dengan memprioritaskan pada sektor rawan krisis, termasuk kesehatan.

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi terhadap lembaga pemerintahan terjadi secara mengejutkan di awal pemerintahan Gus Dur, dua departemen yang kuat sejak bertahun-tahun dilikuidasi Gus Dur, yaitu Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos). Demikian pula dengan Departemen Pekerjaan Umum yang kemudian diubah menjadi Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Gus Dur memiliki argumen kuat mengenai pembubaran dua departemen tersebut. Menurutnya, tugas-tugas yang dibebankan kepada Deppen dan Depsos mestinya dikerjakan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan otonomi daerah. Selain itu, persoalan yang menyangkut kewenangan kedua departemen tersebut bisa diatur

langsung oleh masyarakat, dan bukan lagi dikendalikan pemerintah maupun departemen tertentu.

Bagi Gus Dur, rakyat sudah terlalu lama menderita akibat diatur-atur oleh pemerintah, terutama Deppen. Sebagaimana kita ketahui, fungsi utama dari Deppen adalah sebagai “juru-bicara” dan “humas” pemerintah. Namun di luar fungsi resmi itu, Deppen kerap menjadi departemen “politik” di bawah koordinasi Menkopolkam. Dengan fungsi tersebut, keberadaan Deppen bertentangan dengan arus besar demokratisasi. Dengan kekuasaan besar yang dimilikinya, Deppen bisa menentukan bebas maupun terkekangnya hak berbicara yang dimiliki lembaga-lembaga pers. Padahal kebebasan pers adalah salah satu pilar utama bertumpunya harapan masyarakat pascareformasi politik 1998.

MENYETARAKAN KOMUNIKASI: DARI PIDATO KE DIALOG

Sejak tahun 70-an Gus Dur selalu berpidato tanpa teks baik dalam forum nasional maupun internasional. Tradisi yang tertanam sejak lama itu memudahkan baginya untuk tetap berpidato tanpa teks ketika ia menjadi presiden. Dengan begitu gangguan penglihatan tidak lagi menjadi hambatan dalam urusan berpidato di tengah masyarakat.

Gus Dur mendesakralisasi istana presiden yang selama ini kelihatan resmi dan angker menjadi demikian merakyat. Masyarakat bisa berkunjung ke istana tanpa harus melalui



H.E. Dr. Abdurrahman Wahid menerima gelar doktor kehormatan pada 90th *Graduation Ceremony Thailand* (Sumber: Back Tohir/Setneg).

aturan protocol yang berbelit-belit karena bagi Gus Dur, istana presiden adalah dari rakyat dan untuk rakyat.

KESETARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Sejarah pendidikan Gus Dur adalah sejarah bertemunya pendidikan formal (sekolah negeri) dan nonformal (madrasah dan pesantren). Gus Dur memahami, peran pendidikan nonformal semacam pesantren atau sekolah-sekolah berbasis komunitas, punya andil dalam penguatan karakter dan pencerdasan kehidupan berbangsa.

Gus Dur, misalnya, saat menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, melakukan reformasi sistem pendidikan pesantren dan meningkatkan kualitasnya setara dengan sekolah negeri. Pada 1987, Gus Dur pernah mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur, sebagai forum tafsir atas khasanah-khasanah teks keislaman yang kerap diinterpretasikan secara tekstual. Sebuah forum yang menjadi embrio bagi tumbuhnya ide-ide liberal dan progresif di kalangan intelektual muda Muslim di masa-masa berikutnya.

Reformasi pendidikan yang digelar Gus Dur terletak pada penekanan otonomi dan melakukan pemetaan tugas yang komprehensif dan kewenangan pemerintah pusat dan

Presiden Abdurrahman Wahid menjawab pertanyaan jamaah Masjid Baiturrahim, Istana Merdeka se usai sholat Jumat tanggal 17 Desember 1999 (Sumber: ANTARA).





Presiden Abdurrahman Wahid disambut Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi pada waktu kunjungan resmi ke Tokyo, November 1999 (Sumber: AFP).



Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan kehormatan SEKJEN PBB Kofi Annan di Istana Merdeka (Sumber: Back Tohir/Setneg).

daerah mengatur dunia pendidikan. Gus Dur, mempunyai pemahaman yang sama dengan pemikir pendidikan Johannes Muller bahwa pendidikan universal bisa tumbuh di sekolah maupun di tengah masyarakat. Oleh karena itu muncul istilah yang diakui secara resmi dalam kebijakan pendidikan Nasional yaitu pendidikan formal (sekolah, institut, universitas) dan pendidikan nonformal (keluarga, lingkungan kerja, komunitas sosial dan keagamaan, media massa, kursus, dan sebagainya). Cetak-biru pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan universal itu tertuang dalam UU No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Khusus Bidang Pendidikan).

POLITIK LUAR NEGERI

Pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur, politik luar negeri Indonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan Presiden Sukarno, yaitu penekanan pada peningkatan citra Indonesia pada dunia internasional.

Lawatan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya adalah implementasi dari tujuan Gus Dur untuk mengembalikan posisi tawar Indonesia di mata internasional. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahannya yang singkat, Gus Dur kerap membicarakan isu-isu dalam negeri Indonesia dengan kepala negara yang dikunjunginya termasuk isu

Timor Timur dan juga soal integritas teritorial Indonesia seperti kasus Aceh dan Isu perbaikan ekonomi.

Pada November 1999, Gus Dur mengunjungi negara-negara Asia Tenggara, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, Gus Dur melawat ke Republik Rakyat China.

Januari 2000, Gus Dur melanjutkan perjalanan dinas luar negerinya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Selanjutnya pada bulan April, Gus Dur mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77. Pada tahun 2001, Gus Dur mengunjungi Negara-negara di Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Gus Dur melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.

Bagi Gus Dur, tujuan perjalanan dinas ke luar negeri adalah untuk mengembalikan nama baik Indonesia, beliau berharap para investor asing menanamkan modal kembali di Indonesia. Juga untuk mencari dukungan internasional terhadap Aceh agar Aceh tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia.

Kebijakan luar negeri yang mendapat tantangan keras pada awal pemerintahannya adalah saat muncul keinginan



Menerima Direktur IMF untuk Asia Pasifik di Wisma Negara (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Menerima pimpinan Eksekutif Republik Islam Pakistan Pervez Musharraf di Istana Merdeka (Sumber: Back Tohir/Setneg).

untuk membuka hubungan perdagangan dengan Israel. Gus Dur mengemukakan dua alasan mengenai rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel tersebut, Pertama, bertujuan untuk memperoleh posisi tawar yang strategis dengan pihak Yahudi. Harapan Gus Dur paling tidak Indonesia dapat meminta tokoh Yahudi seperti George Soros untuk berpartisipasi membantu mengendalikan pasar uang agar Indonesia terhindar dari krisis moneter. Kedua, meningkatkan posisi tawar Indonesia terhadap Timur Tengah yang tak pernah membantu Indonesia mengatasi krisis moneter.

Dua alasan Gus Dur tersebut nampaknya tidak mampu meyakinkan beberapa kelompok Muslim di Indonesia. Kekuatan Islam yang ada di parlemen menentang rencana kebijakan Gus Dur dan persoalan ini dijadikan sebagai kasus agama yang dampak protesnya menjadi sangat luas. Melihat situasi ini, Gus Dur akhirnya membatalkan keinginannya.

Perjalanan dinas luar negeri Gus Dur juga bisa kita artikan sebagai panggung terbuka untuk memainkan berbagai diplomasi dan dialog antar peradaban. Diplomasi peradaban ini bertumpu pada negosiasi nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat. Dengan pembawaan dan sikapnya yang cenderung tidak formal dan penuh humor dalam berbagai diplomasi Gus Dur mempertaruhkan kapasitas pribadinya untuk memperoleh dukungan dan simpati dunia. Tidak mengherankan, dalam menghadapi gerakan bersenjata di

Aceh yang menginginkan kemerdekaan, banyak negara yang mendukung perjuangan Gus Dur agar Aceh tetap berada di bawah NKRI.

Hasil dan prestasi yang dicapai dari perjalanan dinas luar negeri Gus Dur antara lain: perjanjian kerangka kerja sama ASEAN mengenai pemberian kemudahan atas barang-barang transit sebagaimana tertulis dalam Keppres No 169 Tahun 1999; protokol promosi dan proteksi investasi antara Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand sebagaimana tertuang dalam Keppres No 167 Tahun 1999; dan perjanjian kerjasama perdagangan dengan Rusia dan kerjasama atas pajak berganda dan pencegahan penggelapan pajak seperti terwujud dalam Keppres No 148 Tahun 1999 dan Keppres No 137 Tahun 1999.

Selain itu, perjalanan dinas luar negeri Gus Dur menghasilkan Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia Organisasi Konferensi Islam (OKI) sebagaimana tertulis di Keppres No 119 Tahun 1999 dan kerjasama modal dengan Zimbabwe, Kuba, dan Spanyol.

Peran Gus Dur bagi perdamaian di tanah Papua cukup besar. Bagi Gus Dur, Papua bukan hanya persoalan domestik, melainkan pintu bagi Indonesia untuk membangun hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Begitu pula pada kunjungan-kunjungan kenegaraan yang dilakukan Gus Dur mengarah pada penguatan kawasan Pasifik.



Searah jarum jam: Presiden Abdurrahman Wahid berbicara dengan Presiden Vietnam Tran Duc Luong di istana kepresidenan Vietnam, tanggal 9 November 1999 (Sumber: Reuters). Presiden Abdurrahman Wahid menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-77 yang berlangsung di Havana, Kuba, 12-14 April 2000 (Sumber: Back Tohir/Setneg). Ratu Belanda Beatrix (kanan) menyambut kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid (tengah) yang didampingi putrinya (kiri) di Istana Noordeinde di Den Haag, 2 Maret 2000 (Sumber: Reuters). Presiden Abdurrahman Wahid sedang mengisi buku tamu, disaksikan PM John Howard (kiri), di Gedung Parlemen Australia, Canberra, Selasa 26 Juni 2001 (Sumber: Reuters). Pemimpin Kuba, Fidel Castro menyambut Presiden Abdurrahman Wahid setibanya Kepala Negara, untuk menghadiri KTT G-77 yang dibuka di Havana, 12-14 April 2000 (Sumber: Reuters).





Presiden Abdurrahman Wahid, menerima Gubernur Papua Jacobus P Solossa dan Forum Kajian RUU Otonomi Khusus Menuju Papua Baru di Bina Graha, Jakarta, 16 April 2001 (Sumber: ANTARA).



Presiden Abdurrahman Wahid menerima Xanana Gusmo Delegasi CNRT di Bina Graha, Jakarta, 28 Maret 2000 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Jauh sebelumnya, tahun 1947, atas kesepakatan negara-negara Barat, dibentuklah Komisi Pasifik Selatan. waktu itu Papua telah berpartisipasi secara aktif dalam forum tersebut. Namun demikian, sejak Papua menjadi bagian dari NKRI, hubungan Papua dengan komisi tersebut nyaris terputus, kemudian disambung kembali pada sekitar tahun 1975. Kondisi kawasan di Pasifik Selatan yang sering mengalami konflik sosial yang kompleks menjadikan Papua sulit bergerak.

Hubungan antarkawasan tersebut dibangun dan diperkuat kembali oleh Gus Dur dengan menempatkan Papua sebagai pintu masuk. Begitu pula sebaliknya, negara-negara yang berada di Pasifik Selatan menganggap Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar mempunyai peran yang penting dalam percaturan politik internasional.

Selanjutnya Gus Dur menugaskan Menteri Muda Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisiepo untuk ambil bagian dalam Pertemuan Tingkat 16 Negara Pasifik Selatan ke 32 di Aiwo, Nauru. Hasil yang dibawa oleh Kaisiepo adalah negara-negara Pasifik Selatan mendukung Otonomi Khusus Papua. Kerjasama di bidang lain seperti pendidikan, olahraga, dan budaya juga dilakukan. Bahkan, Indonesia mengusulkan adanya pusat kajian tentang negara-negara Pasifik Selatan di Universitas Cendrawasih Papua.

ORANG BIASA YANG ISTIMEWA

Walaupun sudah tidak lagi menjadi presiden, pamor Gus Dur secara politik maupun kebudayaan tidak redup. Peran politik-kebudayaannya tetap memiliki pengaruh yang besar di dalam maupun di luar negeri. Kepemimpinannya di bidang kebudayaan terutama yang behubungan dengan perjuangan membangun pluralisme, pemikiran inklusif, gagasan harmonisasi negara dan agama, dan kecintaannya pada kalangan minoritas tetap merupakan teladan bagi semua kalangan.

Semangat dan sikap hidup Gus Dur sehari-hari yang tampak tidak formal dengan humor-humor yang segar bukan berarti bahwa Gus Dur menghadapi masalah-masalah itu dengan sikap santai. Tetapi pemikiran, sikap dan tindakannya sering mandahului zaman dan melampaui batas kapasitas pemikiran orang pada umumnya. Dalam idiom orang Barat Gus Dur bisa disebut *'is larger than life'*.

Kita khususnya kaum Nahdiyyin merasa sangat kecewa ketika situasi politik dalam hubungan Gus Dur sebagai presiden dengan parlemen mengakibatkan Gus Dur meninggalkan istana. Namun Gus Dur menjalani semua itu dengan ketegaran yang luar biasa. Semboyan Gus Dur, "Tak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah"



Searah jarum jam: Mobil jenazah yang membawa jasad Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid melaju menuju Bandara Halim Perdanakusuma di kawasan Tanjung Barat, Jakarta, tanggal 31 Desember 2009 (Sumber: ANTARA). Prajurit TNI mengusung jenazah Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid memasuki pesawat di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, tanggal 31 Desember 2009 (Sumber: ANTARA). Ribuan pelayat dari berbagai daerah, datang ke prosesi pemakaman K.H. Abdurrahman Wahid di kompleks makam Ponpes Tebuireng (Sumber: ANTARA). Seorang santri menulis nisan KH Abdurrahman Wahid di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, tanggal 31 Desember 2009 (Sumber: ANTARA). Sejumlah simpatisan menggelar aksi berduka di Bundaran Gladak, Solo, Jawa Tengah, tanggal 31 Desember 2009 (Sumber: ANTARA). Sejumlah rohaniwan dari tujuh agama mendoakan almarhum KH. Abdurrahman Wahid dalam acara "Doa Bersama Lintas Agama Untuk Gus Dur", di Istora Senayan, Jakarta, tanggal 17 Januari 2010 (Sumber: ANTARA).





5

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Meneguhkan Konstitusi



Awal tahun 1990. PDI (Partai Demokrasi Indonesia) memperlihatkan peningkatan jumlah suara yang cukup menggembirakan pada Pemilihan Umum 1987.

Di suatu hari MEGAWATI SOEKARNOPUTRI datang memenuhi undangan beberapa warga senior Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang diharuskan menggabungkan diri dalam PDI. Mereka bertemu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Para tokoh ingat betapa satu dasawarsa setelah Sukarno meninggal dunia yang fana ini keluarga Presiden RI pertama itu membuat janji bersama untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi ternyata kini Megawati bukan saja tampil sebagai *vote-getter* bagi partai yang tetap ingin setia pada ajaran Bung Karno, bahkan juga menjadi anggota DPR .

"Ada apa saya dipanggil oom dan tante-tante?" Megawati membuka pembicaraan di ruang tengah rumah Ibu Supeni itu. Manai Sophiaan, warga senior PNI, pun mulai dengan mengajukan pertanyaan yang paling mendasar, tentang keinginan Megawati terjun ke gelanggang politik.

"Anak *kita* mau ke mana sebenarnya, kok mau mendaftar masuk partai PDI?"

Dengan tenang, ia, putri tertua Sukarno, menjawab, "Aku *naar* Merdeka Utara."

Merdeka Utara adalah Jalan Medan Merdeka Utara, yang dulu disebut kawasan *Rijswijk*. Alamat yang mudah dikenal dari istana yang didirikan pada 1796, kini lebih dikenal sebagai Istana Merdeka, kediaman resmi Presiden Republik Indonesia.

Jawaban Mega meluncur tenang, datar, tetapi menyimpan energi yang menggelegak. Ia memberikan pernyataan pendek yang menimbulkan keharuan para pengikut Sukarno. Entah

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disambut oleh massa pendukungnya di Jakarta, pada Senin 17 Agustus 1998 (Sumber: ANTARA).



Searah jarum jam: Presiden Sukarno dan ibu Fatmawati bersama putra-putri Guntur Soekarnoputra dan Megawati Soekarnoputri (kanan) (Sumber: ANTARA/IPPHOS). Perayaan ulang tahun Megawati Soekarnoputri tanggal 23 Januari 1959 (Sumber: Beck ANRI). Presiden Megawati Soekarnoputri bersama suami, Taufik Kiemas didalam pesawat dalam kegiatan kenegaraan (Sumber: Back Tohir/Setneg). Presiden Megawati Soekarnoputri memotong tumpeng bersama suami, Taufik Kiemas dan anak-anak dan cucu-cucunya (Sumber: Back Tohir/Setneg).

sudah berapa lama mereka tidak mendengar kaum nasionalis tampil dengan suara yang penuh optimisme. Sebuah keinginan yang tak biasa di tengah suasana politik yang diciptakan dan dijalankan secara *text book*, "tenang dan stabil *zonder* gelombang". Orde Baru sedang berada di puncak kejayaannya.

Sepuluh tahun kemudian mereka yang hadir di pertemuan itu menyaksikan Megawati membuktikan kata-katanya, setelah partai yang diusungnya memenangkan Pemilu 1999 dan Megawati pun tampil sebagai penghuni baru istana di Medan Merdeka Utara. Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI ke-5 setelah melewati gelombang politik yang dramatis.



Suasana jalan-jalan di kota
Yogyakarta pada tahun 1946
(Sumber: ANTARA/IPPHOS).

DIA YANG LAHIR DARI SELUBUNG MEGA-MEGA GELAP

Malam hari. Hujan dan guntur sedang menyelimuti Yogyakarta. Salah satu pusat wilayah yang disebut *Vorstenlanden*, Yogyakarta, yang berpenduduk 170 ribu ini menjadi ibukota revolusi. Yogyakarta adalah "kota hijrah" bagi pimpinan tertinggi Republik Indonesia, ketika tentara Sekutu yang diboncengi pasukan NICA menduduki Jakarta, "kota Proklamasi".

Tiba-tiba lampu padam. Atap di atas kamar runtuh. Mega yang gelap dan berat melepaskan bebannya. Air hujan menggenangi kamar seperti sungai. Fatmawati terbaring di pembaringan di sebuah kamar yang telah disulap sebagai rumah sakit. Juru rawat dan dokter menggotong Fatmawati ke kamar tidurnya sendiri. Semuanya basah. Pakaian Fatmawati, seprei, perkakas dokter. Dalam kegelapan itulah seorang bayi perempuan dilahirkan, malam 23 Januari 1947 yang diselimuti gelap-gulita dengan suara guruh yang enggan untuk berhenti.

Anak yang lahir dalam gelap dan hujan itu adalah anak kedua presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno. Ibunya bernama Fatmawati. Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri.

Menurut Sukarno, sebelum anak kedua ini dilahirkan, ibunya, sang Ibu Negara bermimpi, diberi kembang sepatu merah oleh mertuanya. Sukarno pun membuat interpretasi atas mimpi ini. Mimpi ini adalah isyarat bakal hadir seorang

anak perempuan di tengah-tengah mereka. Kelahiran anak ini melengkapi kebahagiaan mereka. Sebelumnya Fatmawati telah melahirkan anak pertama, Muhammad Guntur Soekarnoputra.

Belum genap Mega berusia enam bulan pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Pertama. Untuk menjaga keselamatan Kepala Negara dari segala kemungkinan, keluarga Presiden dipindahkan ke Madiun. Tetapi ketika Belanda melancarkan Agresi Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 Mega kecil harus terpisah dengan ayahnya.

Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa menteri dan pemimpin Republik berhasil ditawan Belanda. Sukarno bersama Sutan Sjahrir, mantan Perdana Menteri yang telah diangkat sebagai Penasihat Presiden, dan H. Agus Salim diasingkan ke Prapat, Sumatera Utara. Sementara Wakil Presiden dan beberapa menteri diasingkan ke Pulau Bangka. Kemudian mereka dikumpulkan di Bangka.

Selama Sukarno menjalani masa pembuangan itu Fatmawati dan dua anaknya dilindungi Uskup Semarang Romo Soegijapranata di Gereja Bintaran, Yogyakarta.

Pada bulan Juli "Yogya kembali". Setelah melalui perundingan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang cukup melelahkan, pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Belanda "menyerahkan" (bahasa resminya) kedaulatan kepada Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) di Den Haag. Keesokan harinya Presiden RIS yang baru dilantik,

Suasana kota Yogyakarta pada saat diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta ditawan oleh tentara Belanda dibawa ke Maguwo 19 Desember 1948 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).



Sukarno, kembali ke Jakarta; bukan ke rumahnya yang lama, tetapi ke Istana Merdeka. Bukan pula dalam suasana sembunyi-sembunyi seperti ketika pindah ke Yogyakarta, tetapi di tengah-tengah kemeriahan dan kegembiraan penduduk Jakarta yang melimpah ruah mengelu-elukan kedatangan Presiden yang telah lama dirindukan. Maka sejarah pun mencatat Bung Karno hanya kurang dari setahun menjadi Presiden RIS, pada tanggal 17 Agustus 1950 ia kembali menjadi Presiden RI.

Kehidupan dalam suasana serba ketidakpastian dalam pergolakan Revolusi telah terhenti. Kini meskipun pergolakan politik dari negara yang baru mendapat pengakuan dunia internasional semakin menaik juga, kehidupan kekeluargaan Presiden telah tenang. Dalam suasana ketenangan hidup kekeluargaan inilah Megawati, putri kedua, menyambut kedatangan adik-adiknya. Berturut-turut pada tahun 1950, 1951, dan 1953 ketiga adik Megawati lahir. Mereka adalah Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh. Megawati tinggal di istana hingga tahun 1953.

Ketika ibunya memutuskan keluar dari Istana Merdeka ia bersama saudara-saudaranya mengikuti sang ibu. Sebuah pergolakan batin mengharukan yang dirasakan Megawati dan saudara-saudaranya mengikuti irama cepat yang bergolak.

Ia masih seorang remaja belasan tahun ketika harus mengalami betapa pertentangan politik bisa juga menghasilkan kebencian yang mematikan. Suatu hari,

iring-iringan Sukarno tengah berkunjung ke Perguruan Cikini di mana Mega bersekolah. Tiba-tiba iring-iringan itu dilempari granat oleh orang tak dikenal. Saat itu Mega menjadi panitia dan sedang menjaga sebuah *stand*. Sukarno selamat, tetapi Mega melihat ceceran darah dari korban yang terluka. Pemandangan yang tak pernah bisa terhapus dari kenangannya.

Dan tentu saja yang paling memilukan adalah saat Megawati merasakan kesedihan yang menyayat saat menemukan ayahandanya, si pendiri Republik ini, dicabut secara paksa dari kursi kepresidenan pada tahun 60-an akhir dan disekap dalam sebuah wisma hingga wafat dalam kesunyian yang menerbitkan pilu.

Barangkali karena kesulitan-kesulitan dalam sirkuit politik yang keras itulah makanya Sukarno sendiri tak ingin melihat anak-anaknya tampil dalam politik praktis. Oleh karena itu Sukarno pada suatu kala menerbitkan doa untuk Guntur, "Apa pun jadinya kelak, terserah kepada hari depannya. Cuma satu doaku untuknya, semoga ia tidak terpilih menjadi presiden. Kehidupan itu sungguh terlalu berat."

Doa Sukarno itu terkabul. Putranya memang tidak menjadi presiden. Namun, tidak kepada putri keduanya. Empat puluh delapan tahun setelah Mega meninggalkan Medan Merdeka Utara, ia kembali. Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia.



Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati bersama putrinya Megawati Soekarnoputri saat menerima PM India Pandit Jawaharlal Nehru dan istri serta putra putrinya di Istana Jakarta pada 8 Juni 1950 (Sumber: ANTARA/IPPHOS).

PEMIMPIN DAN PENDERITAAN

Perjalanan karier politik Megawati terbilang cepat, walau banyak rintangan yang menghadang. Pada tahun 1987 ia memutuskan masuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI), satu dari dua partai, di samping Partai Persatuan Pembangunan, yang boleh mendampingi Golkar (Golongan Karya) ikut Pemilihan Umum (Pemilu). Di tahun itu pula ia terpilih menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan Jawa Tengah. Enam tahun kemudian ia menjadi ketua umum PDI.

Mega tidak belajar politik dari sekolah. Dia, seperti ayahnya di masa remaja, mendapatkan "ilmu politik" dari pengalaman hidup. Ia belajar politik ketika melihat sang ayahanda, Sukarno, dikunjungi tamu-tamunya dari segala bangsa dan tentu saja dari segala aliran politik. Ketika tamu-tamu sudah pulang, demikian Mega mengenangnya, Bapak mengajak berdiskusi tentang berbagai hal yang dibicarakan dengan tamu-tamu tadi. Tamu-tamu itu bisa saja Oom Jo (Dr. J. Leimena), Pak Nas (A.H. Nasution), dan lainnya. "Dari situlah saya mulai banyak tahu. Bahkan jika ada peristiwa nasional atau internasional yang menarik perhatian Bapak, kepada kami sering diberikan penjelasan. Itulah masa yang paling berharga," kisahnya. Menurut Megawati, pengalaman hidup yang dialaminya bersama gelombang pengalaman yang tak linier telah mengasah naluri politiknya.

Bagi Megawati, memasuki dunia politik mestilah total. Karena itulah ia selalu dengan matang mempertimbangkan

segala risiko yang mesti ditanggungnya ketika memutuskan terjun ke gelanggang politik. Saudara-saudaranya pun kaget ketika Megawati, sang penari yang bersuara lembut dan halus gerak, memutuskan terjun ke politik praktis yang keras dan maskulin.

Pengalaman menemani ayahnya dalam kunjungan ke luar negeri bukan saja kenangan yang tak terlupakan tetapi juga pengalaman yang sangat berharga. Ketika Presiden Sukarno melakukan kunjungan ke luar negeri, Megawati kerap diajak untuk ikut serta. Di samping menemani ayahnya, Megawati juga mewakili ibunya. Dua peristiwa yang paling berkesan pada Megawati adalah ketika ia dibawa ayahnya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Beograd, Yugoslavia, dan ketika ayahnya menjadi tamu kehormatan Presiden John F Kennedy di Gedung Putih pada 1961.

Bekal pengetahuan politik Megawati juga tercermin dari berbagai peristiwa kecil tetapi ikut membentuk karakternya. Megawati kerap disuruh ayahnya meminjam buku ke perpustakaan yang masih "menumpang" di Museum Nasional, "Gedung Gajah", di Medan Merdeka Barat. Buku-buku yang dibawa Megawati itu biasa digunakan Sukarno ketika harus menyusun risalah pidatonya.

Keteguhan sikap pada prinsip merupakan warisan terbesar yang diserap Megawati dari Sukarno. Pada sosoknya yang tenang dan "tidak gaduh" itu Megawati mengendapkan kenangan atas penderitaan batin yang

sempat dijalaninya; bahkan ketika usianya baru berusia dua tahun sejak menyaksikan dan bahkan merasakan kepiluan hati ibundanya saat meninggalkan Istana Negara. Ia pun merasakan kepahitan perasaan yang tak terkatakan ketika karier politik ayahandanya sebagai presiden harus berakhir.

Bagaimanakah harus membayangkan keperihan hati seorang ibu muda yang baru mempunyai seorang anak dan menantikan dengan penuh harap kedatangan anaknya yang kedua ketika mendengar berita yang tak ingin dengarnya? Tiba-tiba suami tercinta harus meninggalkannya untuk selama-lamanya. Suaminya, LU II Penerbang Surindro Supjarso, mengalami kecelakaan saat pesawat terbang yang dibawanya jatuh di Perairan Biak, Papua, pada 22 Januari 1970. Peristiwa tragis ini terjadi sehari hanya sebelum Mega bisa ulang tahunnya ke-23.

Deretan peristiwa yang dialaminya sejak berhentinya ayahnya sebagai presiden terasa sebagai mengharuskan Megawati untuk meniti kehidupan di bawah sorotan masyarakat. Dua puluh tahun lamanya ia merasakan kekikukan dalam menjalankan kehidupan yang dianggapnya sewajarnya saja. Ia merasa terus-menerus disorot masyarakat. Ia seakan-akan dihalangi untuk melakukan apa pun dan tidak pula boleh berpartisipasi dalam gejolak perpolitikan bangsa. Bahkan untuk menjadi sarjana di pendidikan tinggi pun mesti dihapusnya dari kalender hidupnya. Megawati, yang pernah berkhayal untuk menjadi "kepala Kebun Raya" karena

kecintaannya pada serba tanaman, harus berhenti dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Situasi politik setelah terjadinya "malapetaka nasional" di peralihan bulan September-Oktober (1965) tidak lagi bersahabat. Sejak peristiwa itu Indonesia berada dalam situasi konflik yang teramat memprihatinkan dan menyesakkan dada. Ia bukan seorang yang *drop out*, bukan; tetapi harus pulang karena tragedi G-30-S menghentikan semua kegiatan normal sehari-hari masyarakat. Pada tahun 1970, ia, Megawati, sang aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), kembali memasuki bangku kuliah. Ia pun mulai kuliah di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, tetapi tidak bisa bertahan lama. Ia memutuskan berhenti pada tahun 1972 karena situasi ekonomi keluarga yang suram.

Megawati harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia mempunyai keluarga besar yang jumlahnya 33 orang dan mesti ditanggung. Ia pun memutuskan untuk keluar dari bangku kuliah, namun ketika memilih bekerja tidak ada tempat yang menerimanya karena alergi dengan "gen Bung Karno" yang mengalir dalam darahnya. Memilih keluar negeri pun tak diperbolehkan. Saat situasi yang semuanya suram itulah jalan diam ditempuh Megawati dan semua keluarganya. Diam Megawati adalah jalan politik sekaligus menunjukkan karakter politik yang sedang dihadapinya. Diam Megawati adalah cerminan masyarakat yang mengalami pengambangan.



Kongres Luar Biasa PDI tanggal
1 Desember 1993 di Surabaya
(Sumber: Antara).

"Suka atau tidak, bangsa kita memang membutuhkan seorang pemimpin. Bukan pimpinan. Sebab, berbeda makna antara pemimpin dan pimpinan"

Akhirnya ketenangan politik terjadi juga. Pemerintah adalah pemegang kekuasaan yang teramat kuasa. Sementara massa dibiarkan—atau bahkan diharuskan—mengambang. *Floating mass* adalah keharusan politik dan sekaligus realitas yang harus terpelihara, tetapi di saat dominasi negara semakin menyeluruh ini Megawati dengan segala ketenangan dan tanpa huru hara tampil kembali. Ia yang berpembawaan tenang dan "tidak gaduh" ini kembali memperdengarkan suaranya. Ketika bersuara berbeda adalah tindakan yang sangat dihindari, sang ibu rumah tangga ini bahkan mengambil sikap yang sebaliknya. Dia hadir menjadi ibu bagi bangsa yang menaungi seluruh rakyatnya.

Didorong oleh suaminya, Tastafvian Kiemas, atau lebih dikenal dengan Taufiq Kiemas, Megawati akhirnya keluar dari nota kesepakatan keluarga yang dibuat pada 1982. Nota yang berisi konsensus anak-anak Sukarno ini ialah menjauhkan diri dari keberpihakan pada kekuatan politik yang dibolehkan tampil. Mereka bersepakat berdiri di atas semua golongan. Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, serta Bayu dan Taufan yang merupakan putra Sukarno dari Hartini adalah para penandatangan konsensus keluarga ini.

Kini, kalau lembaran-lembaran sejarah boleh dibuka lagi, tampaklah bahwa tahun 1987 bukan saja tahun ketika

Presiden Soeharto mencetuskan idee "asas tunggal"—semua organisasi massa harus berdasarkan Pancasila—tahun ini adalah saat Orde Baru memperlihatkan kekuasaan yang teramat dominan, tetapi di tahun itu pula Megawati memperlihatkan wajahnya yang lain. Atas saran dan nasihat Taufiq Kiemas, suaminya, Megawati, dan juga Guruh, menerima bujukan Ketua Umum PDI Soerjadi untuk terlibat aktif di PDI. Nama Mega dan Guruh jaminan untuk menjadi *vote getter* di Pemilihan Umum 1987. Pada Pemilu 1982 PDI hanya mendapat 24 kursi di DPR, tetapi pada Pemilu 1987 kursi PDI bertambah menjadi 40, meskipun PDI, sebagaimana halnya dengan pemilu yang sudah-sudah, tetap berada di urutan ketiga, di bawah Golkar dan PPP.

Pilihan memasuki gelanggang politik dari pintu PDI mengantarkan Megawati dan Taufiq Kiemas ke Senayan. Mereka terpilih sebagai anggota DPR untuk periode 1988–1993. Megawati bukanlah ikon dalam ruang. Ia tetap saja bagian dari kehidupan masyarakat kecil di luar gedung sidang. Sebagaimana kata Kwik Kian Gie, Megawati tidak terlalu menonjol dalam ruang sidang DPR, tetapi kehadirannya tidak ubahnya kekuatan gravitasi yang memancarkan energi tarikan kuat saat PDI mengerahkan massa. Suaranya yang lembut, sorot matanya yang tajam, dan nama Sukarno yang menempel padanya berhasil menggugah massa dan kembali mengantarkannya maju di Pemilu 1992. Figur Mega dan keberhasilan PDI membangun citra sebagai partai *wong*

Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai ketua umum DPP PDI periode 1993-1998 tengah memberikan keterangan pers tanggal 7 Desember 1993 (Sumber: ANTARA).

"Dalam memegang suatu prinsip, Megawati sejajar dengan Margaret Thatcher, di samping memiliki kelihaihan berdiplomasi seperti Indira Gandhi, dan keluwesan, keibuan, kedekatan dengan rakyat seperti Cory Aquino" – I Gede Ardika, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI (2000--2004)



cilik, pendukung pembaruan, dan simbol perlawanan pada dominasi membuat suara untuk PDI naik 4% dari Pemilu 1987.

Keanggunan cara berpolitik Megawati di jalur politik yang keras itulah yang tercatat betapa ia tampil sebagai aktor penting dalam pergolakan sejarah bangsa. Karena ketokohan ibu rumah tangga inilah Megawati disejajarkan dengan tokoh politik perempuan lain dari seluruh dunia, seperti Corazon Aquino dari Filipina, Benazir Bhutto dari Pakistan, Indira Gandhi dari India, Aung San Su Kyi dari Myanmar, hingga Margareth Thatcher dari Inggris. Majalah Forbes pun memilihnya sebagai salah seorang *The World's Most Powerful Women* di tahun 2003. Ia *ranking* 8 dari 100 perempuan paling berkuasa di dunia.

TITIK BALIK DALAM POLITIK

Meski sudah menjadi figur dalam PDI, terutama dalam hal mengerahkan massa, Megawati belum dianggap sebagai tokoh signifikan. Makna kehadirannya barulah muncul ketika ia hadir dalam pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PDI tahun 1993.

Kongres IV PDI yang diadakan di Asrama Haji Pangkalan Mansyur Medan 21–25 Juli 1993 berakhir ricuh. Mulanya, forum sudah bersepakat untuk memilih Soerjadi sebagai ketua umum, tetapi seakan-akan tiba-tiba saja muncul Ahmad Subagyo, Ketua DPP Peralihan, kubu lain dalam PDI. Ia menentang penunjukan Soerjadi. Dengan dibantu

aparatus, Ahmad Subagyo mendobrak dan menguasai tempat pelaksanaan kongres.

Keras dugaan keributan ini disebabkan pemerintah tidak merestui naiknya kembali Soerjadi sebagai Ketua PDI. Ia dianggap berbahaya karena sering bersuara vokal. Di bawah kepemimpinannya, PDI mengusulkan agar masa jabatan presiden dan wakilnya terbatas dua periode. Ia juga meminta presiden dan wakilnya dipilih berdasarkan suara terbanyak lewat pemilihan langsung.

Setelah rusuh Kongres IV PDI, pemerintah menunjuk Ketua DPP *Caretaker* Latief Pudjosakti sebagai ketua sementara DPP PDI. Di bawah DPP *Caretaker*, PDI mencoba menyelesaikan polemik ketua umum dengan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya. Kongres itu kemudian digelar di Asrama Haji Sukolilo antara 2 hingga 6 Desember 1993.

Pada September 1993, sebelum KLB digelar, seratus fungsionaris dari 70 DPC PDI seluruh Indonesia mendarangi Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Jalan Kebagusan IV, Jakarta Selatan. Mereka meminta supaya Megawati mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Setelah mempertimbangkan, akhirnya Mega menyatakan bersedia. Tak lama kemudian, segera dibentuk "tim sukses" KLB Megawati yang diawaki oleh Taufiq Kiemas, Aberson Marle Sihaloho, Mangara Siahaan, Suparlan, Panda Nababan, dan Sophan Sophiaan. Seminggu sebelum KLB, Megawati meluncurkan bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Pikiran*



Kampanye Pemilu 1997 yang diikuti tiga konstantan yaitu PPP, Golkar dan PDI (Sumber: ANTARA).

Megawati: Bendera Sudah Saya Kibarkan. Buku itu berisi program politik dan ekonominya jika ia menjadi ketua umum.

Pencalonan Mega tidak disetujui pemerintah karena naiknya Megawati bisa memperbesar arus radikalisme di PDI. Karena itu pemerintah mengajukan Budi Hardjono sebagai calon.

Ketika KLB berlangsung, 84 utusan yang mewakili 256 DPC PDI mencalonkan Mega. Saat itu, PDI mempunyai 305 DPC. Ada perdebatan mengenai mekanisme pemilihan, antara pemungutan suara atau lewat pembentukan tim formatur. Mega sendiri turut menjadi pembicara dalam KLB.

KLB diwarnai kemelut. Selain karena ada pelbagai kubu dalam PDI, seperti DPP *Caretaker*, DPP Peralihan, dan Kelompok 17, pemerintah turut campur tangan lewat Menteri Dalam Negeri. Hingga hari terakhir, tanggal 6 Desember 1993, DPP *Caretaker* belum juga berhasil memilih Ketua Umum.

Demikianlah, ketika situasi nyaris *deadlock*, Megawati tampil di detik-detik terakhir. Beberapa saat sebelum pukul 12 malam, ia maju ke depan dan menyatakan diri sebagai Ketua Umum DPP PDI 1993–1998. Ia berkata dengan lembut, tegas, dan tentu saja berani, "Secara *de facto* saya sudah menjadi Ketua Umum DPP PDI. Secara *de jure* memang belum. Karena itu, saya minta saudara-saudara tetap tenang. Silakan diam di sini. Harapan saya kita semua bisa menegakkan konstitusi partai yang kita cintai. Saya tidak ingin ada keributan

"Kalau sudah berjalan, ya pantang surut langkah. Meski layarnya sobek dan diterjang badai, mesti jalan terus. Ini bukan untuk menyombongkan diri. Ini bagi saya sebagai pengalaman hidup"

dilakukan oleh sementara pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah saudara-saudara sanggup?"

Peserta KLB menjawab serentak menyanggupi. Namun pernyataan Mega tersebut tidak diakui oleh Ketua DPP Sementara Latief Pudjosakti. Ia kemudian menyerahkan penyelesaian polemik Ketua Umum PDI kepada Pemerintah.

Di Jakarta, sejumlah perwakilan PDI dipanggil Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet untuk menyelesaikan konflik. Hasil pertemuan itu adalah perlunya PDI menggelar Musyawarah Nasional (Munas) PDI di Jakarta, pada 22 Desember 1993. Berkat dukungan sejumlah jenderal, Munas berlangsung tenang. Hanya dalam waktu lima menit, 52 fungsionaris DPD PDI dari 27 provinsi memilih Megawati sebagai ketua umum secara aklamasi. Mega hanya berkomentar pendek bahwa tak gampang menjadi ketua umum yang dipilih kader dari bawah.

Ternyata masalah belum selesai. Tiga tahun kemudian, pada 1996, Soerjadi dan Fatimah Achmad bersama pendukungnya menggelar acara yang mereka sebut "Kongres IV" di Medan. Menurut mereka, kongres yang mereka gelar adalah kongres babak kedua karena Kongres 1993 belum tuntas. Jadilah Kongres tersebut diselenggarakan pada 20–23 Juni 1996. Sementara di Jakarta, tanggal 19 Juni, para pendukung Mega melakukan *long march* dari Taman Monas menuju Jalan Imam Bonjol. *Long march* dilakukan lagi sehari kemudian, tanggal 20 Juni. Rutenya dibalik, dari

Seorang pria dengan mengangkat foto Presiden pertama RI Sukarno, antusias menyambut kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di Medan, Sumatera Utara, Minggu (3/3). (Sumber: Pusat Informasi Kompas).



Jalan Imam Bonjol ke Taman Monas. Ketika massa melewati Gambir terjadi bentrokan dengan ABRI. Lima orang massa PDI terluka parah, 73 luka ringan, 48 orang ditahan, 8 mobil hancur, dan 56 tentara luka-luka.

Di hari yang sama, *long march* juga digelar di pelbagai kota oleh massa PDI pendukung Megawati. Kota-kota tersebut adalah Semarang, Solo, Surabaya, Lampung, Ujung Pandang, Denpasar, dan Mataram. *Long march* itu kemudian menjadi fenomena baru dalam politik Megawati Soekarnoputri dan bahkan menjadi salah satu kekuatan utamanya. *Long march*, dan bukan retorika, adalah pernyataan politik Megawati untuk mengawal suara dukungan dari para kadernya di bawah yang menginginkan perubahan politik yang besar. *Long march* adalah jalan politik damai yang dilakukan Megawati untuk sebuah konsolidasi. Meski ditamengi massa yang militan, Mega menolak melakukan pembalasan dengan kekerasan. Ia memilih jalur hukum dengan melayangkan gugatan atas Kongres Medan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dukungan kepada Mega terus menguat. Pada awal Juli 1996, ribuan orang yang terdiri dari mahasiswa, anggota PDI, dan simpatisan PDI melakukan aksi seribu bunga. Mereka mengumpulkan tanda tangan di kain sepanjang 1 km dan membagi-bagikan bunga kepada polisi, tentara, dan masyarakat di sekitar lokasi aksi.

Di Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro No. 58 Jakarta Pusat, suasana tak kalah riuh. Setiap hari di depan kantor

digelar mimbar bebas tempat para aktivis berorasi. Mimbar bebas ini ternyata dianggap mengganggu. Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung mengatakan bahwa mengadakan mimbar bebas bisa dikategorikan makar. Megawati tentu saja membantahnya. Menurutnya, apa yang dilakukannya bersama kader-kadernya adalah menjaga harga diri warga yang telah porak-poranda dengan adanya Kongres Medan.

Ketika massa pendukung Soerjadi siap melakukan tindakan merebut paksa Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro No 58 Jakarta Pusat, Megawati pantang surut. Baginya, gedung di jalan Diponegoro adalah milik rakyat dan rakyat mempertahankan habis-habisan haknya.

Saat hasil Kongres Medan 1996 diterima oleh pemerintah pada 25 Juli 1996, suhu politik pun semakin memanas. Dua hari kemudian, 27 Juli 1996, ratusan orang berkaus merah bertuliskan "Pendukung Kongres IV Medan" dan berikat kepala merah menyerbu Kantor PDI pada pukul 6.30. Saat itu para satgas sedang terlelap. Bentrokan tak terhindarkan. Menyusul kemudian pasukan huru-hara bertameng yang mendekati pagar kantor, sementara pasukan penyerbu di belakang mereka. Orang-orang yang berjaga dalam kantor menolak keluar. Namun, pada pukul 9, kantor berhasil direbut dan dirusak oleh pasukan huru-hara. Seratus tiga puluh satgas PDI berhasil digelandang keluar. Sebagian diangkut dengan dua truk, sedangkan yang terluka dibawa ambulans.



Pidato kemenangan Megawati Soekarnoputri di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis tanggal 29 Juli 1999 (Sumber: Pusat Informasi Kompas).

Ketika peristiwa pagi yang berdarah itu terjadi, Megawati tengah berada di rumahnya. Ia mendapat telepon dari kantor DPP bahwa terjadi penyerbuann, namun oleh orang-orang di sekitarnya memintanya tidak ke lokasi. Megawati hanya bisa menangis melihat banyaknya korban yang jatuh untuk sebuah cita-cita politik perubahan yang besar untuk Indonesia. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam peristiwa 27 Juli 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 hilang.

Setelah kejadian kantor DPP PDI itu pendukung Mega pindah dari Jalan Diponegoro No. 58 ke kediaman Mega di Jalan Kebagusan IV No. 45 Jakarta Selatan. Kemudian pindah lagi ke Jalan Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan. Setelah peristiwa tersebut, Megawati memangkas rambut panjangnya dan tidak pernah memanjangkannya lagi. Perubahan sudah dekat.

Benar saja, peristiwa 27 Juli menjadi isu nasional. Lebih-lebih kejadiannya hanya setahun sebelum Pemilu 1997 digelar kembali. Oleh para pendukungnya Megawati yang makin kokoh sebagai ikon perlawanan dan perubahan tetap diminta menjadi memimpin mereka. Pemimpin untuk mereka yang kemerdekaan berpendapatnya disumbat.

PDI pun resmi pecah menjadi dua, pro-Soerjadi dan pro-Megawati. Dalam Pemilu 1997, PDI pro-Megawati tentu saja tidak diakui pemerintah sehingga tidak berhak mengikuti pemilu. Menanggapi keputusan tersebut, maka pada tanggal 22 Mei 1997, Mega mengadakan pertemuan dengan

massanya di depan rumahnya. Di depan 2.000 orang, Mega menyatakan "golput" di Pemilu 1997. Golput atau Golongan Putih adalah pernyataan politik menolak pagelaran Pemilu dengan jalan damai, yakni tak menggunakan haknya untuk memilih. Inilah pidato "golput" Megawati yang terkenal itu:

"Saya selaku pribadi warga negara dan anggota DPR/MPR RI maupun seseorang yang terkait erat dengan nama tokoh bangsa, yaitu proklamator bangsa Indonesia, dengan prihatin yang sangat dalam, saya menyatakan pada hari ini, hak politik saya sebagai warga negara tidak akan saya gunakan dalam pemilu tanggal 29 Mei 1997.

Karenanya, saya akan tetap memegang dan menyimpan kartu kuning yang saya miliki dengan baik sebagai kesaksian kondisi demokrasi kita saat ini. Keputusan ini saya ambil setelah terjadinya peniadaan secara pihak untuk saya sebagai warga negara dan Ketua Umum DPP PDI 1993-1998 yang sah dan konstitusional.

Saya mengajak warga banteng untuk selalu berpegang pada hati nurani saat saudara menggunakan hak politik dalam pemilu kali ini. Apalah gunanya kemenangan jika nilai kejujuran, ketulusan, rasa aman, ketenangan, dan cahaya harapan rakyat tidak lagi bersinar seperti benderang matahari pagi di atas cakrawala negeri ini.

Jadilah warga bangsa yang merdeka lahir dan batin, yang jiwa raganya selalu dihangatnyalakan api kemanusiaan, keadilan, dan peradaban budi luhur sebagai insan beriman. Tanamkan



Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden KH Abdurrahman Wahid pada pembukaan Kongres PDIP di Semarang, 27 Maret 2000 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Abdurrahman Wahid bersama dengan pemimpin PLO Yasser Arafad dan pemimpin negara Arab pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-77 yang berlangsung di Havana, Kuba, 12-14 April 2000 (Sumber: Back Tohir/Setneg)

pula di jiwa kita pesan dari pendiri republik yang kita cintai ini bahwa kita cinta perdamaian tapi lebih cinta kemerdekaan.”

Sikap “golput” Megawati berdampak pada perolehan PDI di Pemilu 1997, sebuah pagelaran pemilu yang memakan korban terbanyak dalam sejarah pemilu Orde Baru, yakni 70 orang tewas. Partai kepala banteng ini hanya meraih 3,05% suara, setara dengan 11 kursi di DPR, padahal di tahun 1992 PDI meraup 14%.

Munculnya Megawati sebagai wanita politikus dalam pentas politik di Indonesia sangat menarik. Megawati menjadi figur bagi perempuan Indonesia untuk terjun dalam politik praktis. Banyak tekanan dan persoalan yang harus dihadapi Megawati serta usaha-usaha untuk merintang kepopulerannya. Pada 21 Juni 1997, sebuah pertunjukan wayang di Yogyakarta dalam rangka acara pribadi dilarang. Alasannya, karena Mega akan hadir dalam acara tersebut, meskipun dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Tekanan itu tidak menjadikan popularitas Megawati surut. Dukungan arus bawah semakin menguatkan popularitas Megawati saat itu.

Krisis moneter 1997 dan semangat keberanian yang ditularkan Megawati dan aktivis-aktivis mahasiswa dari pelbagai kampus mendorong arus karnaval sosial ke perubahan struktur politik.

Pada 1998, Presiden Soeharto digantikan Bacharuddin Jusuf Habibie. Bersama-sama dengan lembaga legislatif, Presiden B.J. Habibie menetapkan bahwa pemilu dipercepat.

Dari yang seharusnya digelar di tahun 2002, menjadi 1999. Habibie juga membuka pintu bagi semua partai untuk mengikuti pemilu. Total, terdapat 48 partai yang mengikuti Pemilu 1999.

PDI pro-Mega juga bersiap dan bahkan yang paling siap untuk bertarung di Pemilu 1999 itu. Untuk membedakan dirinya dengan PDI pecahan yang dipimpin Budi Hardjono, Mega mengganti nama partai menjadi PDI Perjuangan. Perubahan ini diumumkan di Stadion Senayan (sekarang Gelora Bung Karno), pada 14 Februari 1999. Logo partai juga berubah, menjadi banteng bermoncong putih dalam latar merah.

Sebelum pemilu muncul suara-suara yang menginginkan PDIP mencalonkan Mega sebagai presiden. Suara-suara itu muncul dari arus bawah, persis seperti ketika pemilihan ketua umum PDI tahun 1993. Pada Oktober 1995, anggota PDI di Pekalongan mengedarkan formulir berjudul “Koordinator Warga PDI Pendukung Megawati Soekarnoputri”. Isinya, dukungan kepada Megawati untuk menjadi presiden 1998–2003. Formulir tersebut ditandatangani 16 tokoh PDI dari pelbagai daerah.

Gagasan serupa muncul pula dari Jawa Tengah. Tak lama kemudian beredar formulir berjudul “Surat Pernyataan Pendapat dan Keinginan” di markas fraksi PDI di DPR. Isinya memuat tiga hal. Pertama, meminta DPP PDI mencalonkan Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia (RI)



Megawati Soekarnoputri mengucapkan sumpah menjadi Presiden RI ke-5 pada Sidang Istimewa MPR-RI, di Jakarta, Senin tanggal 23 Juli 2001 (Sumber: ANTARA).

dalam SU MPR 1998. Kedua, supaya fungsionaris partai memperjuangkan sungguh-sungguh agar presiden dan wakil presiden dipilih dengan suara terbanyak. Ketiga, agar calon presiden dan wakil presiden berkampanye menawarkan program pada waktu pemilu.

Menjelang SU MPR 1998, Megawati menyebutkan sejumlah nama yang pantas sebagai presiden, sebelum ia sendiri mengeluarkan pernyataan siap menjadi presiden. Kata Megawati, "Bila tidak ada keberanian dari mereka, maka dalam kesempatan ini saya dengan tulus dan ikhlas menyatakan ketidakberatan saya untuk memimpin negeri dan bangsa ini, bila hal tersebut memang telah menjadi kehendak dan tuntutan rakyat."

Dalam keterbukaan demokrasi di Pemilu 1999 yang diselenggarakan pada 7 Juni itulah Megawati mendapat dukungan dari rakyat. PDI Perjuangan menjadi pemenang dengan persentase 33,76%, setara dengan 153 kursi di DPR.

Sebagaimana amanat Kongres V PDI-P di Bali, 8-10 Oktober 1998, Megawati diperjuangkan menjadi calon presiden dari PDI-P di SU MPR 1999. Perjuangan itu makin mendekati titik akhir yang gemilang setelah jelang detik SU MPR 20 Oktober 1999 B.J. Habibie sebagai petahana, menyatakan tidak bersedia mencalonkan diri sebagai presiden setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR. Hanya ada dua calon yang berlaga dalam pemilihan presiden, yakni Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

DARI IBU WONG CILIK MENJADI IBU PRESIDEN

Maka begitulah MPR pun mengadakan pemilihan presiden, satu dari dua calon yang telah menampilkan diri, yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Berkat dukungan Poros Tengah yang digalang partai-partai berlatar Islam dan didukung Partai Golkar, Abdurrahman Wahid menang tipis dari Mega, yakni 373 suara berbanding 313 suara. Dalam kekecewaannya, karena merasa dikhianati, Megawati agak keberatan untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden, tetapi atas bujukan beberapa tokoh di samping para anggota PDIP memintanya untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden, Mega akhirnya bersedia juga untuk dicalonkan. Agak ragu juga ia menerima permintaan ini, sebab senadainya ia gagal lagi terpilih sebagai wakil presiden siapa yang menjamin tidak akan ada protes besar-besaran yang berujung pada kerusuhan di mana-mana.

Megawati pantas khawatir. Segera setelah Abdurrahman dinyatakan terpilih, maka seperti dengan begitu saja letupan sosial di beberapa kota terjadi. Bali, Pekanbaru, Medan, serta kota-kota kabupaten di Jawa Tengah dan di Jawa Timur harus menghadapi suasana yang agak menegangkan, sementara di Jakarta massa PDI-P mulai berkonsentrasi di sekitar bundara Hotel Indonesia.

Anggota PDI-P di MPR segera bertindak cepat mengurus pencalonan Megawati. Pada 21 Oktober 1999,



Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz bersama para menteri Kabinet Gotong Royong, sesuai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, tanggal 10 Agustus 2001 (Sumber: ANTARA).

Sidang Paripurna MPR memilih dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid tak berjalan mulus. Saat Presiden Wahid mengeluarkan dekrit presiden yang membekukan MPR RI, DPR RI, dan Partai Golkar pada 21 Juli 2001, berbagai kalangan menolak dekrit presiden itu. Dua hari setelah dekrit, Ketua MPR Amien Rais menggelar Sidang Istimewa (SI) MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Dalam SI itu mandat Presiden Wahid sebagai presiden RI dicabut. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian dilantik sebagai presiden kelima RI.

Delapan tahun silam, tepatnya di KLB PDI di Surabaya, 1993, Megawati berbicara di depan forum dengan mengutip penyair India Swami Vivekananda. "Sudah cukup lama kita menangis, jangan menangis lagi. Tegakkan mukamu menjadi manusia sejati, untuk menegakkan kebenaran." Pada akhirnya, Megawati berhasil memenuhi impian pendukungnya. Megawati Soekarnoputri menjadi presiden Republik Indonesia ke-5.

Sejarah mencatat beberapa kebijakan penting Presiden Megawati Soekarnoputri sepanjang tiga tahun pemerintahannya, antara lain ia membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, memerangi terorisme, menjaga integrasi bangsa, menghasilkan UU Kekerasan dalam Rumah

"Sebagai perempuan pertama di Indonesia, Ibu Megawati memang membanggakan. Karena berarti kita betul-betul tidak mengenal diskriminasi. Bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia" – Jacob Oetama, Presiden Direktur Kelompok Kompas-Gramedia

"Tampilnya Bu Mega sebagai perempuan pertama sebagai Presiden RI menjadi tonggak penting untuk merubuhkan pendapat kuno tentang posisi perempuan dalam ungkapan ini: 'suwarga nunut, naraka katut (masuk surga ikut (suami), masuk neraka pun terbawa)'. Fenomena abad modern telah melumpuhkan pandangan yang tidak adil dan tidak manusiawi itu" – Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah (1998-2005)

Tangga, menetapkan kuota wajib 30% perempuan dalam Pemilu Legislatif (Pileg), menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% APBN, membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), membentuk Mahkamah Konstitusi (MK), menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pileg) langsung, melakukan reformasi hukum, menstabilkan perekonomian, dan menghentikan hutang luar negeri.



Presiden Megawati Soekarnoputri menyaksikan latihan TNI AL di Kepulauan Karimunjawa, Agustus 2002 (Sumber: ANTARA).

MENJADI NEGARA MARITIM, MENJAGA INTEGRASI, MELAWAN TERORISME

Presiden Megawati menyadari bahwa bidang yang mendapat perhatian dalam jangka pendek pemerintahannya yang berakhir pada 2004 adalah penguatan infrastruktur untuk pemberdayaan rakyat banyak. Oleh karena itu Presiden Megawati memilih untuk fokus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Salah satu yang menjadi fokus perhatiannya adalah persoalan kelautan.

Secara kelembagaan, bentuk konkret komitmen Presiden Megawati pada aspek maritim adalah dengan membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan. Landasan pemikirannya jelas, terjadi ketimpangan perhatian antara darat dan laut. Di Barus, Tapanuli Selatan, para nelayan tradisional kalah bersaing dengan nelayan Thailand yang menggunakan pukat harimau. Diperkirakan, dalam setahun, 1–1,5 juta ton ikan di perairan Indonesia dikail oleh nelayan asing. Jumlah itu setara dengan US\$2 miliar. Bahkan, selama 30 tahun, Indonesia justru mengekspor pasir ke Singapura. Di tahun 2003, praktik di tepian perairan itu dihentikan.

Meski merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar wilayah berupa perairan, sejak lama kebijakan pemerintah berorientasi ke darat; padahal laut, terutama hasil tangkapan laut, menyimpan potensi besar. Dalam setahun, potensinya mencapai 6 juta ton. Potensi pasar ikan

"Sebaiknya kredit untuk para petani dan nelayan dipermudah. Janganlah mereka diwajibkan menyediakan agunan atau jaminan saat mengajukan kredit ke bank. Bank harus memberikan kemudahan kepada petani dan nelayan yang membutuhkan kredit"

tangkap juga besar, baik di dalam maupun luar negeri. Hanya saja potensi itu belum dimanfaatkan sepenuhnya. Tahun 1998 produksi ikan tangkap di Indonesia sebesar 3,6 juta ton dengan volume ekspor sebesar US\$ 1,6 miliar. Pada 2001 angka itu naik menjadi 4,2 juta ton dengan volume ekspor US\$ 2 miliar. Pada 2002 dan 2003 jumlah produksi naik lagi menjadi 5 dan 6 juta ton dengan volume ekspor sebesar US\$2 miliar.

Pemerintah membaca potensi perikanan dan kelautan ini sebagai salah satu cara mempercepat pemulihan kondisi perekonomian. Keseriusan pemerintahan ditunjukkan dengan peresmian Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Gerbang Mina Bahari) oleh Presiden Megawati pada 11 Oktober 2003. Program ini bertujuan meningkatkan produksi ikan tangkap 2003 menjadi 9,5 juta ton dengan volume ekspor sebesar US\$5 miliar serta menyerap tiga juta tenaga kerja, ditambah dengan pengembangan wisata bahari yang berpotensi memberi pendapatan sebesar US\$2,5 miliar.

Atas ke bawah: Presiden Megawati Soekarnoputri menghadiri peringatan Hari Nusantara 2003 di Pelabuhan Indah Kiat Merak Mas, Merak, Banten (Sumber: ANTARA). Presiden Megawati Soekarnoputri mengamati peralatan perang TNI (Sumber: Back Tohir/Setneg). Pemeriksaan pasukan pada peringatan ke 56 TNI di Jakarta, Desember 2001 (Sumber: Reuters).



"Bioteknologi yang ada sekarang ini perlu diarahkan bagi kesejahteraan petani dan nelayan. Setelah sekian puluh tahun ibarat selalu menjadi pusat perhatian dalam pembangunan, dua kelompok besar ini ternyata belum juga bisa keluar dari kesulitan hidup mereka."

Agar produktivitas meningkat, pemerintah berupaya memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir. Caranya dengan mengadakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang menyediakan kredit bagi nelayan dan masyarakat pesisir, mendirikan pangkalan minyak terapung untuk bahan bakar melaut yang dikelola koperasi nelayan, pengembangan infrastruktur seperti teknologi pemudahan pencarian ikan, dan membangun pabrik es. Pembangunan lain berupa pembangunan sepuluh pelabuhan perikanan dan sejumlah pelabuhan samudera di Bitung, Siak, dan Sabang.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan, 30 Mei 2002, Presiden Megawati berkata, "Kompleksitas persoalan kelautan dan perikanan merupakan salah satu pendorong bagi saya untuk membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan. Tetapi, di samping aspek kelembagaan itu, pengalaman selama ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dan keteraturan langkah dalam penanganan persoalan tersebut."





Wakil Presiden Megawati mengunjungi korban kerusuhan Ambon pada 25 Januari 2000 (Sumber: Reuters).



Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan dialog dengan warga Aceh di Masjid Besar Baiturahman, Banda Aceh, tanggal 8 September 2001 (Sumber: ANTARA).

Fokus lain yang menjadi perhatian Megawati adalah soal integrasi bangsa. Ketika menjabat sebagai presiden, Megawati dihadapkan pada pelbagai konflik yang berpotensi perpecahan, seperti Aceh, Poso, Maluku, Papua, dan lain-lain.

Untuk menyelesaikan persoalan yang mengancam integrasi bangsa, Megawati mengeluarkan kebijakan desentralisasi kekuasaan yang disebut otonomi daerah, penyelesaian konflik antarkelompok masyarakat yang terjadi selama kurun tahun 1998 hingga jelang peralihan abad, serta menetapkan status darurat militer dan Operasi Terpadu di Aceh.

Presiden Megawati sadar keputusan yang diambilnya tak populer. Tapi demi integrasi bangsa, ia mengambil tindakan yang tegas. Di sisi lain Presiden Megawati terus menawarkan untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Aceh. Ketika berada di Banda Aceh, 25 September 2002, Presiden Megawati menyerukan, "Saya akan melakukan apa pun agar selalu bisa bersama-sama dengan masyarakat Aceh dalam membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan maju dalam satu keutuhan bangsa."

Di Poso, jalan perjanjian damai juga ditempuh untuk menyelesaikan konflik horisontal antaranak bangsa yang dipicu oleh kebencian berbasis suku, agama, ras, dan agama (SARA). Konflik ini tak hanya memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur, tetapi juga menyebabkan terjadinya krisis sosial. Terdapat seratus ribu orang harus mengungsi. Pemerintah kemudian menggelar Operasi

"Bangsa ini telah melupakan jati dirinya dengan saling pecah belah, bukan hanya secara pikiran, tetapi juga secara fisik. Kalau bangsa ini terpecah belah, saya mau tinggal dimana, karena tubuh saya mengalir banyak darah."

Pemulihan Keamanan pada Desember 2001 yang diikuti upaya dialog yang kemudian melahirkan deklarasi damai di Malino, Sulawesi Selatan. Saat itu hadir 25 tokoh masyarakat beragama Kristen dan 23 tokoh masyarakat Islam untuk mengikat kata sepakat, *masintuvu maroso*. Hasilnya adalah 10 butir kesepakatan yang disebut Deklarasi Malino, yang berisi antara lain kesediaan menghentikan konflik dan perselisihan di antara mereka, menghormati penegakan hukum, serta mengembalikan hak dan kepemilikan kepada pemiliknya yang sah sebelum ada perselisihan.

Di Maluku, konflik antarkelompok masyarakat berlangsung pada 1999 dengan eskalasi yang melahirkan krisis sosial yang dalam. "Jika pertikaian di Maluku yang telah berlangsung lebih dari satu tahun tidak segera dihentikan, saya khawatir Maluku akan kehilangan satu generasi," ungkap Presiden Megawati pada 26 Januari 2001. Masalah Maluku kemudian diselesaikan dengan memberlakukan status Darurat Sipil serta menjembatani perdamaian antara kedua pihak dengan model Poso. Hasilnya adalah lahirnya Deklarasi Malino II.

Persembahan dan doa dihaturkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa bagi para korban bom Bali sekaligus untuk membersihkan Bali dari segala hal-hal buruk pada 7 Mei 2003 (Sumber:Pusat Informasi Kompas).

"Cara kerja Ibu Mega sangat sistematis dan sangat teliti. Tulisan tangan beliau rapi. Belasan nota kecil saya terima tiap minggu sebagai persiapan masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam rapat kabinet"
– Prof. Emeritus Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Perekonomian Kabinet Gotong Royong (2001-2004)

"Megawati selalu menempatkan orang sesuai dengan keahliannya, the right man in the right place" – Hamzah Haz, Wakil Presiden RI (2001-2004)

Munculnya aspirasi memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menguat lagi di Papua yang diorganisir oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah menyadari bahwa soal Papua sangat rentan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari luar. Oleh karena itu Papua diberi keistimewaan lewat otonomi khusus yang disahkan oleh UU No 21 Tahun 2001. Dengan keluarnya UU ini, provinsi yang tadinya bernama Irian Jaya ini resmi berganti nama menjadi Papua.

Bukan hanya dihadapkan pada krisis sosial akibat kerusuhan di pelbagai daerah, pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri juga dirundung ujian oleh ancaman kekerasan dengan eskalasi yang besar. Terorisme menjadi ancaman baru setelah separatisme dan konflik sosial. Setahun setelah tragedi 11 September di Amerika Serikat, Bali diguncang bom dengan daya ledak yang mencengangkan pada 12 Oktober 2002. Dua ratus orang meninggal. Yang terbesar adalah warga negara Australia. Kekerasan teror ini dikenal dengan "Bom Bali I". Dua tahun kemudian, pada Agustus 2004, aksi teror dengan bom bahkan terjadi di Ibukota, yakni di Hotel JW Marriot.

Aksis teror menjadi godam yang menghantam industri pariwisata. Jumlah wisatawan ke Bali menurun drastis. Sebagian negara menerapkan larangan kunjungan ke Bali; padahal, di saat yang sama, pemerintahan Presiden Megawati tengah berusaha memperbaiki kepercayaan dunia



terhadap pasar modal di Indonesia untuk mengundang investasi ke Indonesia serta menggenjot sektor usaha dalam negeri yang terbukti kebal terhadap krisis, seperti usaha kecil dan menengah. Karena adanya peristiwa teror "Bom Bali I", usaha tersebut harus dimulai dari nol kembali.

Untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia segera pulih, diselenggarakan beragam acara berskala dunia di Bali, seperti KTT ASEAN dan pertemuan informal antara presiden Indonesia dan presiden Amerika Serikat. Dalam pelbagai kunjungannya ke luar negeri, Megawati juga terus meyakinkan publik bahwa situasi keamanan di Indonesia telah kondusif.

Pada 18 Oktober 2002, Presiden mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yakni Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Perppu No. 1 Tahun 2002 kemudian menjadi UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Polisi kemudian berhasil mengungkap dan menangkap pelaku di dua peristiwa pemboman tersebut.



Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan panen raya di desa Jetak, Sragen, pada 6 Maret 2004. (Sumber: ANTARA).

MENATA PARAS EKONOMI NASIONAL: BPPN, IMF, UKM, DAN SWASEMBADA

Pada 5 September 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerja Sama dengan IMF. Dengan keluarnya Inpres tersebut, Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF). Kerja sama berupa kredit sebesar US\$9 miliar berakhir pada November 2003.

Konsekuensinya penangguhan utang Indonesia dicabut sehingga pada 2004 Indonesia harus membayar utang beserta bunga sebesar 27 triliun rupiah. Tahun tersebut menjadi tahun penuh beban. Defisit APBN mencapai 24,9 triliun rupiah.

Salah satu siasat keluar dari belitan defisit itu Indonesia menawarkan gagasan perdagangan baru antarnegara, terutama negara berkembang, yakni penggalakkan perdagangan imbal-beli atau imbal-dagang dengan, antara lain, Mesir, Libya, Thailand, dan Vietnam. Tak dinyana, siasat imbal-dagang ini mendapat reaksi negatif dari Bank Dunia karena dianggap merugikan persaingan dagang internasional. Namun kritik itu diabaikan. Hasil perdagangan model imbal-beli itu terlihat ketika pada periode Januari–Oktober 2003, sebagaimana data yang dicatat Kamar Dagang dan Industri (Kadin), tingkat pertumbuhan ekspor mencapai

"Saya telah memberikan instruksi kepada para menteri untuk melakukan program pemulihan ekonomi yang mencakup program stabilitasi ekonomi makro, restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan serta program peningkatan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja"

enam persen dengan volume ekspor senilai 50,7 miliar dollar US, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2001 yang hanya 1,21 persen. Angka itu tentu saja di luar harapan pemerintah yang hanya mematok target pertumbuhan ekspor pada angka 5 persen.

Sepanjang tahun 2003 juga terjadi kenaikan volume ekspor produk-produk pertanian, termasuk perikanan dan kelautan. Ekspor produk dan hasil pertanian berdasarkan data dari Departemen Pertanian mengalami kenaikan sebesar sekira 225 persen. Pada tahun 2002 volume ekspor sektor pertanian tercatat 380 juta dollar AS, sedang pada tahun 2003 melonjak menjadi 1,35 miliar dollar AS. Kenaikan volume ekspor juga dialami bidang perikanan dan kelautan. Pada tahun 2003 volume ekspor bidang kelautan dan perikanan diperkirakan mencapai 2 miliar dollar AS. Naiknya volume ekspor juga ditunjang oleh kebijakan mengikutsertakan eksportir dan produsen pada pameran-pameran perdagangan berskala internasional di pelbagai



Presiden Megawati Soekarnoputri dalam salah satu kegiatan kerja melakukan sidak kebeberapa pasar umum diberbagai daerah (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Megawati Soekarnoputri mengamati sejumlah kerajinan tangan yang terbuat dari kayu Lantung di stan Provinsi Bengkulu usai membuka pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) di Medan, Sumut, Rabu (25/9) (Sumber: ANTARA).

negara. Dengan cara itu ada usaha meningkatkan kualitas produk ekspor agar bisa diserap pasar internasional.

Dalam bidang perbankan, Pemerintah membuat keputusan yang mengejutkan ketika menutup Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lewat Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004. Lembaga yang didirikan pada 1998 sebagai suatu cara menyelamatkan dunia perbankan Indonesia saat krisis menerpa Indonesia mewariskan aset sekira Rp 250 triliun. Semasa bekerjanya, tugas BPPN adalah merawat sejumlah bank nasional yang kolaps karena terbebani kredit. Wewenangnya sangat besar, seperti mengambil alih kredit bank yang seret, merestrukturisasi utang, menagih utang bantuan likuiditas Bank Indonesia, hingga menjual aset-aset yang disetor para mantan pemilik bank. Penutupan BPPN merupakan usaha agar penyimpangan tak meluas.

Perhatian pemerintah lebih tertuju pada penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ketika krisis menerjang mulai tahun 1997 tampil sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di saat investasi dan ekspor nonmigas berada pada titik yang rendah. Pada saat angka pengangguran meningkat tajam, dan banyak tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, UKM menjadi "katup penyelamat" bagi penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja.

Berangkat dari fakta itulah dengan wewenangnya sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri menghimbau kalangan perbankan memudahkan kredit kepada UKM, seperti

"Sebaiknya kredit untuk para petani dan nelayan dipermudah. Janganlah mereka diwajibkan menyediakan agunan atau jaminan saat mengajukan kredit ke bank. Bank harus memberikan kemudahan kepada petani dan nelayan yang membutuhkan kredit."

pemberian kredit tanpa agunan. Pemerintah juga membuat Komite Penanggulangan Kemiskinan. Melalui bekerjasama dengan Bank Indonesia tersedia Rp 34,2 triliun, yang dibagi ke sekitar dua juta nasabah/rekening. Sementara lewat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disalurkan kredit Rp 1,71 triliun untuk membiayai sekitar 600 ribu usaha mikro.

Pemberdayaan ekonomi mikro dan pengentasan kemiskinan ini mampu membuka kesempatan kerja sekira 400 ribu kepala keluarga. Kebijakan ini juga telah membuka peluang berusaha lebih dari 17 ribu unit usaha, utamanya di sektor pertanian, perdagangan dan jasa.

Salah satu prestasi membanggakan dalam soal kesejahteraan umum adalah di tahun 2004, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Indonesia bisa berswasembada beras setelah sekian lama mengimpor beras untuk mencukupi konsumsi nasional sekira 30 juta ton setahun. Bulan Januari Indonesia menutup rapat pintu bagi impor beras. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan membuat



Penerima medali emas Fisika Internasional, Septianus George Saa (kiri) siswa SMU Negeri 3 Buper Jayapura didampingi kedua orang tuanya (Sumber: ANTARA).



Presiden Megawati Soekarnoputri tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah dasar di Papua dalam salah satu kunjungan kerja ke Papua (Sumber: Back Tohir/Setneg).

perkiraan produksi padi surplus 53 juta ton. Salah satu kunci swasembada 2014 adalah peningkatan luas panen. Pada 2004 luas panen mencapai 11,97 juta hektar atau naik sekitar 4,2 persen. Bandingkan dengan tahun 2003 yang hanya 11,49 juta hektar.

POLITIK PEREMPUAN DAN KONSENTRASI PENGUATAN PENDIDIKAN

Dalam buku yang dirilis pada 1993, *Pokok-Pokok Pikiran Megawati: Bendera Sudah Saya Kibarkan*, Megawati memaparkan tujuh pokok pemikirannya. Salah satunya mengenai pendidikan. Ia menulis,

“Pembangunan Indonesia jangan hanya bersifat fisik, tetapi juga mental spiritual dan akhlak, artinya pembangunan dua dimensi. Pembangunan ekonomi juga disertai pembangunan politik. Pembangunan harus ditujukan kepada rakyat, di mana mereka tidak hanya menjadi objek, melainkan turut menjadi subjek. Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan.”

Ketika menjabat sebagai presiden, pemikirannya tentang pendidikan sebagai elemen dasar pembangunan berkelanjutan direalisasikan. Di tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan. Salah satu muatan UU itu yang disambut dengan gempita oleh pelaku di dunia pendidikan adalah kewajiban negara menyediakan 20% dari APBN dan APBD untuk pembangunan dunia pendidikan.

Dengan anggaran sebesar itu—pada tahun 2004 jumlahnya sebesar Rp14,39 triliun atau 21,9% dari APBN, belum termasuk APBD—sektor pendidikan menjadi bagian yang paling banyak menerima porsi belanja negara. Tujuan regulasi ini adalah untuk memperluas daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan, serta menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun.

Dalam UU tentang otonomi khusus Aceh dan Papua, persentase dana pendidikan dalam dana otonomi khusus juga diatur. Untuk Aceh, 30 % dana otonomi khusus dialokasikan untuk pendidikan. Alokasi tersebut juga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik. Di masyarakat, profesi guru tidak menjadi favorit karena dicitrakan tidak sejahtera. Jumlah pendidik juga ditingkatkan sehingga proporsi guru dan murid ideal. Kemudian, untuk meningkatkan profesionalitas, kualifikasi guru dinaikkan. Di tahun 2004, 50 % guru sekolah dasar berpendidikan minimal D-2. Kualifikasi ini terus naik di tahun-tahun selanjutnya. Dalam pidato di Hari Guru, 22 Desember 2003, Presiden Megawati mengatakan, “Harus dihentikan praktik pengadaan guru dan menyerahkan pendidikan dan pengajaran anak-anak kita di jenjang

"Kita sebagai kaum perempuan harus punya kemandirian. Di konstitusi, kita punya hak yang sama"



Presiden Megawati menerima perwakilan tiga pelajar pada kegiatan gerakan pelajar anti narkoba di Istana Negara, 2003 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

pendidikan dasar kepada tenaga pengajar yang dilatih dari tamatan SMU."

Dengan demikian, Presiden Megawati Soekarnoputri tak hanya menyediakan medan bagi lahirnya anak-anak jenius Indonesia di bidang fisika, matematika, dan astronomi dalam kejuaraan olimpiade sains internasional, tapi menyemarakkan dunia pendidikan di semua jenjang, di semua tempat. Oleh karena itu ketika pelajar SMUN 3 Jayapura, Septinus George Saa, pada April 2013 memenangi lomba fisika bernama First Step to Nobel Prize in Physics di Polandia, Indonesia kembali menyalakan optimisme: krisis ekonomi, sosial, dan politik perlahan bisa diurai dan disingkirkan dari jalan reformasi.

Dalam hal pembelaan hak (politik) perempuan, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan dua kebijakan progresif. Yang pertama adalah terbitnya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UU KDRT ini berpretensi melindungi perempuan terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Aktivis pemberdayaan perempuan Nursyahbani Katjasungkana menyambut gembira hadirnya UU KDRT karena di tengah populasi penduduk Islam yang besar bisa lahir undang-undang yang progresif. UU KDRT negara lain, India misalnya, yang lahir dua tahun kemudian, pada tahun 2006, tidak memasukkan *marital rape* sebagai KDRT, sedangkan kita memasukkannya.

"Perempuan punya hak yang sama dengan pria, termasuk dalam dunia politik. Karena itu, perempuan harus berjuang dan berani melawan keadaannya"

Yang kedua adalah ketersediaan kuota perempuan minimal 30 % dalam UU Pemilu dan Partai Politik yang baru. *Affirmative action* itu memosisikan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang luas dalam politik dan dijamin oleh konstitusi. Megawati merupakan contoh sukses emansipasi perempuan dalam sejarah modern Indonesia.

"Kita juga kagum, Megawati Soekarnoputri adalah presiden pertama di Indonesia, sehingga perempuan Indonesia sudah pernah terwakili menjadi presiden" – Melani Leimena Suharli, Wakil Ketua MPR RI

"Sebagai bahan ajar bagi perempuan Indonesia: kelebihan Bu Mega, yakni teguh pendirian dan sederhana dalam kesehariannya" – Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI (2004–2009)

Atas ke bawah: Presiden Megawati Soekarnoputri berpidato pada saat menerima gelar Doktor Honoris Causa di bidang Hukum dari Universitas Waseda, Tokyo, September 2001. Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Taufik Kiemas dan putrinya Puan Maharani menunaikan ibadah haji di Mekkah. Presiden Megawati Soekarnoputri menaiki helikopter puma TNI dalam kunjungan kedaerah di Indonesia (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Megawati Soekarnoputri seperti mengkonkretkan ajaran dari Sukarno yang pernah mengatakan, "Soal perempuan bukanlah soal buat perempuan saja, tetapi soal masyarakat, soal perempuan dan laki-laki. Dan sungguh soal masyarakat dan negara yang amat penting."

SETELAH AMANDEMEN KONSTITUSI KEEMPAT: TATA NEGARA BARU

Setelah Amandemen Keempat UUD 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk menerbitkan sejumlah produk hukum yang selaras dengan perubahan UUD. Bersama dengan DPR, pemerintah kemudian merevisi dan menerbitkan UU baru, seperti revisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membuat RUU Mahkamah Konstitusi, menerbitkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang partai politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Alhasil, terjadi perubahan tatanan politik. Lahirlah sistem kepartaian yang baru, sistem pemilu baru, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung, reformasi birokrasi di



Atas ke bawah: Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Gubernur DKI Sutiyoso meninjau korban banjir di Jakarta (Sumber: Back Tohir/Setneg). Presiden Megawati Soekarnoputri bersama dengan suami Taufik Kiemas mengikuti perlombaan makan krupuk dalam rangka peringatan HUT RI 17 Agustus 2003 di Istana Negara (Sumber: Back Tohir/Setneg). Wakil Presiden Megawati bersama Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. tengah menyaksikan defile kendaraan tempur pada peringatan HUT TNI 5 Oktober 2000 (Sumber: Back Tohir/Setneg).





Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, di kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat, tanggal 12 Mei 2004. (Sumber: ANTARA).



Calon Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi suaminya Taufik Kiemas mencoblos di TPS 046, Kebagusan, Jakarta Selatan, Senin tanggal 20 September 2004. (Sumber: ANTARA).

pusat dan daerah, penataan ulang kelembagaan dan struktur organisasi pemerintah, dan sistem pengawasan legislatif yang disebut *recalling*. *Recalling* atau Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Partai Politik, berupa pemberhentian anggota DPRD yang diketahui berpindah partai atau tidak lagi menjadi anggota partai yang ia wakili di DPRD.

PAW juga diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Alasan dan latar belakangnya diperluas. Anggota legislatif dapat diberhentikan bila melanggar kode etik legislatif—seperti tidak menghadiri rapat tiga bulan berturut-turut—dan bila diusulkan partainya karena melanggar AD/ART partai. Pendeknya, PAW berpretensi menjadi mekanisme kontrol kerja anggota legislatif. PAW pertama terjadi di Aceh. Dua anggota DPRD, masing-masing dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Persatuan Pembangunan, harus menjalani PAW atas rekomendasi pimpinan partai keduanya di Aceh karena berpindah partai.

Bersamaan dengan itu juga dibentuk lembaga-lembaga baru yang mengundang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut konstitusi, pemilu harus diselenggarakan pada 2004. Sebagai penyelenggara pemilu, dibentuk lembaga independen dan mandiri bernama Komisi Pemilihan Umum

(KPU). Sementara presiden menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu. Oleh karena amandemen keempat UUD 1945, terjadi perubahan dalam pemilihan umum. Namun, agar bisa dioperasionalkan, amandemen tersebut perlu dijabarkan dalam produk hukum berupa UU. Pembuatan UU inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi DPR.

Meskipun demikian hingga pertengahan 2002 pelbagai UU yang melandasi penyelenggaraan Pemilu 2004 belum tuntas. Pekerjaan legislasi tersebut meliputi tiga UU, yakni UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu KPU menyatakan butuh waktu dua tahun untuk mempersiapkan pemilu. Dengan demikian, paling lambat, semua UU yang diperlukan harus sudah diketuk palu pada akhir 2002.

Untuk mencegah tertundanya pelaksanaan pemilu, pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri mengusulkan pembentukan semacam perpanjangan tangan KPU di daerah-daerah. Lembaga ini dinamai Perwakilan Sekretariat KPU, yang didirikan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, dengan tugas mempersiapkan administrasi pelaksanaan pemilu sembari menunggu penyelesaian pembahasan empat UU.

Untuk menjaga netralitas, setiap partai yang hendak mengikuti pemilu harus lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di Departemen Kehakiman dan HAM dan

Penjual kalender menunjukkan kalender bergambar lambang partai peserta Pemilu 2004 di Jakarta Barat, Senin, 12 Januari 2004 (Sumber: ANTARA).



219

di KPU. Pertama-tama, partai harus memiliki syarat sesuai yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, yakni melampirkan akta notaris pendirian partai, kepengurusan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, serta memiliki nama dan lambang atau tanda gambar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi syarat tersebut, partai mendaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM untuk mendapatkan badan hukum. Verifikasi administrasi dan faktual pertama dilakukan oleh departemen tersebut untuk memastikan syarat-syarat UU memang telah terpenuhi. Untuk Pemilu 2004, dari 100 partai yang mendaftar, hanya separuhnya yang berhasil disahkan sebagai badan hukum. Partai yang sudah disahkan badan hukumnya mendaftarkan ke KPU untuk mendapatkan penetapan sebagai peserta pemilu. Untuk mendapat status tersebut, syaratnya menurut UU No. 12 Tahun 2003 adalah "memiliki kepengurusan berjenjang, memiliki kepegurusan di 2/3 provinsi dan di masing-masing provinsi memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota, memiliki kantor tetap di masing-masing kepengurusan, memiliki anggota minimal 1.000 orang atau satu persen dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota".

Syarat satu persen tersebut merupakan cara agar partai melibatkan keanggotaan aktif masyarakat. Dengan jumlah memadai, partai akan menjadi wahana belajar penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan mengelola

partai bisa dijadikan modal untuk menyelenggarakan negara. Partai di sini diposisikan sebagai sarana pendidikan politik untuk masyarakat. Sebagaimana Presiden Megawati Soekarnoputri katakan, masa depan Indonesia banyak dipengaruhi kualitas partai politik dan dewan perwakilan.

Menurut Presiden Megawati, hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya merupakan landasan demokrasi. Ia selalu membayangkan demokrasi Indonesia adalah medan peperangan ideologis, bukan sekadar ruang kosong yang bekerja secara metafisis dan mekanis. Dalam arena tersebut, rakyat menjadi bagian pertempuran sekaligus penilai. Sebelumnya, satu-satunya pejabat pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat adalah kepala desa lewat pemilihan kepala desa (pilkades). Dengan cara demikian, rakyat desa telah terbiasa memilih pemimpinnya berdasarkan rekam jejak pengalaman. Ini berbeda dengan pejabat politik di pemerintahan. Mereka direkrut dengan mekanisme vertikal, sehingga indikator pengalaman tidak selalu masuk dalam hitungan.

"Megawati Soekarnoputri adalah perempuan presiden pertama di negara Islam terbesar di dunia (220 juta jiwa). Juga perempuan pertama di dunia yang menegakkan demokrasi dengan sistem pemilihan langsung presiden" – Taufiq Kiemas, Ketua MPR RI



Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pada HUT Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2004 (Sumber: ANTARA).



Gedung Mahkamah Konstitusi senilai Rp 196 miliar berdiri megah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. MK didirikan berdasarkan UU Nomor 24 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (Sumber: ANTARA).

MENJAGA KONSTITUSI, MEMBERANTAS KORUPSI

Pada 23 Agustus 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani UU Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian termuat di Lembaran Negara (*Staatsblad*) No 98 Tahun 2003. Tiga hari kemudian sumpah hakim konstitusi yang diketuai Jimly Asshiddiqie diambil di Istana Negara. Alasan utama pembentukan MK, sebagaimana terbaca dan visi dan misinya, adalah tegaknya konstitusi untuk mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Hadirnya MK merupakan wujud dan sekaligus harapan tentang pembangunan konstitusionalitas dan sekaligus memberi akar kesadaran untuk berkonstitusi.

Sebagai penafsir tunggal konstitusi, MK adalah lembaga negara yang dibuat untuk menjaga UUD 1945 sebagai asas bersama dalam bernegara. MK-lah yang kemudian menjadi tempat pengaduan masyarakat jika hak-haknya yang dilindungi konstitusi dilanggar oleh beragam peraturan. Demokratisasi di depan hukum untuk semua warga yang bersandar pada konstitusi menjadi fenomena baru dalam ketatanegaraan Indonesia.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah memberikan pagar pengaman bagi konstitusi dasar negara, sedangkan pemberantasan korupsi adalah jalan bagi penyehatan keberlangsungan negara. Reformasi 1997–1998 mengamankan pembersihan praktik penyelenggaraan peme-

"Pelajaran paling baik dari Mega adalah kesetiiaannya terhadap cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merah-putihnya tidak diragukan. Ini memang Mega, sama persis dengan ayahnya. Dan Megawati adalah seorang pemberani" – Franz Magnis-Suseno, Tokoh Lintas Agama

rintahan dan negara yang diselimuti perilaku korupsi. Pemberantasan korupsi adalah hakikat menjaga kestabilan perekonomian nasional. Tinggi rendahnya indeks korupsi memengaruhi respons pemodal terhadap pasar Indonesia. Tampak jelas bahwa situasi hukum berpengaruh pada situasi politik, dan situasi politik berpengaruh pada situasi ekonomi. Artinya, berbagai aspek tersebut berkait erat dan saling mempengaruhi.

Di tahun 2004, di bawah pemerintah Presiden Megawati, pemberantasan korupsi menjadi prioritas. Presiden Megawati Soekarnoputri memandang pemberantasan korupsi sebagai kebijakan yang krusial dan mendesak. Tentu saja upaya itu tak mudah. Butuh perjuangan yang keras dan intensif hingga lembaran negara Indonesia pada akhir tahun 2003 mencatatkan lahirnya undang-undang penting, yakni UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana



Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan ucapan selamat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007 (Sumber: ANTARA).

"Saya akan terus melakukan upaya-upaya untuk memberantas korupsi, menempatkan militer dalam perimbangan yang tepat, dan menyeimbangkan hubungan antara eksekutif dan legislatif"

Korupsi (KPTPK) yang kemudian disusul oleh pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebagai bentuk pengawasan yang ketat terhadap potensi korupsi, pemerintah mewajibkan semua penyelenggara negara melaporkan kekayaan pribadinya ke Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam proses penyidikan dan proses hukum pelaku korupsi, pemerintah juga menjalin kerja sama internasional. Penyelidikan KKN juga mencakup kasus-kasus yang terjadi di masa lalu dan berskala besar.

Tindakan pemberantasan KKN lainnya adalah dengan memberi sanksi administratif terhadap pejabat negara dan pejabat pemerintahan, termasuk BUMN, yang diduga terlibat ataupun bertanggung jawab atas tindakan KKN di lembaga yang dipimpinnya. Sanksi itu berupa pembebasan tugas sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi berupa pembebasan tugas dan pemecatan juga berlaku bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, apabila mereka diketahui melakukan penyimpangan dalam

memproses kasus korupsi. Bila dugaan tersebut terbukti, aparat penegak hukum dapat diadili dan dijatuhi hukuman.

Pembentukan KPK dan pemberantasan semesta perilaku korupsi hanya salah satu ikhtiar reformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri di samping reformasi hukum lain yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati sebagai berikut.

Pertama, merumuskan secara menyeluruh konsep reformasi hukum.

Kedua, mengkaji ketentuan perundangan yang berlaku, serta merevisi dan memperbaiki ketentuan perundangan yang sudah tidak relevan, misalnya merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan baru untuk menghindari kekosongan hukum; beberapa di antaranya adalah UU Pencucian Uang, UU Antiterorisme, dan UU Advokat.

Keempat, melakukan pembaruan dan menyiapkan revisi terhadap ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum, seperti UU Kepolisian, UU Pemasarakatan, UU Kehakiman, dan UU Kejaksaan.

Kelima, menyelesaikan masalah pelanggaran hukum di masa lalu serta mempercepat penyelesaian hukum di daerah bekas konflik dengan mengirimkan bantuan tenaga hakim dan jaksa.

Keenam, mendorong Mahkamah Agung menyelesaikan tunggakan perkara.

Ketujuh, menyiapkan ketentuan perundangan baru untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM, seperti RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kedelapan, membentuk badan-badan *ad hoc* untuk mendukung optimalisasi penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kesembilan, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas lembaga peradilan khusus seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan HAM.

Kesepuluh, membentuk dan mengembangkan Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Kesebelas, peningkatan kapasitas lembaga pengkajian masalah hukum di perguruan tinggi, lembaga nonpemerintah, maupun instansi pemerintahan.

Kedua belas, mengadili pelanggaran berat HAM di masa lalu, seperti kasus Tanjung Priok dan Timor Timur.

Ketiga belas, memproses peradilan pelanggaran HAM berat, seperti dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus Abepura.

Keempat belas, menyiapkan dan menerbitkan ketentuan perundangan tentang HAM sebagai petunjuk pelaksanaan ketentuan perundangan yang ada, misalnya PP tentang Perlindungan Saksi serta PP tentang Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.

Kelima belas, mengadili para pelaku terorisme secara terbuka berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Keenam belas, meratifikasi konvenan internasional yang berhubungan dengan HAM untuk melindungi dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM.

Ketujuh belas, meningkatkan kapasitas kelembagaan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengangkat Sekretaris Jenderal yang baru, serta mengisi formasi staf dan pejabat struktural yang diperlukan. Juga menyediakan dukungan pembiayaan bagi pengoperasian Komnas HAM.

Kedelapan belas, membentuk perwakilan Komnas HAM di Papua.

KERJASAMA ASEAN: DIPLOMASI UNTUK PERTAHANAN

Di antara enam program Kabinet Gotong Royong, politik luar negeri berada di urutan kelima. Isinya lebih kurang berbunyi “melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah”.

Dalam politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hubungan baik dengan ASEAN menjadi perhatian khusus. Dalam pidatonya saat membuka Sidang Tahunan MPR, 1 Agustus 2003, Presiden Megawati menyatakan, “Pemerintah tetap

Presiden Megawati Soekarnoputri bersama pemimpin negara ASEAN pada pembukaan KTT ASEAN ke-9, di Nusa Dua, Bali, Selasa tanggal 7 Oktober 2003 (Sumber: ANTARA).



melaksanakan prinsip bebas dan aktif dengan konsekuen, baik dalam hubungan dengan negara-negara tetangga maupun dengan negara lain. Hubungan baik dengan negara-negara ASEAN tetap merupakan tumpuan politik luar negeri kita.”

ASEAN adalah forum kerja sama dan dialog negara-negara Asia Tenggara. Dalam ASEAN, permasalahan yang dialami negara atau komunitas ASEAN dibahas dengan cara dialog; juga dibahas pelbagai kemungkinan kerjasama antara negara-negara tersebut. Dalam forum ini para kepala negara bertukar pikiran dan menyampaikan permasalahan yang tengah dihadapi negaranya. Dari sana, juga bisa dihimpun dukungan dari negara-negara lain untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.

Contoh peran ASEAN dalam membantu penanganan masalah negara anggotanya adalah ketika Singapura didera wabah SARS. Para pemimpin ASEAN bertemu di Bangkok pada 29 April 2003 untuk membahas hal tersebut. Hasil pertemuan itu adalah penetapan serangkaian kebijakan untuk menghindarkan ASEAN dari serangan SARS. Dua bulan kemudian World Health Organization (WHO) menyatakan kawasan Asia Tenggara bebas dari SARS.

Pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Bangkok, Juni 2003, Indonesia mengutarakan ide mengenai komunitas keamanan ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayudha, sebagai ketua-ketua pertemuan ASEAN, mengatakan Indonesia mendorong ASEAN bertransformasi

dari kerumunan negara ke komunitas negara, lalu menjadi kawasan yang terintegrasi.

Saat itu Indonesia tengah menghadapi persoalan separatisme yang dilakukan GAM di Aceh. Ada kemungkinan GAM mendapat pasokan senjata dari negara lain di Asia Tenggara. Pertemuan tersebut menghasilkan dukungan kuat untuk integritas Indonesia, juga komitmen untuk menghalangi pasokan senjata untuk GAM dari negara-negara Asia Tenggara. Gabungan antara konsep integrasi kawasan dan kerja sama keamanan direalisasikan dalam bentuk ASEAN Security Community (ASC). Indonesia menjadi Ketua ASC periode 2003–2004. Di saat yang sama, Indonesia juga menjadi Ketua Panitia Tetap pertemuan-pertemuan ASEAN hingga 2006.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Pemerintah Thailand mengadakan operasi besar-besaran terhadap perdagangan senjata ilegal untuk memutus suplai kepada GAM. Juga disepakati bahwa bila terdapat pelarian GAM di salah satu negara ASEAN, pemerintah setempat akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Di samping berupaya memperkuat basis pengamanan bersama negara-negara ASEAN, Indonesia juga berusaha mengembalikan kepercayaan internasional mengenai situasi keamanan di Indonesia setelah Bom Bali I Oktober 2002. Upaya ini penting karena menyangkut perekonomian



Presiden Megawati Soekarnoputri dan para Menlu ASEAN pada pembukaan pertemuan Menteri ASEAN di Istana Negara, Jakarta, Rabu tanggal 30 Juni 2004 (Sumber: ANTARA).

Indonesia yang tengah menuju titik stabil. Untuk itu pemerintah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bali pada akhir 2003. Konsep ASC disepakati dalam pertemuan ini. Hasil KTT ASEAN 2003 disebut "Bali Concord II". ASC adalah komunitas keamanan yang merupakan bagian dari kerjasama politik dan keamanan antarnegara ASEAN. Komunitas ini bertujuan menciptakan stabilitas keamanan dan tertib kawasan, yang tetap berpegang pada norma perilaku hubungan antarnegara dan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.

Oleh karena itu, pembicaraan masalah bilateral yang memungkinkan komunitas terpecah dalam blok-blok dihindari, misalnya dalam persoalan Indonesia-Singapura, seperti tidak terbukanya Singapura terhadap neraca perdagangan antardua negara serta belum tercapainya kesepakatan mengenai ekstradisi, batas wilayah, dan penyulundupan pasir laut. Masalah ini dibatasi sebagai masalah bilateral.



Kanan (atas dan bawah) Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan Afro-Asian Sub Regional Organizations Conference (AASROC), di Bandung, Indonesia, 28-30 Juli 2003 (Sumber: Back Tohir/Setneg)

"Kita harus membangun kerjasama multi dimensional meliputi bidang politik, ekonomi, pembangunan dan sosial budaya yang didasarkan pada keuntungan bersama serta saling menghormati. Selain itu juga menjadikan komitmen bersama untuk membangun perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan rakyat pada era millenium baru ini"

IBU BANGSA UNTUK PERSEMAIAN GENERASI BARU

Kepimpinan Presiden Megawati tetap berperan dalam berbagai bentuk. Ia tetap berada di jantung perpolitikan nasional. Selain menjaga spirit partai, menyaksikan bagaimana konstitusi makin kokoh dan pemberantasan korupsi makin masif dilakukan, di sana ia menjadi rahim bagi lahirnya pemimpin baru dari proses perkaderan yang panjang.

Megawati Soekarnoputri, yang tumbuh dari tempaan penderitaan yang datang terus-menerus menyelesaikan salah satu masalah pelik Republik Indonesia, yakni bagaimana menempatkan konstitusi sebagai cara hidup baru dalam penghayatan kewarganegaraan. Ia hadir sebagai fenomena penting yang menentang politik pragmatis. Politik pragmatis yang dianut partai politik yang pada umumnya didasari pada kepentingan dan bukan prinsip atau ideologi. Prinsip konstitusi adalah harga yang tak pernah bisa ditawar dari Megawati Soekarnoputri. Jika konstitusi kuat dan dijaga oleh lembaga berwibawa niscaya masalah-masalah kenegaraan bisa diselesaikan. Meninggikan posisi konstitusi di atas seluruh kepentingan adalah sikap seorang negarawan yang ditunjukkan Megawati Soekarnoputri.

Megawati Soekarnoputri sadar bahwa generasi baru mestilah dilahirkan dalam praktik perkaderan, sebagaimana ia tahu bahwa pemimpin itu dibuat. Lahirnya pemimpin-pemimpin muda di daerah sebagai akibat eksekusi

"Orang mungkin bertanya-tanya, 'apa itu Mega, kita kan tahu siapa Mega.' Saya kok berpandangan lain, dan terbukti, Mega memang punya bakat negarawan" – Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001)

berlangsungnya Otonomi Daerah. Kehadiran tokoh-tokoh muda daerah yang menjadi fenomena menarik di lempengan lini masa dunia politik Indonesia paling kontemporer adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa mesin perkaderan bagi lahirnya generasi baru bekerja

Sebagai seorang ibu bagi kelahiran generasi baru dalam dunia kepemimpinan politik, Megawati kerap disalahpahami. Sikap diamnya banyak disalahartikan sebagai ketidakmampuan, padahal diamnya Megawati adalah seperti halnya bumi pertiwi yang menjaga keharmonisan apa pun yang berada di atasnya. Megawati adalah pemimpin yang lebih banyak mendengarkan, menyerap, dan menerima masukan-masukan yang mementingkan kesejahteraan rakyat. Dengan naluri seorang ibu bagi anak bangsanya, mengutip pendapat Guru Besar Komunikasi Professor Alo Liliweri, Megawati



Searah jarum jam: Presiden Megawati Soekarnoputri bersama kepala negara anggota APEC pada KTT APEC di Manila, 2013 (Sumber: Back Tohir/Setneg). Presiden Cina Jiang Zemin secara tidak terduga mengajak Presiden Megawati Soekarnoputri berdansa dengan iringan musik orkestra dalam acara jamuan makan malam kenegaraan di Balai Rakyat Agung, Beijing (Sumber: Pusat Informasi Kompas). Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto menerima kunjungan kehormatan sahabat lamanya Megawati Soekarnoputri (Sumber: Pusat Informasi Kompas). Presiden Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Libia Kolonel Muammar Khaddafi, 26 September 2003 (Sumber: Back Tohir/Setneg). Kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Vatikan, bertemu Paus Yohanes Paulus II 10 Juni 2002 (Sumber: Back Tohir/Setneg). Presiden Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Kaisar Jepang Akihito dan Permaisuri Michiko selama kunjungan ke Jepang, 2003 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Presiden Megawati Soekarnoputri berjabat tangan dengan masyarakat umum pada setiap kunjungannya ke beberapa daerah di Indonesia (Sumber: Back Tohir/Setneg).



"Persoalannya sekarang, kenapa yang muda-muda itu tidak maju? Ayo sebut nama yang muda-muda itu, siapa pun itu, terserah. Tapi, ayo calonkan diri secara resmi."

"Pencapaiannya sangat pantas menjadi kebanggaan perempuan Indonesia, karena beliau telah mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi presiden di negeri ini" – Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta (2012–2018)

berkomunikasi dengan konteks. Konteks adalah situasi dan kondisi, baik fisik, sosiologis/antropologis, maupun politik yang sedang dialami oleh masyarakat sekarang ini. Seorang komunikator akan gagal kalau dia tidak memperhatikan konteks. Sebagai pemimpin yang memahami konteks, Megawati tak banyak menggunakan bahasa yang rumit dan simbol-simbol rumit yang menimbulkan interpretasi yang disalahartikan. Megawati Soekarnoputri tahu dari mana ia berasal dan dari lingkungan seperti apa ia tumbuh. *"Ibu Mega speaks with a very soft voice. But as one of the first woman presidents in the world and a former leader a major Asian country, her voice carries a special power with far-reaching*

resonance," demikian H.E. Mrs Zhang Qiyue, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia.

Megawati Soekarnoputri adalah ibunda bagi orang-orang biasa, sederhana, wong cilik, yang menapaki jalan politik panjang dan penuh penderitaan. Ia menjadi perempuan pemimpin yang mengayomi rakyat dalam kapasitas sebagai seorang "ibu bangsa"—mengutip sebutan *The South China Morning Post* pada suatu waktu.

"Kepada anak-anakku di seluruh Tanah Air, saya minta untuk bekerjalah kembali dengan tulus, janganlah melakukan hal-hal yang bersifat emosional, karena di dalam mimbar ini kamu melihat ibumu berdiri."





6

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Mengembalikan Indonesia ke Orbit Dunia



Presiden SBY saat dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ketahanan Nasional dalam sidang Senat Terbuka Akademik Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia, di Kampus Unhan, Kompleks Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Jawa Barat, Kamis 13 Juni 2014 sore. (Sumber: Abror Rizki)

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, MA atau yang dikenal dengan inisial SBY, adalah Presiden Republik Indonesia keenam. SBY merupakan presiden yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat. Setelah sukses mengawal transisi politik dan ekonomi 2004-2009, SBY terpilih lagi dalam satu putaran pada Pemilu 2009 dengan perolehan suara mencapai 60,80% atau ekuivalen dengan 73,8 juta pemilih. Prestasi ini menempatkan SBY sebagai "*The Most Voted Leader in the World*" dalam sebuah pemilu yang demokratis. Ia bahkan mengalahkan Barack Obama, George Bush, Lula da Silva, Ronald Reagan, Vladimir Putin dan lain-lain. Tidak hanya menjadi pemimpin paling *legitimate* di dunia—dengan dukungan suara terbanyak—mantan Kasospol ABRI itu juga membuktikan bahwa demokrasi di negara berkembang yang



"The Most Voted Leaders" - Veja Magazine,
Edisi November 2012

dianggap penuh kegaduhan dan instabilitas, ternyata dapat menghasilkan pemerintahan efektif dan kesejahteraan rakyat. Di tangan SBY, Indonesia 2004-2014 mencatat kemajuan di sejumlah bidang, mulai dari pertahanan keamanan, luar negeri dan ekonomi.

Kemajuan nyata selama era SBY dapat dilihat dari cadangan devisa kita yang mencapai rekor tertinggi sepanjang republik berdiri pada Agustus 2011, yaitu sebesar US \$ 124,5 miliar. Ini tentu pencapaian yang luar biasa bila dibandingkan dengan cadangan devisa tahun 2004 yang baru sekitar US \$ 36,3 miliar. Lalu dalam rasio utang, terjadi penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang pemerintah yang pernah mencapai 88% PDB pada 2000, dapat diturunkan menjadi 32% PDB pada 2008. Konsistensi



Presiden SBY berdialog dengan buruh PT Maspion, di Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 1 Mei 2013. (Sumber: presidenri.go.id).



Gubernur Akmil, Mayor Jenderal Sarwo Edhie Wibowo sedang menyematkan bintang penghargaan kepada Susilo Bambang Yudhoyono di Akmil Magelang, 1973. (Sumber: Dokumen Pribadi).

Presiden SBY dalam pengurangan beban pengeluaran pemerintah untuk membayar utang juga terlihat jelas. Pada 2006 SBY berhasil mengantarkan bangsa ini melunasi seluruh utang ke *International Monetary Fund* (IMF) sebesar Rp60,7 triliun. Setahun berikutnya jenderal bintang empat itu mengambil keputusan penting kala membubarkan *Consultative Group of Indonesia* (CGI) yang sebelumnya mendikte arah pembangunan bangsa. Begitu juga, melalui upaya Presiden SBY yang sungguh-sungguh, akhirnya sanksi dan embargo militer yang telah berlangsung selama 12 tahun akhirnya dicabut.

Sejalan dengan data-data di atas, kita patut bersyukur karena ekonomi kita mampu bertahan di tengah badai krisis dunia 2008. Hampir semua kawasan di dunia pada saat itu mengalami pertumbuhan minus, termasuk AS dan Eropa. Alhamdulillah Indonesia masih berhasil mempertahankan pertumbuhan hingga 4,3% pada 2009. Daya tahan ekonomi kita yang kuat ini turut mengangkat peringkat investasi kita ke level yang lebih baik. Tercatat JCRA, Fitch, Moody's, Standard & Poor's dan dan Rating and Investment Information Inc (R&I) menaikkan level Indonesia hingga mencapai label "*Investment Grade*", setelah sekian lama kita tak meraihnya.

Impact-nya pada 2012 Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. PDB Indonesia 2013 telah melampaui US \$ 870 miliar, jauh di atas angka PDB di awal pemerintahan SBY pada tahun 2004 yang sebesar US \$ 257

miliar. Sampai akhirnya 2014, Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 10 negara dengan PDB terbesar di dunia, berdasarkan kemampuan daya belinya (*Purchasing Power Parity*).

KECERDASAN DAN PENTINGNYA LATIHAN

Presiden SBY lahir pada 9 September 1949 di Desa Tremas, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Beliau merupakan putra tunggal pasangan R. Soekotjo dan Siti Habibah. Ayahnya seorang prajurit yang pensiun dengan pangkat terakhir Pembantu Letnan Satu. Nama Susilo Bambang Yudhoyono, menurut sang ayah, mengandung makna santun, kesatria, dan unggul dalam perang. Barangkali Soekotjo berharap kelak anaknya menjadi seorang yang bersifat sesuai arti nama itu. Sementara ibunda Presiden SBY, Siti Habibah, memiliki kaitan dengan pesantren di Tremas. Di kemudian hari, nilai-nilai pesantren (agama Islam) itu turut membentuk kepribadian SBY yang mengutamakan akhlak dan moralitas dalam setiap aktivitas, termasuk saat menjabat presiden.

Sejak kecil SBY tinggal bersama kakak ayahnya, Bude Watini, di Ploso, Pacitan. Dimata kerabatnya, SBY kecil hingga remaja adalah sosok yang suka mengalah, tidak sombong, dan bila ada masalah dengan temannya tidak mendendam. SBY muda juga diakui sebagai anak yang cerdas dan selalu menjadi juara di setiap jenjang sekolahnya. Pendidikan dasar



Susilo Bambang Yudhoyono semasa pendidikan di AKABRI sebagai Komandan Divisi Korps Taruna, 1973 (Sumber: Dokumen Pribadi).



Presiden Suharto memberikan penghargaan Adhi Makayasa kepada Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai lulusan terbaik AKABRI 1973 (Sumber: Dokumen Pribadi).



Letnan Satu Susilo Bambang Yudhoyono bersama istri di Bandung Utara, 1975. (Sumber: Dokumen Pribadi).



Susilo Bambang Yudhoyono saat bertugas sebagai Komandan Bataliyon 744 dalam Operasi Keamanan (Opskam) di Timor Timur 1986 (Sumber: Dokumen Pribadi).



Susilo Bambang Yudhoyono tengah memberikan perintah kepada jajaran pasukan bataliyon 744 di Timor Timur 1975 (Sumber: Dokumen Pribadi).

"Ketika berada dalam kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia mengalami kemajuan yang demikian pesat. Hal tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang begitu pesatnya selama 10 tahun kepemimpinan SBY dan apresiasi atas peran aktifnya sebagai co-chair High-Level Panel of Eminent Person on Post-2015 Development Network." -- Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair.

SBY diselesaikan di Sekolah Rakyat Gajah Mada—kini Sekolah Dasar Negeri Baleharjo I Pacitan. Suatu hari semasa belajar di SD, ia ikut berwisata ke Kampus Akademi Militer Nasional di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Di sana SBY kagum saat melihat kegagahan para taruna Lembah Tidar. Sejak itu ia bercita-cita menjadi seorang tentara. Ayahnya yang juga seorang tentara menambah dorongan dirinya mewujudkan cita-cita itu.

Setamat SMA di Pacitan, SBY remaja berangkat ke Malang untuk mendaftar ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Ajendam Kodam VIII / Brawijaya. Namun ia terlambat mendaftar dari jadwal yang ditetapkan panitia. Baru pada 1970, keinginannya untuk masuk AKABRI terwujud. Bakat lain sejak kecil yang menonjol di diri SBY adalah kegemarannya pada seni. Bahkan ia sempat mendirikan band Gaya Taruna bersama teman-temannya remajanya.

Kecerdasan SBY tak hanya terlihat di sekolah dasar hingga menengah. Di AKABRI pun ia muncul sebagai *the best*. Pada akhir pendidikan, SBY mendapat anugerah prestisius Adhi Makayasa, sebagai lulusan terbaik AKABRI 1973. Setelah lulus AKABRI, SBY menjalani berbagai tugas kemiliteran selama hampir tiga puluh tahun, baik di medan pertempuran, lembaga pendidikan dan pelatihan, satuan tempur dan teritorial, maupun tugas-tugas internasional, termasuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mulai bergabung dengan pasukan "baret hijau", Komando Cadangan Strategis TNI-AD (Kostrad), komandan peleton Kompi Senapan A, Batalyon Lintas Udara 330 / Tri Darma, sampai Brigade Infanteri Lintas Udara 27 / Kujang I yang termasuk brigade elite di TNI AD.

Pendidikan luar negeri juga dirasakan SBY yang saat itu berpangkat Letnan mengikuti tugas belajar pendidikan lintas udara (*airborne*) dan pendidikan pasukan (*ranger*) di pusat pendidikan Infanteri Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) di Fort Benning, Georgia, 1975. Sepulang dari tugas belajar di AS, Desember 1975, SBY menikah dengan Kristiani Herrawati, putri ketiga Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo. Uniknya, baru lima hari menikah tugas negara memanggil. SBY bertugas bersama Batalyon Lintas Udara 305 / Tengkorak dalam Operasi Seroja di Timor Timur. Sekitar 13 bulan SBY hidup dalam hutan untuk mematahkan perlawanan gerilya Fretilin. Pulang dari Timor Timur ia



Susilo Bambang Yudhoyono sebagai komandan upacara HUT RI tahun 1994 di Istana Merdeka, Jakarta (Sumber: Dokumen Pribadi).



Kolonel Inf. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Komandan Brigif Linud 17 Kostrad. (Sumber: Dokumen Pribadi).

ditarik kembali ke pangkalannya di Bandung. Tugas baru sudah menanti, SBY ditunjuk menjadi Komandan Kompi dalam latihan militer Indonesia-Malaysia dengan sandi Keris Kartika Malaysia Indonesia (Kekar Malindo). Pasca Kekar Malindo SBY dimutasi sebagai Komandan Kompi Senapan C Yonif Linud 330 / Tri Dharma. Semasa menjadi perwira menengah jabatan-jabatan yang pernah didudukinya antara lain sebagai Komandan Batalyon 744 di Timor-Timur, Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara (Brigif Linud) 17/Kujang I Kostrad, Komandan Komando Resort Militer (Korem) 073 Kodam IV/ Diponegoro.

Dalam kariernya yang lain SBY juga pernah menjabat sebagai guru militer (gumil), komandan penataran pelatih inti. Calon-calon pelatih inti didatangkan dari semua Kodam ataupun komando utama lainnya. SBY mengembangkan perangkat pendidikan dan latihan, *skill level*, melakukan uji tempur, hingga membuat konsep pendidikan. Dalam soal penerapan disiplin kepada calon pelatih inti, ia dikenal tak pernah kompromi. Seorang calon pelatih dinyatakan lulus hanya jika ia memenuhi kriteria kelulusan. SBY berprinsip bahwa di tangan para pelatih inilah kelak postur dan mental prajurit terbentuk. Ia tak ingin prajurit-prajurit gugur di medan laga hanya karena ditangani pelatih inti yang tidak profesional menjalankan tugasnya. Semboyan yang ia pegang, "*Lebih baik bermandi peluh dalam latihan, dari pada bermandi darah dalam pertempuran*". Maksudnya lebih baik berlatih sekeras-

kerasnya daripada menemui kegagalan kala di medan tugas. SBY dikenal keras dalam melatih. Bahkan hari Minggu pun tersedia menu latihan, mulai dari latihan insurgensi, latihan *raid*, penghadangan, penyergapan, hingga operasi khusus. Ia menggabungkan pengalaman di lapangan dengan ilmu yang diperoleh dari berbagai pendidikan di luar negeri.

Posisi SBY sebagai guru militer juga menonjol setelah lulus dengan predikat terbaik di Sekolah Staf dan Komando AD (Seskoad) dan sekaligus menjadi dosen favorit di sekolah candradimuka yang mendidik calon-calon pimpinan di lingkungan TNI-AD. Di sinilah, Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan dirinya sebagai seorang *the thinking officer*. Ia mengisi aktivitas sehari-harinya dengan bekerja, membaca, dan menulis berbagai konsep. Beberapa artikelnya juga dipublikasikan majalah Seskoad yaitu Karya Wira Jati. Pada kurun ini ada pemikiran SBY yang cukup mendapat perhatian dari para intelektual, tak hanya di lingkungan militer. Ketika Seskoad mengadakan Dies Natalis, SBY diminta membuat tulisan ilmiah dan menyampaikannya dalam sebuah kolokium besar. Judul karyanya adalah "*Profesionalisme ABRI, Masa Kini dan Masa Depan*". Tulisan tersebut menekankan pentingnya TNI yang profesional untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan regional dan global yang makin dinamis. Sebuah pemikiran yang dianggap "terlalu maju", karena pada era itu TNI atau ABRI masih lekat dengan peran gandanya melalui Dwifungsi.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang 29 September 2014
(Sumber: Abror Rizki).

Selama berkecimpung sebagai pendidik militer pula, SBY bersama Letkol Agus Wirahadikusuma sempat mendirikan kelompok studi *Center of Excellence* (Pusat Keunggulan), yang salah satunya menghasilkan karya buku berjudul *Tantangan Pembangunan*. Tak hanya itu, dalam upaya membangun tradisi intelektual di Seskoad, SBY secara rutin berdialog dengan para intelektual dalam dan luar negeri. Salah satunya ia mengundang pasangan futurolog terkenal, Alvin dan Heidi Toffler, yang saat itu membawakan tema "*Power Shift and the Military*". Dengan kemampuan intelektualnya tersebut akhirnya SBY dipercaya mengemban tugas Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab dan Menteri Pertahanan, sebelum kemudian diangkat sebagai Komandan Brigade Infanteri 17 Linud Kostrad. Dalam tradisi, jabatan komandan brigade ini adalah jabatan prestisius bagi perwira menengah, lebih khusus lagi perwira infantri lulusan Akademi Militer.

Kuatnya basis intelektual Presiden SBY sejak muda, utamanya saat bertugas di militer, terus terjaga hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia. Selama kurun waktu di atas, dapat dikatakan SBY terus memperluas latar belakang akademisnya. Diantaranya meraih gelar *Master of Arts in Management* dari Webster University Amerika Serikat (AS) dan Doktor Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Sementara itu Presiden SBY juga menerima gelar Doktor *Honoris Causa* dari berbagai Universitas dalam dan luar negeri, antara lain dari Thammasat University Thailand, Keio University Tokyo, Tsinghua University Beijing, Universiti Utara Malaysia Kuala Lumpur, Nanyang Technological University Singapura, Webster University Amerika Serikat, Universitas Andalas Padang, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan Ritsumeikan University Kyoto.



KSAD Jenderal TNI Subagyo HS berbincang dengan Kasospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono dan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, tanggal 16 Februari 1998 (Sumber: ANTARA).



Sebagai anggota BP MPR F-ABRI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Tosari Wijaya dan beberapa anggota MPR lainnya, tanggal 1 Oktober 1998 (Sumber: ANTARA).

"Saya berterima kasih kepada Presiden Yudhoyono yang telah mempromosikan demokrasi dan HAM, dan peningkatan keamanan dan perdamaian. Setelah terciptanya kesepakatan antarkedua negara, saya berharap akan ada perkembangan yang positif untuk keamanan kawasan dan kemakmuran kita semua." --
Presiden Amerika Serikat **Barack Obama**

Di tengah kepadatan tugas-tugasnya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden SBY tetap meluangkan waktu untuk memberikan kuliah di Lemhannas, Sesko TNI dan juga Universitas Pertahanan. Sementara itu, hingga saat ini Presiden SBY telah menulis ratusan tulisan baik dalam bentuk buku, monograf, artikel maupun materi ceramah yang disampaikan di berbagai forum baik nasional maupun internasional. Materi buku, artikel dan *speech*, antara lain ceramah di hadapan mahasiswa Kennedy School of Government Harvard University Amerika Serikat (2009) dengan judul *Toward Harmony Among Civilization*; Pidato Kunci dalam forum Shangri-La Dialogue, Singapura (2012) dengan judul *An Architecture for Durable Peace in the Asia Pacific*. Topik dan judul-judul pidato penting lainnya antara lain *Let Us Build A New Strategic Partnership Between Asia and Africa* di KTT Asia Afrika di Bandung (2005), *Reforming*

the United Nations di PBB New York (2005), *Islam Is About Revelation, Enlightenment, Liberation, and Empowerment* di Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud, Riyadh, Saudi Arabia (2006), *Perspective on the MDGs and the Way Forward to 2015* di Columbia University, New York (2010).

Sementara itu, di berbagai forum di dalam negeri, telah disampaikan berbagai kuliah umum, ceramah dan juga artikel yang antara lain berjudul: Strategi Menjadi Negara Maju, Mencari Format Sistem Keamanan Nasional dalam Era Demokrasi dan Globalisasi, Membangun Dunia yang Lebih Damai, dan Pancasila sebagai *Living dan Working Ideology*. Dalam kapasitasnya sebagai salah satu *World Leaders*, Presiden SBY aktif berperan dan berkontribusi bagi terjaganya perdamaian dan keamanan internasional, termasuk resolusi konflik, serta agenda-agenda global lainnya.

TOKOH KUNCI REFORMASI TNI

Menjelang era reformasi, pada bulan Agustus 1997, Susilo Bambang Yudhoyono diangkat menjadi Asisten Sosial Politik (Assospol) Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI. Tak lama setelah itu, saat Indonesia berada dalam krisis ekonomi dan politik, ia diangkat sebagai Kassospol. Sebagai Kassospol, SBY nyaris setiap hari berhadapan dengan media. Saat itulah inisial "SBY" dinisbatkan pers kepadanya dan kemudian menjadi akronim "politik nama" yang paling



Mayor Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Pangdam II Sriwijaya melaporkan situasi di Sumbagsel kepada Presiden Soeharto (Sumber: Setneg).



Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berbincang dengan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai Kasospol ABRI di UGM Yogyakarta, tanggal 16 Maret 1999 (Sumber: ANTARA).

legendaris dalam sejarah politik Indonesia. Berada di jabatan yang "panas" saat bangsa ini tengah mengalami perubahan besar tak membuat SBY mengalami tekanan. Justru ia-sebagaimana prinsip hidupnya - percaya bahwa dalam setiap krisis selalu tersimpan peluang. Maka ketika protes masyarakat menuntut dihapusnya Dwifungsi ABRI datang menggelombang, SBY meresponsnya dengan terbuka dan positif. Itu karena sejak lama ia dan sejumlah koleganya menginginkan perubahan posisi dan peranan TNI dalam politik.

Saat SBY sebagai Kassospol ABRI inilah sesungguhnya waktu yang paling krusial bagi masa depan politik militer Indonesia. SBY memiliki tugas mengawal transisi militer agar tidak kontra produktif dengan roda reformasi secara mendasar dalam TNI. SBY bahu-membahu merumuskan paradigma baru TNI. Makalah yang pernah ditulisnya pada November 1998, "*The Role of Military in Modern Society : ABRI in the Transitional Period in Indonesia*", menjadi salah satu acuan tertulis yang merumuskan secara cepat dan tepat kontribusi TNI di masa depan. Secara struktural, salah satu bentuk paradigma baru itu tampak dari dilikuidasinya posisi Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) dan bertransformasi menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster). Di samping itu nama ABRI dikembalikan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sementara Kepolisian RI dipisahkan dari tubuh ABRI karena karakter tugasnya memang berbeda.

Setelah reformasi, TNI sepenuhnya diarahkan menjadi militer profesional dengan tugas utama menjadi penjaga pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perubahan mendasar lain yang menjadi paradigma baru militer yang diputuskan di era transisi adalah ditetapkannya UU No 4 Tahun 1999 yang berisi pengurangan secara bertahap jumlah kursi anggota Fraksi ABRI di DPR hingga akhirnya dihapus sama sekali. Bukan hanya itu, peran sosial politik yang tercermin dalam konsepsi Dwifungsi ABRI juga secara bertahap dihapuskan, sebagaimana tertuang dalam buku "*ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa*". Buku yang judulnya dipilih SBY ini merupakan hasil sebuah kolokium reformasi ABRI pada September 1998. Salah satu butirnya adalah ABRI mesti menghadapi secara cermat dan strategis kondisi faktual munculnya aspirasi depolitisasi di mana peran politik ABRI dianggap menghambat proses demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM. Pendekatan ABRI yang berorientasi keamanan harus ditinggalkan dan diganti dengan cara berpikir analitik dan retrospektif. ABRI tak mesti selalu di depan, sebaliknya ia harus memberi jalan institusi-institusi sosial dan fungsional untuk mengambil peran.

Konsekuensinya adalah diperlukan perubahan konsep ABRI dari menduduki menjadi mempengaruhi. Penugasan di luar struktur ABRI dibatasi sedemikian rupa dengan cara mengurangi keterlibatan dalam politik praktis dan itu dibuktikan dengan dicabutnya materi sosial-politik TNI dari



Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kasospol ABRI tengah menyampaikan materi Reformasi TNI, dalam diskusi terbatas di kantor redaksi harian KOMPAS 15 Juni 1998 (Sumber: Puspen TNI).

"Pensiun dini dari TNI itu perasaan yang paling berat dalam hidup saya. Saya begitu cinta TNI. Saya hidup di militer. Istri saya waktu itu menangis. Batin saya berat sekali. Tapi itu sudah suratan nasib dan itu sudah saya terima".

kurikulum di seluruh jenjang pendidikan TNI. Pada Pemilu 7 Juni 1999, SBY memberi garansi ABRI yang telah berubah nama menjadi TNI pada 12 April 1999 menjaga netralitasnya dalam pemilu dengan terlebih dahulu memutuskan hubungan dengan Partai Golkar. Usaha SBY bersama jenderal-jenderal reformis lainnya bisa dikatakan sukses membawa militer keluar dari kegamangan peran di era yang sedang dan telah berubah. Langkah-langkah gradual dengan keputusan-keputusan responsif dan tepat yang diambil SBY dan koleganya sesama perwira tinggi TNI menorehkan sejarah baru, yaitu reformasi ABRI menuju ke arah demokrasi.

Jika kita mengenang masa-masa yang tidak mudah di awal krisis besar di tahun 1998 yang lalu, Indonesia berada dalam keadaan yang porak-poranda. Dunia politik, ekonomi, sosial dan keamanan terguncang. Api, amarah dan darah ada di mana-mana, di sudut-sudut negeri ini. Permusuhan dan kebencian membara. TNI dan Polri, yang waktu itu masih menjadi satu dalam organisasi ABRI, adalah salah satu elemen bangsa yang menjadi sasaran dan korban amarah, kebencian dan permusuhan dari banyak pihak. Adalah menjadi suratan

sejarah bahwa sebagai salah seorang jenderal senior yang secara fungsional harus terlibat aktif dan menangani krisis politik dan reformasi, dalam kapasitas sebagai Kepala Staf Sosial Politik ABRI dan juga Ketua Fraksi ABRI di MPR RI, SBY terpanggil untuk terus berpikir dan bekerja siang dan malam. SBY harus berdiri di depan dan terjun ke kancah masyarakat politik yang panas dan haus akan perubahan, bahkan revolusi. Di situlah bersama sejumlah perwira di Cilangkap, SBY menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk menyusun cetak biru dan agenda reformasi ABRI guna menjawab tantangan zaman dan sekaligus menjalankan amanah reformasi. Meskipun situasinya amat tidak mudah, karena sesepuh TNI yang hidup di era Dwi Fungsi ABRI menolak keras dan menegurnya karena melakukan reformasi internal TNI, namun SBY bersama perwira yang sama pandangannya sangat yakin reformasi internal TNI adalah langkah terbaik untuk menjawab tantangan ke depan.

Sementara di jajaran TNI sendiri sikap dan pandangannya terbelah, antara yang pro reformasi dan yang anti reformasi. Di sisi lain, kalangan aktifis dan reformis muda bahkan menekan TNI untuk melakukan perubahan secara drastis, besar-besaran dan secepat-cepatnya. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah, SBY bersama teman-temannya dengan restu dan kepercayaan Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto, terus bekerja dan bekerja. Pada akhirnya sejarah mencatat, kerja keras dalam melaksanakan reformasi TNI, hasilnya menjadi bagian penting dalam mendorong dan mewarnai



Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden RI di depan anggota MPR di Gedung MPR, Jakarta, 20 Oktober 2009 (Sumber: Biro Pers dan Media).



Kanan bawah: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono di ruang kerja presiden pada hari pertama menempati Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2004 (Sumber: ANTARA).

reformasi nasional khususnya dalam mengantar kehidupan nasional yang demokratis.

Sebagai peristiwa bersejarah yang ikut mengubah jalannya kehidupan politik dan demokrasi bangsa, menjadi penting untuk membukukan peristiwa Reformasi TNI yang bersejarah tersebut dengan benar. Ini juga penting sebagai bagian proses pembelajaran bagi generasi penerus. Oleh karena itu ketika SBY memiliki dan mengutarakan gagasan dan pemikirannya untuk mengabadikan sejarah Reformasi TNI ke dalam sebuah buku, SBY memberikan pesan khusus kepada Tim Penulis. Pesannya kepada Tim Penulis, yang juga disaksikan Panglima TNI Djoko Santoso waktu itu, intinya agar sejarah Reformasi TNI ditulis dengan akurasi yang setinggi-tingginya. SBY minta mereka semua menceritakan fakta dan kebenaran. "*Ceritakan kebenaran. Kebenaran itu abadi*", demikian pesan SBY kepada Tim Penulis buku tersebut.

Setelah pensiun dari militer, nama SBY yang menjulang selama era reformasi, membuatnya menjadi "mutiara" di TNI. Maka tak heran bila ia segera mendapat kepercayaan menempati pos-pos baru di pemerintahan. Saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ia dipercaya menjabat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben), Oktober 1999. Di pos ini SBY tak lama, karena enam bulan kemudian ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menkopolsoskam). Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berlangsung relatif singkat. Dan pada masa itu pula, SBY pernah diminta

oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengundurkan diri dari Menko Polsoskam dan ditawarkan jabatan baru sebagai Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau Menteri Perhubungan. Tentu saja hal yang tiba-tiba tersebut sempat menimbulkan tanda tanya bagi SBY. Namun akhirnya, secara positif SBY memahami kebijakan tersebut adalah hak dan wewenang Presiden. Hal itu bisa saja terjadi dan SBY memang merasa sudah 6 bulan berbeda pendapat dengan Presiden Abdurrahman Wahid dalam soal Dekrit. Akhirnya SBY memutuskan menolak tawaran jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau Menteri Perhubungan. Ini berarti SBY siap menerima konsekuensi pemberhentian dirinya sebagai Menko Polsoskam. SBY menerima dengan tulus hati pemberhentian tersebut. Hal ini menunjukkan sikapnya sebagai seorang ksatria, sekaligus negarawan yang santun dalam berpolitik. Ketika SBY menghadap Presiden ia menyatakan, "*Gus, saya sudah*

"Tsunami telah menumbuhkan bibit-bibit global yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Kali ini bibit solidaritas global itu aktif membantu korban tsunami, namun saya yakin bahwa kita bisa terus-menerus memupuk semangat belarasa dan kepedulian global ini untuk memecahkan masalah global lainnya. Kita bisa terus memupuknya demi terciptanya perdamaian dan kemakmuran yang lebih luas bagi umat manusia. Betapa hebat kalau kita bisa meninggalkan warisan seperti itu bukan?"



Kondisi di sekitar Masjid Baiturrohmah, Banda Aceh setelah terjangkit tsunami 26 Desember 2004
(Sumber: Biro Pers dan Media).

menerima penuh pemberhentian saya, dan saya akan baik-baik saja. Saya tidak akan pernah mengganggu pemerintah. Tidak ada satu kata pun saya menyerang pemerintah dalam bentuk apapun, apalagi mengganggunya. Karena saya sadar, pemerintah berada pada posisi yang sulit". Pemerintahan Gus Dur berganti dengan Megawati Soekarnoputri, dan kabinet pun berganti. Megawati membentuk Kabinet Gotong Royong, dan SBY kembali memangku jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam).

Selain aktif di pemerintahan, SBY juga mulai terjun ke politik saat membidani lahirnya Partai Demokrat (PD), 2001. Dalam pemilu 2004, PD tercatat sebagai peserta pemilu. Meskipun partai baru, namun ketokohan SBY mampu mengangkat perolehan suara PD sebesar 7,45% dengan 57 kursi di DPR. Dalam pemilihan presiden langsung 2004, PD dan sejumlah partai lainnya mengusung pasangan Capres / Cawapres SBY-Jusuf Kalla (JK) yang akhirnya memenangkan

Pilpres dalam dua putaran. Pada Pilpres putaran kedua, 20 September 2004, pasangan SBY-JK keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara meyakinkan 60,62%.

MENGELOLA KRISIS SEBAGAI PELUANG

Tak lama setelah dilantik sebagai presiden, tantangan langsung menguji SBY. Pada 26 Desember 2004, ketika Presiden SBY sedang melakukan kunjungan kerja ke Nabire, Papua, terjadi bencana besar yaitu gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Korban yang tewas mencapai 200 ribu orang lebih. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, serta saudara, dan tak terhitung mereka yang terpisah dari keluarganya. Presiden SBY segera memutuskan apa yang terjadi di Aceh bukan sebagai bencana biasa. Pada hari kedua, setelah peristiwa gempa dan tsunami Presiden



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono mengunjungi korban tsunami Aceh di Wisma Madani, Medan, 25 Desember 2004 (Sumber: Anung/ Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono memberi bantuan kepada korban bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh, 28 Desember 2004 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

SBY mengunjungi Aceh dengan menggunakan pesawat kecil yang mendarat di Lhokseumawe. Kerusakan Aceh tak terbayangkan. Bersama Ibu Negara, Ani Bambang Yudhoyono, Presiden SBY memberikan bantuan dan menyampaikan rasa belasungkawa yang dalam bagi rakyat Aceh.

Dari lokasi gempa Presiden SBY memimpin langsung evakuasi korban dan rekonstruksi pasca bencana. Komitmen SBY akan kemanusiaan dan kesungguhan dalam menangani bencana membuat dunia secara cepat memberikan dukungan untuk Indonesia. Bagi SBY bencana tsunami Aceh harus diperlakukan secara khusus, karena ini bukan saja menjadi masalah nasional, tapi juga masalah dunia. Oleh karena itu setelah menghitung berbagai kemungkinan, termasuk analisa sosial dan keamanan, Presiden menetapkan kebijakan *Open Sky Policy*. Terobosan ini diambil setelah melihat fakta besarnya skala kehancuran akibat hantaman ombak tsunami. SBY memahami bahwa ada kesenjangan antara apa yang dibutuhkan di lapangan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk memenuhinya. Betapa pun besar simpati, semangat, dedikasi, dan sumbangan masyarakat tetap belum cukup untuk menangani dampak bencana yang sangat luas dan masif. Maka setelah itu, melalui *Open Sky Policy*, wilayah Aceh dan Nias terbuka untuk semua bantuan yang berasal dari luar negeri. Pesawat, kapal, militer, pekerja kemanusiaan, wartawan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional mendapat izin masuk ke Aceh tanpa visa, namun tetap dalam kontrol pemerintah Indonesia.

Pasca *Open Sky Policy* partisipasi negara-negara sahabat sangat luar biasa, sampai-sampai Presiden SBY harus meminta bantuan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badhawi agar mengizinkan sebagian pesawat yang membawa bantuan bisa ditampung di Malaysia. Dalam waktu singkat, tak kurang 5.600 pasukan militer negara-negara sahabat mendarat di Aceh. Mereka segera bekerja sama dengan sekitar 6.200 personil TNI BKO Satuan Tugas Bantuan yang didatangkan ke Aceh dan Nias. Hasilnya, dalam waktu relatif singkat penyelamatan korban dan penanggulangan dampak tsunami berangsur dapat dilakukan. Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias. Selain itu juga dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias.

Sebagai terobosan yang berani dari Presiden, *Open Sky Policy* sempat mendapat sorotan dan kecurigaan, karena disinyalir membawa agenda politik terkait dengan pemberian dukungan senjata terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau penyusupan agen intelijen asing melalui relawan. Menjawab kekhawatiran tersebut, Presiden menanggapi dengan berpikir positif, dan menghimbau masyarakat agar memahami bahwa semangat bantuan di Aceh merupakan solidaritas global demi kemanusiaan dan tidak sedikit pun memuat agenda politik atau kepentingan



Helikopter Sea Hawk milik Angkatan Laut Amerika membawa bantuan untuk korban tsunami di Aceh (Sumber: ANTARA). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau tenda pengungsi korban tsunami dan gempa bumi di Mentawai, 2011 (Sumber: Back Tohir/Setneg). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan dua mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Georges H. W. Bush di Aceh pasca penanganan bencana tsunami di Aceh (Sumber: Back Tohir/Setneg).





Ratusan unit rumah yang telah didirikan untuk korban tsunami di kawasan Lampu'uk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar (Sumber: ANTARA).

"Presiden Yudhoyono dan para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengubah strategi tsunami menjadi sebuah kesempatan untuk membangun perdamaian di Aceh. Saya sangat memuji mereka,... rakyat Aceh ingin hidup tanpa ketakutan, dan ingin membangun masa depan mereka dalam sebuah Indonesia yang damai, sejahtera dan demokratis" – Y.M. Koffi Annan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

yang lain. Aceh pun berubah dari zona konflik dan daerah tertutup, menjadi zona krisis / bencana dan daerah terbuka. Besarnya solidaritas di Aceh menjadikan bantuan kemanusiaan kala itu dianggap yang terbesar sejak Perang Dunia II. Kebijakan tersebut membawa dampak yang signifikan bukan hanya mampu memulihkan kondisi Aceh yang porak-poranda dalam waktu relatif singkat, tapi solidaritas global itu juga membawa perdamaian Aceh yang selama ini nyaris mustahil diselesaikan.

Berbekal niat tulus dalam menyelesaikan konflik Aceh secara damai, pada 2005 atau setahun pasca tsunami, Presiden SBY memulai kembali perundingan damai dengan GAM. Setelah melewati negosiasi terarah dan fokus, dalam hitungan bulan tercapai kesepakatan antara Pemerintah RI dan GAM untuk mengakhiri konflik. Nota Kesepahaman Damai (MoU) yang ditanda tangani pada Agustus 2005 di Helsinki itu menjadi babak baru sejarah Aceh dan Indonesia. Efisiennya perundingan damai Aceh sejatinya karena adanya *trust* dari kedua belah pihak. Tanpa itu perdamaian hanya akan menjadi ilusi semata. Keterlibatan SBY dalam menangani perdamaian Aceh sudah dimulai sejak ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah bekerja keras, pada akhir 2002 ditandatangani sebuah perjanjian di Jenewa yang dikenal sebagai *The Cessation of Hostilities Agreement (COHA)* yang bertujuan menghentikan segala bentuk konflik bersenjata, sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseberu di Aceh. Namun realitas berkata lain, COHA



Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari (tengah) menjadi saksi penandatanganan naskah perdamaian antara Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia Hamid Awaluddin dan Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud di Helsinki, 15 Agustus 2005 (Sumber: Reuters).

dan pembentukan komite keamanan bersama kandas karena tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Gagalnya kesepakatan tersebut terutama karena tidak ada dukungan yang kuat di tingkat domestik, baik dari kalangan DPR maupun militer. Begitu pula, tidak ada dukungan dari pihak GAM secara keseluruhan dan absennya kepemimpinan yang bertanggungjawab penuh dengan segala risikonya.

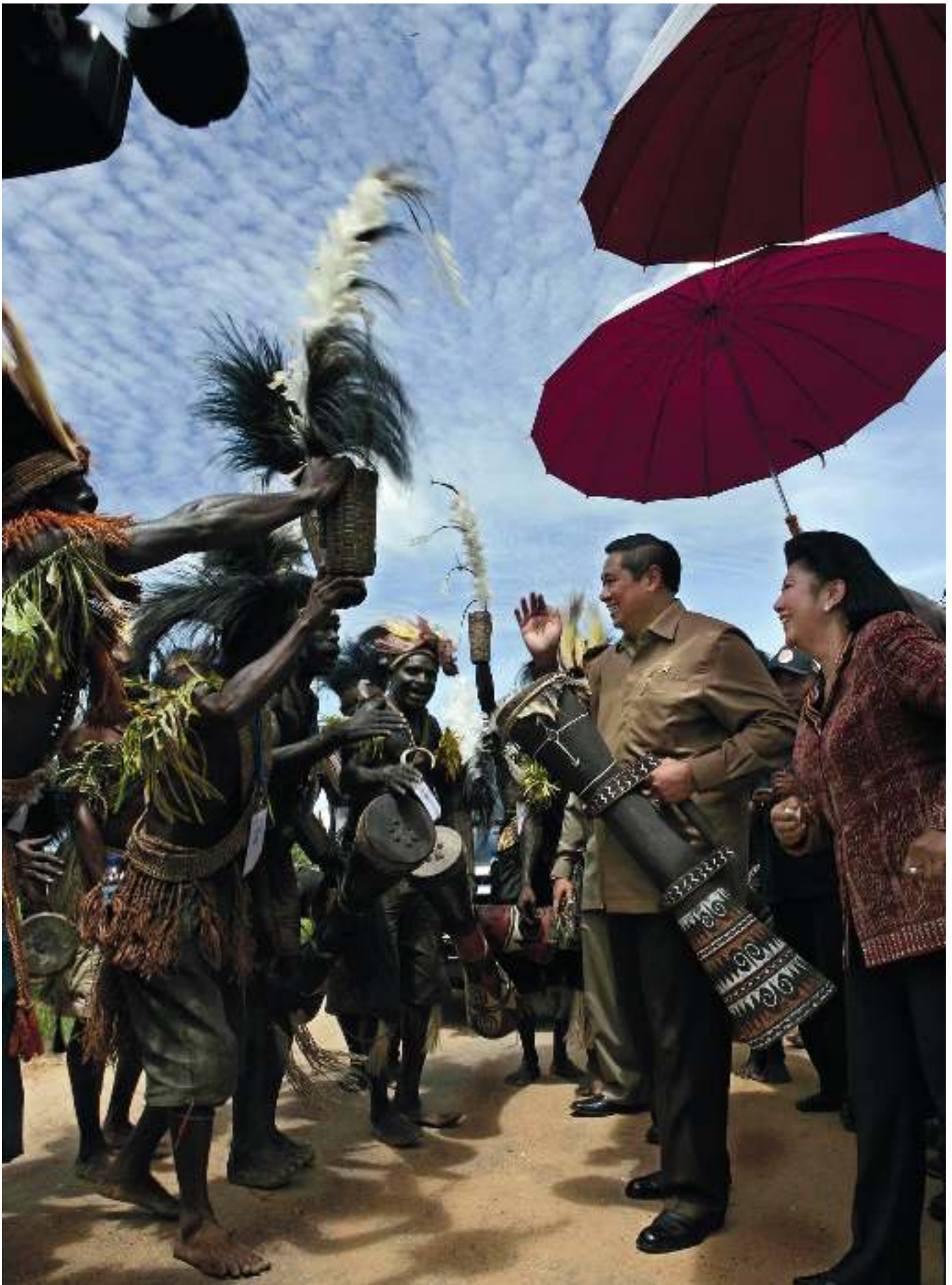
Dalam pandangan dan konsep SBY, penerapan otonomi khusus di Aceh merupakan jalan penyelesaian konflik terbaik. Oleh karena itu cara-cara konstitusional menjadi pilihan SBY, seperti membangun dialog terbuka dengan parlemen terkait kebijakan amnesti bagi anggota GAM. Menurut Presiden, solusi militer tidak pernah bisa menyelesaikan masalah di Aceh secara permanen. Situasi sosial mungkin teratasi sesaat, namun tidak pernah memutus siklus dendam yang memicu

konflik berikutnya. Pengalaman mengajarkan kepada bangsa ini bahwa pendekatan militer yang telah berlangsung selama 30 tahun di Aceh ternyata tak bisa menyelesaikan konflik secara paripurna.

Berbekal dukungan yang kuat dari parlemen dan militer, sejak Januari 2005 mulai dijajaki kembali kemungkinan perundingan dengan pihak GAM. Untuk membangun kepercayaan dan menciptakan suasana kondusif selama penjangkauan upaya perundingan, Presiden memerintahkan TNI untuk menghentikan segala bentuk operasi terhadap GAM. Seluruh kekuatan TNI diarahkan untuk penanggulangan bencana setelah tsunami melanda Aceh. Presiden juga menugasi Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melakukan pendekatan formal kepada tokoh-tokoh GAM di Helsinki, Finlandia, dengan bantuan fasilitasi dari mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari yang menjabat Ketua Dewan *Crisis Management Initiative (CMI)*. Terkait keterlibatan CMI, Presiden menegaskan kepada delegasi RI dalam perundingan bahwa masalah Aceh adalah masalah Indonesia. Peran CMI terbatas sebagai fasilitator dan mediator, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia.

Perundingan penyelesaian konflik Aceh pun berlangsung lima tahap, mulai soal amnesti, sistem pemerintahan, ekonomi dan politik. Sempat muncul tuntutan dari pihak GAM untuk mengganti istilah "otonomi khusus" dengan

Pemecahan masalah dengan semangat menang-menang akan menjamin semua pemain dalam sebuah konflik bertanggung jawab untuk mengusahakan kesuksesan perjanjian perdamaian, karena mereka akan memperoleh banyak keuntungan dari kesuksesannya dan sebaliknya juga akan banyak ruginya jika gagal. Demikianlah kalkulus dari sebuah konflik dapat diubah"





Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono melakukan panen ubi di Yahukimo Papua, 27 Juli 2006 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono pada kunjungan ke Papua, bersama siswa-siswi SD Papua, 27 Juli 2006 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

self government atau pemerintahan sendiri. Usul itu ditolak pemerintah dan DPR, karena dianggap sama dengan ingin merdeka dan lepas dari Indonesia. Mesti demikian, secara keseluruhan perundingan banyak mencapai kesepakatan, termasuk usulan GAM agar pihak Uni Eropa dilibatkan dalam proses pemantauan apabila kesepakatan RI-GAM tercapai. Seluruh hasil perundingan akhirnya disepakati kedua belah pihak. Upaya perwujudan perdamaian di Aceh menjadi kenyataan setelah pihak RI dan GAM menandatangani Nota Kesepakatan Helsinki pada 15 Agustus 2005. Presiden SBY menekankan pentingnya pendekatan *soft power* dalam memimpin penyelesaian konflik Aceh. Pendekatan

itu dilakukan melalui dialog, persuasi dan perundingan. Menurut Presiden, pendekatan *soft power* sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang kita bangun. Dalam penyelesaian konflik Aceh, Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara yang berpengaruh di kancah internasional seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menyelesaikan konflik internal karena citra Indonesia yang semakin baik sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi.

Tugas berat berikutnya untuk Presiden SBY adalah penyelesaian konflik Papua. Sama dengan Aceh, konflik itu



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau sekolah di Papua, 27 Juli 2006 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono berdialog dengan masyarakat Papua, pada kunjungan ke Papua tanggal 27 Juli 2006 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

sudah berlangsung cukup lama ketika muncul Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang didirikan pada 1965. Para pendukung gerakan itu menganggap bahwa Papua harus merdeka dan berpisah dari RI karena mereka tidak memiliki hubungan etnis, budaya, dan geografis dengan Indonesia. OPM menganggap Referendum 1969 sebagai landasan bergabungnya Papua ke Indonesia tidak sah karena tidak dilakukan secara sukarela, melainkan melalui paksaan dan tidak mewakili populasi. Di masa pemerintahan Presiden SBY, jalan dialog ditawarkan sebagai penyelesaian konflik Papua, sebagai tindak lanjut pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Jalan dialog yang ditawarkan Presiden SBY secara khusus berupa pendekatan ekonomi dan kesejahteraan. Melalui pendekatan ekonomi dan pembangunan peningkatan kesejahteraan bisa meminimalisasi pelanggaran yang sering terjadi, karena masyarakat kurang merasakan keadilan sosial-ekonomi. Presiden SBY juga mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua. Melalui otonomi khusus ditekankan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada penduduk asli Papua. Kebijakan tersebut didukung oleh pemerintah melalui penyaluran dana yang cukup besar agar rakyat Papua dapat menikmati rasa aman dan tenteram di tengah derap pembangunan. SBY mengistilahkan perlu ada "New Deal" untuk Papua.

Presiden SBY menilai masalah Papua bukanlah pada *domain* kedaulatan, tetapi merupakan isu politik, sosial, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu,

selain pengetahuan yang komprehensif terhadap tata kelola untuk pemerintah daerah agar birokrasi berjalan baik, menjadi kebutuhan mendasar untuk mencari jalan agar masyarakat Papua bisa produktif. Langkah untuk mewujudkan kesejahteraan di Papua semakin dipertegas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dengan menetapkan koridor Papua-Maluku sebagai daerah yang mendapat percepatan pembangunan dengan anggaran dan agenda yang konkret. Di samping penyelesaian konflik Papua dan Aceh, pada masa pemerintahan Presiden SBY juga dapat dituntaskan resolusi konflik Poso dan Ambon dengan pendekatan penegakan hukum dan pendekatan ekonomi-kesejahteraan. Konflik Poso yang bersifat multi dimensional berakar pada permasalahan politik, ekonomi, dan sosial. Presiden SBY telah aktif menangani konflik Poso semasa masih menjabat sebagai Menkopolkam bersama Menko Kesra Jusuf Kalla. Saat itu lahir Deklarasi Malino (Malino I) di Makassar, yang merupakan langkah awal penyelesaian konflik di Poso.

Sementara dalam meningkatkan *bargaining position* Indonesia di mata dunia, melalui upayanya yang sungguh-sungguh, pada tahun 2006 SBY berhasil mengantarkan bangsa ini melunasi seluruh utang ke *International Monetary Fund* (IMF) sebesar Rp60,7 triliun. Setahun berikutnya SBY mengambil keputusan penting yaitu membubarkan *Consultative Group of Indonesia* (CGI) yang sebelumnya mendikte arah pembangunan bangsa. Begitu juga, melalui



Presiden SBY, didampingi Ibu Ani, menyampaikan pandangan pemerintah tentang pembangunan sekolah, saat meninjau SDN 2 Rajapolah, Tasikmalaya, 24 Agustus 2011. (Sumber: Biro Pers dan Media).



Presiden SBY meninjau Puskesmas DTP Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, 23 Agustus 2011. (Sumber: Biro Pers dan Media).

"Sejak menjadi Presiden 10 tahun lalu, Presiden SBY telah memimpin transformasi Indonesia. Indonesia adalah negara toleran, dengan keberagaman, salah satu negara demokrasi dunia, dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi cepat. Saat SBY tak lagi menjabat Presiden, ia meninggalkan negara dalam kondisi lebih kuat, dibanding saat ia masuk" - Xanana Gusmao, PM Tomor Leste

upaya Presiden SBY yang sungguh-sungguh, akhirnya sangsi dan embargo militer yang telah berlangsung selama 12 tahun akhirnya dicabut.

INDONESIA UNGGUL, PINTAR DAN SEJAHTERA

Presiden SBY memandang pendidikan merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional alokasi anggaran untuk sektor pendidikan diterapkan minimal 20 persen. Alokasi ini untuk mendorong mudah dan luasnya akses pendidikan, peningkatan infrastruktur dan juga peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagai pilar terdepan sektor pendidikan nasional. Sepanjang periode 2004-2014 gaji guru dan dosen telah meningkat sebesar 300 persen. Ini wujud komitmen besar Presiden SBY untuk memastikan kelayakan penghasilan bagi profesi guru dan dosen yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan

nasional. Gaji guru terendah pada tahun 2004 sebesar 600.000 rupiah dan terus meningkat, sehingga pada tahun 2013 telah mencapai 3.049.500 rupiah per bulan.

Dalam upaya meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan bagi seluruh peserta didik, pemerintah menyelenggarakan berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bidikmisi bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi namun berprestasi. Pelbagai program dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbukti telah menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25 persen pada 2005 menjadi hanya 1,5 persen pada tahun berikutnya.

Untuk merangsang budaya unggul itu, tentu tak hanya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah formal, melainkan penciptaan infrastruktur-infrastruktur pendukung di luar publik. Hadirnya banyak rumah pintar, unit-unit mobil pintar, kapal pintar, bahkan kampung pintar adalah penciptaan ruang-ruang kreatif baru untuk Indonesia Unggul. Program Indonesia Pintar adalah salah satu Program Indonesia Sejahtera yang diprakarsai Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) pimpinan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Di samping itu masih ada program lain, seperti Indonesia Peduli, Indonesia Sehat, Indonesia Kreatif, dan Indonesia Hijau.

Selain itu, pemerintah memberikan perhatian pada bantuan pelayanan kesehatan dengan menaikkan anggaran kesehatan. Pemerintah memberikan bantuan pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas dan rumah sakit melalui



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono meresmikan Rumah Pintar Flobamora di Atambua, NTT, 10 Februari 2011. (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan asuransi ini, setiap anggota masyarakat yang tidak mampu tidak lagi merisaukan biaya kesehatan, melainkan fokus bekerja memperkuat perekonomian keluarganya. Di sektor kesehatan ini, pada tahun 2013, Presiden SBY meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai amanat UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), JKN sebagai program jaring pengaman sosial, merupakan program perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial. Dalam SJSN ini, pemerintah diamanatkan memberikan lima jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dalam implementasinya, SJSN ini dikelola oleh sebuah lembaga yang diundangkan dalam UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan terdiri dari BPJS Kesehatan (untuk jaminan kesehatan) dan BPJS ketenagakerjaan (jaminan tenaga kerja).

Melalui pengesahan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), cita-cita mewujudkan kesejahteraan paripurna bagi masyarakat Indonesia semakin realistis. Memang, adanya kompleksitas masalah mulai dari kelembagaan, sistem, payung hukum, kesiapan perangkat di seluruh tanah air, infrastruktur komunikasi informasi, dan lain-lain menyebabkan adanya jeda sejak UU SJSN ini disahkan. Namun dari perjalanan dan realitas yang berlaku, dapat dimaknai bahwa program pembangunan yang mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat merupakan prioritas bagi siapapun pemimpin di era-era selanjutnya.

Sejak 1 Januari 2014, JKN mulai diberlakukan bagi 121 juta jiwa penduduk, yang sebagian besar diantaranya adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah menargetkan hingga 1 Januari 2019, seluruh masyarakat Indonesia telah mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional ini. Sementara untuk jaminan ketenagakerjaan akan mulai diimplementasikan di awal 2015. Jaminan sosial untuk kesehatan dan ketenagakerjaan ini merupakan bentuk



Presiden SBY dan PM Timor Leste Xanana Gusmao melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Maret 2013.
(Sumber: Biro Pers dan Media).

komitmen Presiden SBY dalam mendorong kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat khususnya ketika ketidakpastian ekonomi masih menyisakan beberapa masalah yang dapat sewaktu-waktu membebani kehidupan ekonomi rakyat.

Sebagai catatan, JKN sebagai salah satu bentuk dan komitmen program pro rakyat, dengan 121 juta jiwa rakyat penerima manfaatnya, telah menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar di dunia yang memiliki jaminan kesehatan di bawah satu badan negara. Sasaran JKN adalah memberi jaminan berupa perlindungan kesehatan, dalam bentuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat miskin. Program JKN adalah bentuk dan komitmen program pro untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip yang berkeadilan.

Di samping aspek pendidikan dan kesehatan, kehidupan lingkungan sosial yang demokratis, toleran, dan kreatif juga

menjadi perhatian Presiden SBY. Lingkungan sosial yang baik dapat menjadi tempat lahirnya budaya unggul yang tak hanya mampu berkompetisi, tapi juga memiliki karakter adaptif.

KEKUATAN *SOFT POWER* SBY

Prestasi Presiden SBY dalam resolusi konflik makin lengkap dengan berakhirnya residu konflik Indonesia dan Timor Leste. Sejak awal kita tahu isu Timor Leste lebih bernuansa propaganda ke komunitas internasional, daripada konfliknya itu sendiri. Indikasinya banyak *non government organization* (NGO) internasional yang terus berupaya membawa "dosa politik" Indonesia selama integrasi Timor Timur (1975-1999). Di masa itu, sekalipun pemerintah Orde Baru telah berbuat banyak untuk membangun Timor, tetapi yang kemudian lebih mengemuka adalah tuduhan banyaknya pelanggaran HAM di sana. Pemerintah Indonesia pada 2006 menyiapkan strategi untuk menghindari internasionalisasi isu pelanggaran HAM di Timor Leste. Pasalnya, kemungkinan



Presiden SBY menyampaikan pidato dalam joint session di hadapan parlemen Australia, di Great Hall, Parliament House, Canberra, 10 Maret 2010. (Sumber: Anung Anindito)





Presiden SBY menyampaikan sambutan pada Peresmian Piagam ASEAN, di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan, 15 Desember 2008.
(Sumber: Biro Pers dan Media)

"Andaikan masyarakat global ini sebuah perkampungan dunia, kita tetap memerlukan rumah kita sendiri. Rumah itulah nasionalisme kita. Pertama nasionalisme, kemudian humanitarianisme atau internasionalisme. Kedua hal itu menjadi prinsip dasar. Dua berikutnya adalah mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial".

akan banyak elit militer kita yang terseret ke Mahkamah Internasional bila isu tersebut tidak diredam atau dialihkan. Berbekal keyakinan akan pentingnya *soft power*, Presiden SBY meyakinkan Xanana Gusmao (PM Timor Leste) dan sejumlah elit di Dili untuk menyelesaikan konflik kedua negara secara bilateral. Tentu bukan pekerjaan mudah meyakinkan Xanana dan penguasa Timor, mengingat mereka juga di masa lalu adalah mantan pejuang yang berusaha melawan kehadiran Indonesia di Timor Leste.

Namun dalam diplomasi semua kemungkinan bisa terjadi, sekecil apapun peluang itu. Singkat cerita Xanana dan SBY mencapai kata sepakat mengenai penyelesaian konflik di masa lalu. Dan puncaknya, pada Agustus 2005, di Bali dibentuklah Komite Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Komite ini bertugas menemukan fakta-fakta yang bisa diterima kedua belah pihak. Pembentukan Komite ini awalnya sempat ditolak oleh sejumlah kelompok, baik di Timor Leste

maupun Indonesia. Alasannya, pelanggaran HAM oleh militer Indonesia tidak bisa dikesampingkan begitu saja, melainkan harus diproses secara hukum, termasuk kemungkinan membawa ke Mahkamah Internasional. Namun demikian, Xanana dan SBY melihat sejarah masa lalu bukanlah luka yang harus dikorek terus-menerus. Melainkan pelajaran yang harus diambil generasi mendatang. Pada laporan akhir KKP yang diserahkan kepada pemimpin kedua pemimpin negara, 15 Juli 2008, Ketua KKP Timor Leste Dionisio CBS, yang menyatakan bahwa temuan pelanggaran HAM berat, latar belakang, konteks terjadinya pelanggaran berat HAM itu sama sekali tidak ditujukan untuk suatu proses hukum. Temuan ini ditujukan untuk proses penyembuhan luka lama, rekonsiliasi, dan menjamin peristiwa serupa tidak terulang lagi. Laporan akhir KKP berkesimpulan bahwa TNI, Polri dan pemerintah sipil semuanya memikul tanggung jawab kelembagaan atas sejumlah kejahatan dan pelanggaran berat HAM.

Menanggapi Laporan Akhir KKP, Presiden SBY mengatakan bahwa naskah ini sebagai upaya mencari kebenaran hakiki untuk penyelesaian tuntas pelanggaran berat HAM di masa lalu meskipun hal itu dicapai dengan jalan yang kadang menyakitkan. Hanya melalui akuntabilitas yang akurat atas berbagai ketidakadilan massal yang pernah terjadi di masa lampau, kita akan dapat memberdayakan sebuah masyarakat yang terbelah untuk menyembuhkan dirinya



Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dari Indonesia tengah melakukan persiapan sebelum diberangkatkan.

"Tata kelola yang baik terlepas dari apa pun ideologi, sistem politik, maupun latar belakang sejarahnya, merupakan kunci sukses. Dengan tata kelola yang baik itu kita dapat menyelesaikan masalah, membuka potensi, menyambut kemajuan, menyelesaikan konflik, dan memperkuat kerja sama"

sendiri. Dalam hal ini, berbagai ketidakbenaran tentang apa yang pernah terjadi harus dikeluarkan agar proses rehabilitasi efektif. Sekali lagi, *soft power diplomacy* bisa menjadi opsi kebijakan yang kita ambil, selain *hard power*. Kita tak bisa membayangkan bila kedua pemimpin negara tidak mencapai kesepakatan (pembentukan KKP), bukan tidak mungkin elit militer Indonesia ada yang dibawa ke Mahkamah Internasional. Bila itu terjadi, maka citra Indonesia sebagai negara pelanggar HAM akan makin menggema di seluruh dunia, suatu stigma yang amat buruk akan melekat pada bangsa ini. Padahal TNI sejak reformasi 1998 telah melakukan reformasi internal, termasuk perubahan doktrin dan kembali ke "khittah" prajurit profesional.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas SBY menangani sejumlah konflik dengan mengedepankan dialog dan bukan adu senjata, merupakan ciri diplomasi yang ia jalankan, yaitu *soft power diplomacy*. Pilihan ini bukan hanya khas Presiden SBY, tetapi juga didukung faktor nasional dan

regional yang makin terbuka seiring demokratisasi di hampir semua kawasan. Pilihan politik *soft power* yang dijalankan dengan elegan dan cerdas (*smart power*) Presiden SBY menjadi warisan presidensial dimana seorang pemimpin bisa bertindak rasional, cermat, inklusif yang menuntun ketepatan dalam mengambil keputusan. Dalam memajukan kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional, SBY menekankan terbangunnya konsensus internasional berlandaskan kejelasan visi, determinasi, dan pragmatisme.

Peran *soft power* SBY tak hanya sebatas wacana di forum-forum internasional, melainkan sudah mencatatkan sukses, baik di dalam maupun di luar negeri. Bila di Aceh, Papua dan Timor Leste kita menjadi saksi bagaimana Presiden SBY secara cermat menjalankan *soft power* yang berujung damai, gejala yang sama juga ditunjukkan di kawasan. Pada kasus Myanmar misalnya, sejak awal, ketika Myanmar masih menghadapi sanksi dan isolasi dari masyarakat dunia, Presiden SBY secara aktif, persuasif dan tanpa publikasi telah berkomunikasi dengan para pimpinan di Myanmar untuk memberikan dukungan bagi reformasi dan demokratisasi di negara itu, seraya tetap menjaga persatuan dan keamanan dalam negerinya. Ketika terjadi konflik antara Kamboja dan Thailand menyangkut sengketa perbatasan, Presiden SBY juga bertindak sebagai mediator sehingga ikut memungkinkan konflik itu dapat diselesaikan secara damai. Ketika situasi peperangan saudara di Suriah mencapai



Paling atas: Para kepala negara benua Asia dan Afrika berfoto bersama di Gedung Merdeka pada peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung 24 April 2005 (Sumber: Kemlu).

Kiri atas: Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri Manmohan Singh (India) dan Presiden Hu Jintao (Cina) di ikuti para kepala negara lainnya berjalan kaki menuju dan Gedung Merdeka dalam peringatan 50 tahun KAA Bandung (Sumber: Maha Eka Swasta).

Kanan atas: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekjen PBB Kofi Annan dan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki di ikuti para kepala negara lainnya melakukan penanaman pohon bersama pada peringatan 50 tahun KAA Bandung (Sumber: Maha Eka Swasta).

Kanan: Berbagai liputan surat kabar ARAB NEWS mengenai Konferensi Asia Afrika II, Jakarta dan Bandung tahun 2005 (Sumber: Kemlu).





Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan para kepala negara peserta Bali Demokrasi Forum V 2014
(Sumber: Back Tohir/Setneg).

puncaknya, Presiden SBY aktif menjalankan diplomasi ke Sekjen PBB dan para Pemimpin Dunia yang lain, agar situasi di Suriah tidak semakin memburuk.

Demikian juga ketika perang Israel–Libanon tengah berkecamuk, Presiden SBY ikut berinisiatif untuk digelarnya pertemuan para pemimpin OKI di Kuala Lumpur, yang akhirnya mendorong dilakukannya gencatan senjata di Libanon. Tidak hanya itu, sebagai bagian dari komitmen untuk ikut menjaga perdamaian di wilayah ini, Indonesia kemudian juga memutuskan untuk mengirimkan Batalion Tempur TNI sebagai bagian dari Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB.

Demikian pula dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, dalam berbagai kesempatan ketika ketegangan di Laut Tiongkok Selatan meningkat, Presiden SBY dibantu Menteri Luar Negeri Indonesia menjalankan "*shuttle diplomacy*" agar ketegangan itu dapat diredam dan tidak makin eskalatif. Pada akhirnya setelah proses diplomasi berlangsung beberapa saat, negara-negara ASEAN pun menyetujui adanya *Six-Point Principles on the South China Sea* yang menghormati *Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea* serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum internasional, termasuk dalam *UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.

Presiden SBY juga aktif berkontribusi bagi peningkatan kerjasama dan kemitraan global untuk mengatasi isu-isu global terkini, termasuk menjadi inisiator dan tuan rumah,

seperti *Global Inter-Media Dialog*, *Climate Change*, *Forestry Management*, *Open Government Partnership*, *Financial Inclusion*, dan *Interfaith Dialog*. Dengan akan berakhirnya MDGs pada tahun 2015 mendatang, Presiden SBY bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, telah mendapat amanah dari Sekjen PBB Ban Ki-moon, untuk memimpin High Level Panel yang bertugas mempersiapkan Agenda Pembangunan Global Pasca 2015.

Khusus pada isu *Global Warming and Climate Change*, Presiden SBY menerima permintaan banyak negara maju dan negara berkembang untuk menjadi tuan rumah pertemuan *United Nations Framework Conference on Climate Change (UNFCCC)* ke-13. Pertemuan sejenis yang diselenggarakan setiap tahun di berbagai tempat selama ini tidak berhasil menyepakati sebuah sikap bersama dalam menghadapi perubahan iklim. Demikian pula dalam pertemuan ke-13 ini, perbedaan pendapat diantara para pihak sangat tajam sehingga hampir berujung pada dead lock. Namun melalui kesungguhan dan kesabaran Presiden SBY dan delegasi Indonesia, akhirnya pertemuan di Bali ini menjadi sebuah ajang bersejarah karena menghasilkan beberapa terobosan kesepakatan lebih dari 180 negara dalam menghadapi perubahan iklim, yang selanjutnya disebut sebagai *Bali Roadmap*. Sejak disepakatinya *Bali Roadmap*, isu perubahan iklim dan isu-isu lingkungan hidup lainnya semakin

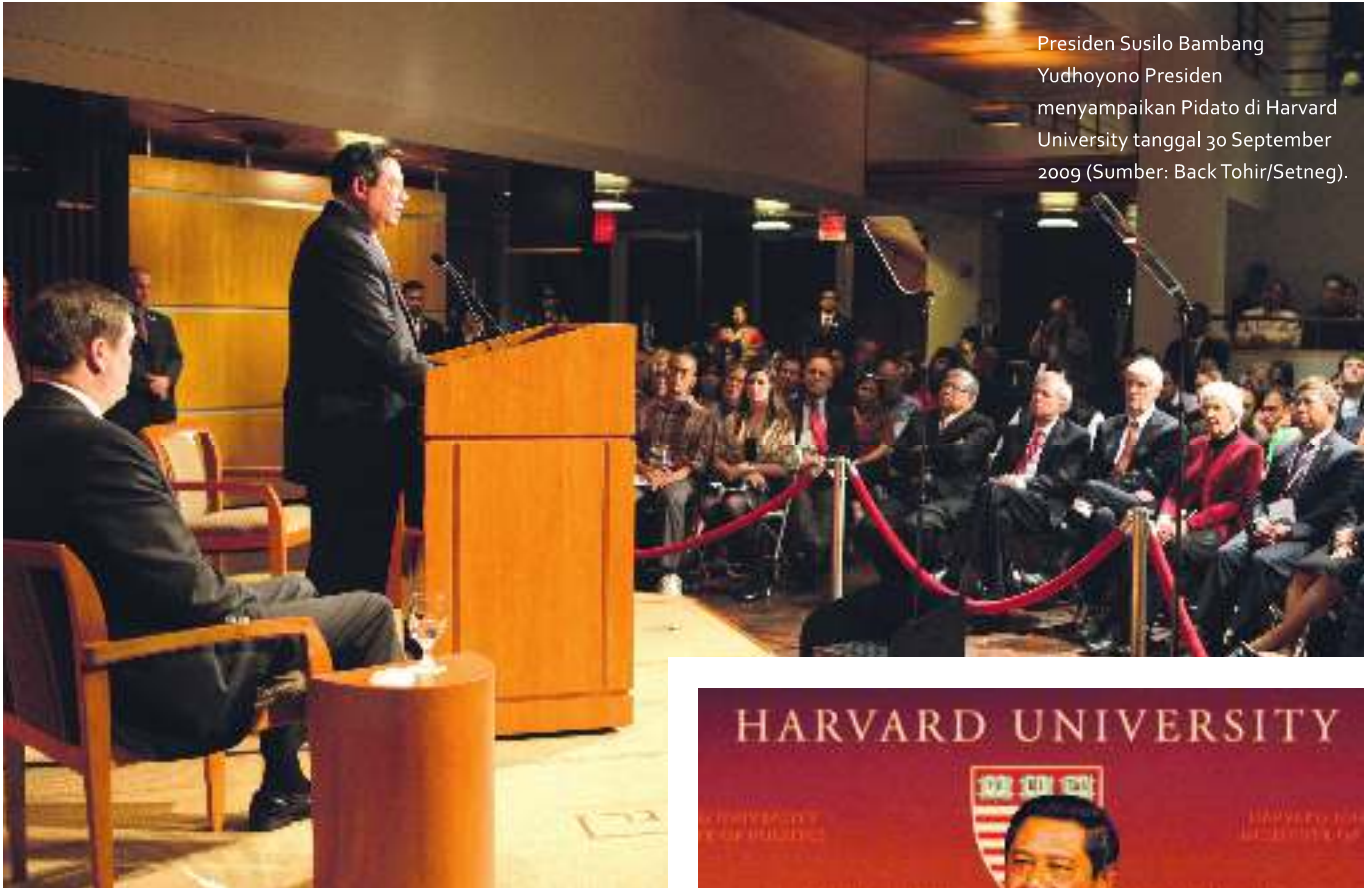


Presiden SBY dan Sekjen PBB Ban Ki-moon saling menjabat tangan erat, usai memberi keterangan pers menjelaskan hasil High-Level Event on Climate Change, di Markas Besar PBB, New York, AS, 24 September 2007. (Sumber: Abror Rizki)

mengemuka di khasanah pemikiran serta agenda-agenda pembangunan berbagai negara.

Semangat membangun konsensus untuk kemaslahatan bersama juga nyata dilakukan Presiden SBY dalam membangun dialog antara dunia Barat dan dunia Islam. Saat mengunjungi Inggris pada 2012, Presiden SBY sempat mengemukakan keyakinannya akan dapat terciptanya harmoni dan perdamaian antar peradaban. Menurut Presiden SBY hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. *Pertama*, upaya dialog harus ditingkatkan. *Kedua*, *soft power*—aplikasi *power* tanpa kekerasan—harus menjadi kebiasaan, hingga abad ini akan dikenal sebagai *soft power century*. *Ketiga*, pembangunan juga harus diarahkan terhadap terciptanya pendidikan global, nurani global, dan tata pemerintahan global.

Presiden SBY memang selalu menekankan pentingnya kerjasama yang berlandaskan prinsip dan norma-norma yang jelas. Demi terciptanya perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bersama, kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lainnya harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, kemitraan, konsultasi, dan saling menghormati. Hal ini antara lain tercantum dalam *Declaration of the East Asia Summit on the Principles of Mutually Beneficial Relations*. Yang menjadi menarik justru bila kita bertolak kembali pada kehidupan pribadi Presiden SBY sebagai sosok yang besar dalam lingkup dunia kemiliteran, namun sangat percaya apa arti dialog dan kesantunan dalam politik. Pada titik inilah Presiden SBY sebetulnya menjadi sosok teladan bagaimana ia mentransformasikan kekuasaan dan mentransendensikan kekuatan dari peperangan ke dialog, dari senjata ke bahasa.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Presiden menyampaikan Pidato di Harvard University tanggal 30 September 2009 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya pada WEF on EAST ASIA di Manila, 21-23 Mei 2014 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Coral Triangle Summit tahun 2009 di Manado (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden SBY memberikan pidato pada debat umum hari pertama Sidang ke-67 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, 25 September 2012. (Sumber: Anung Anindito)

Dan “bahasa” yang dipakai Presiden SBY dalam metode kepemimpinan yang dipilihnya adalah bahasa ekonomi, kemasyarakatan, budaya, humaniter, pendidikan, hukum, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga, musik, media massa dan media sosial, dan sebagainya.

Untuk menjalankan beragam bahasa dalam *soft power* itu, Presiden SBY dalam sepuluh tahun pemerintahannya menjaga dengan konsisten dua nilai ini agar berjalan seimbang: pelaksanaan *freedom* dan penegakan *rule of law*. Selama dua periode masa kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat internasional. Keseluruhan capaian ini tidak dibangun dengan meninggalkan pembangunan nasional. Sebaliknya, membaiknya perekonomian dan meningkatnya stabilitas sosial politik di masa pemerintahan Presiden SBY telah menjadi pilar yang menunjang diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional. Hal ini pun ditunjukkan lebih lanjut melalui berbagai tindakan nyata dalam memajukan kerjasama internasional, mendorong perekonomian global,

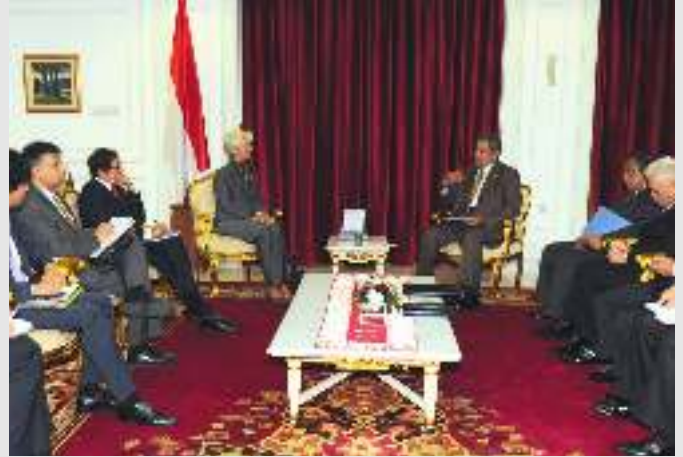
Kita harus menerapkan asas kepatuhan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Kita tidak larut dengan satu pihak saja. Terlalu memusuhi si A atau terlalu mengikuti si B tidak baik bagi diplomasi kita”

serta upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Salah satu kebijakan penting dan beresiko Presiden SBY adalah keputusan dan instruksi Operasi Pembebasan Kapal MV Sinar Kudus di Somalia. Sebagai seorang jenderal, naluri komandonya yang kuat juga terlihat saat mengambil keputusan dan membentuk Satgas Merah Putih untuk membebaskan Kapal Kargo MV Sinar Kudus bermuatan feronikel yang dibajak oleh kelompok perampok Somalia di Laut Arab perairan Somalia dan Teluk Aden bulan Maret 2011. Kita tahu perampok Somalia dikenal sangat terorganisir dengan baik. Perampok Somalia menyandera kapal tersebut dan meminta sejumlah tebusan.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pembukaan 6th World Islamic Economic Forum di Kuala Lumpur, tanggal 19 Mei 2010 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Managing Director International IMF, Christine Lagarde (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Dari atas ke bawah: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan para menteri negara peserta World Cultural Forum, Bali tanggal 24-27 November 2013 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya pada Sidang Umum UNESCO Ke-36 di Paris mengenai keragaman budaya adalah kekuatan, 2 November 2011 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono, bersama Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova, meninjau stand Indonesia pada pameran keragaman budaya di kantor pusat UNESCO di Paris, 2011 (Sumber: Istimewa).





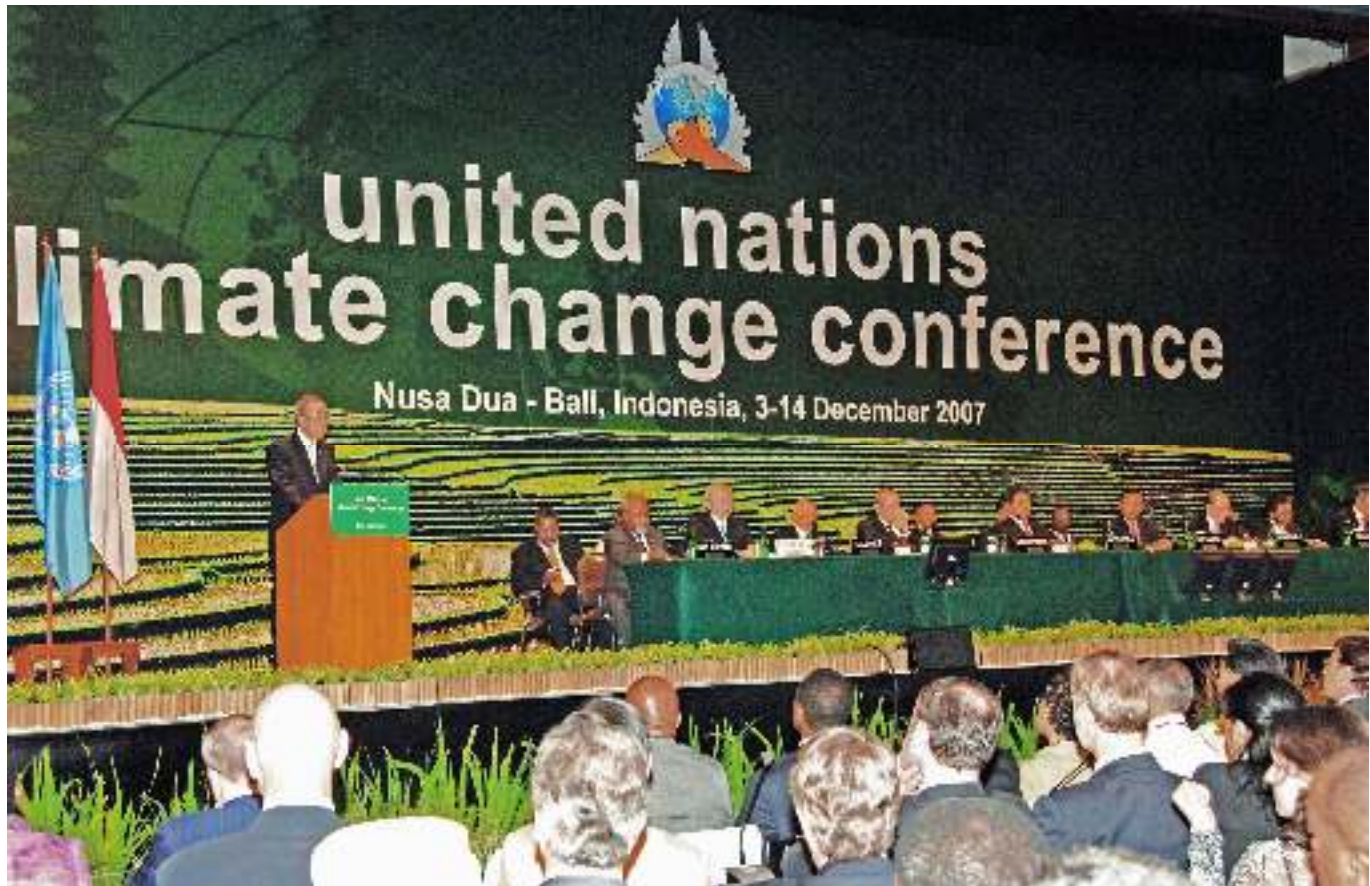
Presiden SBY menerima Global Statesmanship Award dari pendiri dan CEO WEF Klaus Schwab di Hotel Shangri-La Manila, Filipina, 23 Mei 2014. (Sumber: Abror Rizki)



Berbagai kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menerima kepala negara dari negara sahabat. Searah jarum jam: Menerima kunjungan kenegaraan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf ke Indonesia tanggal 25 Maret 2013 (Sumber: ANTARA). Menyambut Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad saat menghadiri "Bali Democracy Forum ke-V" di Bali, tanggal 8 November 2012 (Sumber: ANTARA). Menerima Presiden Republik Turki Abdullah Gül di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 5 April 2011 (Sumber: ANTARA). Menerima kunjungan kenegaraan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara Kim Yong Nam di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 15 Mei 2012 (Sumber: ANTARA).



Searah jarum jam: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Presiden Rusia Vladimir Putin saat KTT APEC tanggal 7 Oktober 2013 di Bali (Sumber: ANTARA). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Presiden Cina Xi Jinping di Istana Merdeka, tanggal 2 Oktober 2013 (Sumber: ANTARA). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden AS Barack Obama di Istana Negara, Jakarta (Sumber: Back Tohir/Setneg). Kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Inggris diterima Ratu Inggris Elizabeth II, pada 31 Oktober 2012 (Sumber: POOL/Reuters). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersulang pada jamuan makan malam atas kunjungan Kanselir Jerman ke Indonesia tanggal 10 Juli 2012 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Konferensi Perubahan Iklim di Bali, 3 Desember 2007 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

Sebagai Panglima Tertinggi TNI Presiden SBY memimpin langsung rapat terbatas guna membahas rencana operasi pembebasan sandera tersebut, dengan memberikan direktif kepada Menkopolhukam dan Panglima TNI. Presiden memastikan harus ada langkah segera untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang sedang disandera oleh pembajak Somalia sekaligus membebaskan kapal MV Sinar Kudus melalui berbagai opsi yang harus dikembangkan. Dalam arahnya, Presiden SBY antara lain menegaskan, bahwa sebagai Presiden, beliau tidak akan pernah berkompromi dan bernegosiasi dengan perompak, hal ini berkaitan dengan martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Maka melalui proses berlanjut dalam hubungan komando dan staf, maka ditentukanlah pola operasi satuan tugas Merah Putih yang melibatkan satuan Marinir TNI AL didukung satuan Kopassus dan satuan TNI lainnya.

Melalui perjalanan laut yang cukup jauh, operasi militer Satgas Merah Putih akhirnya dengan gemilang berhasil

"MDGs menyuarakan pesan secara lantang dan jelas: bahwa Anda tidaklah sendirian. Dari wilayah manapun Anda berasal, dan bagaimanapun kondisi perekonomian negara Anda, jika Anda memiliki masalah kemiskinan dimana pun juga. Kemiskinan adalah masalah semua orang"

membebaskan Kapal MV Sinar Kudus dan penumpangnya dengan selamat. Sebuah prestasi yang membanggakan di saat banyak kapal-kapal dari berbagai negara yang menjadi korban karena tidak mampu dibebaskan atau membebaskan diri dari kerasnya perompak di perairan tersebut.

Meskipun konsisten mengedepankan *soft power* dalam diplomasi dan resolusi konflik kawasan, bukan berarti Presiden SBY meminggirkan penguatan kemampuan dan modernisasi alutsista TNI. Sebaliknya SBY bertekad TNI dapat mencapai *minimum essential forces* dalam waktu dekat ini.



Penerbang - penerbang tempur TNI AU mengawal Indonesia 1 di langit Jawa Timur. Diambil dari ketinggian 31.000 oleh Letkol Pnb Wastum dan Mayor Pnb Gultom dengan pesawat T-50i/TT-5001. (Sumber: Dispen TNI-AU).



Presiden SBY, didampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia, menghadiri demonstrasi sekaligus meninjau pesawat Tempur T-50i Golden Eagle di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 13 Februari 2014. (Sumber: Dispen TNI-AU).



Tank Leopard TNI AD dalam defile alutsista TNI pada Hari Ulang Tahun Ke-69 TNI, di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya, 7 Oktober 2014. (Sumber: Anung Anindityo).

Hal itu diperlukan sebagai *deterrent effect* sehingga Indonesia makin disegani di kawasan dan dunia. Dalam bahasa yang lebih mudah modernisasi alutsista TNI dilakukan SBY untuk meneguhkan prinsip kita bahwa bangsa Indonesia cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan. Pada konteks kekinian SBY kerap menegaskan sikap Indonesia dalam berbagai forum internasional bahwa untuk mencapai perdamaian maka kita juga harus siap berperang. Maka dari itu Presiden SBY terus melakukan modernisasi alutsista TNI secara signifikan, baik kekuatan darat, laut maupun udara. Alutsista TNI ditingkatkan baik dengan meningkatkan produksi industri pertahanan dalam negeri maupun pengadaan dari negara-negara sahabat. SBY ingin TNI memiliki kekuatan yang tangguh untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Dalam kaitan ini, tahun-tahun terakhir ini telah dilakukan revitalisasi industri pertahanan dalam skala yang besar. Sementara itu, Polri juga mengalami penambahan

personel dan peningkatan profesionalitas agar benar-benar bisa menjalankan tugas pemeliharaan keamanan publik dan penegakan hukum.

Untuk semakin mendukung profesionalisme TNI, Presiden SBY dengan dibantu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, pada tahun 2010 menggagas berdirinya Universitas Pertahanan Indonesia. Atas inisiatif dan instruksinya pula, dengan dibantu Menhan Purnomo Yusgiantoro, telah dibangun *Indonesia Peace and Security Center (IPSC)* dalam satu kawasan besar di Sentul, yang terdiri dari *Peace Keeping Center, Counter Terrorism Training Center, Disaster Relief Training Center, Defense University, Language Center, Standby Force Base* dan fasilitas untuk Olimpiade Militer. Boleh dikata IPSC ini digunakan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan Operasi Militer Selain Perang (*Military Operation Other Than War*). Dengan makin terjaganya keamanan di seluruh tanah air, pelibatan Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Peace Keeping Center di Sentul Jawa Barat, 19 Desember 2011 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

PBB dapat ditingkatkan secara tajam. Presiden SBY ingin para perwira militer dan kepolisian Indonesia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam tugas-tugas internasional.

Dalam kaitan misi pemeliharaan perdamaian PBB, terjadi peningkatan tajam jumlah pasukan perdamaian Indonesia di PBB sejak 2006. Sebelumnya, hanya terdapat 300-an peace keeper (posisi 44 di dunia), namun hingga akhir April 2011 terjadi peningkatan personel yang terdiri dari komponen militer, polisi, dan sipil sebesar 1.801 orang atau berada pada peringkat 16 terbesar pengirim pasukan perdamaian PBB. Indonesia juga aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang dilanda konflik atau bencana, seperti Palestina, Jepang, Timor Leste, dan Australia. Artinya, Presiden SBY tidak hanya bekerja untuk kepentingan nasional tetapi juga untuk dunia internasional.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan arahannya kepada 23.600 prajurit TNI AD, AU, dan AL di Darmaga Madura pada HUT TNI ke-69 di Markas Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur (Armatim), Surabaya, Jawa Timur, 6 Oktober 2014. (Sumber: Abror Rizki).





Pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2009 – 2014 di KPU (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono meninjau pasien rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara yang telah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 27 Maret 2014. (Sumber: ANTARA).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikukuhkan sebagai profesor Ilmu Ketahanan Nasional di Kampus Unhan, Sentul oleh Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya Dr. Desi Albert Mamahit. Dalam pengukuhanannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia yang berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategi Bagi Indonesia". Pengukuhan yang pertama di Indonesia ini, merupakan hasil Sidang Senat Terbuka Akademik Universitas Pertahanan pada tanggal 12 Juni 2014. Gelar profesor diberikan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipandang memiliki ilmu ketahanan nasional yang diperoleh dari pendidikan militer maupun non militer, baik di dalam dan di luar negeri (Sumber: Abror Rizki).



Cover Majalah Time edisi 11 Mei 2009.

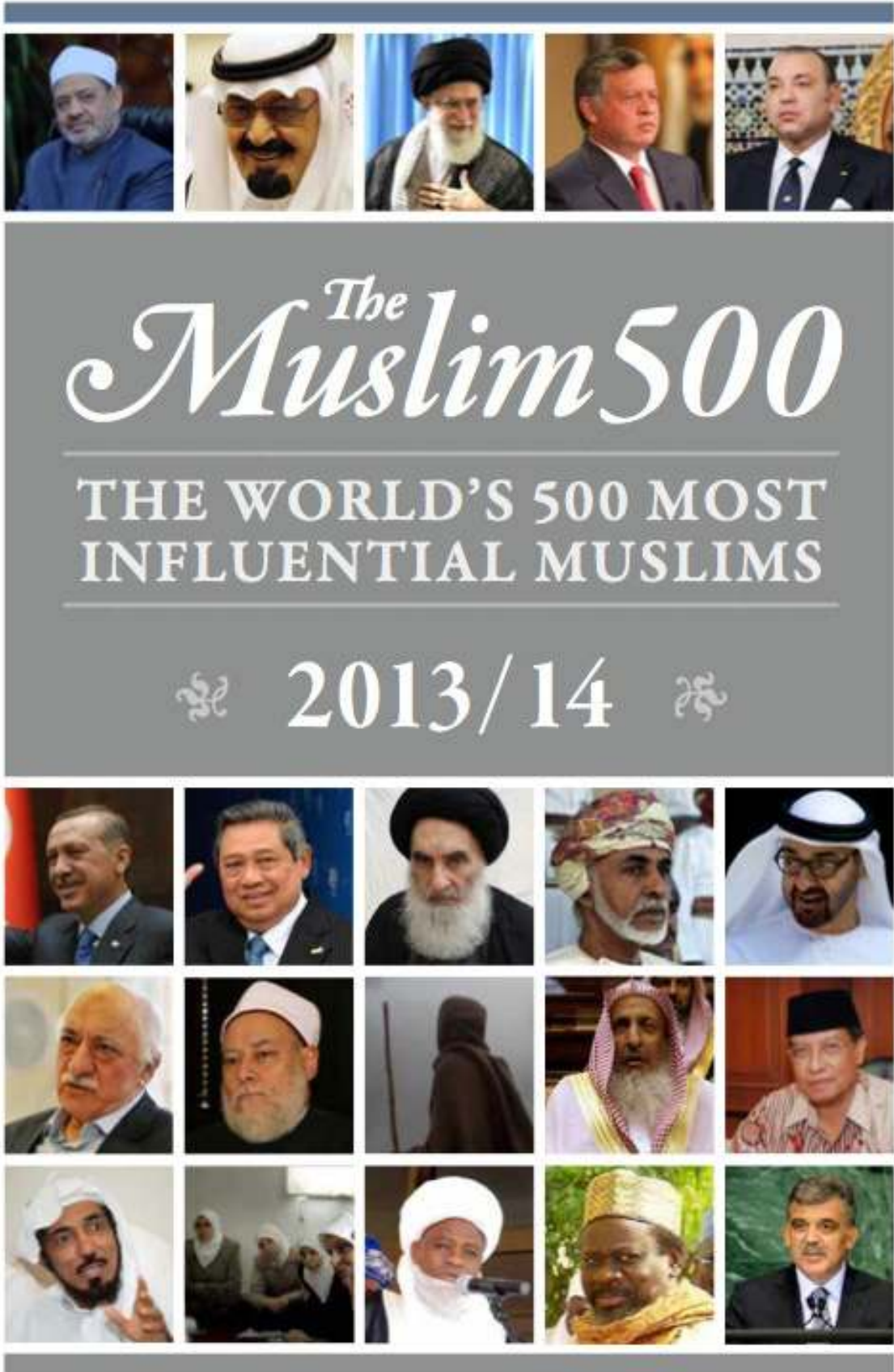
PRESTASI BERBUAH APRESIASI

Berbagai upaya Presiden SBY dalam mengembalikan Indonesia ke orbit diplomasi dunia sejauh ini mencatatkan hasil yang luar biasa. Bukan hanya karena berbagai sasaran tersebut relatif tercapai, lebih dari itu dukungan para *leaders* dari negara-negara strategis dan komunitas internasional juga membuat posisi Indonesia semakin baik. Diplomasi segala arah (*all directions foreign policy*) yang kita jalankan dalam menterjemahkan politik bebas aktif merupakan suatu keniscayaan. Sepuluh tahun terakhir ini Presiden SBY telah mengembangkan doktrin hubungan internasional yang disesuaikan dengan tatanan dunia yang baru, termasuk perkembangan geopolitik di berbagai kawasan, yaitu sebagaimana di atas, "*All Directions Foreign Policy*" berpasangan dengan "*Millions Friends, Zero Enemy*". Dalam kurun waktu ini pula, Indonesia telah membangun kemitraan strategis (*strategic partnership*) dan juga kemitraan komprehensif (*comprehensive partnership*) dengan 16 negara besar di dunia. Di antaranya adalah dengan Tiongkok,

"Dan janganlah kita kehilangan perhatian terhadap eratnya keterkaitan antara pembangunan dan keamanan. Saya yakin bahwa perjuangan demi perdamaian dan keamanan dunia tidak akan pernah dimenangkan, kecuali setelah mengalahkan tantangan kemiskinan."

Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Brasil, Australia, Afrika Selatan, dan Jepang. Menurut SBY hal ini penting karena Indonesia kini telah menjadi "*Regional Power and Global Player*".

Predikat di atas bisa kita raih salah satunya didukung transisi demokrasi yang sukses di Indonesia dan hasil itu mendapat pengakuan dunia. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, adalah wajar bila kemudian Indonesia mendapat tempat di forum-forum internasional. Bahkan Presiden SBY memprakarsai terselenggaranya forum internasional tentang demokrasi yang mendapat



SBY menempati peringkat ke-7 dari 500 Tokoh Islam Berpengaruh di Dunia, menurut Royal Islamic Strategic Studies Center Yordania, 2013/2014.



Presiden SBY menerima penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (AoCF) di Hotel The Pierre, New York, AS, 30 Mei 2013. (Sumber: Biro Pers dan Media)

sambutan hangat dari negara maju dan berkembang, dari negara demokratis dan yang masih mencoba ke arah sana. Forum tersebut, yaitu *Bali Democracy Forum (BDF)* terus berkembang pesat, dari hanya dihadiri 32 negara pada 2008, meningkat drastis menjadi 84 negara dengan 12 kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir langsung.

Berbeda dengan forum-forum internasional lainnya, dalam forum BDF tidak ada negara yang boleh mengatakan paling baik demokrasinya. Semua negara posisinya sama, baik negara maju yang demokratis, maupun negara berkembang yang belum demokratis. Negara berkembang berhak menyatakan pikirannya mengapa demokrasi tidak bisa berkembang cepat di negaranya, begitu juga negara-negara lain, semua berhak bicara secara sejajar. Dengan kata lain, tidak ada satu pihak pun yang dapat mendikte sistem demokrasi dan politiknya kepada negara lain. Hal itu menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya identik dengan negara-negara Barat. Begitu pun negara-negara Timur tidak lagi menjadi objek demokrasi yang hanya menggunakan perspektif Barat. Tanggapan positif peserta

"Saya tidak ingin hanya berbicara terus-menerus kepada tamu asing mengenai pentingnya inter-media dialogue. Saya ingin Indonesia cepat memeloporinya menjadi suatu forum dialog yang benar-benar ada."

BDF menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan dunia yang tinggi terhadap Indonesia dan Presiden SBY.

Transisi demokrasi yang berjalan relatif baik di Indonesia merupakan prestasi bagi pemerintahan Presiden SBY, karena faktanya tidak semua negara bisa melalui proses itu secara baik. Negara-negara di Timur Tengah bisa menjadi contoh bahwa iklim demokrasi merupakan salah satu kemewahan yang dimiliki satu negara dan tidak semua negara sukses menjalaninya. Pelajaran demokrasi dari Mesir dan Palestina menjadi pelajaran nyata kesiapan sebuah bangsa untuk menjalani proses demokrasi tidak selalu berlangsung mulus.

Pada masa Presiden SBY rakyat memiliki kebebasan berpendapat terhadap pemimpinnya. Media massa juga bebas menuliskan berita dan opininya tanpa adanya



Beberapa kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengikuti KTT APEC ke-21, tanggal 8 Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali (atas) dan pertemuan KTT APEC di Rusia tahun 2014 (Sumber: Setneg).



Berbagai kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (searah jarum jam) saat membuka Festival Bunga di Tomohon (Sumber: Back Tohir/Setneg), membuka Pameran International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2012 di Jakarta Convention Center (JCC), bulan April 2004 (Sumber: ANTARA), membuka Pesta Kesenian Bali XXXVI di Denpasar, Bali, 2014 (Sumber: presidenri.go.id), membuka festival Sail Komodo 2011 (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka sidang WTO di Bali, 3 Desember 2013 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

tekanan dari pemerintah. Demikian pula era media social telah memungkinkan rakyat mengekspresikan berbagai perasaannya secara terbuka. Seluruh rakyat bebas menilai dan mengkritik kebijakan Presiden dan kabinetnya melalui media sosial—suatu hal yang tidak banyak terjadi pada era sebelumnya. Maka Presiden SBY dipandang menjadi salah satu tokoh peletak fondasi demokratisasi di Indonesia. Atas semua prestasi di atas, komunitas internasional memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Presiden SBY. Diantaranya *Democracy Award* dari *International Association of Political Consultants Amerika Serikat*, *The 100 Most Influential Persons in the World* dari Majalah *Time*, Amerika Serikat, *The Gold Standard in Political Communication* dari *Public Affairs Asia*, Hongkong, dan *Global Champion for Disaster Risk Reduction Award* dari PBB, New York.

Apresiasi lainnya, penghargaan sebagai pemimpin perdamaian dan kerja sama internasional dari *Foreign Policy Association*, New York, *Global Statesmanship Awards* dari *World Economic Forum (WEF)*, Davos, Swiss. Presiden SBY juga dinobatkan sebagai *The World's 500 Most Influential Muslims* atau masuk 500 Tokoh Islam Dunia yang paling berpengaruh, dengan urutan ke-7 tahun 2013 oleh lembaga

The Royal Islamic Strategic Studies Center, Amman, Jordania, dan juga *The 500 Most Powerful Individuals on the Planet* oleh majalah *Foreign Policy*. Selain itu Presiden SBY ditunjuk oleh PBB sebagai Ketua Panel (*High Level Panel of Eminent Persons*) dalam menyusun skema pembangunan dunia pasca *Millenium Development Goals (MDGs) 2015*. Sebelumnya Presiden SBY bahkan pernah menjadi unggulan peraih Nobel Perdamaian pada 2006, karena dinilai mampu menjalankan resolusi konflik di Aceh dan kawasan Indonesia pada umumnya.

EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Berbagai upaya yang dilakukan Presiden SBY - sebagaimana diuraikan di atas -semata-mata kembali kepada amanat konstitusi, UUD 1945, adalah dalam upaya mencerdaskan bangsa dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam kalimat yang lain, politik luar negeri tak lain adalah potret kepentingan dalam negeri kita. Maka selain fokus pada peningkatan politik luar negeri Indonesia, Presiden SBY juga sangat memprioritaskan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. SBY bahkan menjadikan



"Saya kira apa yang sesungguhnya berubah secara dramatis saat ini adalah bahwa Anda telah memiliki sebuah pemerintahan yang demokratis. Anda telah memiliki pers yang bebas. Anda memiliki ruang diskusi publik yang luas dalam berbagai isu, dan kini Anda memiliki sebuah pemerintahan yang dipilih pada tahun 2004 di atas sebuah platform reformasi yang fundamental. Presiden Yudhoyono telah sangat jelas menegaskan komitmennya untuk membangun institusi demokrasi dan beliau bertekad untuk membangun pemerintahan yang bersih di negeri ini."---Paul Wolfowitz, Presiden Bank Dunia

ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai parameter dalam melihat capaian pembangunan berkesinambungan. Program pengentasan kemiskinan, misalnya, tidak hanya difokuskan pada manusia dan rumah tangganya, tetapi juga meliputi perbaikan lingkungan fisik dan prasarananya, seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, dan lain-lain. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Presiden adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun

2006, yang besarnya mencapai Rp18,8 triliun mencakup bantuan untuk 19,1 juta keluarga. Setahun berikutnya pemerintah menggulirkan BLT bersyarat bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, dan kesehatan.

Upaya kemandirian pangan juga mendapat prioritas pemerintahan Presiden SBY. Anggaran sektor pertanian (anggaran Kementerian Pertanian dan anggaran irigasi Kementerian Pekerjaan Umum) yang semula hanya 5,8 triliun rupiah pada tahun 2004 terus naik dan menjadi 22,9 triliun rupiah pada tahun 2013. Perhatian besar SBY pada pertanian dan ketahanan pangan tampak dari meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, daging ayam, telur ayam, gula dan daging sapi nasional. Peningkatan produksi pangan sangat diperlukan karena peningkatan pendapatan masyarakat, yang meningkat pesat selama pemerintahan SBY, dan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia berdampak pada peningkatan permintaan bahan pangan. Selama pemerintahan SBY, Indonesia mengalami surplus beras dimana jumlah produksi beras nasional lebih besar daripada jumlah konsumsi.



Presiden SBY menekan tombol untuk membuka perdagangan saham perdana 2010, di BEI Tower, Jakarta, 4 Januari 2010 (Sumber: Abror Rizki).

"Dan janganlah kita kehilangan perhatian terhadap eratnya keterkaitan antara pembangunan dan keamanan. Saya yakin bahwa perjuangan demi perdamaian dan keamanan dunia tidak akan pernah dimenangkan, kecuali setelah mengalahkan tantangan kemiskinan"

Dalam skala nasional untuk memperkuat pilar kesejahteraan di pedesaan, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Sejak diluncurkan pada tahun 2007 hingga 2013, pemerintah mengucurkan Rp68,65 triliun untuk membantu pembangunan desa. Dengan PNPM ini, infrastruktur desa perlahan dibangun kembali. Sementara itu PNPM juga mengucurkan kredit sekitar Rp12,5 triliun sejak 2007 lewat program simpan-pinjam untuk 6 juta perempuan di pedesaan. Dengan demikian usaha ekonomi produktif perlahan digerakkan kembali, sehingga yang

kita lihat di desa adalah tumbuhnya jutaan usaha kecil menengah. PNPM yang dirancang dengan membawa tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan warga itu semacam ikhtiar memberikan masyarakat yang hidup di pedesaan, akses untuk menikmati ekonomi nasional yang tumbuh stabil. Disahkannya UU Desa pada 2014 menjadi kemenangan gemilang warga desa untuk mendapatkan hak-hak ekonomi dan kesejahteraannya dalam bursa anggaran nasional.

Sepuluh tahun Presiden SBY memimpin Indonesia adalah satu dasawarsa membangun pondasi ekonomi Indonesia yang kuat dan adaptif terhadap guncangan perubahan. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tersusun koridor-koridor ekonomi di pelbagai kawasan di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali / NTB, dan Maluku / Papua. Pembangunan dipelbagai koridor tersebut dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur untuk



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan delapan mobil prototipe dan 10 mobil *urban concept* merupakan karya dari tim mahasiswa ITS Surabaya, ITB Bandung, UPI Bandung, UGM Jogjakarta, UI Depok, Politeknik Negeri Jakarta, USU Medan, serta Politeknik Manufaktur Bandung dan Medan untuk diadu ketangguhannya dalam Shell Eco-Marathon Asia 2012 di Sirkuit Internasional Sepang, Kuala Lumpur (Sumber: Back Tohir/Setneg).

"Saya ingin membangun perpustakaan, atau library, dengan buku-buku yang cukup, agar bersama teman-teman bisa membicarakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk rakyat, membantu Presiden dan pemerintah yang menjalankan tugasnya."

konektivitas antar wilayah di Indonesia yang sebagian berupa kepulauan. Pembangunan bandar udara, pelabuhan, perluasan rel kereta api, jembatan, jalan tol, dan jalan negara terus dipacu. Jalan kereta api jalur ganda (*double-track*) antara Jakarta dan Surabaya selesai dibangun pada masa pemerintahan SBY. Dengan selesainya jalur ganda kereta api ini, maka pergerakan orang dan barang menjadi jauh lebih lancar dan lebih efisien.

Pengutamaan pembangunan di koridor-koridor itu diperkirakan menyerap 9,4 juta lapangan kerja, yang meliputi sektor industri dan kegiatan pendukung untuk sektor infrastruktur. Adapun kesempatan kerja di sektor pertanian semakin diperluas melalui koridor Sulawesi dan Maluku / Papua. Untuk kegiatan utama lainnya terdapat pada sektor industri, tambang, teknologi, dan lain sebagainya. Pemerintahan SBY memberi perhatian besar terhadap perbaikan kualitas infrastruktur nasional untuk mendorong daya saing serta konektivitas nasional. Percepatan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperbaiki



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang gemar membaca disela-sela kesibukannya (Sumber: Back Tohir/Setneg).



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono melakukan panen raya padi kualitas unggul (Sumber: Back Tohir/Setneg).

mobilitas barang, jasa dan orang di seluruh wilayah Indonesia. MP3EI merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Percepatan infrastruktur di 6 koridor ekonomi (khususnya di luar Jawa) tentu akan membantu mengatasi disparitas antarwilayah di samping memperbaiki konektivitas nasional sebagai pilar penopang pembangunan nasional. Secara total kebutuhan investasi MP3EI mencapai Rp4.481 triliun, yang terdiri Rp2.304 triliun untuk investasi infrastruktur dan Rp2.177 triliun lainnya dialokasikan untuk investasi sektor riil.

Presiden SBY juga memberikan perhatian besar pada pembangunan sistem kelistrikan nasional. Pembangunan sistem kelistrikan nasional merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang energi, karena ketersediaan energi listrik merupakan salah satu faktor kunci penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang mengalir deras di Indonesia dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia tentunya mendorong peningkatan permintaan tenaga listrik. Perencanaan yang matang, kerja keras serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan bidang kelistrikan selama

"Tidak ada hal yang terlalu remeh. Sebuah jembatan dapat mengurangi setengah waktu tempuh petani ke kota. Anak-anak petani dapat ke sekolah lebih cepat tanpa berputar jauh. Hal yang kelihatan remeh itu membuat perubahan sangat besar di pedesaan".

masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu I dan II membuahkan hasil yang memuaskan dilihat dari sisi produksi, rasio elektrifikasi, infrastruktur kelistrikan maupun diversifikasi energi primer yang digunakan oleh sistem pembangkit listrik nasional. Produksi listrik nasional meningkat tajam dari 100,097 GWh pada tahun 2004 menjadi 200,1 GWh pada akhir tahun 2013 atau tumbuh sekitar 10 persen per tahun. Rasio elektrifikasi nasional juga meningkat secara signifikan dari 53,38 persen pada tahun 2004 menjadi 81,5 persen pada Juli 2014. Infrastruktur kelistrikan yang meliputi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik juga tumbuh pesat. Kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2004 yang semula sebesar 26.176 MW telah tumbuh menjadi 49.393 MW pada semester pertama 2014. Jaringan transmisi dan



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah memantau rencana proyek perluasan dan modernisasi Bandara Udara Sepinggang Balikpapan, Kalimantan Timur, 16 Juni 2014. (Sumber: Back Tohir/Setneg).

distribusi listrik juga meningkat. Susut energi pada jaringan juga mengalami penurunan yang signifikan menjadi satu digit sebagaimana di negara-negara yang sudah maju, dari 11,29 persen pada 2004 menjadi 8,5 persen pada 2014.

Periode kepemimpinan SBY terus mendorong dan meningkatkan stabilitas ekonomi melalui iklim investasi yang mendukung, memangkas biaya ekonomi tinggi, memperbaiki dan memangkas sejumlah inefisiensi perizinan dan birokrasi, mendorong sinergi pemerintahan pusat dan daerah dan mempercepat pelayanan satu atap. Presiden SBY juga telah menginstruksikan BKPM dan jajaran kementerian / lembaga untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investasi dibutuhkan untuk mempercepat sejumlah agenda pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong percepatan dan perluasan pembangunan nasional. Besarnya arus investasi di era Presiden SBY merupakan refleksi dari semakin baiknya tata kelola pemerintahan, tetapi juga karena besarnya kepercayaan investor terhadap perkembangan ekonomi nasional. Indonesia semakin diminati investor global sebagai destinasi investasi yang menarik, dengan pertimbangan stabilitas dan positifnya

kinerja ekonomi nasional. Bahkan Jepang untuk pertama kalinya menempatkan Indonesia sebagai destinasi investasi utama menggeser Tiongkok yang selama ini dijadikan tujuan utama investor Jepang.

Di lantai bursa, indikator ekonomi Indonesia meningkat pesat. Pada 2004 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih senilai 1.000,23; dan konsisten meningkat mencapai 5.070,82 pada Juli 2014. Hal ini di samping menunjukkan kinerja pasar modal yang baik juga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi yang tinggi terhadap pemerintahan SBY. Bursa Efek Indonesia bahkan juga masuk dalam tiga besar pasar modal terbaik di dunia karena nilai pertumbuhan IHSG hanya di bawah Indeks Dow Jones Amerika dan Indeks Philippines. Cadangan devisa Indonesia juga memiliki pencapaian yang baik. Pada Agustus 2011 cadangan devisa Indonesia sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia berdiri, yaitu sebesar US \$ 124,5 miliar. Ini tentu pencapaian yang luar biasa bila dibandingkan dengan cadangan devisa tahun 2004 sebesar US \$ 36,3 miliar.



Presiden SBY menerima kaos betulkan semangat antikorupsi, usai dialog dengan LSM penggiat antikorupsi di Istana Negara, 25 Januari 2012. (Sumber: Abror Rizki)

"Indonesia merupakan salah satu negara yang paling dinamis dan paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Rusia sangat berminat untuk memperdalam dan mengembangkan kerjasama yang majemuk dengan negara yang begitu perspektif dan mitra terbaik di dunia di bidang militer dan teknik."-- Vladimir Putin

PEMBERANTASAN KORUPSI PALING AGRESIF DALAM SEJARAH

Virus korupsi merupakan ancaman besar bagi bangsa manapun di dunia. Korupsi mengakibatkan harapan rakyat melayang, sementara sebagian kecil orang diuntungkan dengan perilaku koruptif memperkaya diri sendiri. Presiden SBY sejak awal menjabat telah secara tegas menyatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu prioritasnya. Ia berkeyakinan, hanya ada satu cara dalam melawan korupsi di Indonesia yang sudah lama berakar. Bahkan terkadang kita menganggapnya sebagai "budaya". Cara itu tak lain melalui penegakan hukum secara tegas dan adil kepada para pelaku

korupsi, tanpa melihat latar belakang dan warna bendera politiknya. Dengan kata lain, di era SBY, korupsi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa, yang penanganannya juga dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Berulang kali Presiden menegaskan bahwa tidak ada pihak manapun yang kebal hukum di negeri ini. Lebih dari itu, tidak ada tebang pilih kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini bukan janji kampanye semata, karena sejak 2004 sampai 2012, Presiden telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang dicurigai melakukan kasus korupsi dan tindak pidana lainnya. Dari semua pemeriksaan tersebut, SBY sama sekali tidak melihat jabatan, partai politik atau koneksi yang bersangkutan. Semua diperlakukan sama, meskipun juga menyentuh partainya sendiri. Kita tahu periode 2010-2013 beberapa elit Partai Demokrat berurusan dengan KPK karena berbagai kasus. Secara politik SBY dirugikan karena suara Demokrat turun akibat adanya kasus tersebut. Tapi tak sekali pun SBY menyalahkan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Ia lebih memilih mengevaluasi para kadernya, sehingga ke depan Demokrat makin bersih dari korupsi. Ini lebih dari sekedar



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono memberikan ucapan selamat kepada Ketua KPK Abraham Samad dan kawan-kawan selaku ketua KPK yang baru usai pelantikan tanggal 16 Februari 2011 (Sumber: ANTARA).

bukti komitmen nyata seorang SBY. Belum pernah ada dalam sejarah Indonesia, seorang presiden memberikan dukungan yang demikian besar terhadap upaya pemberantasan korupsi.

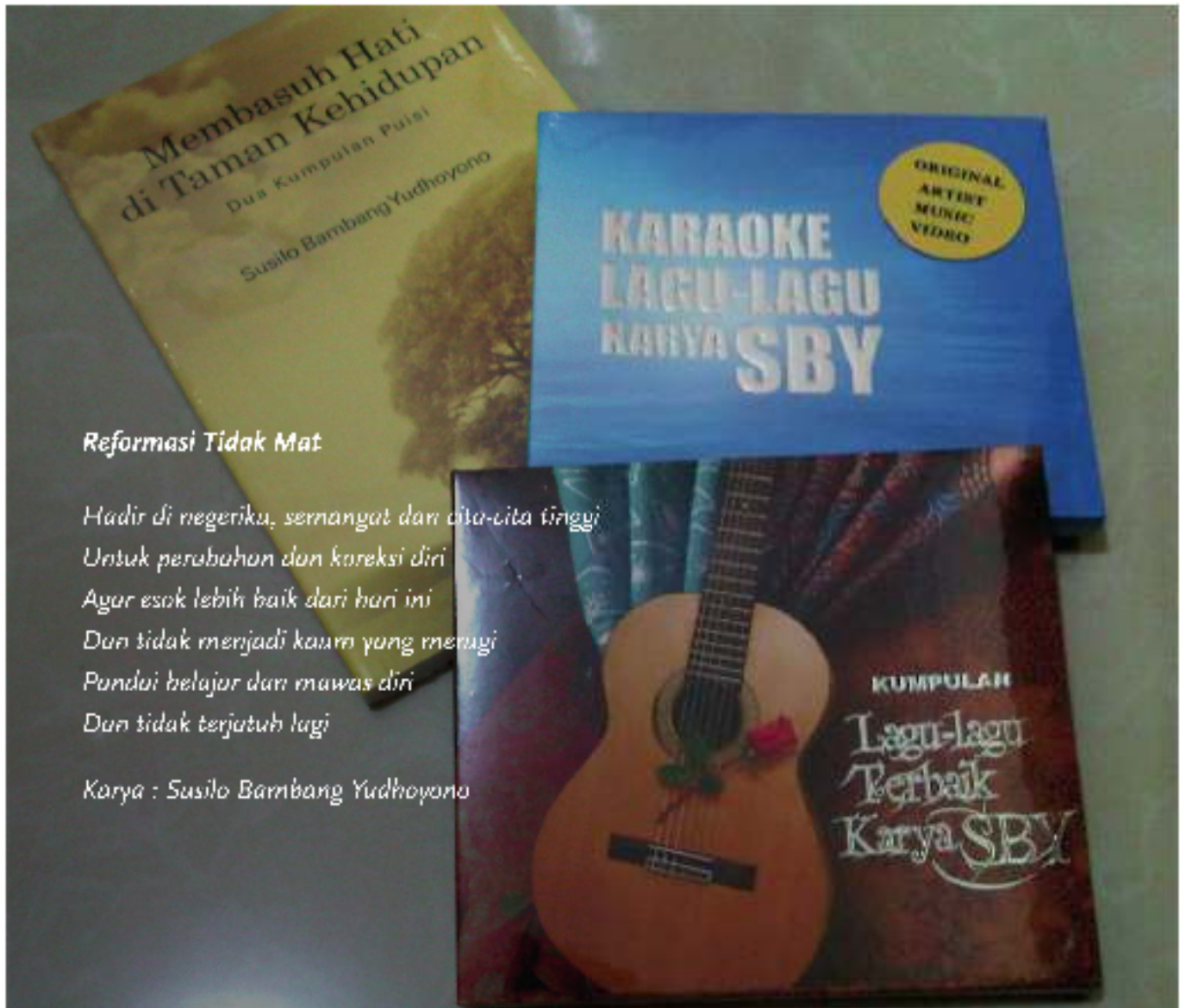
Selain memberikan ijin kepada KPK dan aparat penegak hukum yang akan memeriksa para pejabat tinggi, dukungan SBY dalam usaha pemberantasan korupsi juga dilakukan dengan melawan setiap upaya pelemahan terhadap KPK. Komitmen tersebut berkali-kali dinyatakan Presiden setiap terjadi upaya pelemahan lembaga anti rasuah ini. Seperti "pembelaan" SBY saat KPK hendak dilemahkan DPR melalui revisi terhadap Undang-Undang KPK tahun 2012 lalu. SBY mengatakan bahwa bila UU KPK akan direvisi, harus dijelaskan terlebih dahulu bagian mana dan mengapa direvisi. Bila selama ini rakyat melihat KPK banyak berperan dalam penyelamatan uang negara, seharusnya itu dianggap sebagai prestasi, dan bukan wewenangnya yang justru dikurangi.

Pembelaan SBY terhadap eksistensi KPK secara nyata juga ditunjukkan saat Chanda M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dua komisioner KPK sebagai tersangka oleh Mabes Polri, tahun 2009, karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Sejumlah pihak memberikan reaksi keras atas langkah Polri

"Amerika menyampaikan apresiasi kepada Presiden SBY atas peranannya dalam memastikan kemajuan proses demokrasi dan reformasi di Myanmar, atas posisi Indonesia yang sangat terukur dan betul-betul menampilkan kepedulian berdasarkan fakta yang berkembang di lapangan." -- Hillary Clinton

tersebut, dimana keputusan itu dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap KPK. Penetapan tersangka di atas juga dicurigai bermuatan politis, mengingat sepak terjang KPK yang sejauh ini cukup efektif dalam memburu para koruptor. Melihat kisruh yang terjadi antar lembaga penegak hukum, Presiden SBY tak bisa tinggal diam.

Benar bahwa intervensi pemerintah ke KPK tidak bisa dilakukan, mengingat kedua lembaga berdiri sejajar dan saling menguatkan. Namun presiden bukan hanya kepala pemerintahan, melainkan juga kepala negara yang bertanggung jawab kepada rakyat. Pemberantasan korupsi sejak reformasi telah ditetapkan sebagai agenda prioritas siapapun pemerintahannya. Dengan demikian sejumlah cara untuk menjaga kelangsungan upaya tersebut merupakan



Reformasi Tidak Mat

*Hadir di negeriku, semangat dan cita-cita tinggi
Untuk perubahan dan koreksi diri
Agar esok lebih baik dari hari ini
Dan tidak menjadi kaum yang menugi
Pandai belajar dan mawas diri
Dan tidak terjatuh lagi*

Karya : Susilo Bambang Yudhoyono

sebuah keharusan. Bahkan jika dalam perjalanannya ditemui aral hingga mengarah pada suatu kondisi darurat, presiden memiliki ruang untuk melakukan “ijtihad” politik yang dijamin konstitusi.

Selain mendukung KPK, SBY juga melakukan sejumlah terobosan dalam melawan korupsi yang sudah sistemik. Diantaranya ancaman para mafia peradilan yang kerap menindas para pencari keadilan dari kalangan tak berpunya. Maka sejak 2009 Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dibentuk, dengan tugas khusus melawan mafia, mencegah agar jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan pemerintah. Selain membela rakyat kecil dari ancaman mafia, SBY juga mendorong lahirnya UU No 16 Tahun 2011 yang bertujuan memberi bantuan hukum bagi

masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara untuk menghadapi pengadilan. Perhatian besar Presiden SBY terhadap pemberantasan korupsi didasari pengalamannya bahwa dibandingkan dengan reformasi politik, tantangan reformasi hukum jauh lebih berat. Untuk itu ia berharap agenda reformasi hukum terus menjadi prioritas pemerintah dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang.

Berkaca dari pengalaman Hongkong dalam memberantas korupsi yang memerlukan waktu 15 tahun, Indonesia dengan luas wilayah, populasi dan kompleksitas permasalahannya memerlukan waktu dua kali lebih lama. Ini merupakan penilaian dari pegiat anti-korupsi Hongkong yang disampaikan ke Presiden SBY di Chile pada 2004. Namun demikian, sebagai never ending goal, spirit pemberantasan korupsi harus terus dijaga dan dinyalakan. Dalam arti



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Ani Bambang Yudhouono menikmati udara pagi di Losari, Jawa Tengah tahun 2007 (Sumber: Back Tohir/Setneg). Halaman 289: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh ibu Ani Bambang Yudhoyono berkeliling di taman Istana Cipanas tanggal 2 Februari 2010 (Sumber: Back Tohir/Setneg).

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bila sebelumnya memberi “biaya tambahan” dalam pengurusan di birokrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah kita anggap wajar, ke depannya hal semacam itu harus kita lihat sebagai pelanggaran. Sebab terkadang korupsi tidak hanya karena sistem yang longgar, tetapi juga sering terjadi akibat budaya.

MENYAPA RAKYAT MELALUI LAGU DAN PUISI

Tidak seperti kebanyakan presiden atau perdana menteri negara lain yang memiliki hobi-hobi mahal, seperti kolektor mobil ataupun berkuda, Presiden SBY justru mengisi waktunya dengan menulis puisi dan mengarang lagu. Saat bertemu dengan para pemimpin negara-negara APEC di

Hawaii, 2011 lalu, SBY mengatakan bahwa hobinya tersebut tidak hanya didasari atas kecintaannya pada seni semata. Lebih dari itu melalui lagu dan puisi, SBY ingin berkomunikasi dengan rakyat melalui cara yang “berbeda”. Pasalnya menurut SBY, bila ia hanya menggunakan bahasa politik, kerap kali terjadi miskomunikasi, karena tidak semua lapisan masyarakat bisa “disentuh” dengan bahasa politik. Justru sebaliknya, kerap kali lagu dan puisi lebih mengena bagi masyarakat awam, karena diterima secara ringan dan santai.

Meskipun bukan penyair sungguhan, tetapi apa yang dilakukan Presiden SBY sejatinya hampir sama dengan penyair. Penilaian itu disampaikan penyair sekaligus sastrawan ternama tanah air, Taufiq Ismail, dimana ia appreciate dengan bakat SBY yang seorang presiden dalam mencipta lagu dan puisi. Salah satu pendiri majalah sastra



Kiri: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pandai bermain musik dan telah meluncurkan beberapa album hasil karyanya (Sumber: Back Tohir/ Setneg). Kanan: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kejutan dengan bermain gitar untuk merayakan ulang tahun ke-61 Presiden Rusia Vladimir Putin, disela-sela Konferensi APEC Bali pada 7 Oktober 2013 (Sumber: Abror/presidenri.go.id).

"Pemikiran Presiden Yudhoyono dengan konsep soft power dan mengutamakan kepemimpinan dengan hati menjadi sebuah kekuatan untuk mempengaruhi dunia" - Richard Greene, Penulis Buku "Word That Shook The World"

Horison itu itu yakin SBY tak punya keinginan untuk menjadi seorang penyair ataupun pencipta lagu. Namun dari proses kreatif yang dijalani lantaran hobi, SBY tanpa terasa telah menjadi seperti itu.

Taufiq berkeyakinan, kemampuan SBY di dalam membuat lagu sekaligus menulis karya sastra terpengaruh kuat saat dia masih duduk di bangku sekolah. Sebagaimana diketahui, SBY sejak muda memang kerap menulis lagu dan puisi sebagai sarana mengisi waktu.

Yang membuat publik takjub, bahkan ketika SBY telah menjadi seorang presiden dengan berbagai tantangan dan persoalannya, ia masih sempat mengarang lagu dan puisi. Tak banyak pemimpin dunia yang bisa melakukannya. Ada 29 lagu ciptaan Presiden SBY yang terhimpun dalam 6 album CD dan 2 album karaoke. lagu-lagu tersebut juga digubah dalam berbagai genre dan instrumentalia oleh konduktor terkenal sebanyak 22 lagu, sehingga jumlah keseluruhan tidak kurang dari 51 lagu. Baik lagu maupun puisi Presiden SBY pada

umumnya bermuatan pesan-pesan kebersamaangotong royong, kerukunan, harmoni kehidupan, lingkungan hidup, semangat untuk maju dan juga perjuangan.

Kesemua lagu itu terhimpun dalam beberapa album diantaranya Rinduku Padamu (2007), Majulah Negeri, Evolusi (2009), Kuyakin Sampai Disana (2010), Harmoni (2011) dan Malam Sunyi Di Cipaganti (2013). Sementara untuk puisi, Presiden SBY telah menulis beberapa judul puisi yang terhimpun dalam dua buku, yaitu Taman Kehidupan (2004) dan Membasuh Hati (2010). Sekarang keduanya telah dihimpun dalam satu buku berjudul Membasuh Hati di Taman Kehidupan (2014). Bagi sebagian orang, mungkin tak ada yang istimewa dengan karya-karya seni di atas. Tapi bagi para pecinta seni dan mereka yang menghargai karya, apa yang dilakukan Presiden SBY sungguh luar biasa. Sebuah karya seni tidak hanya berhubungan dengan pengalaman semata, melainkan juga rasa dan kemampuan menuangkan gagasan ke dalam karya seni.

SETIAP PRESIDEN INGIN BERBUAT TERBAIK UNTUK BANGSA DAN NEGARANYA

Bung Karno pernah mengatakan "Jas Merah", jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah memang harus menjadi cermin dan pelajaran bagi generasi masa depan.



Suasana di Gedung Balai Kirti, Museum Kepresidenan yang di gagas oleh Presiden SBY. Berlokasi di Kompleks Istana Bogor.
(Sumber: Studio Patung Yusman)

Tanpa menengok sejarah, kita tak akan pernah tahu pelajaran apa yang dapat kita petik dari para pendahulu bangsa. Namun demikian, dalam politik hubungan antar generasi terkadang mengalami pasang surut. Misalnya Orde Baru yang kurang akrab dengan Orde Lama, ataupun Orde Reformasi yang dijadikan pembeda terhadap Orde baru. Bila perbedaan dan demarkasi itu hanya pada visi dan garis politik, tidak menjadi masalah. Tetapi bila pergantian masa pemerintahan bukan untuk disandingkan, tetapi diperbandingkan secara tajam, maka yang dirasakan seakan tidak ada lagi kesinambungan. Oleh karena itu rakyat memandang seakan pergantian rejim atau pemerintahan di negeri ini sulit sekali dalam kondisi yang *soft landing*, yang sesungguhnya kondisi seperti itu sangat diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Melihat gejala yang kurang sehat dalam tradisi politik kita tersebut, Presiden SBY bertekad untuk mengubah keadaan agar hal tersebut tidak boleh berkepanjangan. Pasalnya, ia berkeyakinan bahwa sekeras apapun persaingan politik antar pemimpin, tidak boleh menggerus sendi-sendi kebangsaan kita. Dalam kalimat lain, politik hanyalah urusan lima tahunan (pemilu), sementara bangsa ini urusan generasi ke generasi. Maka menjadi keniscayaan bagi setiap pemimpin untuk menghormati dan menjalin komunikasi dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Berangkat dari keyakinan tersebut, Presiden SBY merintis pendirian Museum Presiden Republik

"Sebagian besar dari kami, anggota kabinet saya, melihat anda sebagai teladan, khususnya karena kedua negara kita menghadapi isu anti-korupsi dan good governance" - Benigno S Aquino III, Presiden Filipina

Indonesia yang dinamakan Balai Kirti. Museum ini terletak di kompleks Istana Bogor dengan dikelilingi alam yang hijau.

Mungkin bagi kita mendengar kata Museum Presiden terasa biasa saja, datar. Tetapi bagi orang-orang dari luar negeri, mereka tentu akan terkejut, terkejut karena baru di tahun 2014 Indonesia membanggunya. Khususnya bagi orang-orang yang berasal dari negara demokrasi. Pasalnya Indonesia sebagai negara besar dengan 240 juta penduduk, sudah merdeka 69 tahun dan menjalankan demokrasi, seharusnya sudah memiliki museum presiden sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Tapi itulah faktanya, bahwa kita baru membanggunya saat ini, dengan inisiator Presiden SBY.

Di Balai Kirti ditampilkan berbagai memorabilia para pemimpin bangsa dari zaman Presiden Soekarno, Suharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga Presiden SBY. Masyarakat yang berkunjung akan menemukan bagaimana pemikiran Bung Karno, jasa pembangunan Pak Harto, warisan BJ Habibie, pruralisme Gus Dur, Bu Mega sebagai Presiden perempuan pertama



Maket Gedung Balai Kirti, Museum Kepresidenan di Kompleks Istana Bogor. (Sumber: Abror Rizki)



Presiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo memasuki ruangan untuk memberikan keterangan pers bersama, se usai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014, malam. (Sumber: Biro Pers Media)

dan transformasi Indonesia menuju Indonesia yang makin maju, demokratis, adil dan sejahtera. Karya-karya besar pemimpin bangsa ditampilkan secara terhormat agar menjadi pembelajaran bagi generasi masa depan bahwa "Setiap Presiden Ingin Berbuat Yang Terbaik Bagi Bangsa dan Negaranya". Dan itulah ungkapan semangat Presiden SBY yang terukir dalam Prasasti Balai Kirti, Bogor.

Dan bukan hanya berhenti pada museum, Presiden SBY juga mengaplikasikan tekadnya untuk terjadinya pergantian kepemimpinan secara baik dan damai, melalui komunikasi intens dengan presiden terpilih 2014, Joko Widodo dan Wakil

Presiden Jusuf Kalla. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pemenang Pilpres 2014, SBY mengusulkan transisi pemerintahan, sehingga pada hari H pelantikan presiden baru, Jokowi bisa langsung bekerja karena sudah mendapatkan masukan yang komprehensif dari SBY selama masa transisi. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, SBY mengadakan upacara penyambutan penggantinya di Istana Negara lengkap dengan karpet merah dan upacara militer, sebagai penghormatan kepada presiden terpilih, pilihan rakyat.







APENDIKS

Panduan Kepustakaan
Indeks

- Adams, Cindy. 1965. *Sukarno :An Autobiografi as Told as Cindy Adams*. New York: The Bobbs Merrills Company.
- _____. 1966. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 2007. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, edisi revisi (terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo.
- Akbar, Akhmad Zaini. *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru, Esei-esei dari Fisipol Bulaksumur*. Solo: Ramadhani, 1990.
- Anderson, Benedict. 1988. *Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Terjemahan Jiman Rambo. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bahar, Ahmad. 1996. *Megawati Soekarnoputri 1993-1996*. Yogyakarta: Pena Cendekia.
- Barnadib, Imam. 1988. *Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Barton, Greg. 2003. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: Yayasan LKIS.
- Basuki Jamin, A. dkk. 1986. *Setengah Abad Prof. DR. ING. B.J. Habibie. Karangan Pilihan*. Jakarta: Cipta Kreatif Bekerja Sama Dengan Biro Hukum dan Humas BPP Teknologi.
- Bunnell, Frederick P., 1966. "Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965 President Sukarno Moves from Non-Alignment to Confrontation", dalam *Indonesia*, 2: 37-76.
- Casofa, Fachmy. 2014. *Habibie, Tak Boleh Lelah dan Kalah*. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dahm, Benhard. 1987. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Daras, Roso. 2001. *Aktualisasi Pidato Terakhir Bung Karno: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Dhakidae, Daniel. 2013. *Soekarno, Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Dino Patti Djalal. 2008. *Harus Bisa! Seni Memimpin ala SBY*. Jakarta: Red & White Publishing.
- _____. 2009. *Energi Positif: Opini 100 Tokoh Mengenai Indonesia di Era SBY*. Jakarta: Red & White.
- Douglas E. Ramage. 2002. *Percaturan Politik di Indonesia, Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Dwipayana, G. dan Nazaruddin Sjamsudin (Ed.). 2009. *Diantara Para Sahabat. Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: Chitra Kharisma Bunda.
- Emmerson, Donal K. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Terjemahan Donald

- K Emmerson. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Gonggong, Anhar dan Musya Asy'arie (Eds). 2005. *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Green, Marshall. 1992. *Dari Soekarno ke Soeharto*. Terjemahan Tim Grafiti. Jakarta: Grafitipress.
- Habibie, B.J. 1985. *Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- _____ 2013. *Habibie & Ainun*. Jakarta: PT. THC Mandiri
- _____ 2006. *Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: The Habibie Center Mandiri.
- Hakim, M. Nipah Abdul dan Muhammad Zakki. 2000. *Gus Dur Sang Penakluk Tanpa Ngasorake*. Surabaya: LEPKISS.
- Harmoko. 1986. *Komunikasi Sambung Rasa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Harsono, Ganis. 1985. *Cakrawala Politik Era Soekarno*. Jakarta: Idayu Press.
- Hisyam, Usamah. 2004. *SBY: Sang Demokrat*. Jakarta: Dharmapena Publishing.
- Indria, Donna Sita dan Anita Dewi Ambar Sari dkk (Ed). 2011. *Pak Harto: The Untold Stories*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Topo K. Rahardjo dan Herdianto WK. 2001. *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Grasindo.
- Irawan I.B., Sukidin, Basrowi. 2001. *Perencanaan dan Strategi Pembangunan*. Jember: Jember University Press, 2001.
- Kadri Akhmad dan Djoko Sardjono. 1999. *Gerak dan Langkah Megawati Soekarno Putri*. TEB Susilo.
- Katoppo, Aristides ed. 1982. *80 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Komunitas Peduli Komunikasi. 2004. *Megawati Membangun Negeri*. Jakarta: Komunikasi Peduli Komunikasi.
- Legge, John D. 1996. *Soekarno: Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Legge, John D. 1972. *Sukarno : Sebuah Biografi Politik*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Mahmud , Amir. 1985. *Surat Perintah 11 Maret 1966. Super Semar Tonggak Sejarah Perjuangan Orde Baru*. Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2003. *Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Makka, A. Makmur. 1986. *Setengah Abad Prof. DR. ING. B.J. Habibie Kesan dan Kenangan*. Jakarta: Cipta Kreatif bekerja sama dengan Biro Hukum dan Humas BPP Teknologi.

- _____ 2009. *Testimoni untuk B.J. Habibie*. Yogyakarta: Ombak.
- Manning, Chris dan Peter Van Diermen (Ed.). 2000. C. *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisi*. Yogyakarta: LKiS.
- Mas'od, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1971*. Terjemahan M Rusli Karim. Jakarta: LP3ES.
- Ma'ruf, Ade. 2013. *Megawati Soekarnoputri: Riwayat Pribadi dan Politik Putri Bung Karno*. Yogyakarta: Ruzz Media.
- Najib, Muhammad dan Kuat Sukardiyanto. 1998. *Amien Rais Sang Demokrat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nishihara, Masashi. 1993. *Soekarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang: Hubungan Indonesia-Jepang 1951-1966*. Terjemahan Dean Praty R. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Notonagoro. 1973. *Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Filsafat pada Prof Drs. Notonagoro, S.H.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Nugroho, Tjahyadi. 1984. *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*. Semarang: Yayasan Telapak Tangan.
- Osdar, Josef. 2014. *Sisi Lain Istana Dari Zaman Bung Karno Sampai SBY*. Jakarta: PT. Kompas Media.
- Pane, Z.A. 1993. *Pokok-Pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri, Bendera Sudah Saya Pikirkan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Parengkuan, August (Ed.). *Megawati: Anak Putra Sang Fajar*. 2012. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Poeponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prawiro, Radius. 2004. *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi, Pragmatisme dalam Aksi (edisi revisi)*. Jakarta: Primamedia Pustaka.
- Ramadhan KH. 1988. *Kuantar Ke Gerbang: Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ramadhan K.H. dan G. Dwipayana. 2008. *Soeharto: Pikiran Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda.
- Ricklefs, MC. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Roeder, AG. 1976. *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rukmana, Siti Hardiyanti. 2013. *Pak Harto The Untold Stories*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso dkk. 1996. *Megawati Soekarnoputri: Pantang Surut Langkah*. Jakarta: Institut Studi Arus Informas.
- Siagian, Gayus. 1998. *Wasiat Bung Karno*. Jakarta: Ketut Mas Agung Corporation.

- Singh, Bilveer. 2001. *Habibie and the Democratisation of Indonesia*. Sydney: Book House.
- Soedjatmoko. 1985. *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES.
- Sukarno. 1963. *Sarinah*. Yogyakarta: Panitia Penerbit Karangan Presiden Sukarno.
- _____. 1964. *Camkan Pancasila: Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : Departemen Penerangan RI.
- Sukarno. 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Sumarno. 2002. *Megawati Soekarnoputri Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara*. Jakarta: PT. Rumpun Dian Nugraha.
- Sunaryo, FX dan Nuryahman. 2012. *Sukarno di Pengasingan Ende 1934-1939 Empat Tahun Sembilan Bulan Empat Hari*. Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryadinata, Leo. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Team Dokumentasi Presiden RI. 2003. *Jejak Langkah Pak Harto, 1 Oktober 1965 - 27 Maret 1968*. Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda.
- Wahid, Abdurrahman. 2000. *Melawan Melalui Lelucon: Kumpulan Kolom*. Jakarta: PDAT.
- Wanggai, Velix Vernando. 2011. *Mengelola Sebuah Perubahan: Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Era SBY (2009-2014)*. Jakarta: Sekretaris Kabinet Republik Indonesia.
- Wilson, Donald. W. 1989. *Dari Era Pergolakan Menuju Era Swasembada*. Terjemahan Sulaeman Krisnandi. Jakarta: Yayasan Nusantara Persada.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2014. *SBY Selalu Ada Pilihan*. Jakarta: Buku Kompas.

B

Badan Keamanan Rakyat (BKR) 52, 84
Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 99
Bantuan Operasional Sekolah 252
Bantuan Siswa Miskin 252
Bapak Pembangunan 7, 15, 23, 80, 276
baret hijau 234
beasiswa Supersemar 102
beskap 33, 83
Bidikmisi 252
blangkon 83

C

chauvinistis 45
civil society 174, 175

D

daidan 84
Demokrasi Terpimpin 12, 26, 59, 60, 61, 74, 90, 92, 114
Dwi Fungsi ABRI 110, 179

E

Eerste Inlandsche School (EIS) 32
Europeesche Lagere School (ELS) 33

F

fly by wire 132

G

Games of the New Emerging Forces (GANEFOS) 68, 72
golput 204, 205

I

ibu bangsa 227
Indonesia Menggugat 9, 38, 39
Islamisme 35, 39

J

jembatan emas 39, 60

K

keibuho 84
keisatsu 84
Kelompencapir 100
Komando Mandala Siaga (KOLAGA) 88
Komando Siaga (KOGA) 88
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNI-P) 54
Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger 83
Koperasi Unit Desa (KUD) 99

L

Lengser Keprabon Madeg Pandhita 120
Long march Divisi Siliwangi 54

M

MANIPOL-USDEK 60
marhaen 39
Marxisme 16, 35, 39
masintuvu maroso 210
micronationalism 145
mikul dhuwur mendhem jero 90
Millenium Development Goals 259, 260
Mr. Crack 128

N

Nahdiyyin 190
nasionalisme 8, 34, 35, 36, 41, 43, 45, 54, 59, 61, 134, 169,
183, 237
nasionalisme, agama, dan komunis (NASAKOM) 59

O

Orde Baru 14, 24, 26, 81, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 100, 102,
103, 110, 112, 113, 114, 116, 152, 169, 172, 173,
195, 200, 205, 274, 275, 276

P

Pancasila 9, 12, 46, 59, 60, 66, 89, 91, 93, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 147, 174, 200, 277
 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 111, 112
 Pembela Tanah Air (PETA) 84
 Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 10, 56
 Pemimpin Besar Revolusi 13, 30, 60, 81
 Penyambung Lidah Rakyat 7, 30, 59, 274
 perundingan Renville 54
 Perundingan Renville 54
 Piagam Jakarta 46
 pluralisme 173, 176, 180, 190
 pos pelayanan terpadu (Posyandu) 108
 priyayi 35
 program kesehatan masyarakat 107

R

reformasi 26, 92, 140, 142, 143, 144, 146, 149, 152, 153, 154, 175, 179, 186, 207, 212, 215, 216, 221, 237, 238, 239, 259
 Repelita 14, 107, 131, 143
 Rijswijk 194
 RPKAD 89
 rust en orde 37

S

schakel school 82, 83
 self government 244
 Seskoad 235
 smart power 267
 soft power 245, 256, 261, 267, 268
 stagen 37
 status quo 22, 49

Sukarno 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 101, 108, 114, 187, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 203, 216, 232, 274, 275, 277, 280
 super stall 138, 140, 146

T

Technische Hogeschool 8, 33
 Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 84
 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 10, 25, 141
 Tetuko 131, 132, 134
 The New Emerging Forces (NEFOS) 62
 The Old Established Forces (OLDEFOS) 62
 Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) 90
 trilogi sejarah 39
 TRISAKTI BUNG KARN0 60
 TRUK TERBANG 129

U

ukhuwah basyariyah 174
 ukhuwah Islamiyah 174
 ukhuwah wathoniyah 174

V

Volksbank (Bank Desa) 83
 Volksraad 8, 37

W

Wawasan Nusantara 12, 94, 95, 112, 113, 115

Z

zonder 195

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan buku ini, khususnya kepada narasumber gambar/foto dan ilustrasi, serta berbagai pihak yang terlibat di dalamnya:

Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Dewan Pertimbangan Presiden
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bidang Kebudayaan
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Narasumber Keluarga Sukarno; Guntur Soekarnoputra
Narasumber Keluarga Soeharto; Siti Hedyanti Soeharto, Nyoman Tjakri Arwati, Gunawan Wahyu Widodo
Narasumber Keluarga B.J. Habibie; Rubijanto, Andi Makmur Makka, Ahmad Watik Pratiknyo
Narasumber Keluarga Abdurrahman Wahid, Ibu Sinta Nuriyah, Priyo Sambadha, Ira Sulistya, Mohammad Sobary
Narasumber Keluarga Megawati Soekarnoputri
Narasumber Keluarga Susilo Bambang Yudhoyono; Ahmad Yani Basuki, Saleh As'ad Djamhari
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Museum Monumen Nasional
Museum Purna Bhakti Pertiwi
Museum Soeharto, Desa Kemusuk Yogyakarta
The Habibie Center
Divisi Mandiri Foto Perum LKBN Antara
IPPHOS
KITLV (*Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies*) Jakarta
Pusat Informasi Kompas
Tempo
Republika
Museum Satria Mandala
Reuters
AFP
Arsip Foto BAB Publishing Indonesia

Kami mengucapkan rasa terima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh Alm. Armaya Tohir atas sumbangsih yang diberikan khusus dengan memperkaya isi buku ini melalui dokumentasi foto hasil karyanya selama berkarier dan meliputi kegiatan kerja beberapa Presiden Republik Indonesia sampai akhir hayatnya.